



Pemerintah Daerah
Provinsi Papua
2024

Peraturan Daerah Provinsi Papua
Nomor 2 Tahun 2025

RPJPD

Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah

**PROVINSI
PAPUA
2025-2045**





GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Provinsi Papua perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
- b. bahwa bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan ketentuan pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 600.1/176/SJ, Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
- c. bahwa/2

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tahun 2025-2045;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

15. Peraturan/4

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 10);
21. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

24. Peraturan/5

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
28. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 21);
29. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 9);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
dan
GUBERNUR PAPUA**

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI
PAPUA TAHUN 2025-2045.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Papua.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai Badan Legislatif Daerah Provinsi Papua.

5. Badan/6

5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, yang selanjutnya disebut BAPPERIDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Papua untuk Periode 20 (dua puluh) Tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Papua periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Papua dan memperhatikan RPJPN Nasional.
8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Papua untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Penyusunan RPJPD dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) di Provinsi Papua dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah dalam kerangka dan tujuan nasional.
- (2) Penyusunan RPJPD bertujuan untuk:
 - a. memberikan gambaran umum tentang keadaan yang diinginkan pada tahun 2025;
 - b. menjabarkan indikasi dari gambaran umum yang diinginkan dan bagaimana mencapainya;
 - c. memberikan pedoman umum bagaimana mencapai sasaran pembangunan yang dibagi dalam 4 (empat) tahapan berbentuk arah kebijakan;
 - d. merupakan pedoman bagi calon Gubernur dalam menyusun visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan;
 - e. merupakan pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMD;
 - f. RPJPD menjadi acuan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Ruang lingkup penyusunan RPJPD, meliputi:
 - a. penjabaran visi, misi dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah; dan
 - b. arah kebijakan pembangunan dan sasaran pokok disetiap tahap pembangunan 5 (lima) tahunan.

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 4

- (1) RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I Pendahuluan memuat sekurang-kurangnya: latar belakang, dasar hukum, hubungan antara dokumen, maksud dan tujuan dan sistematika;
 - b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah memuat sekurang-kurangnya: aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, aspek pelayanan umum, evaluasi hasil RPJPD tahun 2005-2025, tren demografi, kebutuhan sarasa prasarana pelayanan publik dan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah;
 - c. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis memuat sekurang-kurangnya: Permasalahan dan isu strategis daerah;
 - d. Bab IV Visi dan Misi Daerah memuat sekurang-kurangnya: Visi Daerah Tahun 2025-2045, dan Misi Daerah Tahun 2025-2045;
 - e. Bab V Arah kebijakan dan Sasaran Pokok memuat sekurang-kurangnya 1. Arah kebijakan per-Lima tahun, 2. Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045: 17 Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah, dan 45 Indikator Utama Pembangunan;
 - f. Bab VI memuat salah satunya tentang pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- (2) Sistematika RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
VISI DAN MISI
Pasal 5

- (1) Visi Provinsi Papua yaitu Provinsi Papua yang maju dan berkelanjutan berbasis ekonomi biru dan agro *industry*.
- (2) Misi Provinsi Papua adalah:
 1. transformasi sosial untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas dan inklusif;
 2. transformasi ekonomi untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, maju dan produktif;
 3. transformasi tata kelola untuk mewujudkan tata kelola yang efektif dan bebas dari korupsi;
 4. keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah;
 5. pembangunan masyarakat yang berketahanan dari sisi sosial budaya dan ekologi;
 6. pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan;
 7. pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan mudah diakses, serta kemandirian pangan; dan
 8. peningkatan kapasitas pemerintahan dan masyarakat yang dapat menjalankan pembangunan secara berkesinambungan.
- (3) Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dijelaskan lebih lanjut dalam dokumen RPJPD.

BAB VI
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 6

- (1) Arah kebijakan pembangunan daerah periode 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Provinsi Papua.
- (2) Arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) RPJPD Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD menurut Visi, Misi dan Program Gubernur.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada arah kebijakan dan pencapaian sasaran pokok pada masing-masing tahapan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Gubernur yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD untuk pertama periode pemerintahan berikutnya.
- (2) Dalam hal RPJMD periode berkenaan belum ditetapkan, maka arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD dapat digunakan sebagai pedoman penentuan prioritas dan sasaran pembangunan RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode Pemerintahan Gubernur berikutnya dan/atau masa Pemerintahan Penjabat Gubernur.

BAB VII

KAIDAH PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD sesuai dengan arah kebijakan dan pencapaian sasaran pokok pada masing-masing tahapan.
- (2) Dalam hal RPJPD periode berkenaan belum ditetapkan, maka arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD digunakan sebagai pedoman penentuan prioritas dan sasaran pembangunan RKPD.

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 10

Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan antar kabupaten/kota.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan, maka Gubernur yang sedang menjabat pada periode tahun terakhir RPJPD (Tahun 2044) diwajibkan menyusun rancangan RPJPD periode berikutnya.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 22 Januari 2025

Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
RAMSES LIMBONG, S.IP., M.Si
MAYJEN (Purn)

Diundangkan di Jayapura

Pada tanggal 23 Januari 2025

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua

CAP/TTD

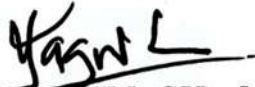
YOHANES WALILO, S. Sos., M.Si

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2025 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR (1-10/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM



NELWAN SAGRIM, SH., M. Hum

NIP. 19741205 200212 1 007

Lampiran : Peraturan Daerah Provinsi Papua

Nomor : 2 Tahun 2025

Tanggal : 22 Januari 2025

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2025-2045

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua Tahun 2005-2025 akan segera berakhir. Berakhirnya dokumen RPJPD Provinsi Papua tahun 2005-2025 bertepatan dengan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepada daerah secara serentak. Untuk itu perlu segera disusun dokumen RPJPD Provinsi Papua tahun 2025-2045 agar dapat menjadi pedoman bagi calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan menyusun visi dan misi pembangunan untuk lima tahun ke depan. Ketika dokumen RPJPD telah ditetapkan, juga akan menjadi pedoman bagi gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam menyusun dan menetapkan dokumen RPJMD Provinsi Papua tahun 2025-2029 (tahap 1 pembangunan lima tahunan).

Penyusunan dokumen RPJPD merupakan mandat undang-undang. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menetapkan bahwa Musyawarah RPJPD dilaksanakan paling lambat 1 tahun sebelum periode RPJPD yang sedang berjalan. Karena RPJPD Provinsi Papua akan berakhir tahun 2025, maka musyawarah RPJPD harus dilaksanakan pada tahun 2024. Tentu saja musyawarah RPJPD harus sudah dilaksanakan ketika rancangan awal dokumen RPJPD telah disusun. Selanjutnya hasil musyawarah RPJPD akan menjadi bahan dalam penyusunan rancangan RPJPD untuk diajukan ke DPRPD dan ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Dokumen RPJPD memberikan gambaran umum tentang kondisi pembangunan Provinsi Papua yang optimal dan diinginkan pada akhir tahun 2045 sesuai dengan karakteristik, inovasi dan pengembangan daerah. Karena itu dokumen ini memberikan gambaran perkembangan kondisi pembangunan dan kondisi saat ini sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah dan merumuskan isu strategis daerah.

Dokumen RPJPD Provinsi Papua 2025-2045 juga menjabarkan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi Papua termasuk indikator utama pembangunan dan strategi untuk mencapainya dalam empat tahap pembangunan. Karena itu dokumen RPJPD memuat mengenai kondisi pembangunan saat ini, isu dan persoalan strategis dan visi, misi dan kebijakan pembangunan beserta targetnya yang akan dicapai pada akhir tahun 2045.

Dalam era Pembangunan saat ini berpusat pada Pembangunan Manusia (people centered development), yaitu peningkatan kualitas Pembangunan yang berorientasi pada kualitas kehidupan manusia dan kesejahteraan Masyarakat serta lingkungan hidup yang lestari sebagai perwujudan tata Kelola pemerintahan yang baik. Guna mencapai Tingkat Pembangunan yang berkualitas, maka dilakukan perencanaan Pembangunan disusun berdasarkan wilayah maupun berjangka. Pembangunan jangka Panjang (RPJPD) Provinsi

Papua akan berakhir tahun 2024 dan akan dilanjutkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang periode 2025-2045 yang berisi penjabaran visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok Pembangunan daerah selama 20 tahun. Penyusunan RPJPD saat ini agak Istimewa, karena disusun untuk dipedomani oleh calon kepala daerah yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) serempak. Menarik dicermati pula, bahwa pada periode ini dokumen RPJPD tidak hanya disusun berdasarkan RPJPD Teknokratik tahun 2025-2030, tetapi harus disusun berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sesuai arahan Permendagri 86 tahun 2017 dan mengikuti pedoman Permendagri 7 tahun 2018, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.11.2/8754/Bangda tanggal 7 Agustus 2023 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD ke dalam dokumen RPJPD/RPJMD, dan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.54/Menlhk/PKTL/Pla.1.1/B/3/2024 perihal Percepatan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan KLHS Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

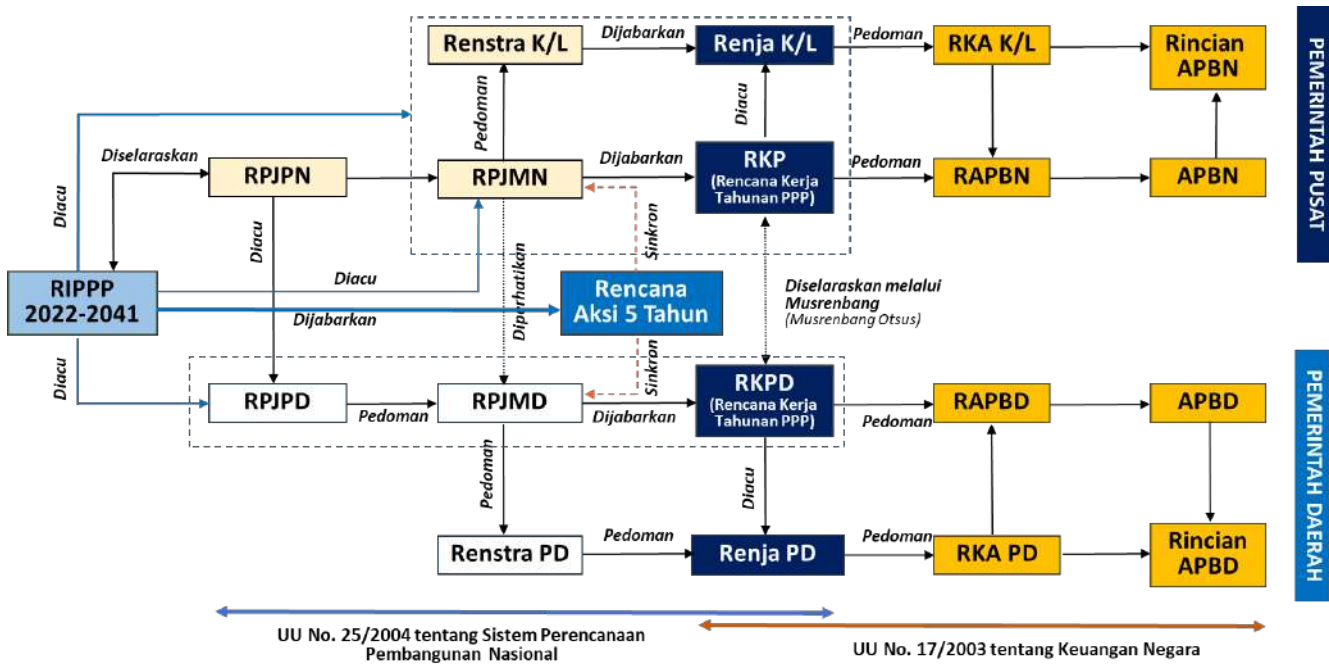
Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan peraturan yang berlaku dan membangun Masyarakat dan wilayah yang lebih baik di Provinsi Papua, maka dibuat KLHS untuk dokumen RPJPD dengan pendekatan *ex ante*, berorientasi pada pencapaian tujuan dan pelaksanaan prinsip-prinsip Pembangunan berkelanjutan, serta memperhatikan kondisi sosial budaya, ekonomi dan tantangan daerah ke depan. Melalui dokumen KLHS RPJPD ini, Pembangunan di Provinsi Papua akan mencapai tingkat berkelanjutan yang memperhatikan proses dan fungsi lingkungan hidup, keselamatan, kualitas kehidupan dan kesejahteraan seluruh masyarakatnya.

Dokumen RPJPD Provinsi Papua merupakan pedoman pembangunan jangka panjang Provinsi Papua yang dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian target pembangunan jangka panjang nasional. Penjabaran visi, misi, arah kebijakan, strategi pembangunan dan indikator dalam dokumen RPJPD 2025-2045 **bersifat imperatif**, mengacu pada visi, sasaran visi, misi, arah pembangunan dan indikator yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045, sesuai dengan Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045. Selain itu, RPJPD ini juga mengacu pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (RIPPP) 2022-2041 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023.

1.2 KETERKAITAN ANTARDOKUMEN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022 – 2041, serta Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Papua 2023-2042. Selanjutnya RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Hubungan antar dokumen dapat dilihat dalam Gambar 0.1.

Gambar 0.1 Keterkaitan RPJPD Provinsi Papua 2025-2045 dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya



Sumber: Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045

1.3.1. Keterkaitan RPJPD dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) tahun 2022-2041

Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) tahun 2022-2041 adalah dokumen rencana yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2023. Dokumen ini merupakan mandat yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dokumen RIPPP memuat uraian visi dan misi percepatan pembangunan Papua, indikator sasaran percepatan pembangunan Papua, arah kebijakan dan strategi percepatan pembangunan Papua, kondisi perlu, pengarusutamaan, arah kebijakan dan strategi percepatan pembangunan tiap wilayah adat, serta tahapan percepatan pembangunan Papua. Dokumen RIPPP juga memuat uraian prioritas dan fokus pembangunan selama tahun 2022-2041 dalam rangka mencapai sasaran Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif (termasuk kondisi perlu), dan lokasi prioritas pembangunan wilayah adat.

Untuk memastikan rencana pembangunan di Provinsi Papua selaras dengan pembangunan nasional, RIPPP memuat uraian sinergi perencanaan dan pendanaan

pembangunan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan di Papua untuk tahun 2022-2041. Juga memuat uraian mekanisme pelaksanaan, mekanisme pelaporan, mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengendalian, mekanisme pengawasan serta penghargaan dan sanksi pada RIPP Tahun 2022-2041.

1.3.2.Keterkaitan RPJPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045

RPJPD memiliki peran penting dalam mengarahkan pembangunan di tingkat daerah. Dokumen ini merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan. Di sisi lain, RPJPN 2025-2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional yang menetapkan visi dan tujuan Indonesia hingga tahun 2045.

Keterkaitan antara RPJPD dan RPJPN sangat penting agar kebijakan dan program pembangunan di tingkat daerah sejalan dengan visi nasional. Kementerian PPN/Bappenas dan Kemendagri telah mengeluarkan Surat Edaran Bersama tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045. Selain SEB, terdapat Instruksi Kemendagri Nomor 1 Tahun 2024 memberikan pedoman penyusunan RPJPD agar selaras dengan RPJPN tahun 2025-2045.

RPJPD harus menjaga sinkronisasi kerangka logis dengan RPJPN 2025-2045. Forum Konsultasi Publik Penyusunan RPJPD berperan sebagai panduan dalam mengarahkan pembangunan di tingkat daerah, dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Dengan demikian, keselarasan antara RPJPD dan RPJPN menjadi kunci dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan visi dan tujuan nasional.

1.3.3.Keterkaitan RPJPD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Papua dimaksudkan sebagai input dalam menyusun dokumen Rancangan Awal (RANWAL) RPJPD Papua tahun 2025-2045. Keterkaitan substansi RPJPD dengan KLHS RPJPD Provinsi Papua ditampilkan dalam Gambar 0.2. Dengan adanya keterkaitan tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan KLHS RPJPD adalah:

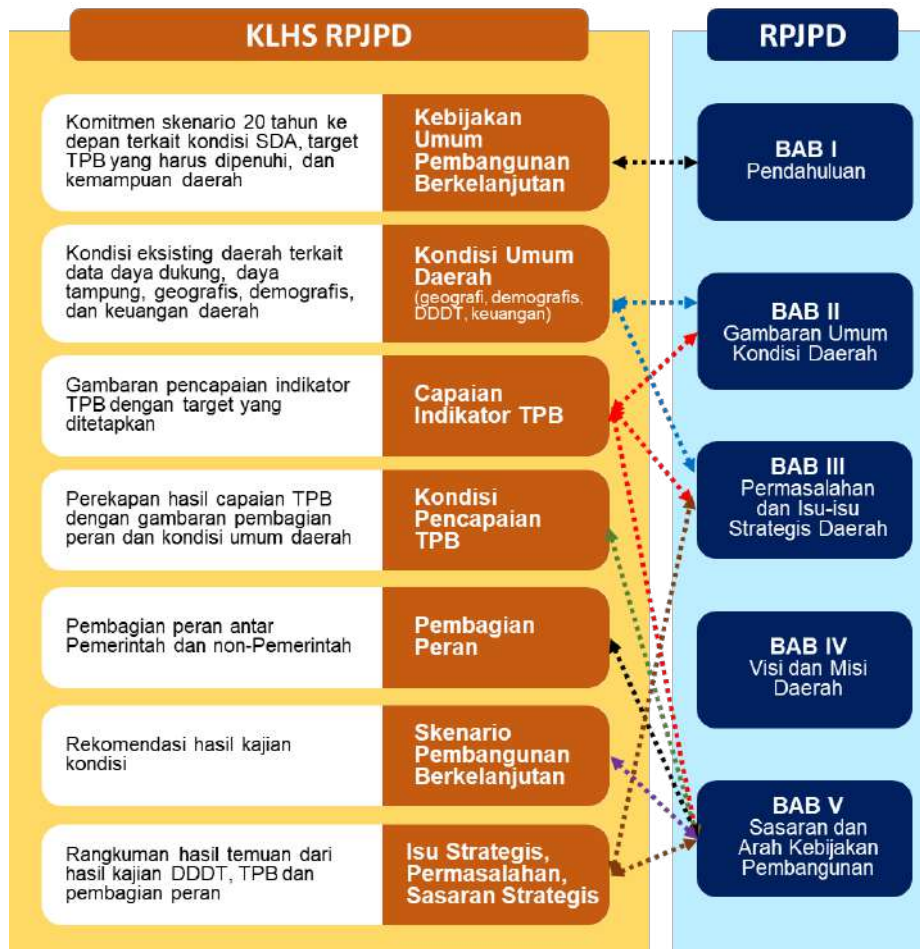
- a. menjamin bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah (RPJPD);
- b. mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup dan keberlanjutan dalam penyusunan RPJPD;
- c. memperkuat proses pengambilan keputusan atas kebijakan, rencana, dan program (KRP); serta
- d. mengarahkan dan memberikan rekomendasi dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam RPJPD.

Adapun sasaran penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Papua adalah:

- a. tersusunnya pengkajian pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua;
- b. tersusunnya perumusan skenario pembangunan berkelanjutan di Papua;
- c. tersusunnya permasalahan dan isu pembangunan berkelanjutan berdasarkan capaian indikator pembangunan di Papua;

- d. dirumuskannya rekomendasi penyempurnaan kebijakan, strategi dan program pembangunan yang tertuang dalam rancangan awal RPJPD Provinsi Papua;
- e. tersusunnya arah kebijakan pemerintah daerah dalam kurun waktu 20 tahun yang dicapai dalam target pembangunan daerah.

Gambar 0.2 Keterkaitan RPJPD dengan KLHS RPJPD Provinsi Papua



Sumber: Paparan Kemendagri, 22 April 2018

1.3.4. Keterkaitan RPJPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

RPJPD dan RPJMD adalah dua dokumen perencanaan yang memiliki peran penting dalam mengarahkan pembangunan di tingkat daerah. RPJPD merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang menetapkan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah untuk periode 20 tahun ke depan. Di sisi lain, RPJMD adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang mencakup periode 5 tahun.

Keterkaitan antara RPJPD dan RPJMD sangat penting agar kebijakan dan program pembangunan di tingkat daerah dapat berjalan efektif dan sesuai dengan rencana jangka panjang. RPJMD berfungsi sebagai instrumen pelaksanaan dari RPJPD, di mana program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD harus mendukung pencapaian visi dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJPD.

1.3 TUJUAN PENYUSUNAN RPJPD

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua Tahun 2025-2045 ditetapkan dengan tujuan:

- sebagai arah pembangunan jangka panjang Provinsi Papua pada tahun 2025-2045;
- menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan lima tahunan;
- menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; serta
- sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Provinsi Papua selama tahun 2025-2045.

1.4 TAHAP PENYUSUNAN RPJPD

Berdasarkan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004, penyusunan dokumen RPJPD Provinsi Papua 2025-2045 secara umum melalui 4 tahapan sebagai berikut:

- penyusunan Rancangan Awal RPJPD;
- musyawarah perencanaan pembangunan daerah;
- penyusunan rancangan akhir RPJPD; serta
- penetapan dokumen rencana.

Mengingat dokumen RPJPD harus selaras dengan RPJPN, maka dalam penyusunan dokumen RPJPD 2025-2045 pemerintah daerah Provinsi Papua melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, serta mendapatkan pelatihan dari Bappenas. Adapun tahap penyusunan RPJPD secara detail ditampilkan dalam Gambar 0.3 berikut.

Gambar 0.3 Jadwal Penyusunan RPJPD Provinsi Papua Tahun 2025-2045

	KEGIATAN	2023			2024								
		OKT	NOV	DES	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	
PENYUSUNAN SUBSTANSI RPJPD 	1 Penyusunan Rancangan Awal												
	2 Konsultasi Publik				31								
	3 Konsultasi Ranwal ke Kemendagri					7							
	4 Penyusunan rancangan					*							
	5 Musrenbang												
	6 Penyusunan Rancangan Akhir												
	7 Reviu APIP												
PENETAPAN RPJPD 	1 Penyampaian Rancangan Akhir												
	2 Pembahasan dengan DPRD												
	3 Persetujuan bersama												
	4 Evaluasi Ranperda RPJPD												
	5 Penetapan Perda RPJPD												

Ket: *Pemilu

Sumber: Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 (dengan adanya penyesuaian berdasarkan konsultasi Pemprov dengan Bappenas dan Kemendagri)

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen RPJMD Provinsi Papua Tahun 2025-2045 disusun menurut sistematika yang di tetapkan berdasarkan peraturan, yang terdiri dari 6 (enam) Bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum dalam penyusunan RPJPD; keterkaitan antara RPJPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya; tujuan penyusunan RPJPD; serta sistematika penulisan dokumen RPJPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memuat gambaran umum kondisi Papua sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan RPJPD yang meliputi: (1) aspek geografi dan demografi; (2) aspek kesejahteraan masyarakat; (3) aspek daya saing daerah; (4) aspek pelayanan umum; (5) evaluasi capaian pembangunan tahun 2005-2025; (6) tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik; dan (7) pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini memuat permasalahan utama dan isu strategis pembangunan daerah Papua yang dirumuskan dan disimpulkan berdasarkan kesenjangan antara realita atau capaian pembangunan dengan kondisi ideal pembangunan Papua.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Bab ini memuat visi dan misi pembangunan daerah Papua yang akan dicapai pada tahun 2025-2045, yang selaras dengan visi dan misi pembangunan Indonesia Emas Tahun 2045, serta sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Bab ini memuat arah kebijakan sebagai kerangka kerja pembangunan dalam 4 tahapan pembangunan untuk mencapai visi daerah. Selain itu, bab ini juga memuat sasaran pokok yang merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya visi RPJPD 2025-2045 dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.

BAB VI PENUTUP

Bab ini memuat pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, diantaranya melalui manajemen risiko pembangunan daerah dan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Aspek Geografi

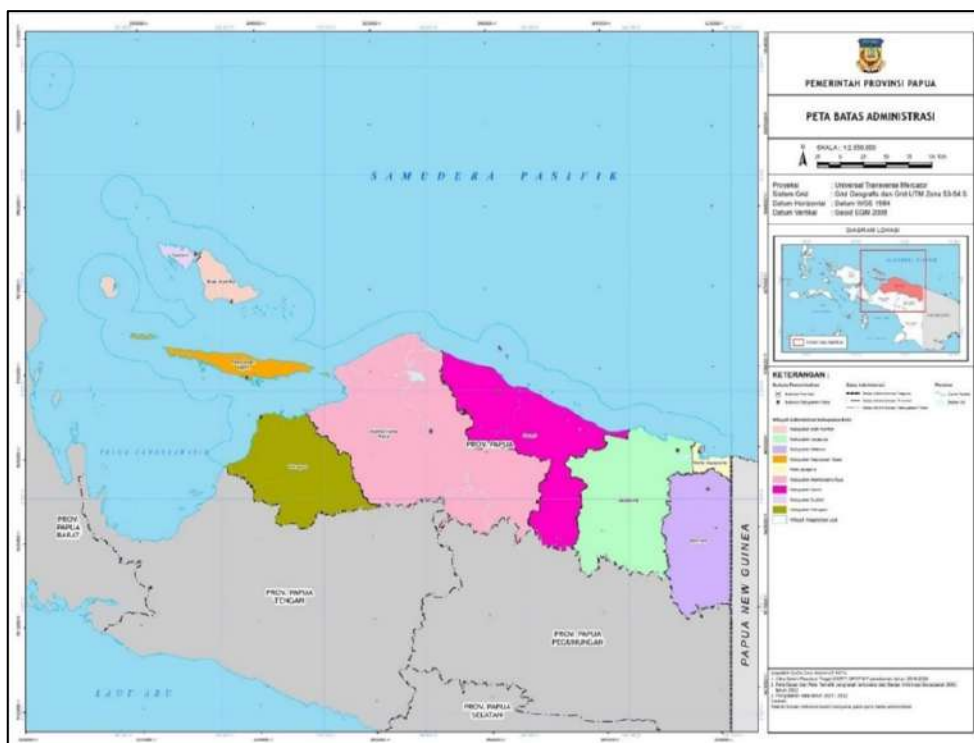
2.1.1.1 Letak Geografis dan Administrasi

Provinsi Papua secara geografis berada di antara garis koordinat $1^{\circ} 8' 20.8752''$ LU - $4^{\circ} 6' 58.626''$ LS dan $134^{\circ} 5' 58.8444''$ - $141^{\circ} 0' 37.5912''$ BT. Batas wilayah Provinsi Papua secara administratif meliputi:

- Sebelah Utara : **Samudra Pasifik;**
- Sebelah Selatan : **Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah;**
- Sebelah Barat : **Provinsi Papua Barat; dan**
- Sebelah Timur : **Negara Papua New Guinea.**

Provinsi Papua memiliki luas wilayah kurang lebih 13.158.285,28 hektar dengan batasan wilayah terdiri atas wilayah darat dan wilayah laut seluas kurang lebih 13.158.285,38 hektar. Adapun wilayah darat memiliki luas kurang lebih 8.268.837,32 hektar dengan 8 kabupaten dan 1 kota di dalamnya yang dapat dilihat pada Gambar 0.1. Secara lebih lanjut, Kota Jayapura menjadi ibukota Provinsi Papua. Adapun kabupaten/kota di Provinsi Papua mencakup: **1) Kota Jayapura; 2) Kabupaten Jayapura; 3) Kabupaten Keerom; 4) Kabupaten Kepulauan Yapen; 5) Kabupaten Mamberamo Raya; 6) Kabupaten Sarmi; 7) Kabupaten Supiori; 8) Kabupaten Biak Numfor; dan. 9) Kabupaten Waropen.**

Gambar 0.1 Peta Batas Administrasi Provinsi Papua



Sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

Tabel 0.1 Daftar Luas Kabupaten/Kota di Provinsi Papua

No	Kabupaten/ Kota	Ibukota	Luas (km2)	Persentase (%)	Jumlah Pulau	Distrik	Kampung/ Kelurahan
1	Jayapura	Sentani	14.082,21	17,03	58	19	144
2	Kep. Yapen	Serui	2.429,03	2,94	142	16	165
3	Biak Numfor	Biak	2.257,78	2,73	126	19	268
4	Sarmi	Sarmi	14.068,37	17,02	-	19	111
5	Keerom	Waris	9.526,32	11,52	15	11	91
6	Waropen	Botawa	10.778,76	13,04	1	12	117
7	Supiori	Sorendiweri	660,61	0,80	164	5	38
8	Mamb. Raya	Burmeso	28.042,39	33,92	2	9	59
9	Kota Jayapura	Jayapura	835,48	1,01	19	5	39
Provinsi Papua		Kota Jayapura	82.680,95	100,00	527	115	1.032

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau dalam Provinsi Papua Dalam Angka 2024

Luasan kabupaten/kota dan pembagian wilayah administrasi di Provinsi Papua dapat dilihat pada Tabel 0.1 dan Gambar 0.1. Diketahui bahwa kabupaten dengan wilayah terluas adalah Kabupaten Mamberamo Raya dengan persentase luas sebesar 33,92%, sedangkan Kabupaten Supiori menjadi kabupaten dengan luas terkecil yaitu sebesar 0,80%.

Wilayah administrasi di Provinsi Papua dibagi menjadi beberapa distrik/kecamatan dan desa/kelurahan. Berdasarkan **Error! Reference source not found.**, diketahui bahwa Kabupaten Jayapura, Biak Numfor, dan Sarmi memiliki distrik terbanyak yaitu 19 kecamatan. Kabupaten Biak Numfor juga menjadi kabupaten di Provinsi Papua dengan desa/kelurahan terbanyak. Kota Jayapura menjadi kota dengan jumlah distrik/kecamatan paling sedikit yaitu 5 kecamatan. Kabupaten Supiori menjadi kabupaten dengan jumlah desa/kelurahan paling sedikit yaitu berjumlah 38 desa/kelurahan.

Tabel 0.2 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota Berdasarkan Geografi dan Topografi Wilayah di Provinsi Papua Tahun 2014-2021

Kabupaten	Letak Geografi						Topografi Wilayah								
	Tepi Laut			Bukan Tepi Laut			Lembah			Lereng/Puncak			Dataran		
	2014	2018	2021	2014	2018	2021	2014	2018	2021	2014	2018	2021	2014	2018	2021
Jayapura	24	24	25	120	120	119	30	22	6	23	28	95	91	94	43
Kep. Yapen	142	142	115	23	23	50	12	21	2	38	4	130	115	140	33
Sarmi	64	64	59	46	46	52	5	5	2	1	1	39	104	104	70
Keerom	-	-	-	61	91	91	9	13	5	2	4	40	50	74	46
Waropen	39	53	19	41	64	92	17	-	1	-	26	37	63	91	73
Supiori	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	31	38	38	7
Mamb. Raya	3	3	9	56	56	50	9	9	-	6	6	7	44	44	52
Kota Jayapura	21	22	23	18	17	16	3	3	-	1	2	28	35	34	11
Papua	646	662	590	4.225	4.890	4.965	551	644	162	2.452	2.638	3.836	1.868	2.270	1.557

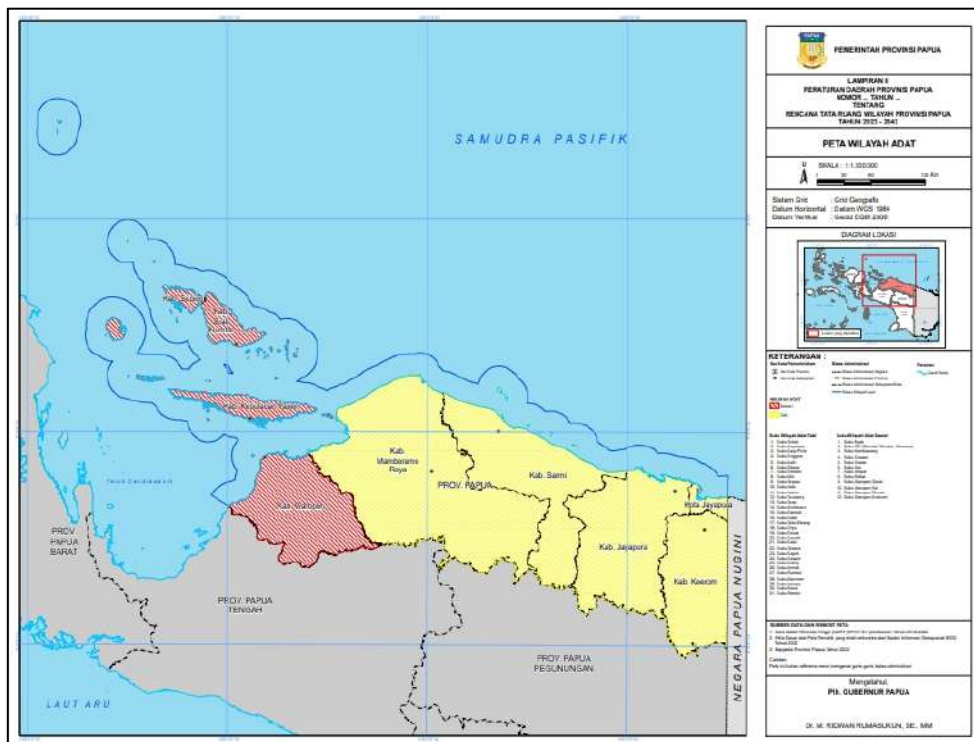
*Catatan : Desa pada tabel ini termasuk Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait dan nagari di Provinsi Sumatera Barat, Data citra satelit yang sudah dikonfirmasi oleh aparat desa. Kategori Lereng/Puncak termasuk juga Tebing

Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes) dalam Provinsi Papua Dalam Angka 2024

Berdasarkan letak geografi dan topografi wilayah di Provinsi Papua sejak tahun 2014 hingga tahun 2021, diketahui bahwa perkembangan jumlah desa/kelurahan mengalami fluktuasi. Jumlah desa yang berada pada daerah Bukan Tepi Laut mengalami kenaikan jumlah namun hal ini tidak diikuti oleh daerah Tepi Laut yang mengalami penurunan. Pertambahan jumlah desa juga terjadi pada daerah lereng/puncak. Sebaliknya daerah Lembah dan Dataran mengalami penurunan jumlah desa.

Wilayah laut sesuai dengan kewenangan pemerintah Provinsi Papua adalah sejauh 12 mil dari garis pantai darat ke arah laut dengan luas kurang lebih 4.889.447,97 hektar. Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Jayapura menjadi kabupaten dengan sebaran pulau-pulau di Provinsi Papua. Berdasarkan data BIG tahun 2018, terdapat 4 pulau yang termasuk dalam kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar Provinsi Papua, yaitu Pulau Fanildo, Pulau Brass, Pulau Bepondi, Pulau Liki di Kabupaten Sarmi.

Gambar 0.2 Peta Wilayah Adat Provinsi Papua



Sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

Wilayah adat mencakup 2 wilayah yang berada di ruang darat dan maupun laut yaitu Wilayah adat Mamta/TABI dan wilayah adat Saireri yang ditunjukkan pada

Gambar 0.2. Secara budaya, keduanya memiliki otoritas penuh dalam kepemilikan dan penguasaan wilayah adat yang tersebar beberapa kabupaten sebagai berikut:

a. Wilayah Mamta/TABI meliputi:

- 1) Kota Jayapura,
- 2) Kabupaten Jayapura,
- 3) Kabupaten Keerom,
- 4) Kabupaten Sarmi, dan
- 5) Kabupaten Mamberamo Raya

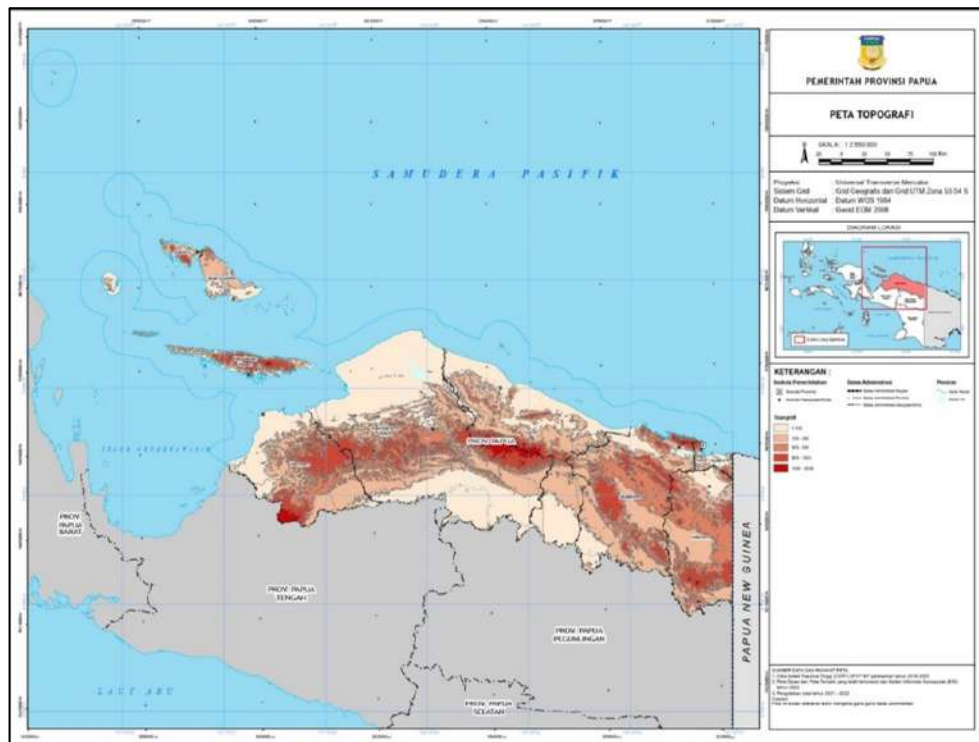
b. Wilayah Saireri meliputi:

- 1) Kabupaten Biak Numfor,
- 2) Kabupaten Supiori,
- 3) Kabupaten Kepulauan Yapen; dan
- 4) Kabupaten Waropen.

2.1.1.2 Topografi

Topografi dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya adalah morfologi, ketinggian, dan kelerengan. Provinsi Papua didominasi oleh dataran (39,20%) yang berada di bagian pesisir selatan (terluas) dan pesisir utara, dan pegunungan (60,79%) yang berada di bagian tengah wilayah provinsi. Morfologi dataran yang memiliki ketinggian lebih dari 100 m menjadi bagian terluas yaitu sebesar 5.027.142,57 ha (53,3%). Sedangkan ketinggian lebih dari 1000 m dari permukaan laut menjadi bagian tersempit dengan luas sebesar 3.241.694.74 ha (39,20%). Berikut peta topografi yang dapat dilihat pada Gambar 0.3.

Gambar 0.3 Peta Topografi Provinsi Papua



Sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

Ketinggian di wilayah Provinsi Papua cenderung memiliki elevasi yang beragam, yaitu 0-100 mdpl, 100-3000 mdpl, dan >3000 mdpl. Wilayah dengan elevasi 0-100 mdpl memiliki luas sebesar 3.241.694.74 ha, elevasi 100-3000 mdpl sebesar 5.025.909 ha, dan elevasi >3000 mdpl sebesar 1.233,57 ha. Kabupaten Mamberamo Raya menjadi kabupaten dengan wilayah terluas yang memiliki elevasi 0-100 mdpl dan 100-3000 mdpl dengan luas masing-masingnya adalah 1.360.180,62 ha dan 1.444.166,45 ha. Sementara Kabupaten Keerom menjadi kabupaten dengan wilayah elevasi >3000 mdpl terluas yaitu seluas 1.233,57 ha.

Tabel 0.3 Luas Wilayah Berdasarkan Ketinggian di Provinsi Papua

Elevasi (Mdpl)	Kabupaten/Kota	Area (Ha)
0-100	Mamberamo Raya	1,360,180.62
	Sarmi	626,262.05
	Waropen	746,554.32
	Jayapura	185,319.99

Elevasi (Mdpl)	Kabupaten/Kota	Area (Ha)
	Biak Numfor	116,564.00
	Keerom	75,299.98
	Kepulauan Yapen	69,214.21
	Supiori	25,702.05
	Kota Jayapura	36,597.52
0-100 Total		3.241.694.74
100-3000	Jayapura	1,222,941.63
	Mamberamo Raya	1,444,166.45
	Keerom	876,097.99
	Sarmi	780,639.91
	Waropen	331,658.57
	Kepulauan Yapen	173,628.00
	Biak Numfor	109,437.70
	Kota Jayapura	46,971.47
Elevasi		
(mdpl)	Kabupaten	Area (ha)
	Supiori	40,367.28
100-3000 Total		5.025.909
>3000	Keerom	1,233.57
>3000 Total		1,233.57
Grand Total		8.268.837.32

Sumber: Revisi RTRWP Papua Tahun 2022

Tingkat kemiringan lereng seperti yang ditunjukkan pada Tabel 0.4, diklasifikasikan dalam beberapa rentang, yaitu 0-8%, 15-25%, 25-45%, dan > 45%. Kemiringan lereng 0-8 % seluas 3.849.082,03 ha, 8-15% seluas 1.034.503,65 ha, 15-25% seluas 1.531.173,89 ha, 25-45% seluas 1.013.710,94 ha, dan >45% seluas 134.759,41 ha. Kabupaten Mamberamo Raya menjadi kabupaten dengan kemiringan lereng 0-8% dan 15-25% terluas dengan masing-masing luasnya sebesar 1.517.691,61 ha dan 484.150,73 ha. Kabupaten Jayapura menjadi kabupaten dengan kemiringan lereng 8-15% terluas sebesar 360.181,45 ha, diikuti Kabupaten Sarmi dengan kemiringan lereng >45% terluas sebesar 57.217,56 ha. Tingkat kemiringan lereng yang mendominasi di wilayah Provinsi Papua adalah landai (0-8%) dengan persentase sebesar 45,9% dan sangat terjal (>40%) sebesar 43,3%.

Tabel 0.4 Kelerengan Provinsi Papua

No	Kemiringan Lereng	Kabupaten/Kota	Area (Ha)
1	0-8 %	Mamberamo Raya	1,517,691.61
		Sarmi	786,828.96
		Jayapura	550,385.44
		Keerom	433,272.53
		Waropen	516,193.64
		Biak Numfor	186,892.61
		Kepulauan Yapen	38,772.07
		Supiori	19,971.85
		Kota Jayapura	56,722.06
Total 0 – 8 %			4,106,730.77
2	8-15%	Jayapura	295,881.08
		Mamberamo Raya	478,660.73
		Sarmi	191,828.18
		Keerom	179,566.75
		Waropen	257,370.93
		Kepulauan Yapen	26,625.90
		Biak Numfor	18,831.22

No	Kemiringan Lereng	Kabupaten/Kota	Area (Ha)
		Supiori	13,209.59
		Kota Jayapura	13,741.82
Total 8-15 %			1,475,716.20
3	15-25%	Mamberamo Raya	484,150.73
		Jayapura	350,131.45
		Sarmi	215,357.06
		Keerom	194,529.88
		Waropen	200,660.97
		Kepulauan Yapen	60,503.87
		Supiori	19,902.39
		Biak Numfor	12,683.64
		Kota Jayapura	17,129.85
Total 15-25%			1,555,049.84
4	25-45%	Mamberamo Raya	310,648.06
		Jayapura	188,532.54
		Sarmi	155,670.20
		Keerom	129,997.55
		Waropen	101,890.17
		Kepulauan Yapen	96,899.04
		Supiori	11,410.49
		Biak Numfor	6,625.39
		Kota Jayapura	12,037.50
Total 25-45%			1,013,710.94
5	>45%	Sarmi	47,217.56
		Jayapura	16,331.11
		Kepulauan Yapen	19,911.49
		Keerom	15,264.83
		Mamberamo Raya	13,195.94
		Waropen	2,097.18
		Supiori	1,575.01
		Biak Numfor	968.84
		Kota Jayapura	1,067.61
>45% Total			117,629.57
Grand Total			8,268,837.32

Sumber: Revisi RTRWP Papua Tahun 2022

2.1.1.3 Jenis Tanah

Beberapa jenis tanah di Provinsi Papua di antaranya adalah jenis tanah entisol, inceptisol, mollisol, histosol, dan ultisol. Adapun jenis-jenis tanah di Provinsi Papua terbagi dalam lima jenis yang dijabarkan sebagai berikut.

a. Entisol

Jenis tanah yang berkembang dari bahan asal atau bahan induknya dan pembentukannya terjadi oleh beberapa akibat seperti iklim yang sangat kering sehingga reaksi kimia dan pelapukan terjadi sangat lambat, erosi kuat sehingga bahan yang tererosi lebih banyak dari yang terbentuk, pengendapan terus-menerus, dan jenuh air yang menghambat perkembangan horison. Tanah entisol cocok untuk pertanian khususnya di daerah endapan sungai. Provinsi Papua memiliki jenis tanah entisol seluas 322.217,71 ha yang dapat ditemukan di beberapa kabupaten yaitu Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Waropen, Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Supiori.

b. Inceptisol

Jenis tanah yang belum matang dan masih menyerupai bahan induknya. Tanah inceptisol digunakan secara bergaam untuk pertanian maupun non pertanian.

Wilayah di Provinsi Papua dengan tanah inceptisol memiliki luas 3.326.850292 ha yang berada di Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Waropen, Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kota Jayapura, dan Kabupaten Supiori.

c. Mollisol

Jenis tanah yang terbentuk dari proses pembentukan tanah berwarna gelap karena penambahan bahan organik. Tanah mollisol sebagian besar digunakan untuk pertanian. Wilayah di Provinsi Papua dengan tanah mollisol memiliki luas 231.294,22 ha yang berada pada beberapa kabupaten, yaitu Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Supiori, dan Kabupaten Sarmi.

d. Histosol

Jenis tanah yang terbentuk akibat penimbunan bahan organik yang lebih besar dari mineralisasinya dan terbentuk pada tempat yang tergenang air sehingga sirkulasi oksigen terhambat dan terjadi akumulasi bahan organik. Agar dapat digunakan untuk usaha pertanian, perbaikan drainase perlu dilakukan bagi tanah histosol. Tanah histosol dapat digunakan untuk bertanam sayur, bawang merah, padi, dan sebagainya. Wilayah di Provinsi Papua memiliki tanah histosol seluas 762.867,67 ha yang berada Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Waropen, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kota Jayapura, Kabupaten Supiori, dan Kabupaten Jayapura.

e. Ultisol

Jenis tanah yang sudah berkembang dan memiliki horison argilik, bersifat masam dan kejenuhan basa rendah (<35%). Penggunaan tanah ini sedikit memiliki kendala karena reaksi masam, kejenuhan basa rendah, kadar aluminium tinggi yang dapat meracuni tanaman, unsur hara rendah, dan fiksasi fosfor yang tinggi. Wilayah di Provinsi Papua memiliki jenis tanah ultisol seluas 2.768.019,01 ha yang berada di hampir seluruh wilayah Provinsi Papua yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Waropen, Kabupaten Supiori, Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Jayapura.

Tabel 0.5 Luas Jenis Tanah di Provinsi Papua

Jenis Tanah	Kabupaten/Kota	Area (Ha)
Entisols	Kabupaten Sarmi	95.060,48
	Kabupaten Mamberamo Raya	57.806,27
	Kabupaten Waropen	48.955,23
	Kabupaten Jayapura	45.312,74
	Kota Jayapura	34.151,52
	Kabupaten Keerom	31.502,84
	Kabupaten Supiori	9.428,63
Entisols Total		322.217,71
Inceptisols	Kabupaten Mamberamo Raya	1.477.352,81
	Kabupaten Sarmi	913.496,30
	Kabupaten Jayapura	620.843,28
	Kabupaten Waropen	166.698,33
	Kabupaten Keerom	98.038,18
	Kabupaten Kepulauan Yapen	26.293,22
	Kota Jayapura	17.811,94
	Kabupaten Supiori	6.316,86

Jenis Tanah	Kabupaten/Kota	Area (Ha)
Inceptisols Total		3.326.850,92
Mollisols	Kabupaten Biak Numfor	163.713,81
	Kabupaten Jayapura	57.414,34
	Kabupaten Kepulauan Yapen	9.020,44
	Kabupaten Supiori	834,76
	Kabupaten Sarmi	310,87
Mollisols Total		231.294,22
Histosols	Kabupaten Mamberamo Raya	597.148,74
	Kabupaten Waropen	128.925,63
	Kabupaten Sarmi	29.634,57
	Kabupaten Keerom	3.690,51
	Kabupaten Biak Numfor	959,97
	Kabupaten Kepulauan Yapen	957,40
	Kota Jayapura	891,31
	Kabupaten Supiori	448,21
	Kabupaten Jayapura	211,33
	Histosols Total	
Ultisols	Kabupaten Keerom	795.344,59
	Kabupaten Jayapura	702.901,07
	Kabupaten Mamberamo Raya	359.557,57
	Kabupaten Sarmi	356.243,64
	Kabupaten Waropen	238.450,11
	Kabupaten Kepulauan Yapen	204.626,59
	Kabupaten Biak Numfor	60.764,33
	Kabupaten Supiori	50.073,73
	Kota Jayapura	57,38
	Ultisols Total	
Tidak Ada Data	Kota Jayapura	8.428,14
	Kabupaten Sarmi	2.345,23
	Kabupaten Waropen	294,52
	Kabupaten Supiori	3,96
	Kabupaten Biak Numfor	0,40
	Kabupaten Jayapura	0,12
Tidak Ada Data Total		11.072,37
Tubuh Air	Kabupaten Mamberamo Raya	71.983,24
	Kota Jayapura	21.692,73
	Kabupaten Sarmi	13.701,46
	Kabupaten Keerom	13.341,30
	Kabupaten Waropen	3.463,13
	Kabupaten Kepulauan Yapen	83,22
	Kabupaten Biak Numfor	14,21
Tubuh Air Total		124.279,29
Grand Total		7.546.601,19

Sumber : RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

2.1.1.4 Stratigrafi

Provinsi Papua secara garis besar dibedakan dalam 3 kelompok stratigrafi, yaitu batuan Kraton Australia, batuan Lempeng Pasifik, dan batuan campuran dari kedua lempeng tersebut. Batuan Kraton Australia tersusun dari batuan alas, batuan malihan dengan derajat rendah hingga tinggi, dan sebagiannya diintrusi oleh batuan granit di sebelah barat.

2.1.1.5 Tektonik

Terdapat 2 mandala struktur geologi terpenting di Provinsi Papua berdasarkan peristiwa tektonik regional, di antaranya:

a. Jalur Sesar Naik Pegunungan Tengah (JSNPT)

Berada pada daerah Pegunungan Tengah Papua, jalur sesar sungkup berarah timur barat dan memiliki panjang 100 km. Batu gamping New Guinea menjadi satuan litologi yang paling dominan di JNSPT dengan ketebalan 2000 m. Bentuk daerah JNSPT termodifikasi pada awal Pliosen diduga terbentuk dari penebalan batuan kerak. Perkembangan kerak yang bergerak ke arah utara membentuk Sesar Sungkup Mamberamo (*The Mamberamo Thrust Belt*) dan menjadi awal tempat Gautier (*The Gautier off set*).

b. Jalur Sesar Naik Mamberamo

Terdiri dari sesar anjak dan sesar geser (*shear*) serta memanjang 100 km ke arah selatan sehingga menggeser sedikit-demi sedikit batuan Plio-Pleistosen Formasi-Mamberamo dan batuan kerak Pasifik yang berada di bawahnya.

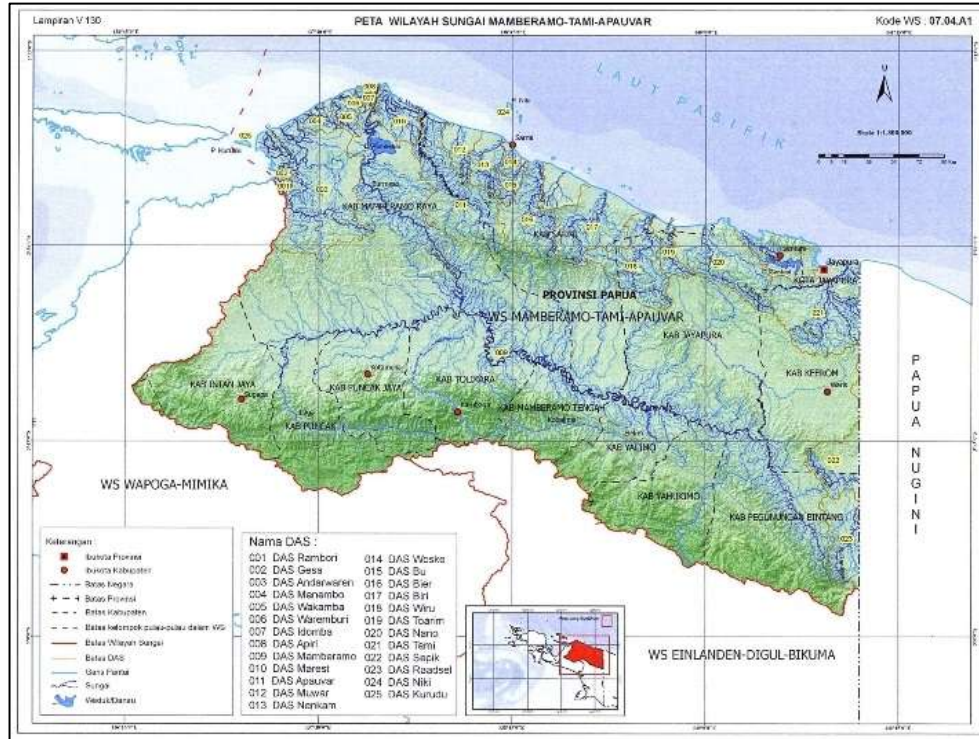
2.1.1.6 Hidrologi

Hidrologi berkaitan dengan karakteristik kuantitas dan kualitas air di bumi menurut waktu dan ruang. Hidrologi dapat terbentuk oleh proses hidrologi, pergerakan, penyebaran, sirkulasi tampungan, eksplorasi, pengembangan dan manajemen, Kondisi Hidrologi di Provinsi Papua dapat dilihat dari banyaknya sungai yang ada. Banyaknya daerah aliran sungai yang ada ditunjukkan pada Gambar 0.4. Provinsi Papua dilalui oleh wilayah sungai Mamberamo-Tami-Apauvar.

Terdapat 2 sungai besar yang melintasi beberapa kabupaten di Provinsi Papua meliputi:

1. Sungai Mamberamo-Tami-Apauvar melintasi Kabupaten Keerom, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Mamberamo Raya; dan
2. Sungai Wapoga-Mimika melintasi Kabupaten Supiori, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Waropen.

Gambar 0.4 Peta Wilayah Sungai Provinsi Papua



Sumber : Balai Wilayah Sungai Papua, Dirjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR

Adapun Wilayah Sungai (WS) di Provinsi Papua terbagi dalam wilayah sungai lintas negara dan wilayah sungai lintas kabupaten yang dikelompokkan berdasarkan kewenangan wilayah sungai, kabupaten, dan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dijabarkan pada Tabel 0.6 dan Gambar 0.5.

Tabel 0.6 Wilayah Sungai di Provinsi Papua

No.	Kewenangan Wilayah Sungai	Kabupaten	DAS
Wilayah Sungai Lintas Negara			
A	WS MamberamoTami-Apauva	1) Kabupaten Keerom	<ul style="list-style-type: none"> DAS Tami (Kab. Keerom, Kab. Jayapura, Kota Jayapura) DAS Sepik (Kab. Keerom dan Pegunungan Bintang)
		2) Kabupaten Jayapura	<ul style="list-style-type: none"> DAS Wiru (Kab. Sarmi dan Kab. Jayapura) DAS Toarim (Kab. Sarmi dan Kab. Jayapura) DAS Nano (Kab. Sarmi, Kab. Jayapura, Keerom) DAS Sentani (Kab. Jayapura dan Kota Jayapura)
		3) Kabupaten Sarmi	<ul style="list-style-type: none"> DAS Muwar (Kab. Sarmi dan Mamberamo Raya) DAS Nenkam DAS Woske DAS Bu DAS Bier DAS Biri (Kab. Sarmi dan Kab. Jayapura) DAS Niki DAS Orai

No.	Kewenangan Wilayah Sungai	Kabupaten	DAS
		4) Kabupaten Mamberamo Raya	<ul style="list-style-type: none"> • DAS Rambori • DAS Gesa • DAS Andarwaren • DAS Manembo • DAS Wakamba • DAS Waremburi • DAS Idomba • DAS Apiri • DAS Mamberamo (Kab. Mamberamo Raya, Keerom, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Yalimo, Kab. Jayapura, Tolikara, Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Mamberamo Tengah) • DAS Marest • DAS Apauvar • DAS Kurudu
Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota			
A	WS Wapoga-Mimika	1) Kabupaten Supiori	<ul style="list-style-type: none"> • DAS Bepondi • DAS Rusdori • DAS Wafordori • DAS Waradokdo
		2) Kabupaten Biak Numfor	<ul style="list-style-type: none"> • DAS Surdori • DAS Sarwodari • DAS Korem • DAS Wardo • DAS Owi • DAS Auki • DAS Pai • DAS Padaidori • DAS Bromsi • DAS Numfor
		3) Kabupaten Mamb. Raya	<ul style="list-style-type: none"> • DAS Sorabi • DAS Bariworo • DAS Barapasi • DAS Naduboai • DAS Rawiwa • DAS Wankai • DAS Sosoro
		4) Kabupaten Waropen	<ul style="list-style-type: none"> • DAS Waron • DAS Wanasanu • DAS Boi • DAS Binatanaboa • DAS Sanoringga • DAS Sabia • DAS Rombak • DAS Rondisi • DAS Dambo • DAS Seram
		5) Kabupaten Kep. Yapen	<ul style="list-style-type: none"> • DAS Wadapi • DAS Menawi • DAS Borai • DAS Amboi • DAS Mariadey • DAS Warui

No.	Kewenangan Wilayah Sungai	Kabupaten	DAS
			<ul style="list-style-type: none"> • DAS Pamawari • DAS Sumbu • DAS Koanda • DAS Sasawa • DAS Parida • DAS Papuma • DAS Ansus • DAS Marau • DAS Antunai • DAS Jauri • DAS Aibondeni • DAS Kairawi • DAS Wooi

Sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2023 – 2042

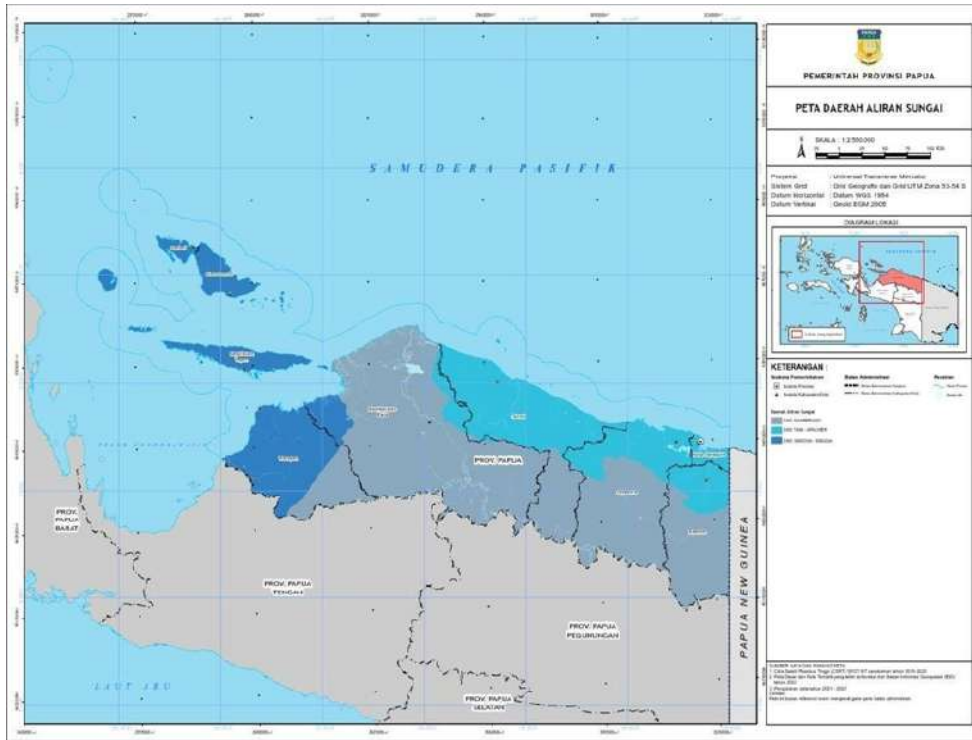
Cekungan air tanah (CAT) di Provinsi Papua dibagi berdasarkan 2 kewenangan yaitu CAT dalam wilayah provinsi dan CAT lintas negara. CAT dalam wilayah Provinsi Papua meliputi CAT Numfor, CAT Warsa, CAT Biak, CAT Pom, CAT Ansar, CAT Serui, CAT Samberdada, CAT Waren-Demta, CAT Taritatu, Cat Hulu S. Senggi, CAT Timur Arso, CAT Lereh-Leweh dan CAT Ubrub. CAT di Provinsi Papua ditunjukkan pada Tabel 0.7.

Tabel 0.7 Cekungan Air Tanah di Provinsi Papua

No.	Kewenangan	Cekungan Air Tanah
1	CAT dalam wilayah Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • CAT Pom di Kabupaten Yapen Waropen • CAT Ansar di Kabupaten Yapen Waropen • CAT Serui di Kabupaten Yapen Waropen • CAT Samberdada di Kabupaten Kepulauan Yapen • CAT Waren-Demta di Kab. Nabire, Waropen, Sarmi, Jayapura • CAT Taritatu di Kab. Waropen, Sarmi, Jayapura, Keerom • Cat Hulu S. Senggi di Kabupaten Keerom • CAT Timur Arso di Kabupaten Keerom • CAT Lereh-Leweh di Kabupaten Keerom dan Jayapura • CAT Ubrub di Kabupaten Keerom
2	CAT lintas negara	<ul style="list-style-type: none"> • CAT Jayapura di Kabupaten Jayapura dan Keerom

Sumber: Revisi RTRW Provinsi Papua, Tahun 2022

Gambar 0.5 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Papua



Sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2023 - 2042

2.1.1.7 Klimatologi

Klimatologi merupakan salah satu hal terpenting dalam melihat perubahan iklim selama beberapa tahun terakhir. Perubahan iklim menjadi salah satu isu internasional untuk menjaga lingkungan. Klimatologi berkaitan akan dampaknya bagi kelangsungan hidup penduduk dilihat dari perubahan iklim yang terjadi serta pola dan perilaku suatu penduduk. Klimatologi dilihat dari rata-rata temperatur, kelembaban, curah hujan, angin, dan tekanan atmosfer. Peta klimatologi di Provinsi Papua ditunjukkan pada Gambar 0.6.

Gambar 0.6 Peta Klimatologi Provinsi Papua



Sumber : Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Papua

Hasil catatan pengamatan BMKG yang dilakukan di Stasiun Meteorologi Sentani dalam mengamati unsur iklim sebagai komponen data klimatologi ditunjukkan pada Tabel 0.8. Berdasarkan data tahun 2020-2022, diketahui bahwa rata-rata suhu dan tekanan udara tertinggi terjadi pada tahun 2020 dan kelembaban serta kecepatan angin pada tahun 2022. Jumlah curah hujan dan hari penyinaran tertinggi terjadi pada tahun 2021 dan persentase penyinaran matahari tertinggi pada tahun 2020.

Tabel 0.8 Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Provinsi Papua Tahun 2020–20221

Unsur Iklim	2021			2022			2023		
	Min.	Rata-Rata	Maks.	Min.	Rata-Rata	Maks.	Min.	Rata-Rata	Maks.
Suhu (°C)	21,30	27,50	36,60	22,60	27,03	35,00	21,80	27,07	33,28
Kelembaban (%)	38,00	75,80	96,00	45,00	77,74	93,00	56,14	83,57	98,19
Kecepatan Angin (m/det)	calm	3,50	31,00	-	4,06	24,00	-	3,19	15,11
Tekanan Udara(mb)	988,50	998,70	1.012,90	991,20	997,04	1.002,60	985,22	990,02	994,54
Jumlah Curah Hujan (mm)	2.028,30			217,40			209,10		
Jumlah Hari Hujan (hari)	221,00			25,00			20,11		
Penyinaran Matahari (%)	5,20			2,45			5,01		

*Catatan: Calm adalah kecepatan angin mendekati nol

Sumber : Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dalam Provinsi Papua dalam Angka 2022-2024

2.1.1.8 Tutupan Lahan

Tutupan lahan di Provinsi Papua didominasi oleh peruntukkan hutan rimba sebesar 7.878.548,02 ha atau 95,28% terhadap luas wilayah provinsi. Tutupan lahan di Provinsi Papua selain hutan rimba meliputi badan air yang berupa air danau, air sungai dan air rawa sebesar 205.741,87 ha (2,49%), bukit pasir sebesar 1.223,84 ha (0,015%), pelabuhan udara sebesar 753,26 ha (0,009%), permukiman sebesar 24.316,08 ha (0,29%), perkebunan sebesar 51.907,5 ha (0,63%), sawah sebesar 10.795,94 ha (0,13%), tegalan sebesar 14.714,49 ha (0,18%) dan semak belukar sebesar 80.835,33 ha (0,98%).

Gambar 0.7 Peta Tutupan Lahan di Provinsi Papua Tahun 2022



Sumber: Revisi RTRW Provinsi Papua, Tahun 2022

Tabel 0.9 Tutupan Lahan di Provinsi Papua Tahun 2022

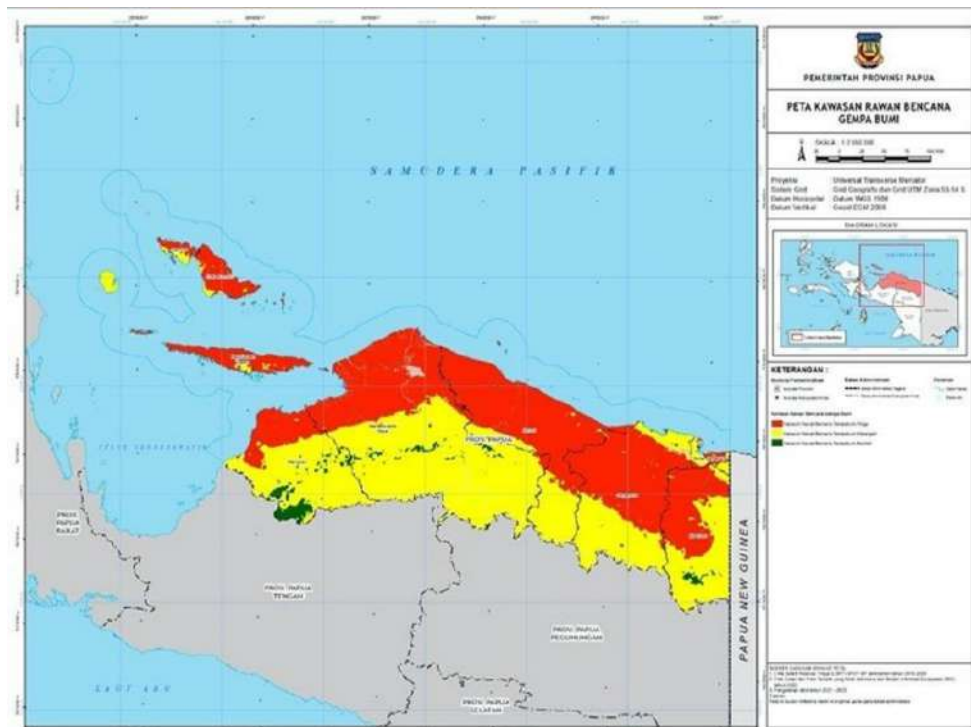
Tutupan Lahan	Biak Numfor	Jayapura	Keerom	Kep. Yapen	Mamberamo Raya	Sarmi	Supiori	Waropen	Kota Jayapura	Grand Total
Air Danau/Situ	147.9	9,736.09	1.24	85.88	23,161.06	1,947.76	7.75	293.84	225.95	35,607.47
Air rawa	114.99	325.03	41.4		87,168.44	1,434.87		2,499.34	393.5	91,977.57
Air Tawar Sungai	41.8	8,053.29	3,281.83	3.37	50,055.65	10,364.59	5.47	5,899.04	451.79	78,156.83
Hutan Rimba	203,707.74	1,336,427.4	904,413.2	240,166.29	2,616,480.42	1,378,715.7	64,415.9	1,066,834.9	67,386.41	7,878,548.02
Pasir/Bukit Pasir Darat					28.83			992.25		1,021.08
Pasir/Bukit Pasir Laut	92.39	1.71		44.43	5.91		58.01	0.93	0.38	203.76
Pelabuhan Udara Domestik	227.93									227.93
Pelabuhan Udara Internasional	253.33									253.33
Pelabuhan Udara Perintis	41.61	146.11	11.01	50.75	11.83	5.2		5.49		272
Perkebunan/kebun	254.85	24,307.52	26,974.8			135.46	200.13		34.74	51,907.5
Permukiman dan Tempat Kegiatan	3,943.33	5,622.88	4,032.09	1,802.32	510.38	2,267.09	637.25	962.14	4,538.6	24,316.08
Sawah	45.51	1,512.76	5,180.16	165.39				215.16	3,676.96	10,795.94
Semak Belukar/Alang-Alang	15,798.96	17,848.07	2,740.42	463.25	26,921.01	10,883.73	731.84	424.27	5,023.96	80,835.33
Tegalan/Ladang	1,331.35	4,280.74	5,955.35	60.53	3.55	1,147.59	12.95	85.54	1,836.89	14,714.49
Grand Total	226,001.7	1,408,261.6	952,631.5	242,842.21	2,804,347.07	1,406,902	66,069.3	1,078,212.9	83,568.99	8,268,837.31

Sumber: Keputusan Menteri KLHK Nomor: SK.6632/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021

2.1.1.9 Wilayah Rawan Bencana

Provinsi Papua dilalui oleh dua lempeng benua yaitu Australia dan Samudera Pasifik aktif serta dikelilingi dua samudera besar yaitu Samudera Indonesia dan Samudera Pasifik. Hal tersebut menyebabkan Provinsi Papua secara geografis memiliki berbagai kerawanan akan bencana. Guna mengantisipasi bencana, diperlukan adanya penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana dapat bersifat preventif, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan. Provinsi Papua rawan terhadap bencana geologi berupa gempa bumi dan gerakan tanah. Pergerakan ini juga dapat menyebabkan tsunami yang dapat terjadi pada beberapa daerah rawan bencana tsunami seperti Pulau Biak, Yapen, dan bagian utara Kabupaten Waropen.

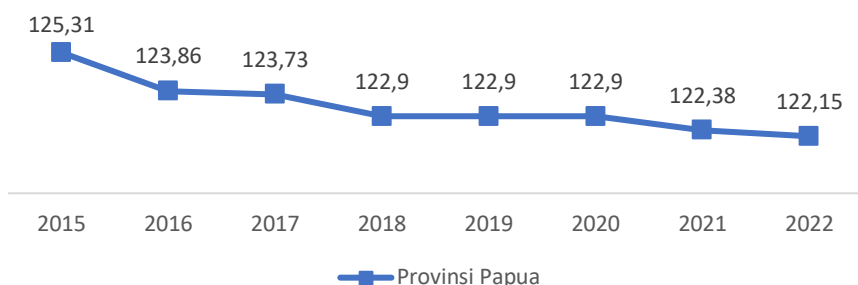
Gambar 0.8 Peta Kawasan Rawan Bencana di Provinsi Papua



Sumber : RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

Pengukuran risiko bencana di Indonesia diukur melalui indeks risiko bencana yang dilihat berdasarkan tiga faktor utama yaitu bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*). Berdasarkan catatan yang diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Provinsi Papua memiliki Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) sebesar 122,15 pada tahun 2022. Hal ini menurun dibandingkan pada tahun 2021 yaitu 122,38. Berdasarkan hal tersebut, Provinsi Papua berada dalam capaian “turun”, yang diartikan bahwa terjadi keberhasilan penurunan risiko bencana pada tiap kabupaten/kota di Provinsi Papua. Provinsi Papua juga termasuk dalam kategori risiko bencana “sedang” dengan perolehan skor total indeks risiko bencana berada pada rentang 13-144 sehingga dari tahun 2015-2022, Provinsi Papua berada dalam kelas risiko bencana “sedang”.

Gambar 0.9 Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi Papua



Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia, BNPB (data diolah)

Tabel 0.10 Indeks Risiko Bencana Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua

No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	Kelas Risiko
1	Jayapura	203.20	203.20	203.20	203.20	203.20	tinggi
2	Kepulauan Yapen	83.48	83.48	83.48	83.48	93.60	sedang
3	Biak Numfor	138.40	138.40	138.40	138.40	138.40	sedang
4	Sarmi	166.98	166.98	166.98	166.98	169.63	tinggi
5	Keerom	127.20	127.20	127.20	127.20	127.20	sedang
6	Waropen	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	sedang
7	Supiori	92.40	92.40	92.40	92.40	92.40	sedang
8	Mamberamo Raya	165.60	165.60	165.60	165.60	165.60	tinggi
9	Kota Jayapura	143.94	143.94	143.94	128.86	114.40	sedang

Sumber: BNPB dalam dokumen "Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2018-2022"

Nilai indeks risiko per ancaman bencana di Provinsi Papua menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2022 berdasarkan Indeks Risiko Bencana 2022 yang diterbitkan oleh BNPB ditunjukkan pada Tabel 0.11.

Tabel 0.11 Nilai Indeks Risiko Per Ancaman Bencana Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2022

No.	Kabupaten	Nilai IRB	Kelas Risiko	Jenis Bencana	Skor	Kelas Risiko
1	Jayapura	203.20	Tinggi	Gempa Bumi	32.40	Tinggi
				Tsunami	14.40	Tinggi
				Karhutla	24.00	Tinggi
				Longsor	36.00	Tinggi
				Gelombang Ekstrim dan Abrasi	17.60	Tinggi
				Kekeringan	36.00	Tinggi
				Cuaca Ekstrim	6.80	Sedang
2	Kepulauan Yapen	93.60	Sedang	Gempa Bumi	21.60	Tinggi
				Tsunami	24.00	Tinggi
				Karhutla	8.40	Sedang
				Longsor	25.20	Tinggi
				Gelombang Ekstrim dan Abrasi	13.60	Tinggi
				Kekeringan	20.80	Tinggi
				Cuaca Ekstrim	3.60	Rendah
3	Biak Numfor	138.40	Sedang	Gempa Bumi	14.40	Tinggi
				Tsunami	24.00	Tinggi
				Karhutla	25.20	Tinggi

No.	Kabupaten	Nilai IRB	Kelas Risiko	Jenis Bencana	Skor	Kelas Risiko
				Longsor	16.80	Tinggi
				Gelombang Ekstrim dan Abrasi	20.00	Tinggi
				Kekeringan	31.20	Tinggi
				Cuaca Ekstrim	6.80	Sedang
4	Sarmi	169.63	Tinggi	Banjir	33.18	Tinggi
				Gempa Bumi	13.27	Tinggi
				Tsunami	22.12	Tinggi
				Karhutla	15.48	Tinggi
				Longsor	23.23	Tinggi
				Gelombang Ekstrim dan Abrasi	18.80	Tinggi
				Kekeringan	28.76	Tinggi
				Cuaca Ekstrim	3.32	Rendah
5	Keerom	127.20	Sedang	Gempa Bumi	14.40	Tinggi
				Karhutla	16.80	Tinggi
				Longsor	25.20	Tinggi
				Kekeringan	31.20	Tinggi
				Cuaca Ekstrim	3.60	Rendah
6	Waropen	140.00	Sedang	Gempa Bumi	14.40	Tinggi
				Tsunami	14.40	Tinggi
				Karhutla	16.80	Tinggi
				Longsor	16.80	Tinggi
				Gelombang Ekstrim dan Abrasi	13.60	Tinggi
				Kekeringan	20.80	Tinggi
				Cuaca Ekstrim	7.20	Sedang
7	Supiori	92.40	Sedang	Gempa Bumi	14.40	Tinggi
				Tsunami	6.40	Sedang
				Karhutla	16.80	Tinggi
				Longsor	16.80	Tinggi
				Gelombang Ekstrim dan Abrasi	13.60	Tinggi
				Kekeringan	20.80	Tinggi
				Cuaca Ekstrim	3.60	Rendah
8	Mamberamo Raya	165.60	Tinggi	Gempa Bumi	21.60	Tinggi
				Tsunami	19.20	Tinggi
				Karhutla	16.80	Tinggi
				Longsor	16.80	Tinggi
				Gelombang Ekstrim dan Abrasi	20.40	Tinggi
				Kekeringan	31.20	Tinggi
				Cuaca Ekstrim	3.60	Rendah
9	Kota Jayapura	114.40	Sedang	Banjir	18.52	Tinggi
				Gempa Bumi	11.11	Sedang
				Tsunami	8.23	Sedang
				Karhutla	4.32	Rendah
				Longsor	8.64	Sedang
				Gelombang Ekstrim dan Abrasi	10.29	Sedang
				Kekeringan	16.05	Tinggi
				Cuaca Ekstrim	3.50	Rendah

Sumber: IRBI Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2022, BNPB

Beberapa kabupaten/kota di Provinsi Papua berada dalam kawasan rawan bencana alam berisiko tinggi. Jenis bencana dengan risiko kerawanan tinggi di Provinsi Papua antara lain adalah tanah longsor, banjir bandang, banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, tsunami, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, dan gelombang ekstrem.

Wilayah rawan bencana di Provinsi Papua ditinjau berdasarkan beberapa jenis bencana yang terjadi di antaranya adalah gempa bumi, longsor, banjir, tsunami, kekeringan, dan bencana alam lainnya yang berpotensi membawa bencana. Masing-masing jenis bencana dijabarkan sebagai berikut.

a. Gempa Bumi

Provinsi Papua rawan gempa bumi akibat dari tatanan tektonik di Pulau *New Guinea*. Provinsi Papua juga termasuk dalam kategori wilayah rawan bencana gempa bumi dan tsunami berdasarkan kajian kerawanan bencana gempa bumi di Indonesia. Adapun tingkat kerawanan gempa bumi berada di jalur pegunungan tengah hingga bagian utara Pulau Papua tergolong menengah hingga tinggi dengan percepatan tanah maksimal. Berdasarkan catatan Balai BMKG wilayah V Jayapura, sebanyak lebih dari 2600 kali terjadi gempa bumi di Provinsi Papua pada tahun 1988-2007. Gempa bumi kuat dan dapat merusak berpusat di sekitar Kabupaten Mamberamo Raya, Sarmi, dan Jayapura.

Tabel 0.12 Wilayah dengan Bahaya Gempa Bumi Tinggi

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH (ha)	PROPORSI (%)
1	Jayapura	667,913.15	19.94
2	Kepulauan Yapen	195,268.72	5.83
3	Biak Numfor	124.55	0.00
4	Sarmi	624,831.77	18.66
5	Keerom	36,642.82	1.09
6	Waropen	65,968.39	1.97
7	Supiori	30.85	0.00
8	Mamberamo Raya	1,698,934.93	50.73
9	Kota Jayapura	59,148.48	1.77
TOTAL		3,348,863.66	100

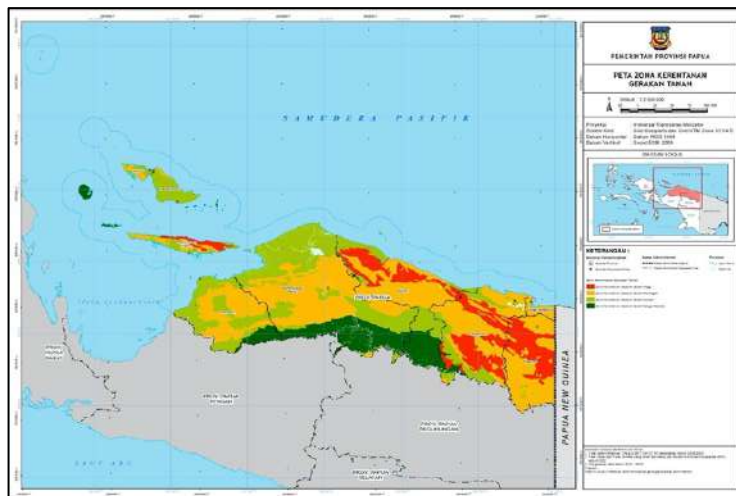
Sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

Daerah rawan gempa bumi di Provinsi Papua berada di satu wilayah yaitu pulau Biak-Yapen yang secara umum berada di bagian utara pegunungan tengah Papua. Gempa bumi yang biasa terjadi adalah gempa tektonik yang terjadi akibat tubrukan dari dua lempeng. Gempa dangkal sering kali berhubungan dengan aktivitas sesar yang ada di jalur pegunungan tengah Papua. Gempa yang terjadi akibat pergerakan sesar Sorong secara berkelanjutan dirasakan di Pulau Biak dan Yapen serta dapat terjadi di darat dan di bawah laut.

b. Longsor

Longsor terbagi dalam 3 kategori yaitu zona kerentanan gerakan tanah tinggi, zona kerentanan gerakan tanah menengah, dan zona kerentanan gerakan tanah rendah. Zona kerentanan gerakan tanah tinggi merupakan daerah dengan tingkat kerentanan tinggi yang dapat terkena gerakan tanah. Zona kerentanan gerakan tanah menengah merupakan daerah dengan tingkat kerentanan menengah untuk terkena gerakan tanah dan zona kerentanan gerakan tanah rendah merupakan daerah yang mempunyai tingkat kerentanan rendah untuk terkena gerakan tanah.

Gambar 0.10 Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah di Provinsi Papua



Sumber : RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

Provinsi Papua berada pada daerah dengan zona kerentanan gerakan tanah menengah dan tinggi khususnya pada jalur pegunungan tengah dan pegunungan utara Papua. Bahaya longsor tinggi di Provinsi Papua meliputi seluruh kabupaten/kota. Kabupaten Jayapura menjadi wilayah dengan bahaya longsor tinggi terluas diikuti Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom.

Tabel 0.13 Wilayah dengan Bahaya Bencana Longsor Tinggi

No	Kabupaten/Kota	Jumlah (Ha)	Proporsi (%)
1	Jayapura	219,388.10	51.68
2	Kepulauan Yapen	58,886.97	13.87
3	Biak Numfor		0.00
4	Sarmi	53,175.90	12.53
5	Keerom	87,688.31	20.66
6	Waropen	0	0.00
7	Supiori	0	0.00
8	Mamberamo Raya	3,044.21	0.72
9	Kota Jayapura	2,314.49	0.55
TOTAL		424,497.98	100

Sumber : RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

c. Banjir

Banjir terjadi akibat beberapa faktor di antaranya curah hujan yang tinggi dan lama, lokasi topografi yang cenderung datar dengan pola sungai berbelok-belok dan dataran banjir yang luas, keadaan tanah maupun batuan yang lambat dalam meresap air, dan kapasitas sungai yang penuh sehingga tidak memungkinkan untuk menampung dan mengalirkan air ke laut. Wilayah rawan banjir di Provinsi Papua berada di bagian pesisir utara yaitu Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Mamberamo Raya, dan Waropen seperti terlihat pada Gambar 0.11.

Gambar 0.11 Peta Rawan Bencana Banjir di Provinsi Papua



Sumber : RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

Bahaya banjir tinggi terdapat pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua dengan wilayah bahaya banjir terluas berada di Kabupaten Mamberamo Raya diikuti Kabupaten Sarmi dan Waropen. Proporsi bahaya banjir menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua dijabarkan pada Tabel 0.14.

Tabel 0.14 Wilayah dengan Bahaya Bencana Banjir Tinggi

No	Kabupaten/Kota	Jumlah (Ha)	Proporsi (%)
1	Jayapura	48,859.59	8.24
2	Kepulauan Yapen	739.34	0.12
3	Biak Numfor	1,318.71	0.22
4	Sarmi	63,365.16	10.68
5	Keerom	26,972.71	4.55
6	Waropen	62,418.33	10.52
7	Supiori	282.66	0.05
8	Mamberamo Raya	385,285.77	64.95
9	Kota Jayapura	3,939.93	0.66
TOTAL		593,182.20	100

Sumber : RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

d. Tsunami

Provinsi Papua melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi tahun 2006, mencatat kejadian tsunami di Provinsi Papua tepatnya di pulau Yapen pada tahun 1900, 1914, 1957, 1979, dan 1996. Wilayah rawan tsunami di Provinsi Papua diprediksi berada di bagian pesisir utara Papua termasuk semenanjung Wondama (Teluk Cenderawasih). Terdapat 8 kabupaten/kota dengan risiko tsunami tinggi di Provinsi Papua yaitu Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Mamberamo Raya, Sarmi, Supiori, Waropen, dan Kota Jayapura. Kabupaten Mamberamo Raya menjadi kabupaten di Provinsi Papua yang memiliki area rawan tsunami tinggi terluas diikuti Kepulauan Yapen dan Sarmi.

Tabel 0.15 Wilayah dengan Bahaya Tsunami Tinggi

No	Kabupaten/Kota	Jumlah (Ha)	Proporsi (%)
1	Jayapura	503.16	2.37
2	Kepulauan Yapen	3,429.65	16.13
3	Biak Numfor	2,749.78	12.93
4	Sarmi	3,062.08	14.40
5	Keerom	1,171.63	5.51
6	Waropen	1,812.36	8.52
7	Supiori	7,886.21	37.09
8	Mamberamo Raya	544.89	2.56
9	Kota Jayapura	503.16	2.37
TOTAL		21,159.76	100

Sumber : RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

e. Kekeringan

Kekeringan dapat terjadi ketika terjadinya musim kemarau berkepanjangan. Beberapa dampak langsung yang dapat dirasakan dari kekeringan adalah produksi pangan yang semakin berkurang dan kegiatan ekonomi masyarakat yang terganggu. Bahan pangan yang cenderung sulit didapatkan pada masa kemarau mengakibatkan harganya menjadi mahal. Selain itu, air bersih menjadi sulit didapatkan dan hewan dapat mati dan menimbulkan wabah penyakit.

Provinsi Papua memiliki bahaya kekeringan pertanian yang lebih menonjol dibandingkan dengan jenis kekeringan lainnya. Bahaya kekeringan pertanian di Provinsi Papua sering ditemukan di pegunungan yang memiliki topografi tinggi dan curam serta memiliki kondisi dan perubahan cuaca yang sangat ekstrem namun dengan jumlah penduduk yang cukup banyak. Wilayah rawan kekeringan di Provinsi Papua masih belum dipetakan secara lebih rinci dan lengkap karena informasinya lebih banyak berasal dari instansi teknis pertanian. Informasi mengenai penyebab dan antisipasi penanganan bahaya kekeringan masih belum tertangani dengan baik.

f. Bencana Alam Lainnya

Bencana lain yang dapat terjadi dan mengancam serta memiliki risiko tinggi di antaranya adalah banjir bandang, wilayah dataran rendah dan wilayah pegunungan.

2.1.1.10 Potensi Pengembangan Wilayah

Skenario pengembangan wilayah provinsi Papua, dibagi dalam 3 (tiga) wilayah pengembangan, yang meliputi:

- a. **Wilayah pengembangan I**, meliputi wilayah Jayapura dan sekitarnya, yaitu:
 - (1) Kabupaten Keerom sebagai PKW, memiliki potensi di sektor pertanian (tanaman pangan dan hortikultura), sektor perkebunan (kelapa sawit, jagung, kakao), sektor pariwisata (Telaga Cinta Yowong), sektor pertambangan, dan sektor Peternakan dengan fokus pengembangan pada sektor pertanian (food estate dan tanaman pangan, sektor perkebunan dan sektor pertambangan);
 - (2) Kabupaten Sarmi sebagai PKW, memiliki potensi di sektor pertanian (tanaman pangan dan hortikultura), sektor perkebunan (kelapa sawit, kelapa dalam, kakao), sektor pertambangan (nikel), sektor perikanan, sektor kehutanan, dan sektor pariwisata dengan fokus pengembangan pada sektor industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan kelapa dalam (PICHO/Papua Home industri Coconut Oil);

- (3) Kabupaten Jayapura sebagai PKN, memiliki potensi di sektor Pertanian (tanaman pangan dan hortikultura), sektor perkebunan (kelapa sawit, kakao, sagu), sektor peternakan, sektor perikanan, sektor pariwisata (kerajinan kapak batu Ormu Wari, Danau Sentani), sektor pertambangan, sektor industri dan sektor Kehutanan dengan fokus pengembangan pada sektor pertanian dan industri; serta
- (4) Kota Jayapura sebagai PKN dan PKS, memiliki potensi di sektor pertanian (tanaman pangan dan hortikultura), sektor perkebunan, sektor peternakan, sektor perikanan, sektor pariwisata, dan sektor jasa dengan fokus pengembangan sebagai pusat perdagangan, jasa dan pariwisata.

b. **Wilayah pengembangan II**, yaitu:

- (1) Kabupaten Biak Numfor sebagai PKW dan PKS, memiliki potensi di sektor perikanan, sektor pariwisata, sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor peternakan dengan fokus pengembangan sebagai pusat perikanan, industri pengolahan perikanan dan wisata bahari;
- (2) Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi di sektor pariwisata (Kampung wisata Alam), sektor perikanan (ikan dan rumput laut), sektor perkebunan (sagu, kakao), sektor kehutanan, sektor pertanian, dan sektor peternakan dengan fokus pengembangan pada sektor perikanan dan wisata bahari; serta
- (3) Kabupaten Supiori memiliki potensi pengembangan di sektor perikanan dan pariwisata; dan

c. **Wilayah pengembangan III**, yaitu:

- (1) Kabupaten Mamberamo Raya memiliki potensi di sektor pertanian (tanaman pangan dan hortikultura), sektor perkebunan rakyat, sektor pertambangan (batu bara), sektor perikanan, sektor pariwisata (pariwisata alam), dan sektor kehutanan dengan fokus pengembangan pada pengolahan hasil hutan, pertanian dan Pariwisata; serta

Kabupaten Waropen memiliki potensi di sektor pariwisata (Wisata Rohani Pulau Nau, Pantai Mangrove), sektor perikanan (ikan, udang, kepiting), sektor pertanian (tanaman pangan dan hortikultura), sektor perkebunan (sagu), sektor kehutanan, dan sektor pertambangan dengan fokus pengembangan meliputi pariwisata, perikanan dan pertanian serta potensi pertambangan.

Gambar 0.12 Peta Pengembangan Wilayah Provinsi Papua



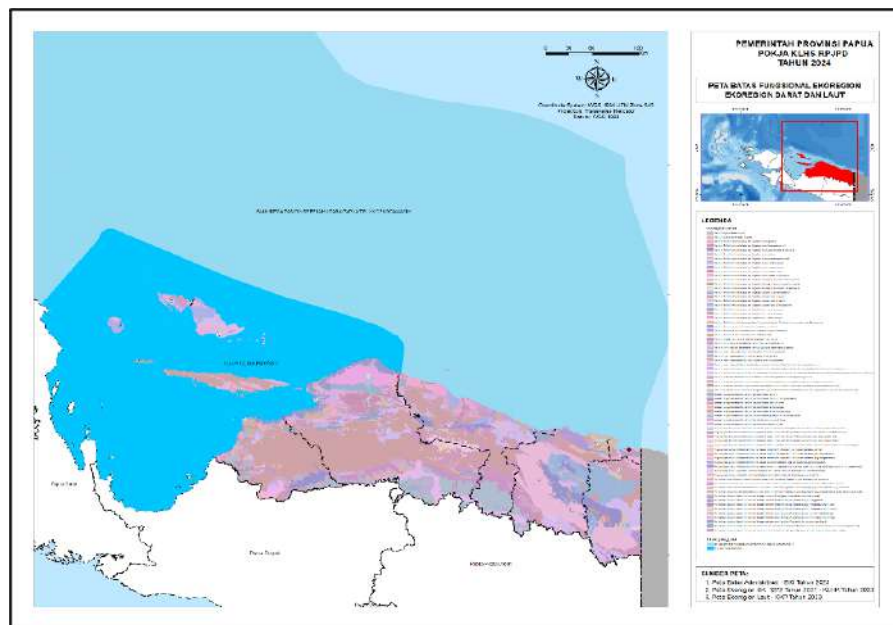
Sumber: Revisi RTRW Provinsi Papua, Tahun 2022

2.1.1.11 Batas Wilayah Fungsional

1) Batas Wilayah Berdasarkan Ekoregion

Berdasarkan Buku I Deskripsi Peta Ekoregion Pulau, Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, flora, dan fauna asli serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Undang – Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dinyatakan bahwa penetapan wilayah ekoregion dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan: 1. karakteristik bentang alam; 2. Daerah Aliran Sungai; 3. Iklim; 4. Flora dan Fauna; 5. Sosial Budaya; 6. Ekonomi; 7. Kelembagaan Masyarakat; dan 8. Hasil Inventarisasi Lingkungan Hidup. Penetapan ekoregion memiliki peranan untuk melihat keterkaitan, interaksi, interdependensi, dan dinamika pemanfaatan berbagai sumber daya alam antar ekosistem di wilayah ekoregion.

Gambar 0.13 Peta Ekoregion Darat dan Laut Provinsi Papua



Sumber: SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021 dan Buku 2 Ekoregion Laut Indonesia

Selain membahas Batas Fungsional Ekoregion Darat, dalam KLHS RPJPD ini juga di bahas terkait dengan Batas Fungsional Ekoregion Laut. Ekoregion laut adalah wilayah perairan laut dengan komposisi spesies yang relatif homogen, yang jelas berbeda dari sistem yang berdekatan (spalding et al., 2007). Faktor pembeda dalam mendefinisikan ekoregion bervariasi dari lokasi ke lokasi antara tingkar isolasi, upwelling, masukan nutrien, pengaruh air tawar, rezim suhu, morfostruktur, sedimen, arus, dan kompleksitas bathimetri atau tipe pantai. Secara umum tujuan pewilayahan ekoregion laut Indonesia adalah sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) ada sesuai dengan karakter wilayah ekoregion, termasuk karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal. Dengan dasar tersebut diharapkan dapat dicapai keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam untuk mengoptimalkan sumberdaya laut serta dicapai perlindungan lingkungan secara efektif, yang pada akhirnya dapat dicapai pembangunan berkelanjutan.

A. Ekoregion Darat

Berdasarkan SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021 tentang Penetapan Karakteristik Bentang Alam dan Karakteristik Vegetasi Alami Peta Wilayah Ekoregion Indonesia Skala 1:250.000, dapat dilihat bahwa terdapat 70 jenis ekoregion Provinsi Papua, dan jenis ekoregion Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) merupakan jenis ekoregion terluas di daratan Provinsi Papua mencapai 2,095,220.17 hektar atau sekitar 25,30 persen dari luas Provinsi Papua.

Jenis ekoregion Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) memiliki bentuk lahan pegunungan denudasional. Morfologi ini terbentuk karena aktivitas vulkanisme, yang kemudian aktivitas vulkanik ini sudah tidak berjalan lagi, sehingga agen yang lebih berperan disini adalah erosi dan pelapukan yang mempengaruhi morfologi pegunungan ini. Morfologi ini memiliki elevasi lebih dari 300 mdpl dan kemiringan lereng lebih dari 16%, jenis batuan pada ekosistem ini yaitu batuan beku dan batuan piroklastik hasil dari aktivitas vulkanisme pada masa lampau yang sudah mengalami pelapukan dan erosi. Vegetasi pada ekosistem ini adalah hutan pamah (non dipterokarpa), memiliki kondisi iklim tropika basah dengan suhu sejuk hingga dingin dan suhu rata-rata 18-22oC, curah hujan tahunan 1500-2500 mm. Hutan pamah non dipterokarpa memiliki tanah Podsolik Merah Kuning dan Latosol dengan tingkat kesuburan rendah hingga sedang dengan pH masam dan retensi hara rendah.

Tanah Podzolik merah kuning merupakan tanah yang kaya unsur mineral dan organik namun cepat larut oleh air hujan, sedangkan Latosol merupakan tanah yang kurang subur dan bersifat asam karena mengandung aluminium dan besi. Karakteristik yang demikian menyebabkan vegetasi ini mempunyai penggunaan lahan beragam, yaitu hutan, semak belukar, dan ladang. Pemanfaatan ekosistem diantaranya sebagai daerah resapan karena batuan atau lapukan piroklastik memiliki porositas yang baik sehingga dapat juga digunakan sebagai penyedia air bawah tanah dan pemanfaatan lahan untuk kebutuhan pertanian. Potensi bencana yang dapat terjadi pada ekosistem ini diantaranya longsor.

Tabel berikut ini menunjukkan jenis ekoregion di wilayah Provinsi Papua berdasarkan SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021.

Tabel 0.16 Sebaran Luas Jenis Ekoregion Provinsi Papua

No	Ekoregion Komplek	Luas (ha)	Luas (%)
1	Danau Vegetasi hutan danau	159.41	0.002
2	Danau Vegetasi terna tepian danau	9,155.05	0.111
3	Dataran fluvial bermaterial aluvium Vegetasi hutan gambut	248,559.28	3.001
4	Dataran fluvial bermaterial aluvium Vegetasi hutan kerangas pamah	27,759.47	0.335
5	Dataran fluvial bermaterial aluvium Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	333,593.02	4.028
6	Dataran fluvial bermaterial aluvium Vegetasi hutan pantai	35,139.56	0.424
7	Dataran fluvial bermaterial aluvium Vegetasi hutan pegunungan bawah	3,046.51	0.037
8	Dataran fluvial bermaterial aluvium Vegetasi hutan rawa air payau	2,934.08	0.035

No	Ekoregion Komplek	Luas (ha)	Luas (%)
9	Dataran fluvial bermaterial aluvium Vegetasi hutan rawa air tawar	24,270.78	0.293
10	Dataran fluvial bermaterial aluvium Vegetasi hutan tepian sungai	190,391.90	2.299
11	Dataran fluvial bermaterial aluvium Vegetasi hutan tepian sungai payau	146,439.24	1.768
12	Dataran fluvial bermaterial aluvium Vegetasi padang rumput lahan kering pamah	511.30	0.006
13	Dataran fluvial bermaterial aluvium Vegetasi padang rumput rawa gambut pamah	21,753.23	0.263
14	Dataran fluvial bermaterial aluvium Vegetasi padang rumput tepian sungai payau	4,427.35	0.053
15	Dataran fluvial bermaterial aluvium Vegetasi savana lahan kering pamah	557.00	0.007
16	Dataran fluvial bermaterial aluvium Vegetasi savana rawa air payau	107,441.55	1.297
17	Dataran fluvial bermaterial aluvium Vegetasi savana rawa air tawar	177,086.81	2.138
18	Dataran fluvial bermaterial aluvium Vegetasi savana rawa gambut pamah	1,071.02	0.013
19	Dataran fluvial bermaterial aluvium Vegetasi terna rawa air payau	40,543.23	0.490
20	Dataran fluvial bermaterial aluvium Vegetasi terna rawa air tawar	129,698.50	1.566
21	Dataran fluvial bermaterial aluvium Vegetasi terna tepian sungai	16,413.29	0.198
22	Dataran fluvial berombak-bergelombang bermaterial aluvium Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	16,702.97	0.202
23	Dataran fluviomarin bermaterial aluvium Vegetasi mangrove	183,012.16	2.210
24	Dataran fluviomarin bermaterial aluvium Vegetasi mangrove monsun	130.19	0.002
25	Dataran fluviomarin bermaterial aluvium Vegetasi sagu	1,070.40	0.013
26	Dataran lakustrin bermaterial aluvium Vegetasi hutan danau	224,552.09	2.711
27	Dataran marin berpasir bermaterial aluvium Vegetasi hutan pantai	43,733.39	0.528
28	Dataran marin berpasir bermaterial aluvium Vegetasi hutan rawa air payau	179.42	0.002
29	Dataran organik bermaterial gambut Vegetasi hutan danau gambut	98,273.71	1.187
30	Dataran organik bermaterial gambut Vegetasi hutan gambut	465,716.69	5.623
31	Dataran organik bermaterial gambut Vegetasi terna tepian danau	57,208.16	0.691
32	Dataran organik koralian bermaterial batuan sedimen karbonat Vegetasi hutan batugamping pamah	31,499.61	0.380
33	Dataran solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat Vegetasi hutan batugamping pamah pada bentang alam karst	1,670.79	0.020
34	Dataran solusional karst berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen karbonat Vegetasi hutan batugamping pamah pada bentang alam karst	71,179.53	0.859
35	Dataran struktural bermaterial batuan sedimen karbonat Vegetasi hutan batugamping pamah	254,732.62	3.076

No	Ekoregion Komplek	Luas (ha)	Luas (%)
36	Dataran struktural bermaterial batuan sedimen karbonat Vegetasi hutan batugamping pamah monsun malar hijau	1,052.96	0.013
37	Dataran struktural berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen karbonat Vegetasi hutan batugamping pamah	44,376.33	0.536
38	Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	25,014.77	0.302
39	Lembah sungai bermaterial aluvium Vegetasi hutan gambut	102,116.96	1.233
40	Lembah sungai bermaterial aluvium Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	3,621.35	0.044
41	Lembah sungai bermaterial aluvium Vegetasi hutan rawa air tawar	3,600.44	0.043
42	Lembah sungai bermaterial aluvium Vegetasi hutan tepian sungai	119,608.60	1.444
43	Lembah sungai bermaterial aluvium Vegetasi hutan tepian sungai payau	61,752.00	0.746
44	Lembah sungai bermaterial aluvium Vegetasi padang rumput tepian sungai payau	34,130.26	0.412
45	Lembah sungai bermaterial aluvium Vegetasi savana rawa air tawar	8,719.05	0.105
46	Lembah sungai bermaterial aluvium Vegetasi terna tepian sungai	8,809.83	0.106
47	Pegunungan denudasional bermaterial batuan metamorfik (ultrabasa) Vegetasi hutan batuan ultrabasa pegunungan bawah	8,084.73	0.098
48	Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	2,095,220.17	25.299
49	Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik Vegetasi hutan pegunungan atas	572.72	0.007
50	Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik Vegetasi hutan pegunungan bawah	64,202.62	0.775
51	Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	7,484.13	0.090
52	Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah	576,886.68	6.966
53	Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik Vegetasi hutan batuan ultrabasa pegunungan atas	5,721.63	0.069
54	Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik Vegetasi hutan batuan ultrabasa pegunungan bawah	47,160.71	0.569
55	Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen karbonat Vegetasi hutan batugamping pamah	140,527.18	1.697
56	Pegunungan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	76,559.05	0.924
57	Pegunungan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	7,221.41	0.087
58	Pegunungan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam Vegetasi hutan pegunungan bawah	10,617.31	0.128
59	Perbukitan denudasional bermaterial batuan metamorfik (ultrabasa) Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah	38,831.39	0.469

No	Ekoregion Komplek	Luas (ha)	Luas (%)
60	Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	7,187.50	0.087
61	Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat Vegetasi hutan batugamping pamah pada bentang alam karst	235,903.30	2.848
62	Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat Vegetasi hutan batugamping pegunungan bawah pada bentang alam karst	5,863.75	0.071
63	Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah	364,433.22	4.400
64	Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen karbonat Vegetasi hutan batugamping pamah	543,928.28	6.568
65	Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen karbonat Vegetasi hutan batugamping pegunungan atas	40.70	0.000
66	Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen karbonat Vegetasi hutan batugamping pegunungan bawah	21,302.19	0.257
67	Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	554,688.67	6.698
68	Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat Vegetasi hutan pamah monsun malar hijau	1,440.83	0.017
69	Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat Vegetasi hutan pegunungan bawah	1,334.78	0.016
70	Perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	83,245.68	1.005

Sumber: SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021

B. Ekoregion Laut

Saat ini, Indonesia memiliki 18 ekoregion laut yang mencerminkan keanekaragaman ekosistem lautnya yang berisi spesies-spesies, komunitas alam, dan kondisi lingkungan yang bersatu dalam sebuah lingkup geografis, (Priyanto dan Setyawan dalam Atlas Tematik Kelautan Indonesia Tahun 2013), dan wilayah laut Provinsi Papua masuk dalam 2 ekoregion laut Indonesia yaitu Ekoregion Laut 16 (Samudera Pasifik Sebelah Utara Papua) dan Ekoregion Laut 17 (Teluk Cenderawasih), dengan luas kurang lebih 553,226 km², lihat tabel berikut ini.

Tabel 0.17 Luas Sebaran Wilayah Ekoregion Laut

No	Ekoregion Laut	Kode	Luas (km ²)
1	Samudera Pasifik Sebelah Utara Papua	E.L.16	459.857
2	Teluk Cenderawasih	E.L.17	93.369

Sumber: Buku 2 Ekoregion Laut Indonesia

Ekoregion Laut 16 berada dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 717, yang meliputi seluruh perairan di sebelah utara Pulau Papua kecuali Teluk Cenderawasih. Ekoregion ini memiliki luas 459.857 km², dengan ciri khasnya yaitu memiliki fenomena arus *Halmahera Eddy*, yang terbentuk akibat struktur betimetri dan topografi Papua Utara hingga Kepulauan Halmahera, yakni arus putar balik ke arah barat kemudian kembali ke Samudera Pasifik, yang semula berasal dari arus susur tepian Papua Utara yang menuju ke barat. Selain itu, fenomena kolam air hangat yang terdapat di Samudera Pasifik Barat juga berimbas pada ekoregion ini, dimana

area ini adalah sangat disenangi oleh populasi ikan tuna. Bagian wilayah Kabupaten Supiori yang masuk dalam Wilayah Ekoregion 16 ini adalah Kepulauan Mapia.

Ekoregion Laut 17 juga berada dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 717, yang meliputi Teluk Cenderawasih dan sebagian kecil perairan di utara Papua. Ekoregion ini memiliki luas 93.369 km², dengan ciri khas yaitu massa airnya sangat dipengaruhi oleh massa air Samudera Pasifik Barat dengan kecerahan yang tinggi (lebih dari 30 meter). Ekoregion 17 merupakan habitat yang sangat mendukung berbagai biota lainnya seperti kerang raksasa yang masih hidup dan berumur ratusan tahun. Ekoregion 17 memiliki batas dengan ekoregion Samudera Pasifik sebelah utara Papua karna perbedaan batimetri, keanekaragaman hayati karang dan pola temperature dan salinitas permukaan air laut. Karakteristik utama ekoregion 17 adalah terumbu karang dengan sejumlah biota laut endemic, dan dapat dikatakan ekoregion ini masih berstatus tertutup sehingga menyebabkan tingkat keragaman biota endemiknya tinggi. Sebagian ekoregion ini berstatus sebagai Taman Nasional Teluk Cenderawasih (TNTC) dengan luas 1.453.500 hektar, terbagi atas perairan/laut seluas 1.305.300 hektar dan daratan 68.200 hektar.

2) Batas Wilayah Berdasarkan Daerah Aliran Sungai

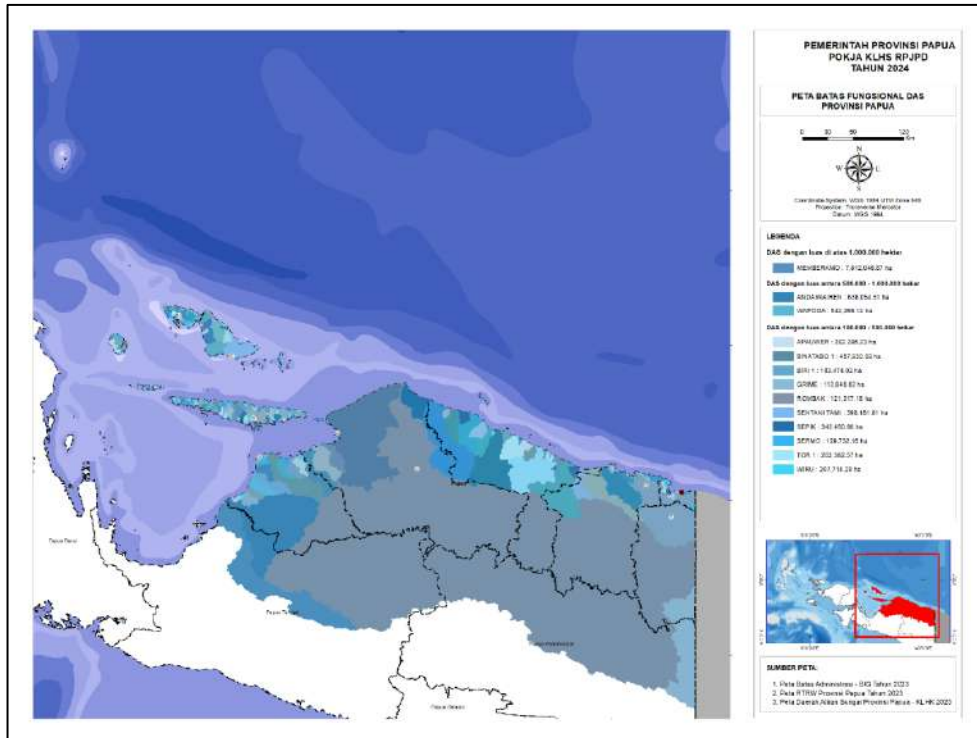
Penentuan batas wilayah kajian selain berdasarkan batas ekologi, juga didasarkan pada batas fungsional. Pada kajian ini batas fungsional merujuk batas Daerah Aliran Sungai (DAS). Sebagai sebuah ekosistem, DAS merupakan sebuah sistem fungsional yang terbentuk pada wilayah yang dikelilingi dan dibatasi oleh topografi berupa punggung bukit, pegunungan, atau pemisah alami lainnya. DAS juga dikenal dengan sebutan watershed atau daerah tangkapan (catchment area) dan merupakan unit analisis yang mempertimbangkan ekosistem pada sistem yang lebih besar. Penetapan batas DAS didasarkan pada batas geografis dari komunitas manusia dan sistem lingkungan, serta mempertimbangkan karakteristik ekologis dan geografis.

DAS memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta dalam menentukan pola aliran sungai dan fungsi hulu, tengah, dan hilir. Selain itu, DAS juga menjadi unit pengelolaan sumber daya alam dan perencanaan pembangunan wilayah. Oleh karena itu sangat penting meninjau batas kajian berdasarkan batas DAS. Batas wilayah kajian yang didasarkan pada batas DAS dibuat berdasarkan wilayah DAS yang menjadi bagian dari wilayah perencanaan. Untuk itu batas wilayah kajian akan menjadi lebih luas dari batas wilayah perencanaan karena meliputi seluruh wilayah DAS sebagai satu sistem fungsional, tidak dibatasi oleh batas administrasi.

Berdasarkan batas fungsional Daerah Aliran Sungai, wilayah Provinsi Papua berada pada 791 DAS dengan total luas wilayah fungsionalnya sebesar 12.960.773,84 ha yang membentang meliputi wilayah administrasi Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan. DAS dengan kategori "Sangat Besar" yang berada di wilayah Provinsi Papua adalah DAS Mamberamo dengan luas 7,812,046.87 ha, yang membentang melalui 5 kabupaten antara lain Kabupaten Jayapura seluas 905,259.00 ha, Kabupaten Sarmi seluas 382,186.00 ha, Kabupaten Keerom seluas 587,055.00, Kabupaten Waropen seluas 281,422.00 dan Kabupaten Mamberamo Raya seluas 1,833,580.00 ha. DAS Mamberamo juga melintasi 4 Kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah dan 7 Kabupaten di wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Terdapat 2

DAS dengan kategori "Besar" yaitu 1). DAS Andaiwairan seluas 637,903.00 ha yang melintasi wilayah kabupaten Mamberamo Raya; 2). DAS Wapoga seluas 542,266.40 ha yang melintasi kabupaten Waropen Provinsi Papua dengan luas 386,409.00 ha, sementara sisa luasan DAS Wapoga masuk dalam wilayah kabupaten Intan Jaya, kabupaten Nabire dan kabupaten Paniai yang merupakan wilayah Provinsi Papua Tengah. Peta Wilayah Daerah Aliran Sungai yang menjadi bagian dari wilayah perencanaan di Provinsi Papua dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut.

Gambar 0.14 Peta Batas Fungsional Daerah Aliran Sungai



Sumber: Daerah Aliran Sungai Provinsi Papua – BPKH Tahun 2022

2.1.1.12 Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

Dalam konteks daya dukung dan daya tampung ini akan digunakan 2 jenis daya dukung yaitu Daya Dukung Penyediaan Pangan dan Daya Dukung Penyediaan Air Bersih. Pemodelan spasial yang digunakan untuk menghitung kapasitas daya dukung pangan dan air adalah dengan menggunakan sistem grid sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2019, dengan skala 30" x 30". Pendekatan dengan sistem grid skala ragam memungkinkan dilakukannya analisis spasial yang melibatkan banyak jenis data dengan berbagai skala/resolusi berbeda (Mashita, 2012). Selain itu, system grid juga memungkinkan mengubah data tabular menjadi sebaran (spasial). Dalam penentuan kecukupan JLH sebagai penyedia air, data spasial hasil penentuan kinerja jasa lingkungan hidup penyedia air disiapkan dengan konsep sistem grid.

1) Ambang Batas dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyediaan Pangan

Ketersediaan jasa ekosistem untuk bahan pangan dihitung dari jumlah produksi bahan pangan pada setiap kabupaten atau kota di Provinsi Papua. Nilai produksi ini didistribusikan dengan menggunakan metode pembobotan berdasarkan Indeks Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan (IJEPPB). Sementara nilai kebutuhan pangan bergantung pada jumlah populasi dan dihitung dari Angka Kecukupan Energi (AKE) per kapita.

Tabel berikut ini menunjukkan nilai ketersediaan energi bahan pangan di Provinsi Papua cukup merata di semua kabupaten dan kota.

Tabel 0.18 Nilai ketersediaan, kebutuhan, selisih pangan di Provinsi Papua tahun 2022

Kabupaten/Kota	Energi Bahan Pangan (miliar kkal)			Ambang Batas Populasi (jiwa)	Persentase Luas Wilayah yang Berstatus Belum Melampaui
	Ketersediaan	Kebutuhan	Selisih Ketersediaan		
Biak Numfor	14,49	105,67	(91,19)	18.614,00	67,53%
Jayapura	48,87	130,38	(81,51)	63.371,00	88,62%
Keerom	21,50	48,40	(26,90)	27.478,00	89,05%
Kepulauan Yapen	2,99	88,40	(85,41)	3.365,00	85,58%
Kota Jayapura	37,76	312,66	(274,90)	48.077,00	52,88%
Mamberamo Raya	2,50	28,68	(26,18)	-	95,15%
Sarmi	12,65	32,87	(20,21)	16.694,00	91,13%
Supiori	1,69	17,70	(16,01)	1.908,00	76,28%
Waropen	5,90	26,57	(20,68)	12.129,00	96,15%
Provinsi Papua	148,35	791,33	(642,99)	191.636,0	82,04%

Sumber: Data diolah pokja KLHS RPJPD Provinsi Papua Tahun 2024

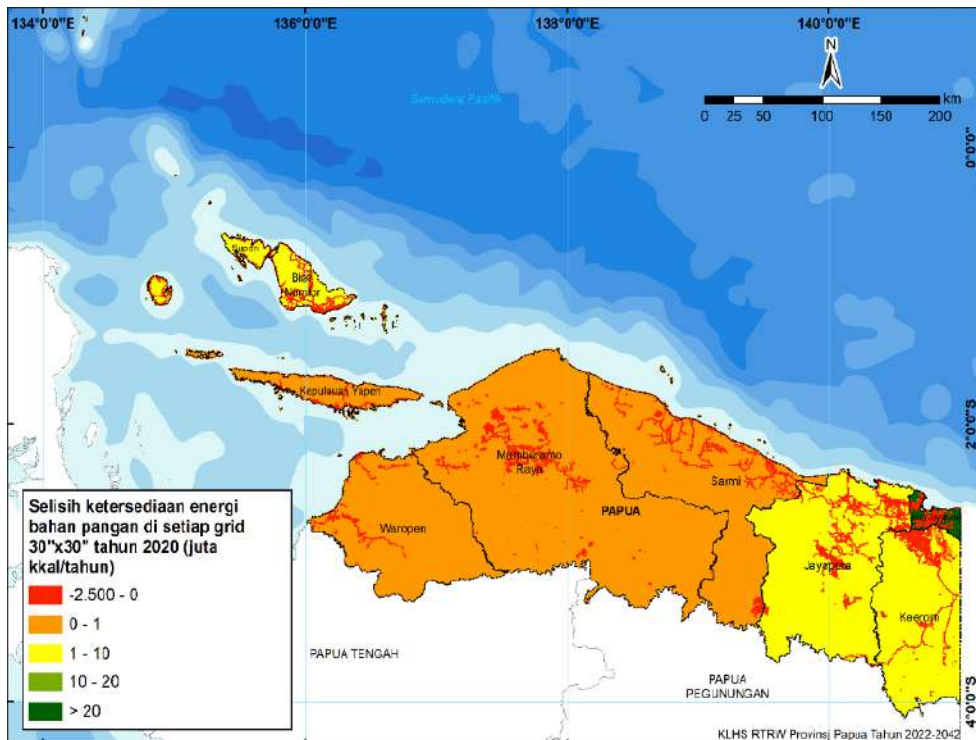
Selisih ketersediaan dengan kebutuhan bahan pangan dihitung untuk melakukan analisis daya dukungnya. Pada tabel diatas selisih antara ketersediaan dengan kebutuhan menunjukkan bahwa secara keseluruhan wilayah Provinsi Papua masih memiliki selisih ketersediaan yang negatif. Namun, apabila nilai selisih ini disajikan dalam bentuk peta spasial berdasarkan sebaran penduduk per grid maka terlihat bahwa masih terdapat sebagian besar persentase luas wilayah yang berstatus belum melampaui di setiap kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pemodelan sistem grid yang digunakan, nilai kebutuhan pangan setiap kabupaten/kota lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan pangan yang ada, sementara kapasitas lingkungan dalam penyediaan pangan masih cukup besar di daerah khususnya yang tidak “berpopulasi” (populasi berdasarkan model).

Penentuan status daya dukung terhadap penyedia pangan dilakukan dengan menghitung selisih ambang batas penduduk yang dapat didukung oleh wilayah tersebut terhadap jumlah penduduknya. Apabila jumlah penduduk lebih besar dibandingkan ambang batas, maka dapat disimpulkan bahwa lokasi tersebut memiliki status daya dukung penyedia pangan yang telah melampaui batas, dan sebaliknya. Selisih ketersediaan energi penyedia pangan ditunjukkan oleh peta pada gambar berikut ini. Dari peta tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa wilayah dengan status daya dukung telah melampaui batas. Beberapa wilayah ini ditunjukkan oleh gambar berwarna merah, yaitu seperti Jayapura dan Keerom.

Terdapat dua catatan terhadap pendekatan/model yang digunakan untuk menentukan status daya dukung penyediaan pangan ini. Pertama, model ini bersifat “closed system”/tertutup dalam sistem grid; artinya hasil perhitungan dan penentuan status adalah untuk satuan grid 30”x30” dengan berbasiskan pendistribusian berdasarkan kabupaten/kota masing-masing. Implikasinya, pendistribusian dapat menjadi bias terhadap luas wilayah, dimana dengan potensi

ketersediaan yang sama, grid pada daerah dengan luasan yang lebih besar akan memiliki ketersediaan yang lebih kecil. Kedua, model ini sangat dipengaruhi oleh data masukan yang digunakan, terutama ketersediaan bahan pangan.

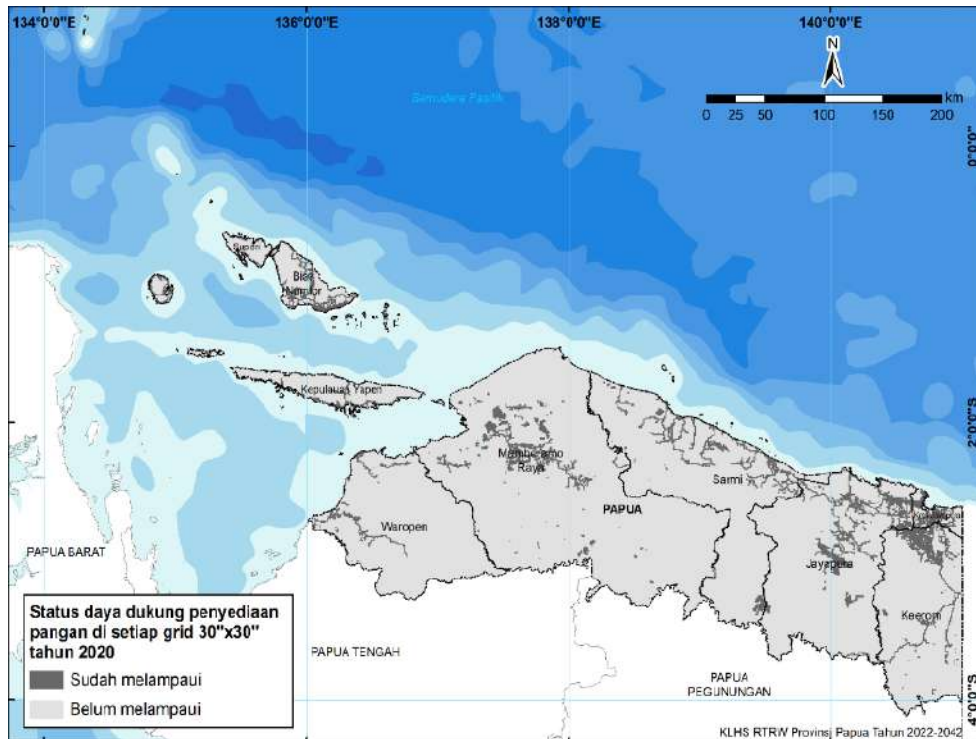
Gambar 0.15 Selisih ketersediaan bahan pangan di Provinsi Papua



Sumber: KLHS RTRWP Provinsi Papua Tahun 2023

Data ketersediaan bahan pangan yang digunakan berasal dari statistik dalam angka Provinsi Papua tahun 2023 (menunjukkan hasil produksi 2022). Bahan pangan yang diperhitungkan merupakan bahan pangan yang produksinya terdapat pada data tersebut. Dalam hal ini, hasil perhitungan akumulatif yang menunjukkan bahwa Provinsi Papua telah mengalami defisit pangan, dapat mengindikasikan perlunya pendataan produksi pangan yang lebih memperhatikan pangan lokal daerah Provinsi Papua, misalnya sagu dan perikanan tangkap, serta dapat juga dari bahan pangan yang diperoleh dari hutan.

Gambar 0.16 Status daya dukung penyedia bahan pangan di Provinsi Papua



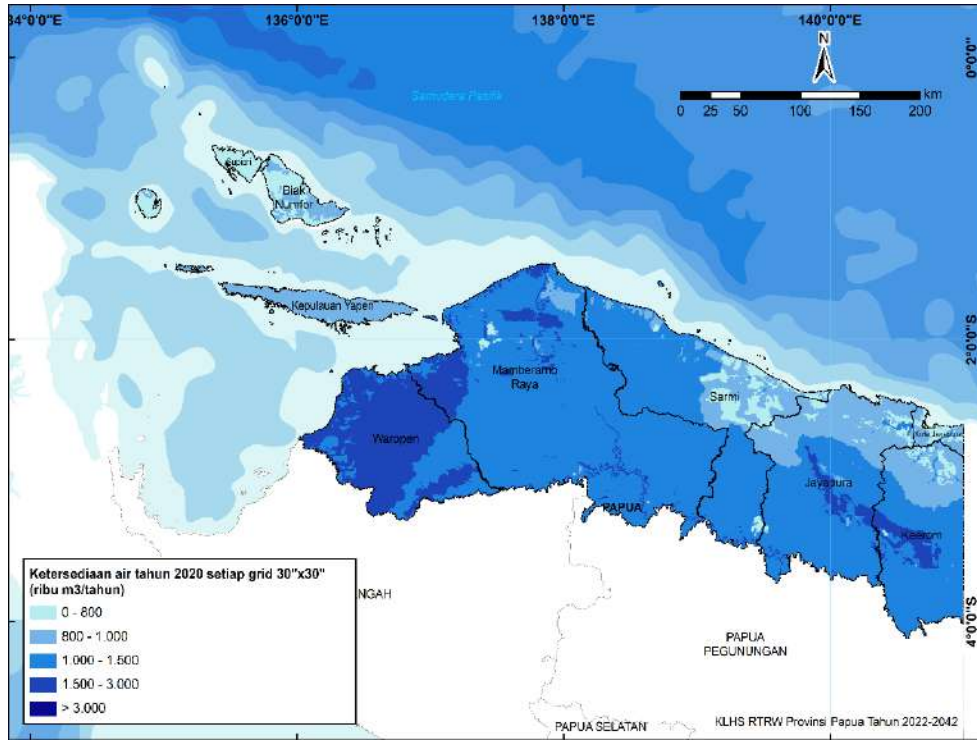
Sumber: KLHS RTRWP Provinsi Papua Tahun 2023

2) Ambang Batas dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyediaan Air Bersih

Ketersediaan air di Provinsi Papua dihitung menggunakan data volume air per wilayah distrik dan disebarakan dengan menggunakan metode pembobotan berdasarkan Indeks Jasa Ekosistem Penyedia Air. Sementara nilai kebutuhan untuk air dihitung berdasarkan kebutuhan air bersih untuk domestik per kapita dan tutupan lahan. Secara umum, ketersediaan air di Provinsi Papua cukup melimpah dan tersebar merata, kecuali untuk beberapa daerah seperti pada bagian timur Kab. Sarmi, bagian utara Kab. Jayapura dan Kab. Keerom, serta pada Kota Jayapura yang memiliki jumlah ketersediaan air lebih sedikit.

Kebutuhan air yang tinggi berada pada bagian utara Kab. Jayapura dan Kab. Keerom, serta pada Kota Jayapura. Kebutuhan air secara lebih rinci baik kebutuhan air domestik, kebutuhan air lahan, serta kebutuhan air total dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

Gambar 0.17 Ketersediaan air bersih di Provinsi Papua tahun 2022



Sumber: KLHS RTRWP Provinsi Papua Tahun 2023

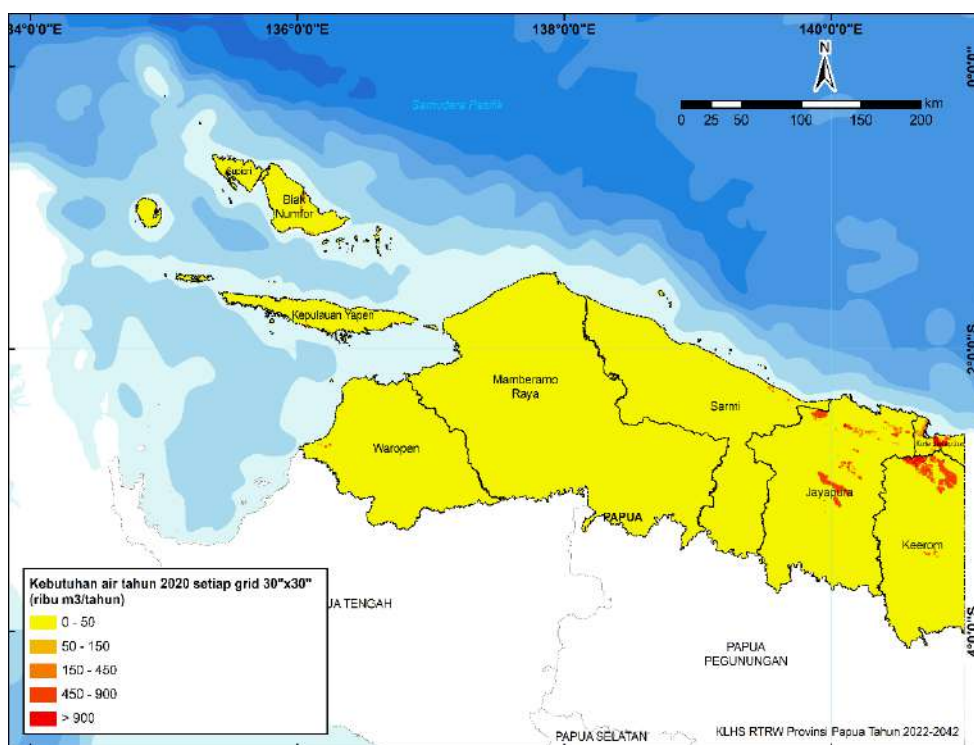
Tabel 0.19 Nilai kebutuhan air lahan dan air domestik di Provinsi Papua tahun 2022

Kabupaten/Kota	Kebutuhan Air Lahan (m ³)	Kebutuhan Air Domestik (m ³)	Kebutuhan Total
Biak Numfor	11.235.328,29	11.634.278,40	22.869.606,69
Jayapura	280.995.826,44	14.354.323,20	295.350.149,64
Keerom	398.863.655,86	5.328.979,20	404.192.635,06
Kepulauan Yapen	4.528.736,78	9.732.873,60	14.261.610,38
Kota Jayapura	105.297.726,49	34.423.833,60	139.721.560,09
Mamberamo Raya	84.601,70	3.157.142,40	3.241.744,12
Sarmi	9.636.094,84	3.618.432,00	13.254.526,84
Supiori	1.801.904,78	1.948.838,40	3.750.743,18
Waropen	6.687.271,94	2.925.504,00	9.612.775,94
Provinsi Papua	819.131.147,12	87.124.204,80	906.255.351,92

Sumber: KLHS RTRWP Provinsi Papua Tahun 2023

Pada penentuan daya dukung air, dibutuhkan nilai selisih antara ketersediaan dan kebutuhan. Apabila diakumulasi berdasarkan kabupaten/kota, tidak ada wilayah yang memiliki selisih negatif. Hal ini menunjukkan ketersediaan air yang melimpah di daerah tersebut dan juga kebutuhan air yang rendah. Nilai ketersediaan, kebutuhan, dan selisih air di Provinsi Papua dirangkum pada tabel 3.34, terlihat bahwa selisih antara ketersediaan dan kebutuhan air bersih paling besar berada di wilayah Kab. Mamberamo Raya dan Kab. Waropen, hal ini karena kedua kabupaten tersebut memiliki ketersediaan air yang melimpah.

Gambar 0.18 Kebutuhan air bersih di Provinsi Papua tahun 2022



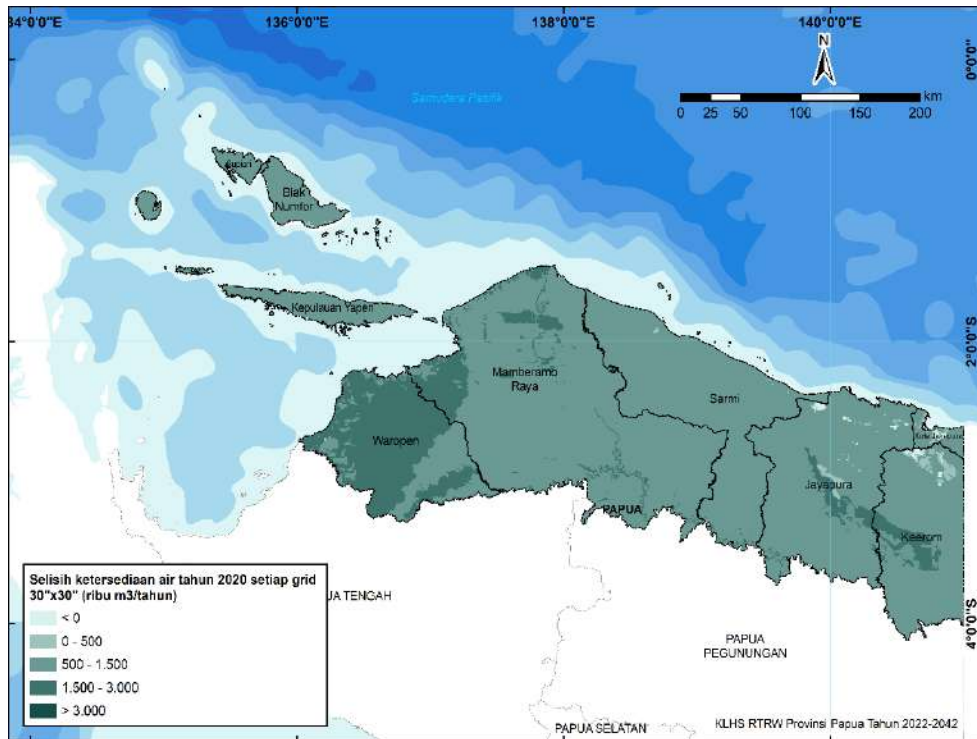
Sumber: KLHS RTRWP Provinsi Papua Tahun 2023

Tabel 0.20 Nilai ketersediaan, kebutuhan, selisih air di Provinsi Papua tahun 2022

Kabupaten/ Kota	Ketersediaan Air (m ³)	Kebutuhan Total (m ³)	Selisih Ketersediaan (m ³)	Ambang Batas (m ³)	Luas wilayah berstatus belum melampaui (%)
Biak Numfor	2,278,973,814.64	22,869,606.69	2,256,104,207.95	26,246,973.22	100.00
Jayapura	19,191,718,228.10	295,350,149.64	18,896,368,078.46	218,874,101.87	99.39
Keerom	13,882,505,884.90	504,192,635.06	13,378,313,249.84	156,060,673.95	99.15
Kepulauan Yapen	3,058,432,688.92	14,261,610.38	3,044,171,078.54	35,346,110.56	99.93
Kota Jayapura	831,085,245.54	139,721,560.09	691,363,685.45	8,400,318.51	94.50
Mamberamo Raya	44,059,418,196.60	3,241,744.12	44,056,176,452.48	509,945,990.68	100.00
Sarmi	18,086,869,743.80	13,254,526.84	18,073,615,216.96	209,227,241.31	99.99
Supiori	6,099,438,826.34	3,750,743.18	6,095,688,083.16	70,574,501.41	99.89
Waropen	20,850,504,692.20	9,612,775.94	20,840,891,916.26	251,247,886.81	99.98
Provinsi Papua	128,338,947,321.04	1,006,255,351.94	127,332,691,969.10		

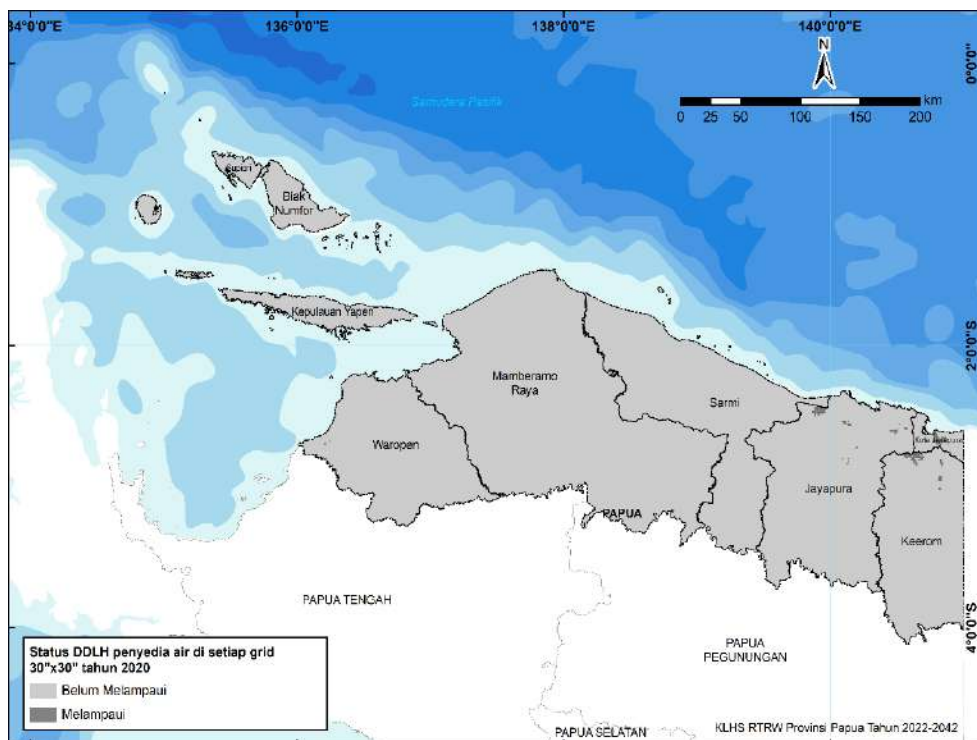
Sumber: KLHS RTRWP Provinsi Papua Tahun 2023

Gambar 0.19 Selisih ketersediaan air bersih di Provinsi Papua tahun 2022



Sumber: KLHS RTRWP Provinsi Papua Tahun 2023

Gambar 0.20 Status daya dukung penyedia air di Provinsi Papua tahun 2022



Sumber: KLHS RTRWP Provinsi Papua Tahun 2023

Penentuan status DLLH air dianalisis melalui nilai ambang batas yang dibandingkan dengan jumlah populasi di setiap grid. Apabila jumlah populasi pada grid tersebut lebih banyak dibandingkan nilai ambang batasnya, maka status DLLH daerah tersebut telah melampaui ambang batas, dan sebaliknya. Berdasarkan hasil penghitungan ambang batas (tabel 3.34) dapat disimpulkan bahwa daerah dengan ambang batas lebih rendah berada pada beberapa bagian di Provinsi Papua meliputi bagian utara, terutama di Kota Jayapura. Daerah-daerah dengan nilai ambang batas

yang rendah merupakan daerah yang rentan terhadap kelangkaan air di masa mendatang, khususnya jika terdapat pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi yang signifikan serta adanya dampak perubahan iklim.

Status daya dukung DDLH air dihitung berdasarkan selisih ambang batas dengan jumlah penduduk. Dari hasil perhitungan, diperoleh bahwa hampir seluruh wilayah di Provinsi Papua memiliki status daya dukung air yang belum melampaui ambang batas (99,74%). Hanya sebagian kecil wilayah pada bagian utara Kab. Jayapura dan Kab. Keerom serta pada Kota Jayapura yang status daya dukung airnya telah melampaui. Hal tersebut ditunjukkan oleh blok abu-abu tua pada peta sebaran status daya dukung air di Provinsi Papua.

2.1.2 Aspek Demografi

Jumlah penduduk di Provinsi Papua sejak tahun 2017 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan. Jumlah penduduk pada tahun 2017 adalah sebanyak 823.494 jiwa dan meningkat menjadi 1.034.956 jiwa pada tahun 2022. Kota Jayapura mengalami peningkatan jumlah penduduk lebih banyak dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Papua hingga tahun 2022. Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua mengalami kenaikan jumlah penduduk hingga tahun 2022. Kabupaten Biak Numfor mengalami peningkatan jumlah penduduk hingga tahun 2019, namun mengalami penurunan jumlah penduduk pada tahun 2020. Meskipun begitu, jumlah penduduk terus mengalami kenaikan hingga tahun 2022.

Tabel 0.21 Jumlah Penduduk di Provinsi Papua Tahun 2016-2022

No	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jayapura	125.975	128.587	131.802	166.171	168.476	171.331
2	Kepulauan Yapen	95.007	97.412	101.204	112.676	114.210	116.107
3	Biak Numfor	144.697	148.404	152.401	134.650	135.231	135.796
4	Sarmi	38.210	39.406	40.515	41.515	41.849	42.233
5	Keerom	55.018	55.799	57.100	61.623	62.157	62.777
6	Waropen	29.480	30.612	31.514	33.943	34.414	34.997
7	Supiori	19.104	20.018	20.710	22.547	22.860	23.247
8	Mamberamo Raya	22.313	23.307	24.086	36.483	36.989	37.616
9	Kota Jayapura	293.690	297.775	300.192	398.478	404.004	410.852
Provinsi Papua		823.494	841.320	859.524	1.008.086	1.020.190	1.034.956

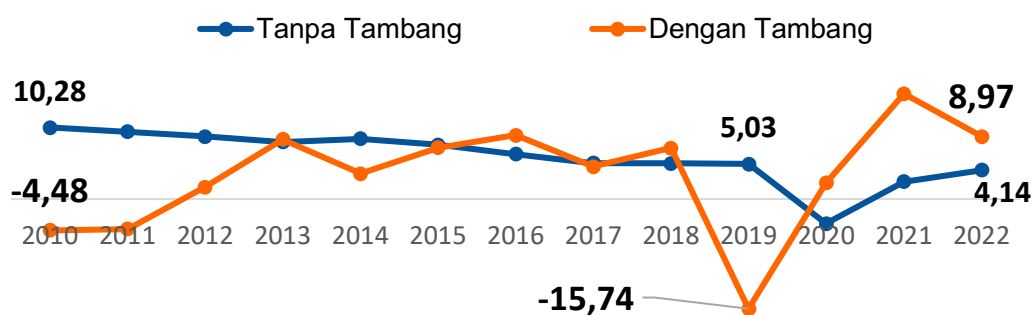
Sumber: BPS Provinsi Papua, 2021

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB digunakan untuk melihat proporsi lapangan usaha untuk mengidentifikasi sektor basis dan PDRB ADHK digunakan untuk melihat proyeksi dari pertumbuhan ekonomi.

Gambar 0.21 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Tahun 2015-2022



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2022 (data diolah)

Berdasarkan Gambar 0.21, diketahui bahwa laju pertumbuhan PDRB ADHK dengan tambang cenderung fluktuatif. Pada tahun 2021 sebesar 15,11%, walaupun di tahun 2022 mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan menjadi 8,97%. Sedangkan, laju pertumbuhan PDRB tanpa tambang mengalami penurunan pada 2010-2020 hingga mencapai -3,40% dan mengalami peningkatan pada 2020-2022 menjadi 4,14%.

2.2.2 Struktur Ekonomi

Adapun perkembangan dan kontribusi PDRB ADHB menurut lapangan usaha di Provinsi Papua ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 0.22 PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Papua Tahun 2019-2022 (Juta Rupiah)

No.	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**	Rerata
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	9.982,09	10.116,43	10.509,00	11.255,07	11.820,46	10.736,61
B.	Pertambangan dan Penggalian	553,31	576,02	608,41	633,77	680,81	610,47
C.	Industri Pengolahan	2.117,03	2.145,92	2.213,40	2.249,95	2.397,76	2.224,81
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	43,52	43,00	44,89	50,44	51,80	46,73
E.	Limbah, dan Daur Ulang	75,20	73,23	76,11	79,91	82,04	77,30
F.	Konstruksi	13.559,58	14.109,53	14.993,24	15.743,08	16.682,48	15.017,58
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.672,24	9.962,33	10.493,52	11.844,94	13.041,48	11.002,90
H.	Transportasi dan Pergudangan	6.672,82	4.295,25	4.749,49	5.752,60	6.578,45	5.609,72
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.045,98	862,68	930,23	987,71	1.040,55	973,43
J.	Informasi dan Komunikasi	3.894,21	4.245,79	4.500,23	4.789,77	4.983,60	4.482,72
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.205,38	2.173,68	2.283,33	2.660,57	3.061,82	2.476,96
L.	Real Estat	3.156,70	3.212,64	3.431,25	3.572,66	3.838,07	3.442,27

No.	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**	Rerata
M, N	Jasa Perusahaan	1.617,00	1.613,80	1.696,73	1.758,73	2.009,33	1.739,12
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	9.077,28	9.229,80	9.248,40	9.274,97	9.483,70	9.262,83
P.	Jasa Pendidikan	.073,21	.072,82	1.982,67	1.981,68	2.186,61	2.059,40
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.854,01	2.048,21	2.197,22	2.209,84	2.317,25	2.125,31
R, S, T,U	Jasa Lainnya	1.228,15	1.258,25	1.327,87	1.414,27	1.481,71	1.342,05
	PDRB	68.827,70	68.039,39	71.286,01	76.259,96	81.737,92	73.230,20

Sumber: BPS Provinsi Papua

Berdasarkan PDRB ADHB menurut lapangan usaha di Provinsi Papua tahun 2019-2023, diketahui bahwa sektor konstruksi menjadi sektor dengan distribusi tertinggi (20,50%) yang diikuti dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (14,67%), dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (14,98%).

Tabel 0.23 Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Papua Tahun 2017-2022 (%)

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14,50	14,87	14,74	14,76	14,46	14,67
B	Pertambangan dan Penggalan	0,80	0,85	0,85	0,83	0,83	0,83
C	Industri Pengolahan	3,08	3,15	3,10	2,95	2,93	3,04
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,06	0,07	0,06	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,11
F	Konstruksi	19,70	20,74	21,03	20,64	20,41	20,50
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,05	14,64	14,72	15,53	15,96	14,98
H	Transportasi dan Pergudangan	9,69	6,31	6,66	7,54	8,05	7,65
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,52	1,27	1,30	1,30	1,27	1,33
J	Informasi dan Komunikasi	5,66	6,24	6,31	6,28	6,10	6,12
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,20	3,19	3,20	3,49	3,75	3,37
L	Real Estate	4,59	4,72	4,81	4,68	4,70	4,70
M,N	Jasa Perusahaan	2,35	2,37	2,38	2,31	2,46	2,37
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13,19	13,57	12,97	12,16	11,60	12,70
P	Jasa Pendidikan	-	-	2,78	2,60	2,68	2,69
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,69	3,01	3,08	2,90	2,83	2,90
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,78	1,85	1,86	1,85	1,81	1,83
	PDRB	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Papua

Berdasarkan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha, diketahui bahwa sektor dengan kontribusi rata-rata terbesar adalah sektor konstruksi (18,13%) yang diikuti dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (14,59%), dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (14,91%).

Tabel 0.24 PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Papua Tahun 2017-2022

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.743,57	6.731,11	6.840,53	6.887,27	7.017,87
B	Pertambangan dan Penggalian	412,54	422,50	434,87	439,18	451,53
C	Industri Pengolahan	1.431,62	1.416,91	1.433,33	1.399,28	1.418,04
D	Pengadaan Listrik dan Gas	28,51	28,34	29,26	32,31	33,80
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	57,57	57,26	58,23	61,04	61,08
F	Konstruksi	8.109,17	8.167,34	8.551,48	8.701,73	9.023,20
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.583,75	6.541,96	6.826,25	7.334,66	7.729,26
H	Transportasi dan Pergudangan	3.673,26	2.467,80	2.679,69	2.979,10	3.240,90
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	682,74	545,72	577,34	573,98	592,05
J	Informasi dan Komunikasi	3.137,81	3.392,46	3.473,06	3.587,08	3.724,89
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.450,55	1.419,41	1.449,21	1.536,17	1.733,02
L	Real Estate	2.157,70	2.177,51	2.265,89	2.456,93	2.600,14
M,N	Jasa Perusahaan	1.178,18	1.111,54	1.170,44	1.178,90	1.274,86
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.488,34	6.292,42	6.299,17	6.147,17	6.239,86
P	Jasa Pendidikan	1.764,97	1.743,31	1.713,04	1.734,90	1.812,42
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.388,81	1.465,16	1.513,24	1.449,49	1.502,43
R,S,T,U	Jasa lainnya	983,41	971,86	1.005,09	1.056,41	1.097,38
	PDRB	41.698.326,12	46.272,50	44.952,63	46.320,11	47.555,61

Sumber: BPS Provinsi Papua

Tabel 0.25 Distribusi PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Papua Tahun 2017-2022 (%)

No	Lapangan usaha	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14,57	14,97	14,77	14,48	14,16	14,59
B	Pertambangan dan Penggalian	0,89	0,94	0,94	0,92	0,91	0,92
C	Industri Pengolahan	3,09	3,15	3,09	2,94	2,86	3,03
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,13	0,13	0,13	0,12	0,13
F	Konstruksi	17,52	18,17	18,46	18,30	18,21	18,13
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,23	14,55	14,74	15,42	15,60	14,91
H	Transportasi dan Pergudangan	7,94	5,49	5,79	6,26	6,54	6,40
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,48	1,21	1,25	1,21	1,19	1,27
J	Informasi dan Komunikasi	6,78	7,55	7,50	7,54	7,52	7,38
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,13	3,16	3,13	3,23	3,50	3,23
L	Real Estate	4,66	4,84	4,89	5,17	5,25	4,96
M,N	Jasa Perusahaan	2,55	2,47	2,53	2,48	2,57	2,52

No	Lapangan usaha	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	14,02	14,00	13,60	12,93	12,59	13,43
P	Jasa Pendidikan	3,81	3,88	3,70	3,65	3,66	3,74
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,00	3,26	3,27	3,05	3,03	3,12
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,13	2,16	2,17	2,22	2,21	2,18
PDRB		100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

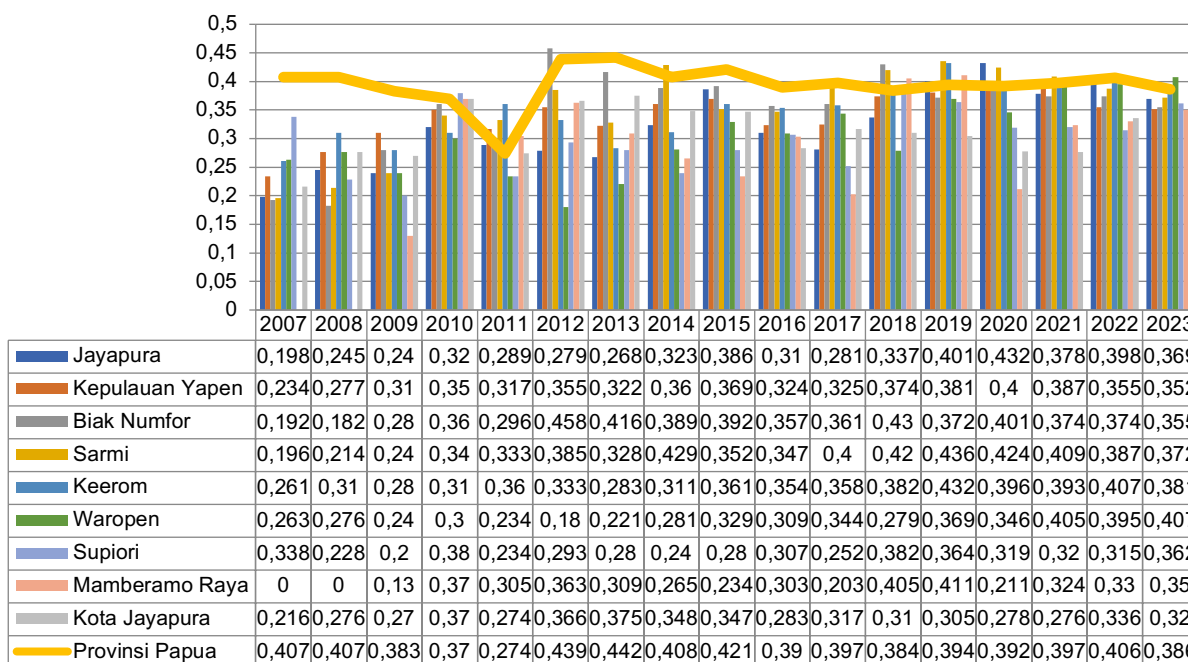
Sumber: BPS Provinsi Papua

2.2.3 Indeks Gini

Indeks Gini merupakan suatu metode atau indikator untuk menunjukkan tingkat ketimpangan atau kesenjangan pengeluaran masyarakat pada suatu wilayah tertentu. Indeks Gini menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua dari tahun 2007-2021. Semakin kecil rasio gini menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi semakin menurun antar masyarakat. Sebaliknya semakin tinggi rasio gini, menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi antar masyarakat semakin tinggi.

Tahun 2011 menjadi tahun dengan rasio gini terendah di Provinsi Papua yaitu sebesar 0,274. Sementara tahun 2013 menjadi tahun dengan capaian rasio gini tertinggi yaitu sebesar 0,442. Berdasarkan Gambar 0.22, terlihat bahwa indeks gini pada mayoritas kabupaten/kota di Provinsi Papua pada tahun 2023 masih berada di bawah garis provinsi terkecuali pada Kabupaten Waropen.

Gambar 0.22 Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2007-2023



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2022 (data diolah)

2.2.4 Tingkat Kemiskinan dan Daerah Tertinggal

Persentase penduduk miskin yang berada di Provinsi Papua mencapai 14,88 persen dari jumlah penduduk pada tahun 2021, capaian tersebut menunjukkan ada penurunan penduduk dengan kategori miskin jika dibandingkan pada tahun 2018

yang mencapai 18,33 persen. Kabupaten Supiori ditahun 2021 merupakan wilayah dengan persentase penduduk miskin tertinggi dengan 34,25 persen dari jumlah penduduk di Kabupaten Supiori, sedangkan Kota Jayapura ditahun yang sama merupakan wilayah dengan persentase penduduk miskin terendah mencapai 8,61 persen dari jumlah penduduk Kota Jayapura diikuti Kabupaten Jayapura yang mencapai 9,24 persen. Kedua daerah tersebut juga telah menunjukkan adanya penurunan penduduk dengan kategori miskin jika dibandingkan 3 tahun ke belakang.

Tabel 0.26 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021
1	Jayapura	13,37	13,04	12,38	9,24
2	Kepulauan Yapen	27	26,87	26,17	22,48
3	Biak Numfor	25,56	25,33	24,45	26,90
4	Sarmi	14,39	14,32	13,81	13,29
5	Keerom	16,85	16,73	16,27	14,96
6	Waropen	30,25	30,72	29,41	28,16
7	Supiori	38,77	38,48	36,72	34,25
8	Mamberamo Raya	29,78	28,90	28,18	19,03
9	Kota Jayapura	11,33	11,47	11,13	8,61
Provinsi Papua		18,33	18,31	17,71	14,88

Sumber: BPS Provinsi Papua

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, terdapat 4 (empat) kabupaten di Provinsi Papua yang termasuk dalam daftar Daerah Tertinggal, yaitu Kab. Keerom dan Kab. Mamberamo Raya di wilayah adat Mamta serta Kabupaten Waropen dan Kabupaten. Supiori di wilayah adat Saireri. Apabila merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, terdapat 5 (lima) penyebab ketertinggalan yaitu perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah/daerah tertentu.

Tabel 0.27 Daerah Tertinggal dan Penyebab Utama Ketertinggalan di Provinsi Papua

No	Kabupaten/ Kota	Penyebab Utama Ketertinggalan (Menurut Urutan)				
		1	2	3	4	5
1	Keerom	Aksesibilitas	Ekonomi	Keuangan	SDM	
	Mamberamo Raya	Aksesibilitas	Ekonomi	SDM		
2	Waropen	Aksesibilitas	Ekonomi	SDM	Karakteristik	Keuangan
	Supiori	Ekonomi	Aksesibilitas	Keuangan	Karakteristik	SDM

Sumber: Strategis Daerah, Tahun 2022

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 Tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menetapkan 54 kampung di Provinsi Papua sebagai kampung yang

diprioritaskan dalam sasaran pembangunan kampung dan pembangunan daerah tertinggal serta daerah transmigrasi yang terdiri dari 8 (delapan) kampung dengan status Berkembang dan 46 kampung dengan status tertinggal.

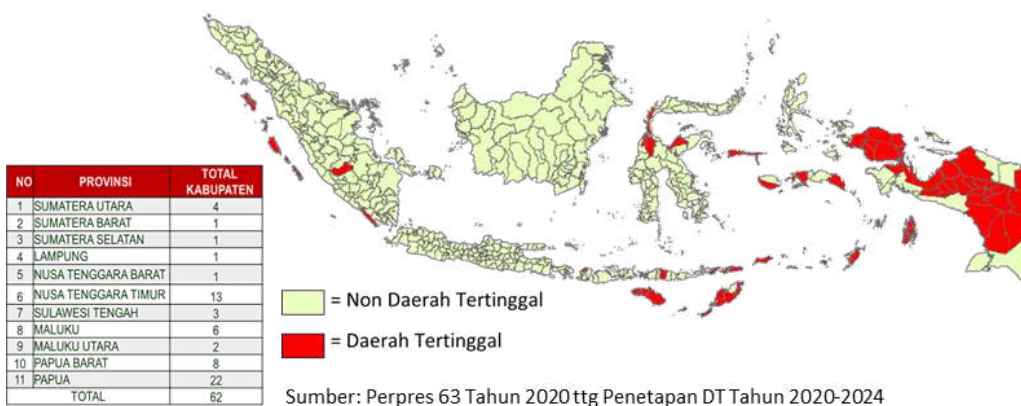
Tabel 0.28 Kampung Prioritas Sasaran Pembangunan Kampung, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Wilayah Adat	Kabupaten	Distrik	Kampung	Status Perkembangan	
MAMTA	Keerom	Web	Umuaf	Tertinggal	
	Keerom	Web	Dubu	Tertinggal	
	Keerom	Web	Yuruf	Tertinggal	
	Keerom	Senggi	Molof	Tertinggal	
	Keerom	Senggi	Senggi	Berkembang	
	Keerom	Senggi	Warlef	Tertinggal	
	Keerom	Senggi	Jabanda	Tertinggal	
	Keerom	Senggi	Woslay	Berkembang	
	Keerom	Waris	Kalimo	Tertinggal	
	Keerom	Waris	Yuwainda	Tertinggal	
	Keerom	Waris	Banda	Tertinggal	
	Keerom	Waris	Kalifam	Tertinggal	
	Keerom	Waris	Ampas	Tertinggal	
	Keerom	Arso	Sawyatami	Tertinggal	
	Keerom	Arso	UPT Pir III / Bagia	Tertinggal	
	Keerom	Arso	Ubiyau	Tertinggal	
	Keerom	Arso	Asiaman	Berkembang	
	Keerom	Arso Timur	Kriku	Tertinggal	
	Keerom	Skanto	UPT Arso XIV / Wulukubun	Berkembang	
	Keerom	Skanto	Arsopura	Berkembang	
	Keerom	Skanto	UPT Arso IX / Intaimilyan	Tertinggal	
	Mamberamo Raya	Waropen Atas	Barapasi	Tertinggal	
	Mamberamo Raya	Mamberamo Ilir	Trimuris	Tertinggal	
	Mamberamo Raya	Mamberamo Ilir	Warembori	Tertinggal	
	Mamberamo Raya	Mamberamo Tengah	Burmeso	Berkembang	
	Mamberamo Raya	Mamberamo Ulu	Dabra	Tertinggal	
	SAERERI	Waropen	Waropen Bawah	Sawara Jaya SP VI	Berkembang
		Waropen	Waropen Bawah	Waren Satu	Tertinggal
Waropen		Waropen Bawah	Waren Dua	Tertinggal	
Waropen		Waropen Bawah	Sarafambai	Tertinggal	
Waropen		Waropen Bawah	Nonomi	Tertinggal	
Waropen		Inggerus	Awaso	Tertinggal	
Waropen		Inggerus	Soimiangga	Tertinggal	
Waropen		Inggerus	Harapan Jaya SP II	Tertinggal	
Waropen		Inggerus	Demisa SP III	Tertinggal	
Waropen		Urei Faisei	Kemon Jaya SP V	Tertinggal	
Waropen		Urei Faisei	Apainabo	Tertinggal	
Waropen		Oudate	Botawa	Berkembang	
Waropen		Kirihi	Dairi	Tertinggal	

Wilayah Adat	Kabupaten	Distrik	Kampung	Status Perkembangan
	Waropen	Kirihi	Sooh	Tertinggal
	Waropen	Kirihi	Diwa	Tertinggal
	Waropen	Kirihi	Kawari	Tertinggal
	Waropen	Kirihi	Kuaisa	Tertinggal
	Waropen	Kirihi	Foida	Tertinggal
	Waropen	Kirihi	Dirou	Tertinggal
	Waropen	Kirihi	Antu Aru	Tertinggal
	Waropen	Kirihi	Wauka	Tertinggal
	Supiori	Supiori Selatan	Biniki	Tertinggal
	Supiori	Kepulauan Aruri	Rayori	Tertinggal
	Supiori	Supiori Utara	Warsa	Tertinggal
	Supiori	Supiori Utara	Warbor	Tertinggal
	Supiori	Supiori Barat	Koiryakam	Tertinggal
	Supiori	Supiori Barat	Wayori	Tertinggal
	Supiori	Supiori Timur	Douwbo	Tertinggal

Sumber: Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal No 126 Tahun 2017

Gambar 0.23 Sebaran Lokus Daerah Tertinggal Tahun 2020-2040

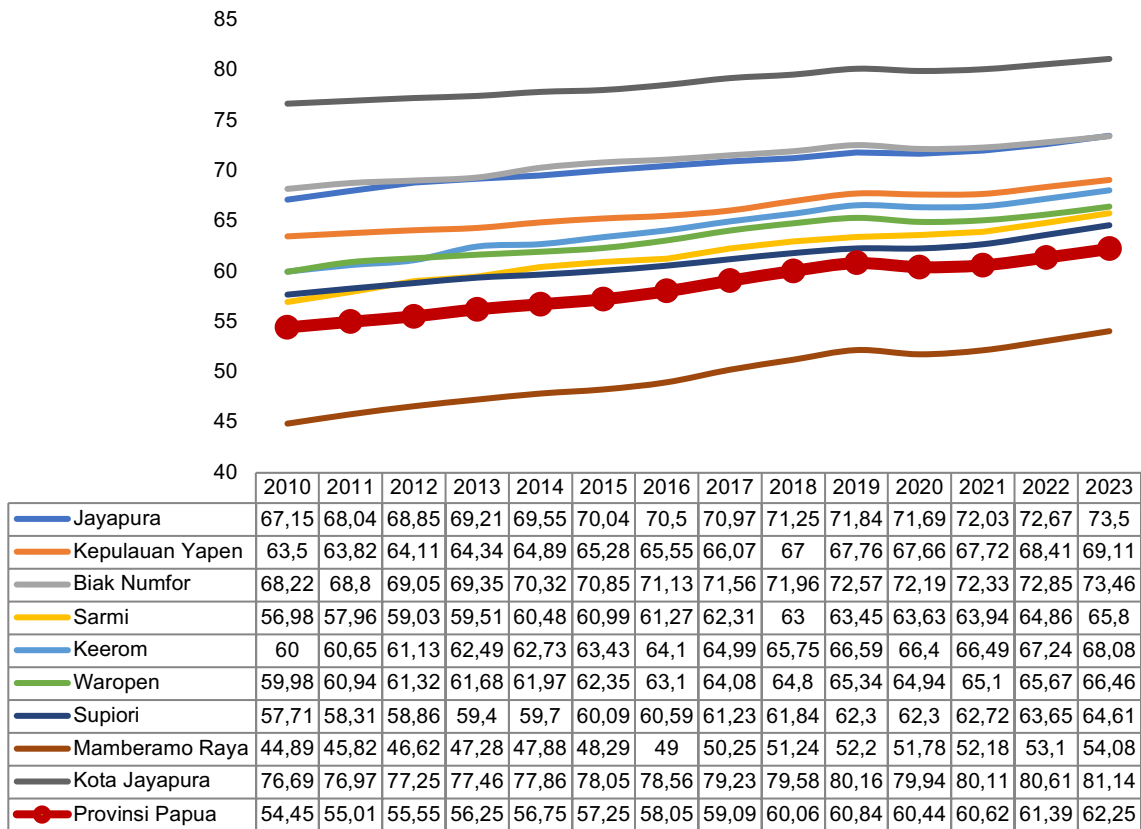


Sumber: Perpres 63 Tahun 2020 ttg Penetapan DT Tahun 2020-2024

2.2.5 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu indikator untuk mengukur capaian pembangunan manusia. IPM dihitung berdasarkan 3 dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan layak. Provinsi Papua menjadi provinsi dengan kecepatan pertumbuhan IPM tertinggi se-Indonesia pada kurun waktu 2010-2022. Hal tersebut membuat Provinsi Papua kini berstatus “sedang” dari status sebelumnya “rendah”. Berdasarkan gambar, Kota Jayapura menjadi kota di Provinsi Papua yang memiliki IPM tertinggi pada tahun 2010-2023, sementara Kabupaten Mamberamo Raya menjadi kabupaten dengan IPM terendah di Provinsi Papua sekaligus berada di bawah garis provinsi. IPM di Provinsi Papua menurut kabupaten/kota dari tahun 2010-2023 ditunjukkan pada Gambar 0.24.

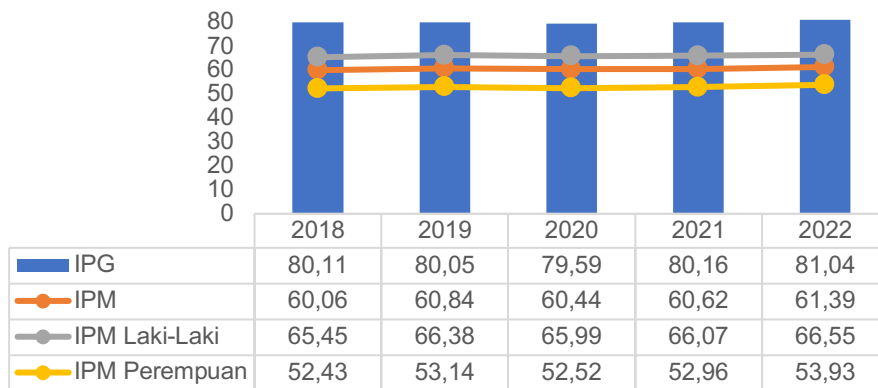
Gambar 0.24 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua 2010-2023



Sumber: BPS Provinsi Papua (data diolah)

Analisis Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan IPM Provinsi Papua berdasarkan gender diketahui bahwa IPM di Provinsi Papua pada tahun 2018-2022 didominasi oleh jenis kelamin laki-laki. Kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara jenis kelamin laki-laki maupun perempuan di Provinsi Papua digambarkan melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Gambar 0.25 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Gender dan IPG di Provinsi Papua Tahun 2018-2022

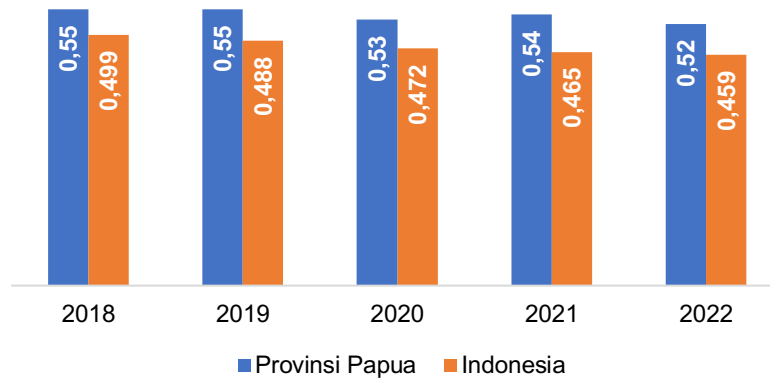


Sumber: BPS RI, 2023 (data diolah)

Diketahui juga bahwa IPG di Provinsi Papua masih berada di bawah angka 100 yang diartikan bahwa capaian Perempuan masih lebih rendah dibandingkan capaian laki-laki. Hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua mengalami peningkatan IPG

menuju 100 yang menunjukkan semakin berkurangnya ketimpangan yang terjadi antara Perempuan dan laki-laki di Provinsi Papua. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Provinsi Papua menunjukkan penurunan yang diartikan bahwa kesetaraan gender semakin membaik di Provinsi Papua

Gambar 0.26 Indeks Ketimpangan Gender di Provinsi Papua Tahun 2018-2022



Sumber: BPS RI, (data diolah)

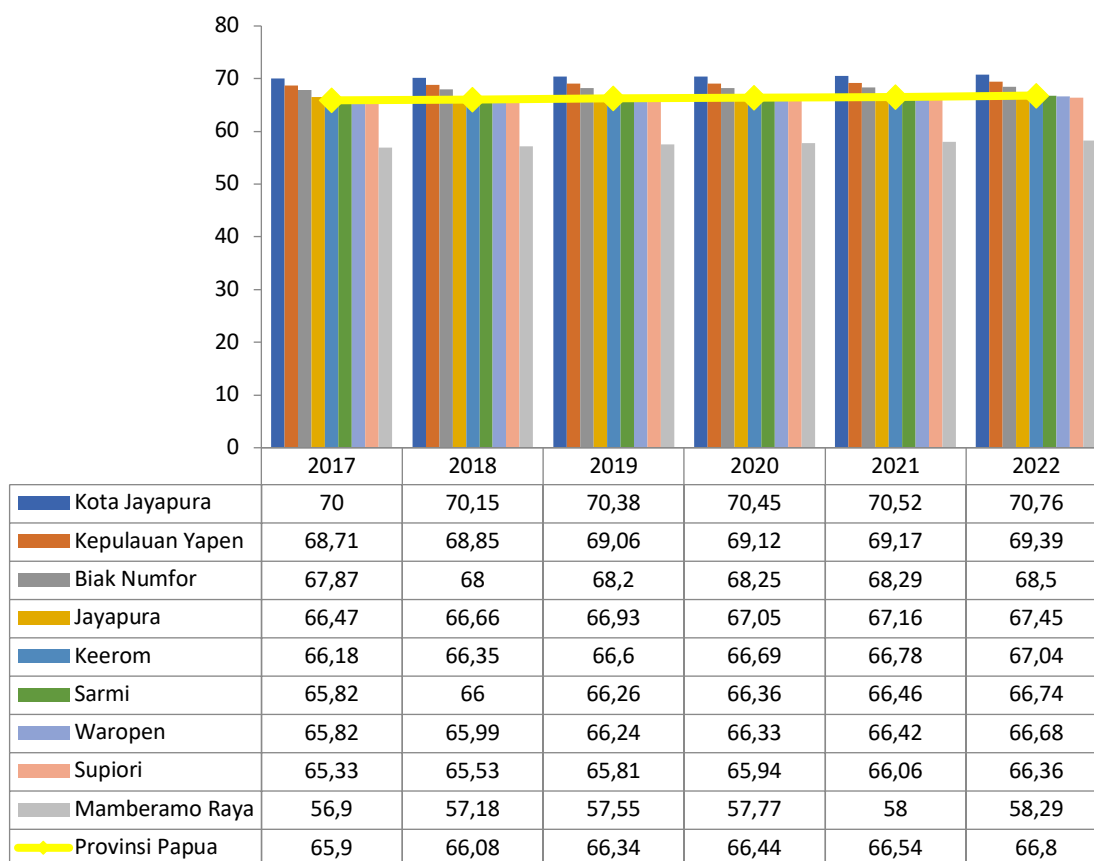
2.2.6 Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) di Provinsi Papua dapat dilihat secara umum maupun berdasarkan jenis kelamin. AHH merupakan indikator penting dalam kesehatan yang dapat mengindikasikan derajat kesehatan masyarakat umum pada waktu tertentu di level dampak sehingga AHH merupakan gambaran keadaan kesehatan di suatu wilayah.

Faktor-faktor penentu tinggi rendahnya AHH antara lain angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka kejadian penyakit-penyakit tertentu, ketersediaan pelayanan kesehatan, dan kondisi sosio-ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, AHH menjadi komponen di bidang kesehatan dalam menentukan angka Indeks Pembangunan Manusia. Semakin tinggi AHH menunjukkan bahwa terjadi peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan.

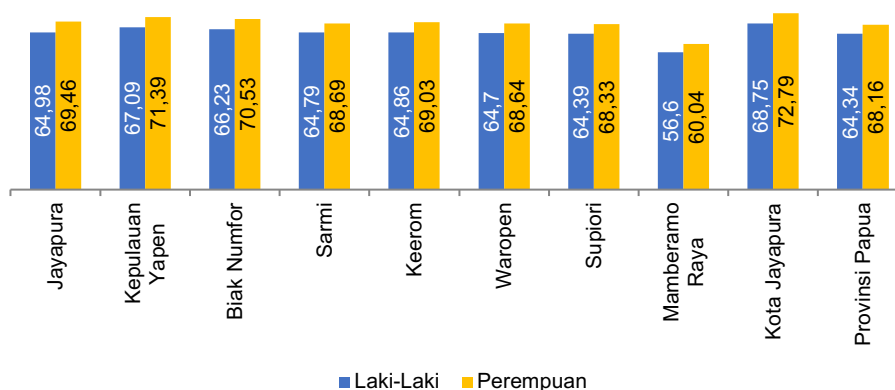
Berdasarkan Gambar 0.27, diketahui bahwa AHH baik secara provinsi maupun kabupaten/kota di Provinsi Papua mengalami kenaikan dari tahun 2017-2022. Kota Jayapura menjadi kota di Provinsi Jayapura dengan tingkat AHH tertinggi, sementara Kabupaten Mamberamo Raya menjadi kabupaten dengan AHH terendah di Provinsi Papua. Terdapat beberapa kabupaten dengan AHH di bawah garis provinsi pada tahun 2022 di antaranya adalah Kabupaten Sarmi, Waropen, Supiori, dan Mamberamo Raya.

Gambar 0.27 Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua 2017-2022



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2022

Gambar 0.28 Angka Harapan Hidup Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2022



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (data diolah)

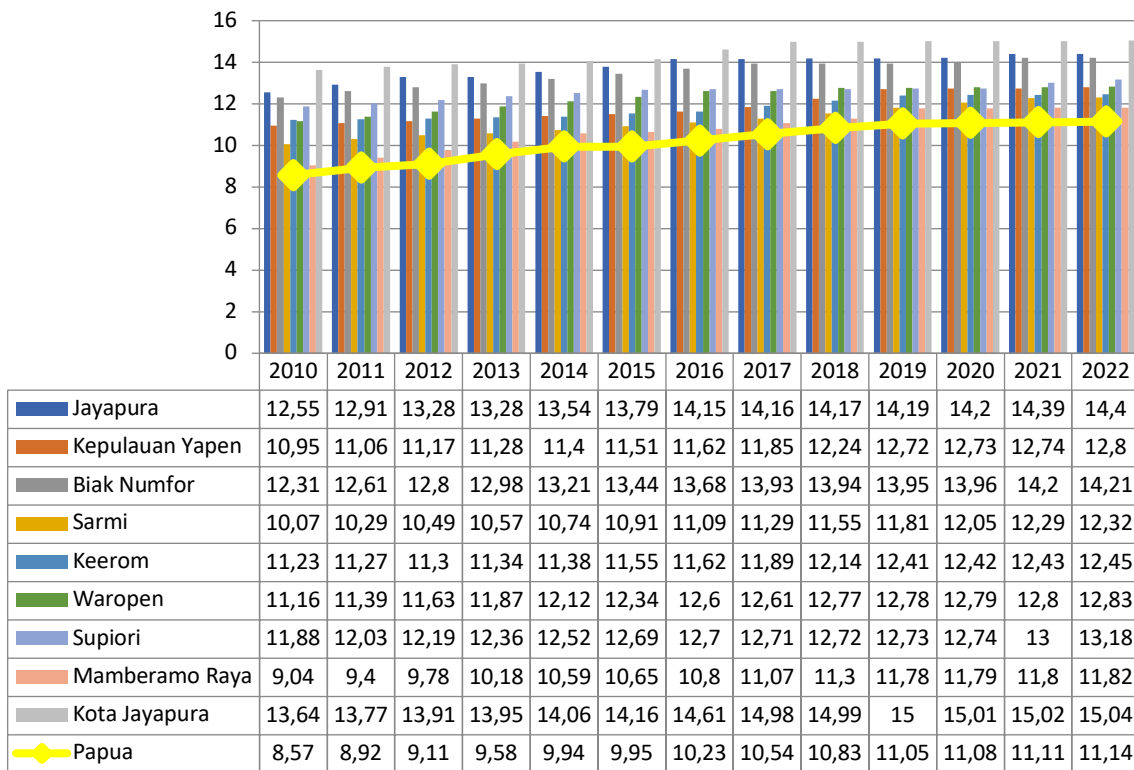
Berdasarkan Gambar 0.28, diketahui bahwa Kota Jayapura menjadi kabupaten/kota di Provinsi Papua dengan tingkat AHH tertinggi pada tahun 2022 untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan diikuti Kabupaten Kepulauan Yapen. Kabupaten Mamberamo Raya menjadi kabupaten dengan AHH terendah pada tahun 2022 di Provinsi Papua untuk kedua jenis kelamin. Berdasarkan gambar juga diketahui bahwa AHH pada tahun 2022 didominasi oleh jenis kelamin perempuan.

2.2.7 Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) di Provinsi Papua dapat dilihat secara umum maupun berdasarkan jenis kelamin. HLS Provinsi Papua secara umum digunakan untuk melihat lamanya tahun bersekolah yang diharapkan dapat kemudian hari dirasakan oleh anak usia 7 tahun ke atas.

Salah satu bentuk keberhasilan pembangunan pendidikan di suatu wilayah adalah Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS merupakan suatu indikator untuk menggambarkan tingkat ketersediaan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan bagi penduduk yang berada di usia sekolah oleh pemerintah. Berdasarkan kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar, HLS dihitung bagi penduduk dari usia 7 tahun ke atas.

Gambar 0.29 Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2010-2022 (Tahun)



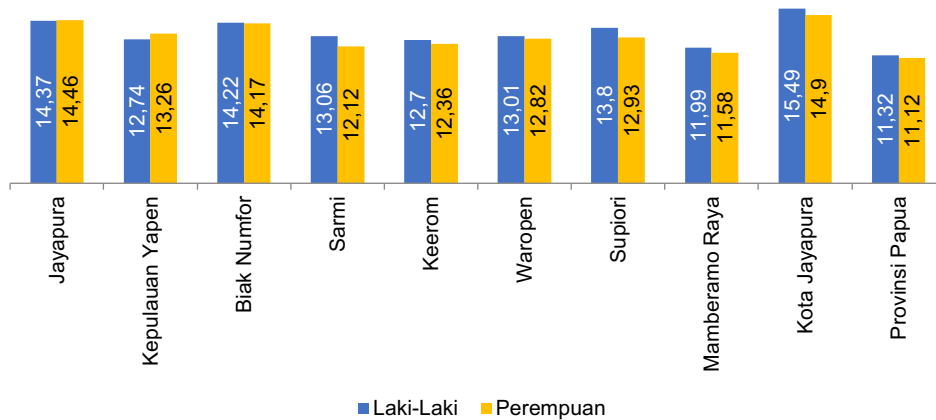
Sumber: BPS Provinsi Papua, 2022 (data diolah)

Berdasarkan Gambar 0.29, HLS di Provinsi Papua mengalami peningkatan dalam kurun waktu 10 tahun ke belakang. Hal tersebut membuktikan bahwa Provinsi Papua secara terus menerus meningkatkan ketersediaan dan kualitas pendidikan bagi penduduk usia sekolah di atas 7 tahun di Provinsi Papua. Kenaikan secara Provinsi juga sudah diikuti dengan kenaikan HLS pada masing-masing kabupaten/kota yang ada.

Berdasarkan Gambar 0.30, HLS Provinsi Papua ditunjukkan melalui masing-masing kabupaten/kota berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2022. Diketahui bahwa, Kota Jayapura menjadi kabupaten/kota di Provinsi Papua dengan angka HLS tertinggi

untuk kedua jenis kelamin diikuti Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Biak Numfor. Sebaliknya, Kabupaten Mamberamo Raya menjadi kabupaten di Provinsi Papua dengan angka HLS terendah pada tahun 2022. Angka HLS berdasarkan gender pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua diketahui telah berada di atas rata-rata provinsi.

Gambar 0.30 Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2022 (Tahun)



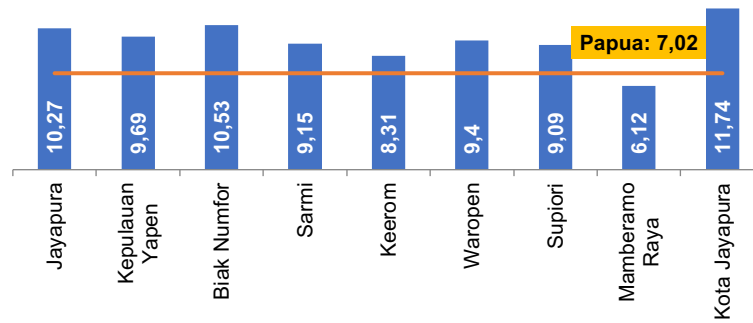
Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (data diolah)

2.2.8 Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan perhitungan jumlah tahun oleh penduduk dalam mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki, dan tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Rata-rata lama sekolah di Provinsi Papua pada tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 0.31.

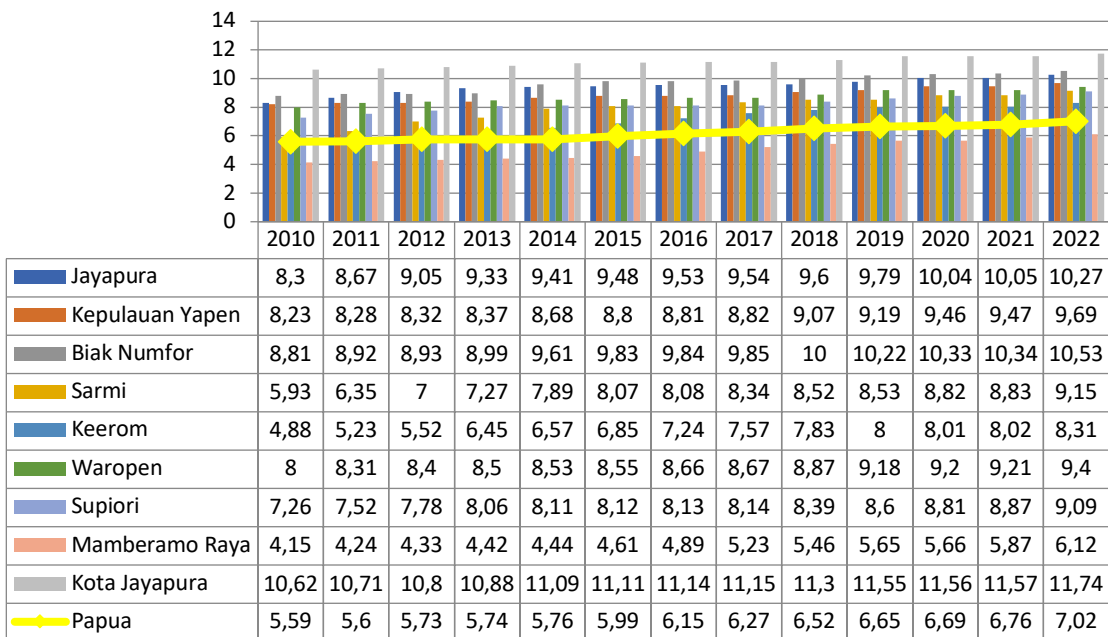
Berdasarkan Gambar 0.31, mayoritas kabupaten/kota di Provinsi Papua berada di atas rata-rata Provinsi. Masih terdapat kabupaten dengan RLS di bawah rata-rata Provinsi Papua yaitu Kabupaten Mamberamo Raya. RLS tertinggi di Provinsi Papua adalah Kota Jayapura. Berdasarkan Gambar 0.32, RLS di Provinsi Papua menurut masing-masing kabupaten/kota mengalami peningkatan selama lebih dari 10 tahun terakhir. Secara kabupaten/kota, Kota Jayapura memiliki RLS tertinggi selama lebih dari 10 tahun terakhir namun hal tersebut belum diikuti oleh Kabupaten Mamberamo Raya yang memiliki RLS masih di bawah RLS Provinsi Papua.

Gambar 0.31 Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2022 (Tahun)



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2022 (data diolah)

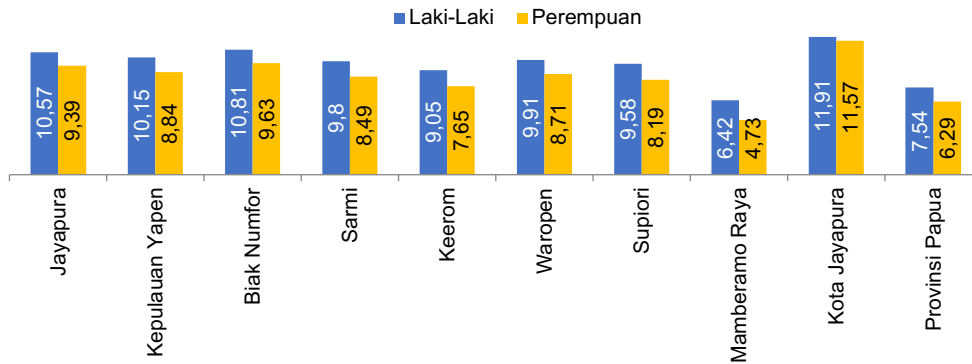
Gambar 0.32 Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua 2010-2022 (Tahun)



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2022 (data diolah)

Gambar 0.33 menunjukkan rata-rata lama sekolah (RLS) di Provinsi Papua berdasarkan gender. Angka RLS tertinggi di Provinsi Papua untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan pada tahun 2022 adalah Kota Jayapura. Sementara Kabupaten Mamberamo Raya menjadi kabupaten dengan RLS berdasarkan gender terendah di Provinsi Papua. Kabupaten Mamberamo Raya juga menjadi kabupaten dengan capaian RLS yang masih berada di bawah garis rata-rata secara provinsi. Berdasarkan Gambar 0.33 juga dapat dilihat bahwa jenis kelamin laki-laki cenderung mendominasi perolehan RLS berdasarkan gender di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Papua dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan. Apabila dibandingkan dengan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua, Kota Jayapura cenderung memiliki capaian RLS yang hampir serupa untuk kedua jenis kelamin.

Gambar 0.33 Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2022 (Tahun)

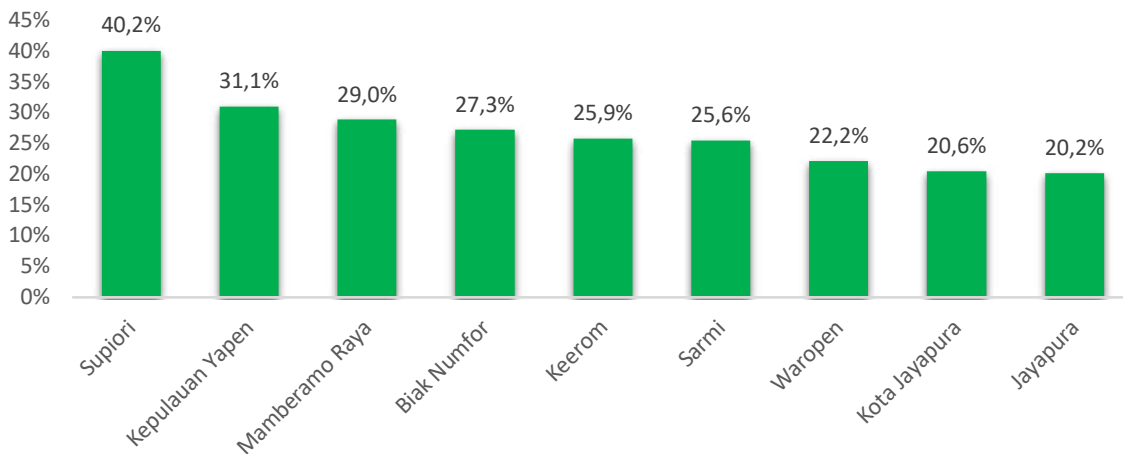


Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (data diolah)

2.2.9 Prevalensi Stunting

Stunting adalah keadaan tubuh yang pendek atau sangat pendek berdasarkan tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 standar deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan WHO yang disebabkan oleh asupan nutrisi yang tidak adekuat dan/atau infeksi berulang / kronis yang terjadi sejak bayi dalam kandungan hingga berusia 2 tahun, atau disebut 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK). Stunting berpotensi memperlambat perkembangan otak, dengan dampak jangka panjang berupa keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan risiko serangan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, hingga obesitas.

Gambar 0.34 Prevalensi Balita Stunting Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2022



Sumber: Survey Status Gizi Indonesia, 2022

Berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi balita stunting di 9 kabupaten di Provinsi Papua rata-rata sebesar 26,9%. Tidak tersedia angka prevalensi untuk Provinsi Papua pasca pembentukan DOB, sebab survei dilakukan sebelum pemekaran provinsi. Berdasarkan kabupaten, prevalensi tertinggi balita stunting terdapat di Kabupaten Supiori yakni 40,2%, dan terendah di Kabupaten Jayapura sebesar 20,2%. Dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua, hanya Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura yang angka balita

stuntingnya di bawah angka nasional, 21,6%. Tujuh kabupaten lainnya menunjukkan prevalensi di atas angka nasional.

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

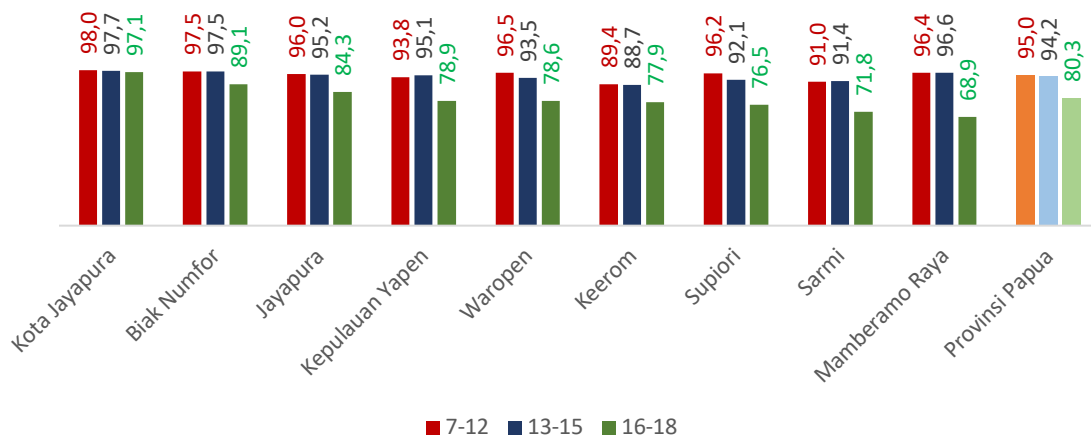
2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

2.3.1.1 Pendidikan

1. Partisipasi Sekolah

Tingkat keikutsertaan penduduk di Provinsi Papua dalam pendidikan formal yang dinyatakan dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) secara umum tidak jauh tertinggal daripada capaian nasional. APS menunjukkan jumlah dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk pada kelompok umur yang sama. APS cenderung menurun dengan makin tingginya kelompok umur penduduk yang juga menunjukkan jenjang Pendidikan yang sedang ditempuh. APS di Provinsi Papua pada tahun 2021 pada kelompok usia 7-12 tahun menunjukkan angka 95,0%, lebih rendah daripada angka nasional 99,1%. Sedangkan untuk kelompok umur 13-15 tahun sebesar 94,2% sedikit lebih rendah daripada angka nasional 95,8%. Sementara APS untuk kelompok usia 16-18 tahun, lebih tinggi daripada angka nasional yakni 80,3% (nasional: 70,7%). Jika dilihat angka-angka kabupaten/kota, APS tertinggi untuk ketiga kelompok umur terdapat di Kota Jayapura, sedangkan kabupaten dengan angka terendah yaitu Sarmi dan Mamberamo Raya. Berikut grafik yang menunjukkan APS per kabupaten/kota dan Provinsi.

Gambar 0.35 Angka Partisipasi Sekolah per Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2021



Sumber: BPS Provinsi Papua, Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua 2023, (Data diolah)

2. Fasilitas Pendidikan

Pada tahun ajaran 2021-2022, fasilitas pendidikan yang terdapat di Provinsi Papua adalah 237 unit TK/RA, 849 unit SD/MI, 279 unit SMP/MTs, 168 unit SMA/SMK/MA dan 30 unit Perguruan Tinggi. Sebaran fasilitas Pendidikan berdasarkan kabupaten/kota cukup merata, kecuali perguruan tinggi hanya terdapat di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Biak Numfor.

Tabel 0.29 Jumlah Fasilitas Pendidikan di Provinsi Papua Tahun Ajaran 2021/2022

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan				
		TK/RA	SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK/MA	PT
1	Jayapura	52	141	50	34	5
2	Kepulauan Yapen	14	124	36	18	3
3	Biak Numfor	18	167	55	26	6
4	Sarmi	6	65	19	9	0
5	Keerom	51	81	20	13	0
6	Waropen	2	54	18	8	0
7	Supiori	29	40	13	8	0
8	Mamberamo Raya	2	71	20	6	0
9	Kota Jayapura	63	106	48	46	16
Total		237	849	279	168	30

Sumber: Provinsi Papua Dalam Angka, 2023

2.3.1.2 Kesehatan

1. Angka Kematian Bayi

Salah satu indikator untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat adalah Angka Kematian Bayi (AKB) yang menunjukkan jumlah kematian bayi usia 0-11 bulan dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu. Menurut hasil Sensus Penduduk 2020, AKB di Provinsi Papua sebelum pemekaran Provinsi sebesar 38,2 per 1.000 Kelahiran Hidup. Angka ini lebih dari 2 kali lipat angka nasional yang besarnya 16,9 per 1.000 Kelahiran Hidup.

Tabel 0.30 Angka Kematian Bayi Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Jumlah kematian bayi	Jumlah kelahiran hidup	AKB
1	Sarmi	0	235	0.00
2	Mamberamo Raya	0	86	0.00
3	Kota Jayapura	10	4,955	2.02
4	Jayapura	12	2,041	5.88
5	Supiori	3	387	7.75
6	Biak Numfor	14	1,453	9.64
7	Keerom	13	793	16.39
8	Kepulauan Yapen	37	2,010	18.41
9	Waropen	2	30	66.67
Provinsi Papua		91	11,990	7.59

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2021

2. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian IBU (AKI) adalah indikator penting lainnya dalam mengukur derajat Kesehatan Masyarakat. AKI adalah banyaknya kematian perempuan sejak saat hamil hingga 42 hari sejak berakhirnya kehamilan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab- sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan Sensus Penduduk 2020, AKI di Provinsi Papua sebelum pembentukan DOB adalah 565 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini 3 kali lebih tinggi daripada angka nasional yakni 189 per 100.000 kelahiran hidup

Laporan Dinas Kesehatan Tahun 2021 menunjukkan angka yang lebih rendah daripada angka nasional. Sama halnya dengan angka kematian bayi, ada kemungkinan pencatatan dan pelaporan dari tingkat kabupaten ke bawah tidak cukup lengkap dan teratur sehingga terdapat perbedaan antara angka laporan Dinas Kesehatan dan angka hasil sensus penduduk.

Tabel 0.31 Angka Kematian Ibu Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Jumlah kematian ibu	Jumlah kelahiran hidup	AKI
1	Sarmi	0	235	0
2	Mamberamo Raya	0	86	0
3	Kota Jayapura	4	4,955	81
4	Biak Numfor	2	1,453	138
5	Kepulauan Yapen	3	2,010	149
6	Jayapura	4	2,041	196
7	Supiori	1	387	258
8	Keerom	4	793	504
9	Waropen	1	30	3333
Provinsi Papua		19	11,990	158

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2021

3. Fasilitas Kesehatan

Jumlah Rumah Sakit Umum dan Puskesmas di Provinsi Papua jika dilihat dari sebaran wilayah telah cukup memadai, yakni telah tersedia setidaknya 1 Rumah Sakit di setiap kabupaten, serta jumlah puskesmas berdasarkan jumlah distrik di tiap kabupaten/ kota. Tabel berikut menampilkan jumlah RS dan Puskesmas di tiap kabupaten pada tahun 2022.

Tabel 0.32 Jumlah Rumah Sakit Umum dan Puskesmas Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Tahun 2022

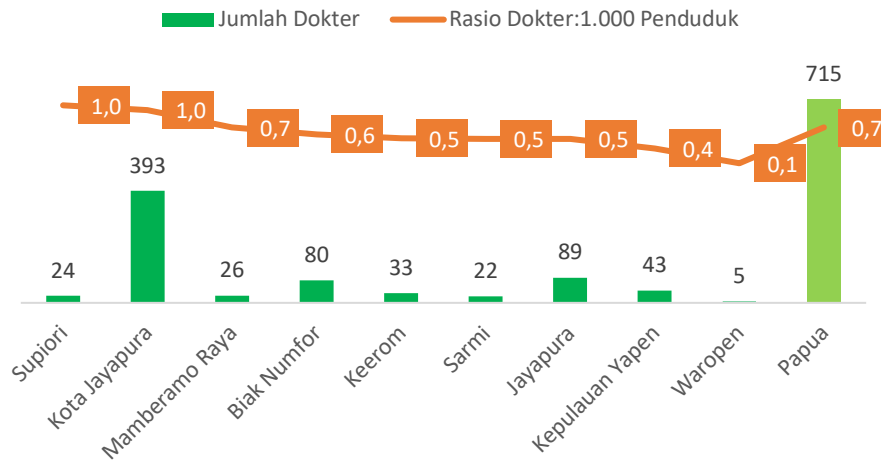
Kabupaten/Kota	Rumah Sakit Umum	Puskesmas
Jayapura	1	21
Kepulauan Yapen	1	15
Biak Numfor	3	21
Sarmi	1	11
Keerom	1	10
Waropen	1	10
Supiori	1	5
Mamberamo Raya	1	11
Kota Jayapura	8	13
Papua	18	117

Sumber: Provinsi Papua Dalam Angka, BPS, 2023

4. Tenaga Kesehatan

Sebaran tenaga Kesehatan berdasarkan kabupaten/kota menunjukkan jumlah yang belum memenuhi standar dibandingkan dengan jumlah penduduk di masing-masing wilayah. Dari segi kuantitas, tenaga perawat dan bidan menunjukkan jumlah yang cukup tinggi di semua kabupaten/ kota, seperti ditunjukkan oleh Tabel 0.33. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, untuk tenaga dokter umum baru 2 kabupaten yang telah memenuhi standar WHO yaitu 1 dokter untuk 1.000 penduduk, yakni Kabupaten Supiori dan Kota Jayapura. Dalam tingkat provinsi, rasio dokter per 1000 penduduk baru mencapai 0,7.

Gambar 0.36 Rasio Dokter Umum per 1.000 Penduduk Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Tahun 2022



Sumber: Provinsi Papua Dalam Angka, BPS, 2023 (diolah)

Tabel 0.33 Jumlah Tenaga Medis dan tenaga Kesehatan Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Tahun 2022

Kabupaten/ Kota	Dokter	Perawat	Bidan	Farmasi	Ahli Gizi
Jayapura	89	461	241	74	51
Kepulauan Yapen	43	411	134	36	28
Biak Numfor	80	556	266	58	30
Sarmi	22	196	139	20	13
Keerom	33	234	114	30	29
Waropen	5	133	38	7	8
Supiori	24	177	71	15	13
Mamberamo Raya	26	130	58	12	8
Kota Jayapura	393	1 293	305	193	95
Papua	715	2298	1366	445	275

Sumber: Provinsi Papua Dalam Angka, BPS, 2023

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jaringan Jalan dengan kondisi aksesibilitas yang paling baik di Provinsi Papua terdapat pada Kabupaten Jayapura dengan total 384,1 km (31,42%) dari total keseluruhan aksesibilitas yang ada di Provinsi Papua. Kabupaten Sarmi merupakan wilayah dengan aksesibilitas dan mobilitas yang paling rendah di Provinsi Papua dengan 37,7 km (3,08%) dari total keseluruhan aksesibilitas yang ada di Provinsi Papua (lihat Tabel 0.34).

Tabel 0.34 Panjang Jalan di Provinsi Papua (km)

Kabupaten/Kota	Aspal	Lainnya	Total
Jayapura	178	206.1	384.1
Kepulauan Yapen	58	117.01	175.01
Biak Numfor	164.4	7.6	172
Sarmi	0	37.7	37.7
Keerom	12	79.8	91.8
Waropen	45.5	57	102.5
Supiori	30	49.21	79.21
Mamberamo Raya	0	75.6	75.6
Kota Jayapura	96.38	8	104.38
Provinsi Papua	584.28	638.02	1.222.3

Sumber: BPS Provinsi Papua, Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua 2023 (Data diolah)

2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pembangunan rumah layak huni oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan tujuan menciptakan lingkungan yang sehat dan layak untuk memenuhi standar kesehatan perumahan bagi masyarakat terutama Orang Asli Papua. Jumlah rumah layak huni selama tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 0.35.

Tabel 0.35 Jumlah Rumah Layak Huni Provinsi Papua 2016-2022

No	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rumah Swadaya (Unit)		1000	1680	2700	1768	1840	380	1089
1	Biak Numfor	300	320	450	160	100	-	35
2	Jayapura	200	-	725	431	261	66	162
3	Keerom	-	-	615	190	100	129	177
4	Kepulauan Yapen	-	-	290	166	250	165	165
5	Mamberamo Raya	-	270	-	70	150	-	-
6	Sarmi	-	200	-	196	185	-	-
7	Supiori	200	550	-	180	100	-	-
8	Waropen	-	190	160	170	250	-	-
9	Kota Jayapura	300	150	460	205	444	20	550
Rumah Khusus		247	129	35	25	61	0	20
1	Biak Numfor	87	25	10	-	-	-	-
2	Jayapura	50	25	25	-	12	-	-
3	Keerom	-	-	-	25	-	-	-
4	Kepulauan Yapen	110	25	-	-	-	-	20
5	Mamberamo Raya	-	25	-	-	-	-	-
6	Sarmi	-	10	-	-	20	-	-
7	Supiori	-	19	-	-	-	-	-
8	Waropen	-	-	-	-	29	-	-
9	Kota Jayapura	-	-	-	-	-	-	-
Bantuan PSU							295	546
1	Biak Numfor						-	-
2	Jayapura						60	92
3	Keerom						-	-
4	Kepulauan Yapen						-	-
5	Mamberamo Raya						-	-
6	Sarmi						-	-
7	Supiori						-	-
8	Waropen						-	-
9	Kota Jayapura						235	454

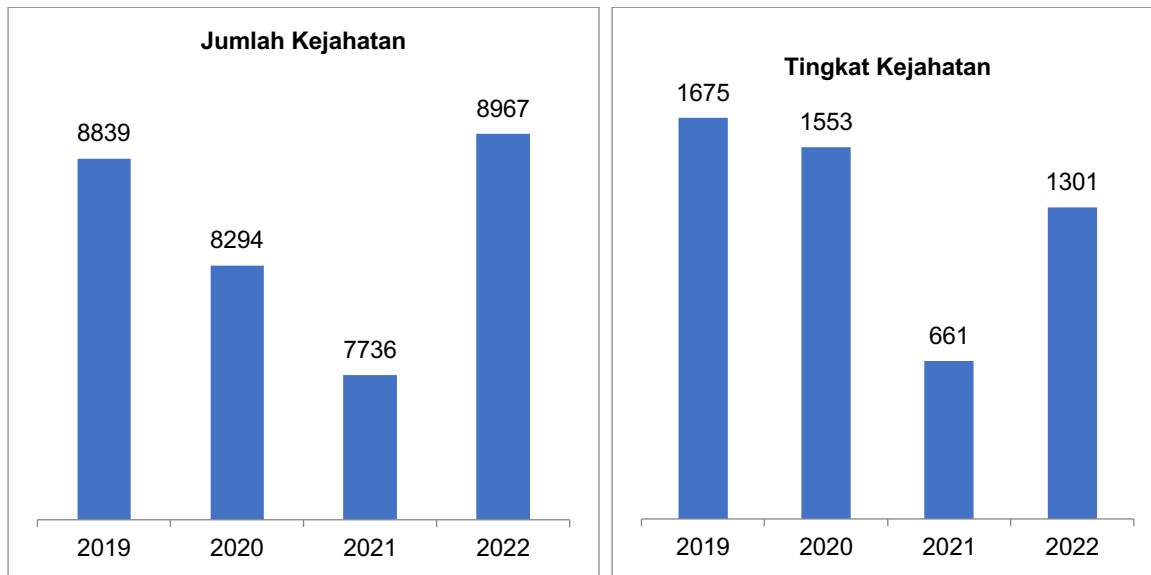
Sumber : data RTLH dari aplikasi e-RTLH yang sudah di input oleh Kabupaten/ Kota (Periode 12 September 2022)

2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Tindak Kejahatan

Perkembangan tindak kejahatan terlihat dari rasa aman yang di rasakan masyarakat. Data dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, yang diartikan bahwa semakin tinggi tindak pidana menunjukkan semakin tinggi risiko masyarakat terhadap tindak pidana yang merupakan indikasi bahwa masyarakat merasa semakin tidak aman. Dalam konteks lebih luas, terdapat indikator angka jumlah kejahatan (*crime total*), angka kejahatan per 100.000 penduduk (*crime rate*), dan selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (*crime clock*). Gambar 0.37 menunjukkan jumlah kejahatan dan tingkat risiko kejahatan di Papua tahun 2019-2022.

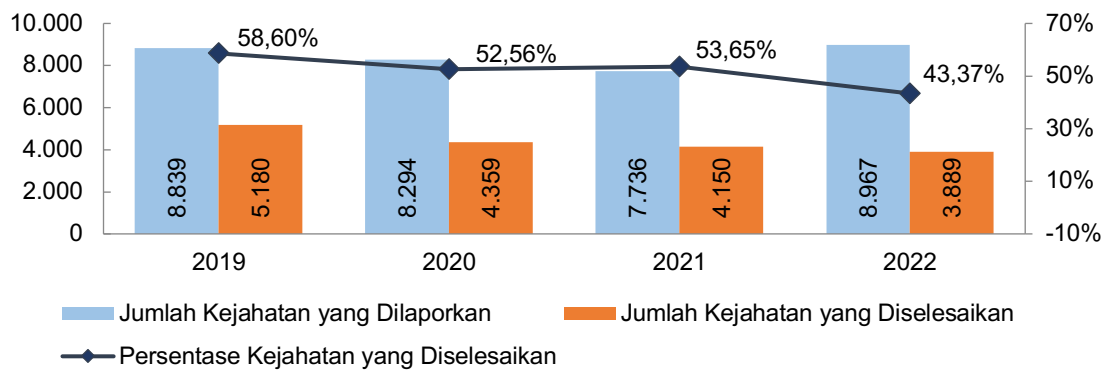
Gambar 0.37 Jumlah Kejahatan dan Tingkat Risiko Kejahatan di Provinsi Papua Tahun 2019-2022



Sumber: Polda Provinsi Papua dalam Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Papua Tahun 2023

Gambar 0.37 menunjukkan jumlah kejahatan sempat mengalami penurunan hingga tahun 2021 menjadi 7.736 kejadian. Jumlah kejahatan kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 8.967 kejadian. Tingkat kejahatan juga mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 661 kejadian namun kembali meningkat menjadi 1.301 kejadian pada tahun 2022. Adapun jumlah kejahatan yang dilaporkan pada tahun 2022, dapat diselesaikan dengan capaian 43,37%. Persentase tersebut cenderung menurun bila dibandingkan pada tahun 2021 yang mencapai 53,65%.

Gambar 0.38 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan, Diselesaikan, dan Persentase yang Diselesaikan di Provinsi Papua Tahun 2019-2022



Sumber: Polda Provinsi Papua dalam Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Papua Tahun 2023

Selang waktu terjadinya tindak kejahatan (*crime clock*) pada tahun 2019 adalah 01.00'32" (1 jam 32 detik) yang kemudian memanjang menjadi sebesar 1.03'32" (1 jam 3 menit 32 detik) pada tahun 2020. Interval terjadinya tindak kejahatan juga menjadi semakin panjang yaitu pada tahun 2021 menjadi sebesar 01.07'56" (1 jam 7 menit 56 detik). Berbanding terbalik dengan tahun-tahun sebelumnya, interval pada tahun 2022 memendek menjadi 00.58'37" (58 menit 37 detik). Interval waktu yang semakin panjang menunjukkan intensitas kejadian tindak kejahatan yang semakin menurun dan sebaliknya.

Tabel 0.36 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan, Diselesaikan, dan Persentase yang Diselesaikan Menurut Jenis Kejahatan di Provinsi Papua Tahun 2019-2022

Jenis Kejahatan		Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan				Jumlah Kejahatan yang Diselesaikan				Persentase yang Diselesaikan			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Kejahatan terhadap Nyawa	Pembunuhan	35	35	39	51	21	20	30	34	60	57,14	76,92	66,76
Kejahatan terhadap Fisik/Badan	Penganiayaan Ringan	1482	1446	1538	1513	1081	986	1155	956	72,94	68,19	75,1	63,19
	Penganiayaan Berat												
	Kekerasan dalam Rumah Tangga												
Kejahatan terhadap Kesusilaan	Perkosaan	110	85	110	91	80	57	99	67	72,73	67,06	90	73,63
	Pencabulan												
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang	Penculikan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Mempekerjakan Anak di Bawah Umur												
Kejahatan terhadap Hak Milik/ Barang dengan Penggunaan Kekerasan	Pencurian dengan Kekerasan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Senpi)												
	Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam (Sajam)												
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang	Pencurian	3679	3936	3611	4079	1831	1733	1531	1353	49,77	44,03	42,4	33,17
	Pencurian dengan pemberatan												
	Pencurian Kendaraan Bermotor												
	Pengrusakan/ Penghancuran Barang												
	Pembakaran dengan Sengaja												
Penadahan													
Kejahatan Terkait Narkotika	Narkotika dan Psikotropika	110	133	68	96	109	124	57	86	99,09	93,23	83,82	89,58

Jenis Kejahatan		Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan				Jumlah Kejahatan yang Diselesaikan				Persentase yang Diselesaikan			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi	Penipuan/Perbuatan Curang	1226	1167	1035	1099	745	606	471	935	60,77	51,93	45,51	85,08
	Penggelapan												
	Korupsi												
Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	Terhadap Ketertiban Umum	113	177	287	118	67	42	203	50	59,29	23,73	70,73	42,37

Sumber: Polda Provinsi Papua dalam Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Papua Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 0.36, diketahui bahwa jenis kejahatan dengan jumlah laporan tertinggi adalah Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang. Pada tahun 2022, jumlah laporan terkait kejahatan ini menembus sebanyak 4.079 laporan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 3.611 laporan. Meskipun kejahatan jenis ini memiliki jumlah laporan tertinggi, namun jumlah maupun persentase yang diselesaikan cenderung lebih kecil dibandingkan dengan jenis kejahatan lainnya. Pada tahun 2022, jenis kejahatan ini mampu diselesaikan dengan persentase 33,17% berkurang dibandingkan pada tahun 2021 yaitu 42,4%. Kejahatan terhadap fisik dan badan juga menjadi jenis kejahatan dengan laporan terbanyak. Pada tahun 2022, jumlah laporan kejahatan jenis ini mencapai 1.513 laporan. Jumlah laporan cenderung menurun dibandingkan tahun 2021 namun meningkat apabila dibandingkan pada tahun 2019 dan 2020 yang berkisar pada angka 1400-an laporan. Kejahatan terkait narkoba menjadi salah satu kejahatan dengan jumlah maupun persentase tertinggi yang diselesaikan. Pada tahun 2019, diketahui bahwa sebesar 99,09% jenis kejahatan ini dapat diselesaikan sebelum mengalami penurunan hingga tahun 2021 menjadi 83,82% dan kembali meningkat menjadi 89,58% pada tahun 2022.

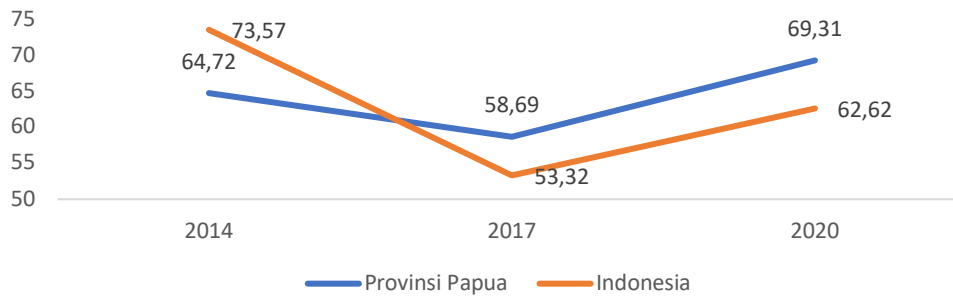
Tabel 0.37 Karakteristik Penduduk Papua Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2019-2022

Korban Kejahatan	Laki-Laki				Perempuan			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Terhadap Nyawa	87,1	73,91	76,19	95,83	12,9	26,09	23,81	4,17
Terhadap Fisik/Badan	67,02	75,66	63,66	80,53	32,98	24,34	36,34	19,47
Terhadap Kesusilaan	1,59	0	4,29	54,84	98,41	100	95,71	45,16
Terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan	66,67	63,39	62,07	86,05	33,33	36,61	37,93	13,95

Sumber: Polda Provinsi Papua dalam Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Papua Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 0.37, diketahui bahwa mayoritas korban kejahatan terhadap nyawa, fisik/badan, dan hak milik/barang dengan penggunaan kekerasan terjadi pada jenis kelamin laki-laki. Sebaliknya, korban kejahatan terhadap kesusilaan terjadi paling banyak terhadap jenis kelamin perempuan.

Gambar 0.39 Proporsi Penduduk Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya di Provinsi Papua Tahun 2014-2020



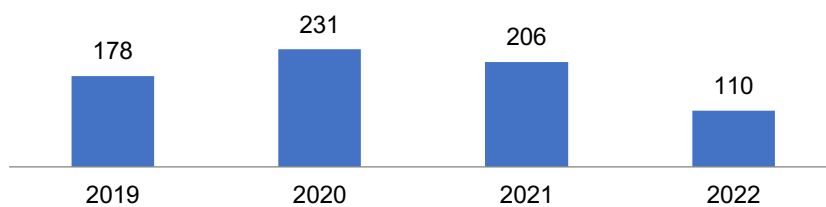
Sumber: Susenas Modul Hansos dalam BPS, 2020

Unsur rasa aman juga menjadi kebutuhan dan hak dasar setiap orang. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Oleh sebab itu, rasa aman diperlukan sebagai dasar ketertiban Masyarakat untuk mencapai perencanaan Pembangunan khususnya di Provinsi Papua. Berdasarkan data Susenas Modul Hansos pada Gambar 0.39, proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya di Provinsi Papua adalah sebesar 69,31 pada tahun 2020. Proporsi ini meningkat dibandingkan pada tahun 2017 dengan proporsi sebesar 58,69.

Unsur Penegak Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Aspek pertahanan keamanan merupakan faktor hakiki guna menjamin kelangsungan hidup negara. Terdapat beberapa faktor yang dapat memicu tingginya intensitas kejahatan, khususnya kejahatan konvensional. Salah satu faktor tersebut adalah komposisi penduduk. Komposisi penduduk di Provinsi Papua yang multikultur dan multi agama menyimpan kerawanan konflik antar kelompok apabila hubungan antar kelompok tidak dikelola dengan baik. Jumlah personil keamanan (Polisi) juga mempengaruhi kondisi lingkungan. Jumlah personil keamanan yang mencukupi akan semakin memudahkan pengawasan terhadap kondisi lingkungan.

Gambar 0.40 Rasio Penduduk Terhadap Personil Polisi di Provinsi Papua Tahun 2019-2022



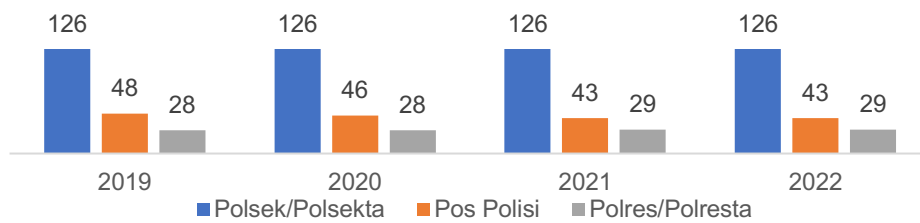
Sumber: Polda Provinsi Papua dalam Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Papua Tahun 2023

Berdasarkan Gambar 0.40, diketahui bahwa pada tahun 2022 rasio penduduk terhadap personil polisi di Provinsi Papua adalah 1:110. Hal ini diartikan bahwa 1 polisi berbanding 110 penduduk di Papua. Pada kondisi ideal, rasio polisi dan penduduk adalah 1:350, yang artinya 1 polisi berbanding 350 penduduk.

Berdasarkan hal tersebut, maka rasio penduduk terhadap polisi di Provinsi Papua sudah mencapai kondisi ideal tiap tahunnya sejak tahun 2019 hingga tahun 2022.

Keamanan suatu wilayah juga perlu ditinjau berdasarkan sarana keamanan yang ada. Jumlah sarana keamanan di Provinsi Papua ditunjukkan pada Gambar 0.41. Jumlah Polsek/Polsekta tetap sama sejak tahun 2019 hingga 2022. Jumlah pos polisi mengalami penurunan dari 48 unit di tahun 2019 menjadi 43 unit pada tahun 2022. Sementara Polres/Polresta mengalami penambahan 1 unit pada tahun 2021 menjadi 29 unit.

Gambar 0.41 Jumlah Sarana Keamanan di Provinsi Papua Tahun 2019-2022



Sumber: Polda Provinsi Papua dalam Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Papua Tahun 2023

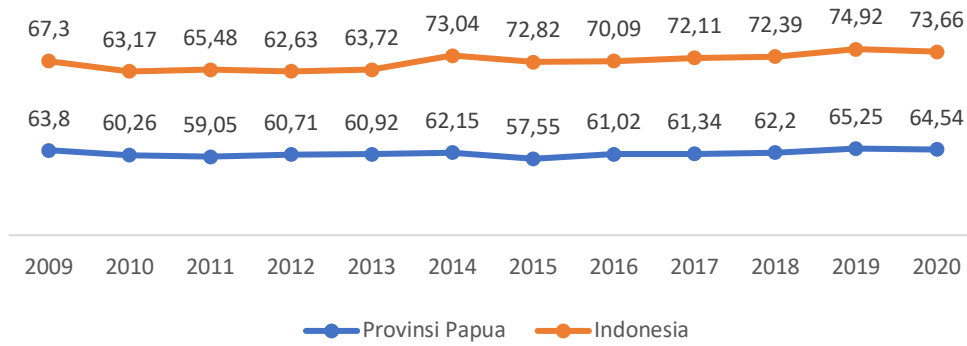
Guna menjaga ketentraman, ketertiban, dan melindungi masyarakat, diperlukan adanya campur tangan masyarakat dan pemerintah. Unsur pemerintah yang berkaitan dengan hal tersebut adalah Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Salah satu prasyarat dalam pelaksanaan pembangunan adalah mewujudkan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib. Pengamanan dari Satpol PP dan personil Linmas dibutuhkan untuk mencapai kondisi tersebut khususnya pada lokasi yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Di lain sisi, diperlukan juga kesadaran serta kepatuhan masyarakat untuk mendukung hal tersebut.

b. Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indikator komposit untuk menunjukkan tingkat perkembangan dan penerapan demokrasi di Indonesia. Berdasarkan data BPS tahun 2009-2020, IDI Provinsi pernah mengalami penurunan pada tahun 2015 hingga mencapai angka dibawah angka 60. Perkembangan IDI di Provinsi Papua ditunjukkan melalui Gambar 0.42.

Gambar 0.42 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Papua Tahun 2009-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2009-2020

Per tahun 2021, perhitungan IDI sudah menggunakan metode baru dengan 3 aspek penyusun yaitu kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi. Berdasarkan Indeks Demokrasi Indonesia dalam BPS, pada tahun 2021 IDI di Provinsi Papua mencapai angka 66,39 dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 66,65. Kenaikan angka menuju 100 menandakan bahwa kinerja demokrasi di Provinsi Papua semakin meningkat.

IDI Provinsi Papua masih berada dalam kategori “**sedang**”, meskipun begitu terdapat perubahan signifikan pada capaian aspek penyusun IDI seperti pada capaian Aspek Kesetaraan yang melampaui Aspek Kebebasan. Meskipun keseluruhan aspek masih berada dalam kategori "sedang", namun peningkatan yang terjadi menandai pergeseran fokus dalam pembangunan demokrasi, penekanan pemberdayaan kesetaraan tetapi juga menegaskan perlunya perbaikan dalam kapasitas lembaga demokrasi.

Tabel 0.38 Capaian IDI Provinsi Papua Berdasarkan Aspek dan Indikator Penyusunnya 2021-2022

No.	Indikator IDI	2021	2022
Aspek Kebebasan			
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara	54,15	0
2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat	0	0
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	100	100
4	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	100	100
5	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu	99,48	99,48
6	Pemenuhan hak hak pekerja	100	94,32
7	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	68,87	75,57
Aspek Kesetaraan			
8	Kesetaraan gender	89,01	90,54
9	Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	43,48	100
10	Anti monopoli sumber daya ekonomi	54	57,5
11	Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	50,32	39,86
12	Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah	96,67	97,17
13	Akses masyarakat terhadap informasi publik	66,37	63,03
14	Kesetaraan dalam pelayanan dasar	48,43	50,22
Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi			
15	Kinerja lembaga legislatif	4,17	16,22
16	Kinerja lembaga yudikatif	87,23	91,45
17	Netralitas penyelenggara pemilu	85	85

No.	Indikator IDI	2021	2022
18	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	71,67	88,33
19	Jaminan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	80,23	81,46
20	Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah	57,14	42,86
21	Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik	75,2	65
22	Pendidikan politik pada kader partai politik	10,77	33,85

Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia dalam Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Papua Tahun 2023

2.3.1.6 Sosial

a. Agama dan Kepercayaan

Keagamaan menjadi salah satu aspek sosial mendasar di Provinsi Papua. Provinsi Papua memiliki latar belakang keagamaan maupun kepercayaan yang telah berkembang sejak lama dan turun-temurun. Agama dan kepercayaan di Provinsi Papua ditunjukkan pada Tabel 0.39. Agama dan kepercayaan yang mendominasi di Provinsi Papua berdasarkan kabupaten/kota adalah agama Protestan sebanyak 625.247 jiwa diikuti agama Islam sebanyak 252.315 jiwa dan agama Katolik sebanyak 110.249 jiwa. Kota Jayapura menjadi kota dengan pemeluk agama Islam, Katolik, Hindu, dan Budha terbanyak pada tahun 2020, sementara Kabupaten Jayapura menjadi kabupaten dengan pemeluk agama Protestan terbanyak.

Tabel 0.39 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama yang Dianut di Provinsi Papua Tahun 2020 (Jiwa)

Kabupaten	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
Jayapura	34.069	150.327	293	233	196	-
Kepulauan Yapen	10.973	113.868	2.045	47	22	-
Biak Numfor	3.004	118.501	3.546	150	301	-
Sarmi	6.706	29.311	152	35	-	-
Keerom	2.705	22.506	17.661	366	15	-
Waropen	9.722	34.661	1.777	20	-	-
Supiori	486	18.975	162	10	-	-
Mamberamo Raya	2.031	7.035	135	-	6	-
Kota Jayapura	182.619	130.063	84.478	741	1.237	-
Provinsi Papua	252.315	625.247	110.249	1.602	1.777	-

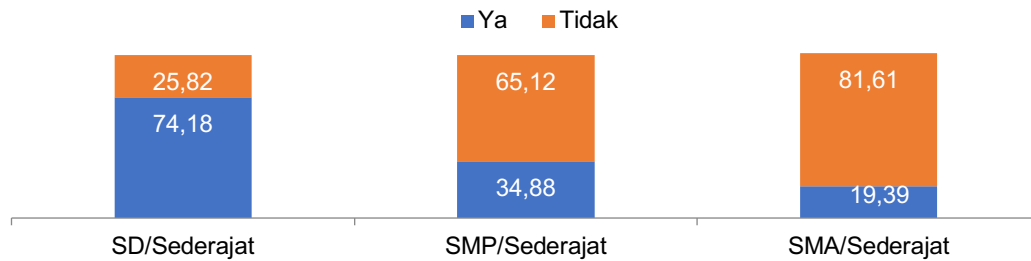
Sumber: Kementerian Agama Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

b. Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Papua menjadi salah satu isu pembangunan strategis. Masalah terkait kesejahteraan sosial di Provinsi Papua antara lain adalah ketelantaran, kecacatan, dan ketunaan sosial. Upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan pemerintah masih belum optimal dalam menangani permasalahan terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Selain itu, guna mewujudkan kesejahteraan sosial, terdapat beberapa bantuan yang dapat diterima oleh penerima bantuan di Provinsi Papua seperti Program Indonesia Pintar (PIP), akses terhadap perlindungan sosial, dan penerima kredit dalam setahun.

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah salah satu program pemerintah untuk memajukan dunia pendidikan. PIP melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan pemberian bantuan tunai untuk anak usia sekolah (usia 6-21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin: pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), anak yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam/musibah.

Gambar 0.43 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Program Indonesia Pintar Menurut Jenis PIP di Provinsi Papua Tahun 2021



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua, 2021 dalam Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua 2023

Persentase rumah tangga sebagai sasaran utama penerima PIP masih tergolong sangat rendah yaitu hanya 9,27%. Rumah tangga penerima PIP paling banyak berada pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) yaitu sebesar 74,18%. Jenjang Pendidikan SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat masing-masing berada pada persentase 34,88% dan 19,39%. Jenjang pendidikan SMA/Sederajat menjadi persentase paling sedikit penerima PIP.

Tabel 0.40 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Jaminan Sosial Menurut Jenis Jaminan Sosial di Provinsi Papua Tahun 2019-2023

Jenis Jaminan Sosial	Cakupan Penerima Manfaat (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jaminan Pensiun	6,52	7,46	5,65	4,71	6,14
Jaminan Hari Tua	5,1	5,29	3,68	3,1	4,15
Asuransi Kecelakaan Kerja	4,22	4,53	3,54	2,91	3,75
Jaminan / Asuransi Kematian	4,56	4,33	3,48	2,94	3,34
Jaminan Kehilangan Pekerjaan	N/A	N/A	N/A	N/A	0,75
Pesangon PHK	1,62	1,84	0,81	1,03	0,67

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret dalam Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua 2019-2023

Akses terhadap perlindungan sosial termasuk dalam sistem jaminan sosial nasional yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Seluruh warga Indonesia wajib menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional tanpa terkecuali. Jenis jaminan sosial mencakup Jaminan Pensiun/veteran, Jaminan Hari Tua, Asuransi Kecelakaan Kerja, Jaminan/Asuransi Kematian dan Pesangon (PHK). Jaminan pensiun menjadi jenis jaminan sosial dengan cakupan persentase penerima tertinggi sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 di Provinsi Papua. Sebaliknya, pesangon PHK menjadi jenis jaminan sosial dengan persentase terendah pada tahun 2023 yaitu 0,67% diikuti jaminan kehilangan pekerjaan yang terdata sejak tahun 2023 yaitu 0,75%.

Tabel 0.41 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit dalam Setahun Menurut Jenis Kredit di Provinsi Papua Tahun 2019-2023

Jenis Kredit	Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit dalam Setahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	32,13	36,96	34,3	39,75	42,78
Kredit dari Bank Umum selain KUR	46,27	39,46	41,02	32,21	34,18
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	5,63	6	6,46	12,2	5,35
Kredit dari Koperasi	7,47	6,41	7,19	7,14	7,88
Kredit Perorangan/Perorangan dengan Bunga	3,51	4,78	2,4	2,42	4,98
Pegadaian	1,67	2,71	5,23	3,94	4,11
Perusahaan Leasing	3,47	4,59	4,55	4,92	7,66
Kelompok Usaha Bersama	1,85	0,2	0,97	N/A	N/A
Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	1,29	0,48	1,38	0,27	0,85
Pinjaman Online	N/A	N/A	N/A	0,27	0,47
Lainnya	6,04	3,64	1,86	4,76	8,02

Sumber: Susenas Maret dalam Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua 2019-2023

Kredit usaha merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial lainnya yang diterima penduduk di Provinsi Papua. Kredit usaha lebih berfokus pada kredit yang diberikan oleh lembaga perbankan, koperasi, pegadaian, maupun perorangan. Berdasarkan Tabel 0.41, diketahui bahwa jenis kredit yang paling banyak diterima masyarakat di Provinsi Papua adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sejak tahun 2019 hingga tahun 2023, persentase rumah tangga penerima KUR lebih tinggi dibandingkan jenis kredit lainnya. Sebaliknya, BUMDES menjadi jenis kredit dengan persentase terendah diikuti pinjaman online. Sejak tahun 2022, jenis kredit pinjaman online mulai terdata dan meningkat di tahun 2023 menjadi 0,47 dari 0,27 pada tahun 2022.

2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.3.2.1 Tenaga Kerja

Tenaga kerja di Provinsi Papua ditinjau berdasarkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK dan TPT dilihat dari penduduk dengan usia di atas 15 tahun yang terbagi dalam angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Jumlah Angkatan Kerja secara provinsi adalah sebanyak 2.516.129 jiwa dengan persentase bekerja terhadap angkatan kerja adalah sebesar 97,33%. Adapun Jumlah Bukan Angkatan Kerja adalah sebesar 743.102 jiwa yang terdiri dari sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya.

Tabel 0.42 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Provinsi Papua Tahun 2023

No	Kabupaten	Angkatan Kerja					Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja			
		Bekerja	Pengangguran			Jumlah Angkatan Kerja		Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah Bukan Angkatan Kerja
			Pernah Bekerja	Tidak Pernah Bekerja	Jumlah						
1	Jayapura	70.469	913	2.076	2.989	73.458	95,93	10.327	20.225	4.508	35.060
2	Kepulauan Yapen	44.746	N/A	1.871	1.871	46.617	95,99	6.754	16.779	6.214	29.747
3	Biak Numfor	57.919	1.323	2.194	3.517	61.436	94,28	8.014	19.213	4.469	31.696
4	Sarmi	17.303	97	454	551	17.854	96,91	2.427	5.462	1.419	9.308
5	Keerom	30.851	N/A	357	470	31.321	98,5	2.814	4.866	1.787	9.467
6	Waropen	13.453	N/A	556	651	14.104	95,38	2.009	3.484	1.603	7.096
7	Supiori	7.842	N/A	347	396	8.238	95,19	1.158	3.792	1.145	6.095
8	Mamberamo Raya	10.846	N/A	44	N/A	10.890	99,6	911	9.206	4.433	14.550
9	Kota Jayapura	178.808	4.789	16.779	21.568	200.376	89,24	25.848	58.215	12.978	97.041
Provinsi Papua		2.448.947	14.821	52.361	67.182	2.516.129	97,33	156.725	441.573	144.804	743.102

Sumber: Sakernas Agustus dalam Provinsi Papua Dalam Angka 2024

Apabila kegiatan utama di Provinsi Papua ditinjau berdasarkan gender seperti terlihat pada Tabel 0.43, jumlah angkatan kerja di Provinsi Papua didominasi oleh laki-laki yaitu 1,52 juta jiwa. Angka ini merupakan angka Provinsi Papua sebelum pemekaran. Jumlah penduduk bekerja di Provinsi Papua adalah sebanyak 2,45 juta jiwa yang juga didominasi oleh laki-laki yaitu sebesar 60,12%.

Tabel 0.43 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2023

Kegiatan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
Angkatan Kerja	1.515.065	1.001.064	2.516.129
i. Bekerja	1.472.266	976.681	2.448.947
ii. Pengangguran Terbuka	42.799	24.383	67.182
Bukan Angkatan Kerja	233.618	509.484	743.102
i. Sekolah	79.412	77.313	156.725
ii. Mengurus Rumah Tangga	58.641	382.932	441.573
iii. Lainnya	95.565	49.239	144.804
Jumlah	1.748.683	1.510.548	3.259.231

Sumber: Sakernas Agustus dalam Provinsi Papua Dalam Angka 2024

Secara provinsi, TPT di Provinsi Papua pada Agustus 2021-2023 menunjukkan penurunan persentase dari 3,33% menjadi 2,67%. Penurunan persentase TPT pada selang tahun yang sama juga diikuti oleh penurunan TPAK. Persentase TPAK secara provinsi mengalami penurunan dari 78,29% pada tahun 2021 menjadi 77,2% pada tahun 2023. Persentase TPT dan TPAK ditunjukkan pada Tabel 0.44.

Tabel 0.44 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) – Agustus Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2021-2023

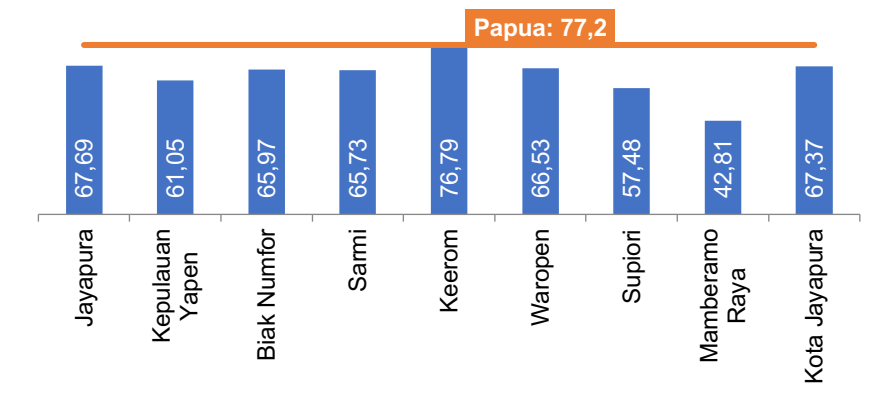
No	Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Jayapura	7,87	5,94	4,07	67,97	65,13	67,69
2	Kepulauan Yapen	2,47	3,6	4,01	63,94	68,36	61,05
3	Biak Numfor	9,49	7,4	5,72	69,47	72,31	65,97
4	Sarmi	2	2,09	3,09	68,57	68,96	65,73
5	Keerom	1,41	2,49	1,5	76,91	74,75	76,79
6	Waropen	8,56	6,64	4,62	56,39	56,98	66,53
7	Supiori	2,66	2,93	4,81	68,56	61,22	57,48
8	Mamberamo Raya	1,91	2,32	N/A	66,84	63,19	42,81
9	Kota Jayapura	11,67	9,71	10,76	63,75	60,61	67,37
Provinsi Papua		3,33	2,83	2,67	78,29	77,75	77,2

Sumber: Sakernas Agustus dalam Provinsi Papua Dalam Angka 2024

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) - Agustus tertinggi di Provinsi Papua pada tahun 2023 berada di Kabupaten Keerom dengan persentase sebesar 76,79%. Persentase TPAK yang semakin meningkat di suatu daerah mengindikasikan bahwa penduduk dalam usia angkatan kerja di daerah tersebut secara aktif melakukan kegiatan ekonomi. Kabupaten Mamberamo Raya menjadi kabupaten dengan persentase TPAK terendah di Provinsi Papua pada tahun 2023. Apabila ditinjau berdasarkan kabupaten/kota, persentase TPAK pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua masih berada di bawah garis TPAK provinsi. Persentase TPAK di Provinsi Papua menurut kabupaten/kota pada tahun 2023 ditunjukkan pada Gambar 0.44.

Gambar 0.44 Persentase Tingkat Partisipasi Kerja (TPAK) - Agustus di Provinsi Papua Tahun 2022

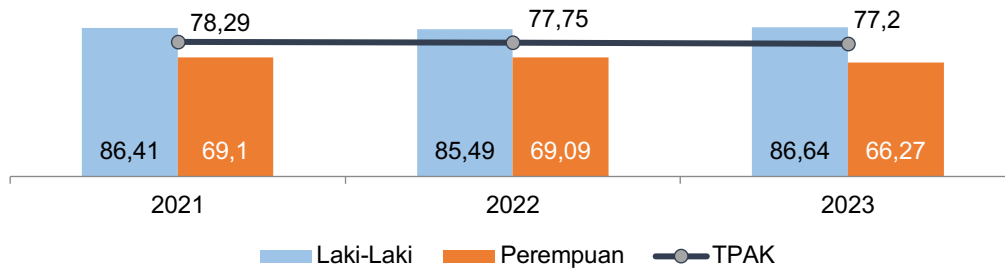


Sumber: Sakernas Agustus dalam Indikator Penting Provinsi Papua dan Daerah Otonom Baru (DOB) Edisi Februari 2024

TPAK di Provinsi Papua juga ditinjau berdasarkan gender atau jenis kelamin. Diketahui bahwa TPAK di Provinsi Papua didominasi oleh laki-laki. TPAK laki-laki mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi 86,64% dari 85,49% pada tahun 2022. TPAK perempuan pada tahun 2023 cenderung mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 dan 2022. Tahun 2023, persentase TPAK perempuan adalah sebesar 66,27% dari sebelumnya 69,10% pada tahun 2021 dan 69,09% pada

tahun 2022. Adapun TPAK laki-laki berada di atas garis rata-rata provinsi sementara perempuan berada di bawah garis rata-rata provinsi.

Gambar 0.45 Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2021-2023

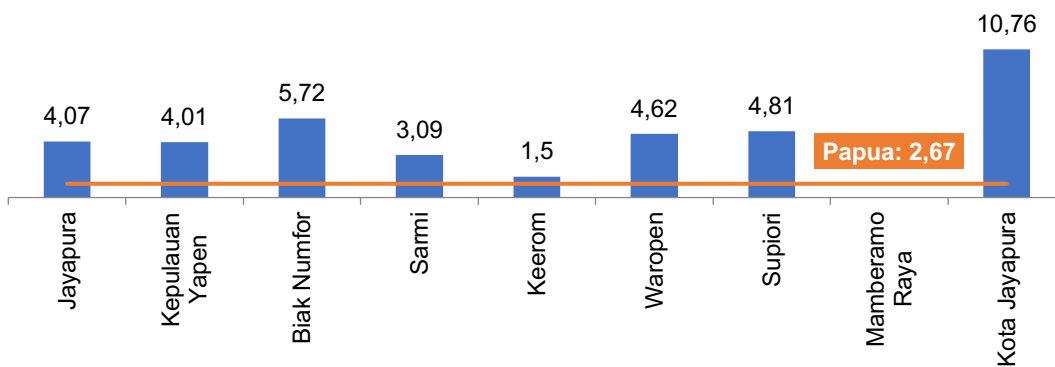


Sumber: Sakernas Agustus dalam Indikator Penting Provinsi Papua dan Daerah Otonom Baru (DOB) Edisi Februari 2024

b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Papua pada Agustus 2023 adalah sebesar 2,67%. Kota Jayapura menjadi kota dengan persentase TPT tertinggi di Provinsi Papua yaitu sebesar 10,76%, sementara Kabupaten Keerom menjadi kabupaten dengan persentase TPT terendah yaitu sebesar 1,5%. Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua memiliki persentase TPT diatas garis TPT provinsi. Adapun data persentase TPT Kabupaten Mamberamo Raya masih belum tersedia. Persentase TPT di Provinsi Papua pada tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 0.46.

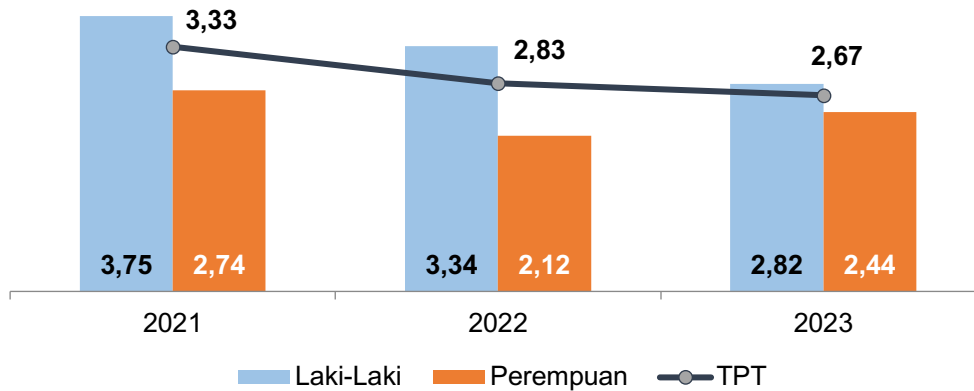
Gambar 0.46 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) - Agustus di Provinsi Papua 2023



Sumber: Sakernas Agustus dalam Indikator Penting Provinsi Papua dan Daerah Otonom Baru (DOB) Edisi Februari 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Papua dapat dilihat berdasarkan gender atau jenis kelamin. Tahun 2023, TPT laki-laki adalah sebesar 2,82% lebih tinggi dibanding TPT perempuan yaitu sebesar 2,44%. TPT laki-laki mengalami penurunan dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2023, TPT perempuan mengalami kenaikan sebesar 0,32 dibandingkan pada tahun 2022. TPT perempuan mengalami penurunan pada tahun 2022 yaitu sebesar 2,12% namun kembali meningkat di tahun 2023 menjadi 2,44%. Adapun TPT perempuan masih berada di bawah garis rata-rata TPT secara provinsi sedangkan TPT laki-laki berada di atas garis rata-rata.

Gambar 0.47 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2021-2023



Sumber: Sakernas Agustus dalam Indikator Penting Provinsi Papua dan Daerah Otonom Baru (DOB) Edisi Februari 2024

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Unsur Aparatur Sipil Negara

Pemberdayaan perempuan di Provinsi Papua dilihat dari kontribusi perempuan pada Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kontribusi perempuan bagi PNS di Provinsi Papua pada tahun 2022 adalah sebanyak 13.433 jiwa. Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura menjadi kabupaten dan kota dengan jumlah PNS perempuan terbanyak dengan masing-masingnya berjumlah 2.311 dan 2.472 jiwa. Apabila dibandingkan secara total dengan jumlah laki-laki, jumlah perempuan dalam kepegawaian negeri sipil cenderung tidak memiliki perbandingan yang begitu tinggi. Jumlah tersebut ditunjukkan pada Tabel 0.45.

Tabel 0.45 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Jayapura	1.771	2.311	4.082
2	Kepulauan Yapen	1.911	1.617	3.528
3	Biak Numfor	1.974	1.972	3.946
4	Sarmi	1.188	898	2.086
5	Keerom	1.602	1.469	3.071
6	Waropen	1.375	951	2.362
7	Supiori	1.371	1.137	2.508
8	Mamberamo raya	1.252	606	1.858
9	Kota Jayapura	1.603	2.472	4.075
	Provinsi Papua	14.047	13.433	27.480

Sumber: BPS Provinsi Papua dalam Provinsi Papua Dalam Angka 2024

2. Keterlibatan di Parlemen

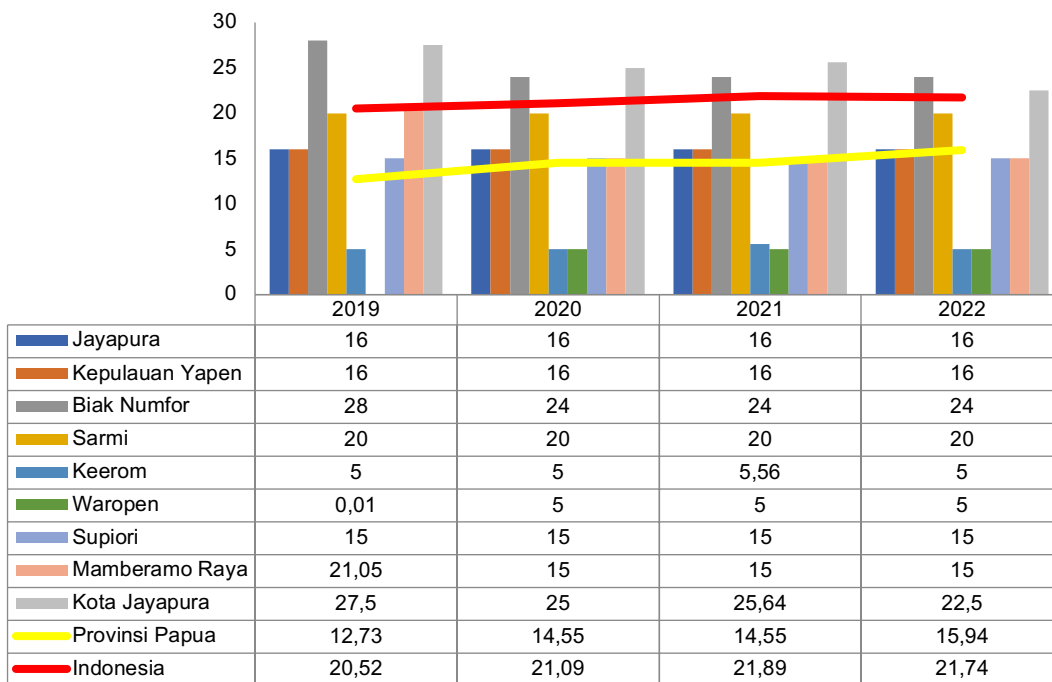
Pemberdayaan perempuan juga dapat terlihat dari keterlibatannya di parlemen. Indonesia menduduki peringkat ke-7 se-Asia Tenggara dalam keterwakilan perempuan di parlemen menurut data World Bank tahun 2019. Hal tersebut mencerminkan bahwa angka keterwakilan perempuan Indonesia di parlemen masih rendah dan berpengaruh terhadap kebijakan kesetaraan gender. Keterlibatan

perempuan di Parlemen dari Provinsi Papua pada tahun 2019-2022 ditunjukkan pada Gambar 0.48.

Jika dilihat secara nasional, keterlibatan perempuan dalam parlemen di Provinsi Papua masih berada di bawah garis nasional. Secara provinsi, terdapat beberapa kabupaten/kota di Provinsi Papua yang sudah memiliki persentase keterlibatan perempuan di parlemen di atas garis provinsi. Kabupaten/kota dengan persentase keterlibatan perempuan di parlemen tertinggi adalah Kota Jayapura dan kabupaten/kota dengan persentase terendah adalah Kabupaten Keerom dan Waropen.

Partisipasi perempuan dalam politik dan pemerintahan di Papua menjadi fokus penting untuk mencapai representasi yang lebih inklusif dan merata. Partisipasi ini masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun begitu perempuan di Papua semakin aktif terlibat dalam berbagai tingkatan politik dan pemerintahan. Terdapat sejumlah inisiatif yang bertujuan untuk mendorong partisipasi perempuan dalam kebijakan dan pengambilan keputusan di Papua, mencakup advokasi untuk peningkatan jumlah perempuan di lembaga-lembaga legislatif, peningkatan kesadaran akan pentingnya peran perempuan dalam agenda politik, serta dukungan terhadap kepemimpinan perempuan dalam berbagai bidang, termasuk bidang politik.

Gambar 0.48 Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen Provinsi Papua Tahun 2019-2022



Sumber: BPS Provinsi Papua

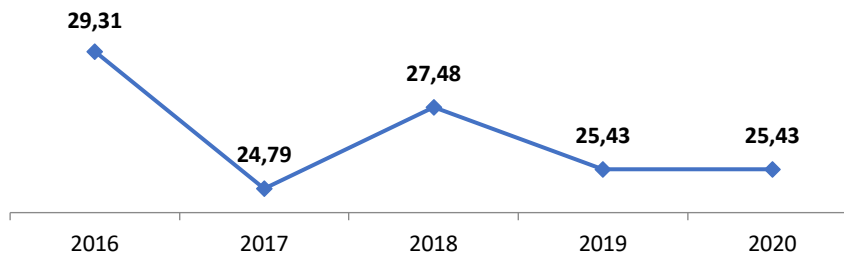
2.3.2.3 Pangan

Urusan pangan di Provinsi Papua dilihat berdasarkan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari, konsumsi setara kedelai pada penduduk, kerawanan pangan, ketidakcukupan konsumsi pangan, dan program bantuan pangan.

a. Asupan Kalori Minimum di Bawah 1400 Kkal/Kapita/Hari

Tubuh memerlukan minimal 1400 kkal asupan untuk dapat melakukan aktivitas dalam sehari. Apabila penduduk belum memenuhi kebutuhan kalori minimum per hari maka hal tersebut mengindikasikan kurangnya kebutuhan kalori penduduk yang sesuai dengan standar. Adapun penduduk di Provinsi Papua dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari semakin mengalami penurunan sejak tahun 2016 meskipun sempat meningkat pada tahun 2018 sebelum kembali menurun hingga tahun 2020.

Gambar 0.49 Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori Minimum Di Bawah 1400 kkal/Kapita/Hari di Provinsi Papua Tahun 2016-2020



Sumber: BPS RI, 2022

Rata-rata konsumsi per kapita ditinjau dari kalori dan protein per hari dan kelompok bahan makanan lainnya. Berdasarkan Tabel 0.46, diketahui bahwa rata-rata konsumsi per kapita per hari di Provinsi Papua cenderung mengalami kenaikan dalam 5 tahun terakhir. Sementara rata-rata konsumsi protein per kapita per hari sempat mengalami penurunan pada tahun 2022 namun perlahan kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 46,8 gram dari 45,07 gram. Meskipun rata-rata kalori dan protein mengalami kecenderungan untuk meningkat, tetapi masih belum bisa mencapai rata-rata nasional.

Tabel 0.46 Rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita per Hari di Provinsi Papua Tahun 2019-2023

Provinsi	Kalori (kkal)					Protein (gram)				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Papua	1.863,07	1.914,12	1.879,71	1.902,04	1.902,72	44,66	46,52	44,94	45,07	46,8
Indonesia	2.120,52	2.112,06	2.143,21	2.079,09	2.087,64	62,13	61,98	62,28	62,21	62,33

Sumber: Publikasi Statistik Indonesia dalam BPS, 2023

b. Konsumsi Setara Kedelai

Konsumsi setara kedelai dilihat berdasarkan jenis pengolahan kedelai dalam bentuk tahu, tempe, dan kecap. Konsumsi tahu, tempe, dan kecap di Provinsi Papua diketahui masih berada di bawah angka konsumsi nasional yang ditunjukkan pada Tabel 0.47.

Tabel 0.47 Konsumsi Setara Kedelai (Tahu, Tempe, Kecap) di Provinsi Papua Tahun 2020

Uraian	Konsumsi Setara Kedelai (kg/kapita/tahun)			
	Tahu	Tempe	Kecap	Total
Papua	2,23	1,65	0,34	4,22
Indonesia	2,78	3,64	0,74	7,17

Sumber: BPS RI, 2022

Apabila dilihat secara tahunan mulai dari tahun 2018 hingga 2020, konsumsi total setara kedelai cenderung mengalami peningkatan. Tahun 2018, konsumsi setara kedelai meraih angka 3,42 hingga pada tahun 2020 meraih angka 4,22. Laju pertumbuhan konsumsi setara kedelai di Provinsi Papua adalah sebesar 11,09 per tahunnya. Konsumsi setara kedelai dan laju pertumbuhannya pada tahun 2018-2020 ditunjukkan pada Tabel 0.48.

Tabel 0.48 Konsumsi Setara Kedelai di Provinsi Papua Tahun 2018-2020

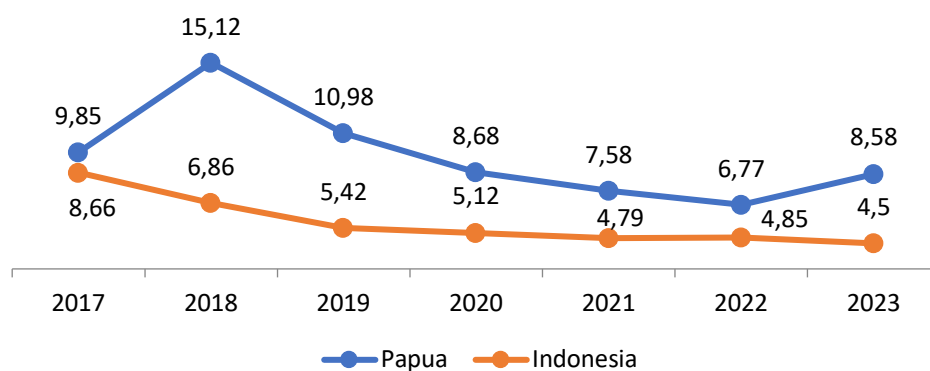
Uraian	Konsumsi Setara Kedelai (kg/kapita/tahun)			Pertumbuhan
	2018	2019	2020	
Papua	3,42	3,66	4,22	11,09
Indonesia	7,51	7,14	7,17	-2,29

Sumber: BPS RI, 2022

c. Kerawanan Pangan dan Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Kerawanan pangan menunjukkan kondisi ketidacukupan pangan di suatu daerah. Prevalensi penduduk di Provinsi Papua dengan kerawanan pangan baik sedang maupun berat yang didasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan tahun 2017-2023. Tingkat keparahan kerawanan pangan bersifat laten, yang diukur berdasarkan Skala Kerawanan Pengalaman Kerawanan Pangan. Skala ini memungkinkan untuk menganalisa prevalensi kerawanan pangan secara konsisten. Tingkat keparahan kondisi kerawanan pangan yang diukur melalui skala ini dapat memberikan gambaran secara langsung terkait ketidakmampuan rumah tangga atau individu dalam mengakses makanan yang dibutuhkan secara reguler. Berdasarkan Gambar 0.50, angka prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan mengalami fluktuasi. Tahun 2018 menjadi tahun dengan perolehan prevalensi tertinggi di Provinsi Papua yaitu mencapai 15,12% yang ditunjukkan pada Gambar 0.50.

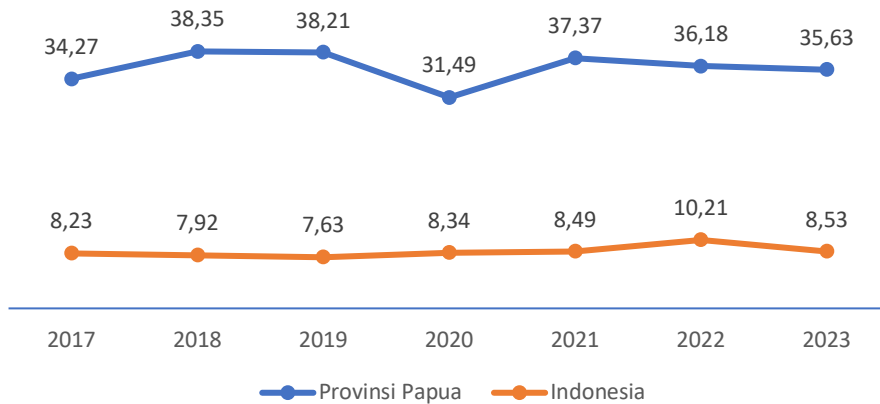
Gambar 0.50 Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat Berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan di Provinsi Papua Tahun 2017-2023 (Persen)



Sumber: Susenas dalam BPS RI, 2023

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu dimana konsumsi energi sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Provinsi Papua sejak tahun 2017 menjadi yang terbesar secara Nasional dan jauh berada di atas garis nasional. Angka prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Provinsi Papua berstatus “sangat tinggi” pada tahun 2019 dan 2021, serta berstatus “tinggi” pada tahun 2020. Prevalensi ketidakcukupan pangan di Provinsi Papua ditunjukkan pada Gambar 0.51.

Gambar 0.51 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Provinsi Papua Tahun 2017-2023 (Persen)



Sumber: Susenas dalam BPS, 2024

d. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan di Provinsi Papua dapat dilihat dari Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Indikator penyusun ketahanan pangan di Indonesia didasarkan pada 3 aspek yaitu aspek ketersediaan, keterjangkauan/distribusi, dan pemanfaatan pangan di Indonesia pada kurun waktu tertentu. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Provinsi Papua mengalami kenaikan dari tahun 2020 hingga 2022, yaitu dari 34,79 menjadi 37,80. Meskipun begitu, Provinsi Papua juga menjadi provinsi dengan peringkat **“rendah”** dalam skor IKP dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Hal ini menjadikan Provinsi Papua menjadi provinsi Prioritas 1 untuk peningkatan skor IKP.

IKP dibedakan berdasarkan kabupaten dan kota untuk menentukan tingkatan kelompok keretakan. Berdasarkan data IKP tahun 2022, sebanyak 70 kabupaten atau 16,83% dari 416 kabupaten memiliki skor IKP rendah, salah satunya adalah kabupaten di Provinsi Papua. Kabupaten Prioritas 1 (sangat rentan) tersebar di Provinsi Papua. Berdasarkan pengelompokan terhadap kabupaten pada Gambar 0.52 Peta Indeks Ketahanan Pangan Provinsi 2022

terlihat bahwa Kabupaten Mamberamo Raya menjadi kabupaten Prioritas 1 dalam kurun 3 tahun terakhir. Sebaliknya Kabupaten Keerom menjadi kabupaten dengan tingkat kerentanan yang cukup baik yaitu berada pada Prioritas 4 selama 3 tahun terakhir. Berdasarkan tinjauan kota, Kota Jayapura sebagai satu-satunya kota di Provinsi Papua menunjukkan ketahanan pangan sangat baik dengan berada pada

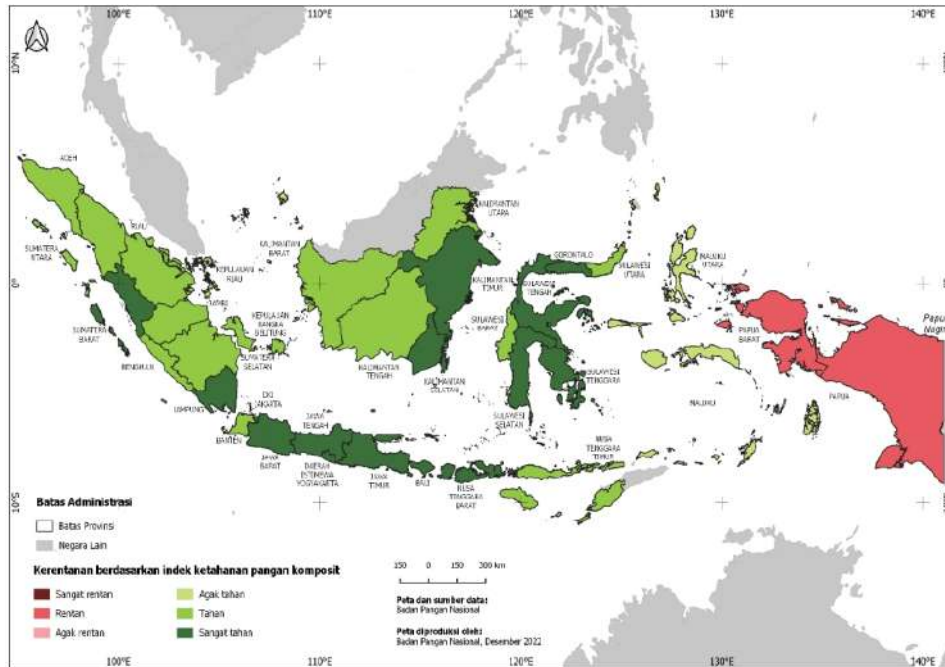
Prioritas 5. IKP Provinsi Papua berdasarkan kabupaten dan kota ditunjukkan pada Gambar 0.52 Peta Indeks Ketahanan Pangan Provinsi 2022

Tabel 0.49 Indeks Ketahanan Pangan Menurut Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Tahun 2019-2022

Wilayah	Uraian	2020	2021	2022
Provinsi Papua	IKP (indeks)	34,79	35,48	37,8
	Kategori	Prioritas 1	Prioritas 1	Prioritas 1
	Interpretasi	Tingkat kerentanan pangan relatif sangat tinggi	Tingkat kerentanan pangan relatif sangat tinggi	Tingkat kerentanan pangan relatif sangat tinggi
	a. Indeks Ketersediaan (IK)	7,98	8,89	17,68
	b. Indeks Keterjangkauan	49,49	49	49,89
	c. Indeks Pemanfaatan (IP)	42,29	43,71	42,34
Kabupaten				
1 Jayapura	IKP (indeks)	58,11	54,91	70,62
	Kategori	Prioritas 3	Prioritas 3	Prioritas 5
2 Kepulauan Yapen	IKP (indeks)	43,38	43,92	44,82
	Kategori	Prioritas 2	Prioritas 2	Prioritas 2
3 Biak Numfor	IKP (indeks)	48,51	49,07	48,16
	Kategori	Prioritas 2	Prioritas 2	Prioritas 2
4 Sarmi	IKP (indeks)	44,68	44,73	57,07
	Kategori	Prioritas 2	Prioritas 2	Prioritas 3
5 Keerom	IKP (indeks)	60,24	61,38	61,22
	Kategori	Prioritas 4	Prioritas 4	Prioritas 4
6 Waropen	IKP (indeks)	37,5	50,03	44,89
	Kategori	Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 2
7 Supiori	IKP (indeks)	31,59	28,11	29,87
	Kategori	Prioritas 1	Prioritas 1	Prioritas 1
8 Mamberamo Raya	IKP (indeks)	19,8	21,95	22,96
	Kategori	Prioritas 1	Prioritas 1	Prioritas 1
9 Kota Jayapura	IKP (indeks)	68,83	70,18	74,64
	Kategori	Prioritas 5	Prioritas 5	Prioritas 5

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2022

Gambar 0.52 Peta Indeks Ketahanan Pangan Provinsi 2022

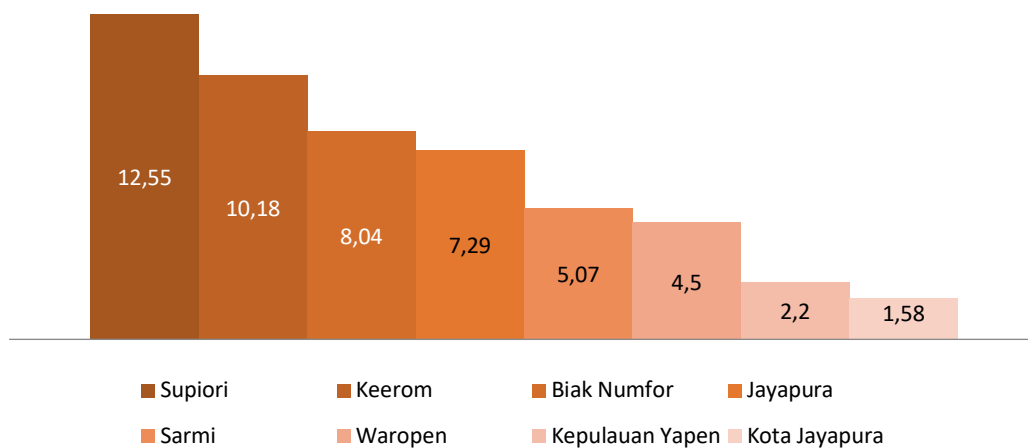


Sumber: Indeks Ketahanan Pangan, 2020-2022

e. Program Bantuan Pangan

Provinsi Papua termasuk dalam wilayah program bantuan pangan. Bantuan pangan berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sembako. BNPT merupakan bantuan sosial pangan non tunai yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari pemerintah sebesar 110.000 rupiah tiap bulan melalui mekanisme perbankan. Bantuan Sembako adalah pengembangan BPNT yang dilakukan sejak tahun dimulainya yaitu tahun 2020. KPM memperoleh program bantuan Sembako sebesar 150.000 rupiah melalui mekanisme perbankan. Adapun persentase KPM di Provinsi Papua yang menerima BPNT maupun Bantuan Sembako pada tahun 2023 ditunjukkan pada Gambar 0.53.

Gambar 0.53 Persentase Penerima BPNT dan Bantuan Sembako Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2023



Sumber: BPS Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua, 2023

Adapun realisasi jumlah KPM Bansos Pangan di Provinsi Papua pada tahun 2022 berjumlah 1.205.586 KPM dengan rencana jumlah KPM adalah sebesar 1.500.427

KPM. Realisasi jumlah KPM cenderung mendekati rencana jumlah KPM Bansos Pangan. Hal serupa juga berlaku pada rencana dan realisasi anggaran Bansos Pangan di tahun yang sama seperti ditunjukkan pada Tabel 0.50.

Tabel 0.50 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Rencana Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Pangan (BANSOS PANGAN)	Realisasi Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Pangan (BANSOS PANGAN)	Rencana Anggaran Bantuan Sosial Pangan (BANSOS PANGAN)	Realisasi Anggaran Bantuan Sosial Pangan (BANSOS PANGAN)
Jayapura	19.364	17.672	11.609.600.000	10.596.800.000
Kepulauan Yapen	41.321	38.174	24.776.200.000	22.899.600.000
Biak Numfor	44.572	42.894	26.718.400.000	25.727.600.000
Sarmi	12.908	11.610	7.742.000.000	6.964.800.000
Keerom	15.431	14.483	9.253.400.000	8.687.800.000
Waropen	10.207	9.622	6.120.600.000	5.769.600.000
Supiori	7.977	7.918	4.784.200.000	4.748.800.000
Mamberamo Raya	8.212	6.600	4.926.000.000	3.958.800.000
Kota Jayapura	36.769	31.033	21.997.800.000	18.577.400.000
Papua	1.500.427	1.205.586	899.932.600.000	723.129.600.000

Sumber: BPS RI, 2023

2.3.2.4 Pertanahan

Urusan pertanahan di Provinsi Papua dilihat dari peralihan tanah. Peralihan tanah memiliki beberapa pengelompokan di antaranya jual-beli, pewarisan, hibah, tukar-menukar, dan lelang. Pada tahun 2016-2017, pertanahan di Provinsi Papua mengalami penurunan. Pertanahan berdasarkan jual-beli, pewarisan, hibah, tukar-menukar, dan lelang mengalami penurunan. Pada tahun 2017 penurunan peralihan tanah menjadi sebesar 5.887 ha.

Tabel 0.51 Peralihan Tanah di Provinsi Papua Tahun 2016-2017 (ha)

Tahun	Jual-Beli	Pewarisan	Hibah	Tukar Menukar	Lelang	Total
2016	6.208	559	254	6	30	7.057
2017	5.211	451	197	3	25	5.887

Sumber: Bappeda Papua

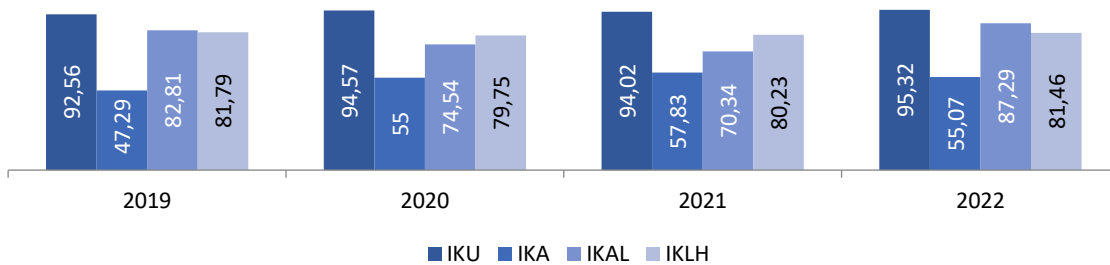
2.3.2.5 Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan salah satu unsur terpenting dalam suatu wilayah yang berkaitan dengan sumber daya alam. Lingkungan hidup di Provinsi Papua dapat dilihat dari indeks lingkungan hidup beserta nilai kompositnya dan persentase rumah tangga dengan layanan sanitasi yang dikelola secara aman berdasarkan tipe daerah.

A. Indeks Lingkungan Hidup

Provinsi Papua memiliki kekayaan akan sumber daya alam sehingga perencanaan dan pembangunan perlu memperhatikan dan menjaga unsur lingkungan hidup. Perubahan kondisi lingkungan menjadi salah satu isu penting terkait pengelolaan kualitas lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hidup diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). IKLH Provinsi Papua pada tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020-2022.

Gambar 0.54 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Kompositnya di Papua Tahun 2019-2022



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (data diolah, 2023)

Pada tahun 2023, perolehan IKLH Provinsi Papua dengan menggunakan metode lama masih mengungguli rata-rata IKLH Nasional. Skor IKLH Provinsi Papua sebesar 81,31, lebih tinggi 8,78 poin dibandingkan nasional yaitu sebesar 72,53. Sama halnya dengan perolehan IKLH, nilai komposit (IKU, IKA, IKL, IKAL) Provinsi Papua juga cenderung lebih tinggi dibandingkan nasional. Sedangkan jika dibandingkan dengan menggunakan rumus baru di tahun yang sama, IKLH Provinsi Papua mengalami kenaikan sebanyak 0,57 poin menjadi 81,88. Namun kenaikan ini tidak disertai dengan kenaikan pada salah satu nilai kompositnya. Perolehan IKA dengan rumus baru cenderung lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yaitu 70,74 dari 72,01. Penurunan tersebut terjadi karena terdapat penambahan parameter yang membuat nilai IKU cenderung turun. Selain itu pada rumus terbaru, terdapat perubahan metode perhitungan pada IKA menjadi metode IKA-INA serta klasifikasi tutupan lahan ditambahkan dalam perhitungan IKL dan penambahan Faktor Koreksi Ekosistem Gambut (FKEG) bagi kabupaten/kota dengan sistem gambut.

Tabel 0.52 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Kompositnya Berdasarkan Metode Perhitungan di Provinsi Papua Tahun 2023

Provinsi	Capaian 2023 (Rumus Lama)					Capaian 2023 (Rumus Baru)				
	IKLH	IKU	IKA	IKL	IKAL	IKLH	IKU	IKA	IKL	IKAL
Papua	81,31	95,87	54,73	100	84,56	81,88	84,47	70,74	100,01	84,56
Nasional	72,53	88,67	54,59	61,79	78,84	76,09	78,14	72,01	77,87	78,84

Sumber: Bappeda 2024 mengacu Surat Direktur Jenderal (Ditjen) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024

Apabila ditinjau secara kabupaten, Supiori menjadi kabupaten dengan perolehan IKLH tertinggi baik menggunakan rumus lama maupun baru pada tahun 2023 yaitu sebesar 87,44 dan 85,37. Sebaliknya, Kota Jayapura menjadi kota dengan perolehan IKLH terendah dengan kedua rumus tersebut di tahun 2023 yaitu sebesar 73,5 dan 78,65.

Tabel 0.53 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Kompositnya Berdasarkan Metode Perhitungan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2023

Kab/Kota	Gambut/Non Gambut	Capaian 2023 (Rumus Lama)				Capaian 2023 (Rumus Baru)			
		IKLH	IKU	IKA	IKL	IKLH	IKU	IKA	IKL
Biak Numfor	Non Gambut	82,84	95,23	62	95,71	82,12	84,13	70,74	97,94
Jayapura	Gambut	79,62	94,54	51,67	100	84,84	83,5	77,44	100
Keerom	Gambut	77,7	94,46	46,67	100	80,14	84,08	64,33	100
Kep. Yapen	Non Gambut	83,85	94,16	63,33	100	83,97	83,63	74,99	100
Mamb. Raya	Gambut	84,96	100	60	100	84,08	85,96	72,79	100
Sarmi	Gambut	78,93	94,4	50	100	80,7	83,97	65,94	100
Supiori	Non Gambut	87,44	98,89	67,78	100	85,37	85,52	76,68	100
Waropen	Gambut	81,45	97,52	53,33	100	81,3	85,02	66,39	100
Kota Jayapura	Gambut	75,5	93,32	49	88,03	78,65	83,36	66,54	90,75

Sumber: Bappeda 2024 mengacu Surat Direktur Jenderal (Ditjen) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024

B. Akses Sanitasi Aman

Akses sanitasi aman merupakan salah satu upaya dalam mengelola lingkungan secara berkelanjutan. Tertuang dalam poin 6 SDGs yaitu air bersih dan sanitasi layak, sanitasi aman diharapkan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas air bersih untuk mewujudkan air minum yang aman dan terjangkau. Akses sanitasi aman di Provinsi Papua melalui rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dilihat berdasarkan beberapa indikator. Indikator tersebut diantaranya adalah fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air, akses terhadap sanitasi layak, praktik buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka, akses terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T), dan keterlayanan sistem pengelolaan lumpur tinja. Persentase rumah tangga dengan layanan sanitasi yang dikelola secara aman di Provinsi Papua dapat dilihat pada Tabel 0.54.

Tabel 0.54 Persentase Rumah Tangga Menggunakan Layanan Sanitasi yang Dikelola Secara Aman Menurut Tipe Daerah di Provinsi Papua Tahun 2020-2023

	Perkotaan				Perdesaan				Perkotaan + Perdesaan			
	2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020
Papua	4,96	8,64	5,07	5,6	0,53	5,68	1,01	1,11	1,82	6,47	2,13	2,32
Indonesia	13,67	13,54	10,42	11,25	5,37	5,52	3,07	3,03	10,21	10,16	7,25	7,64

Sumber: Susenas Maret dalam BPS, 2023

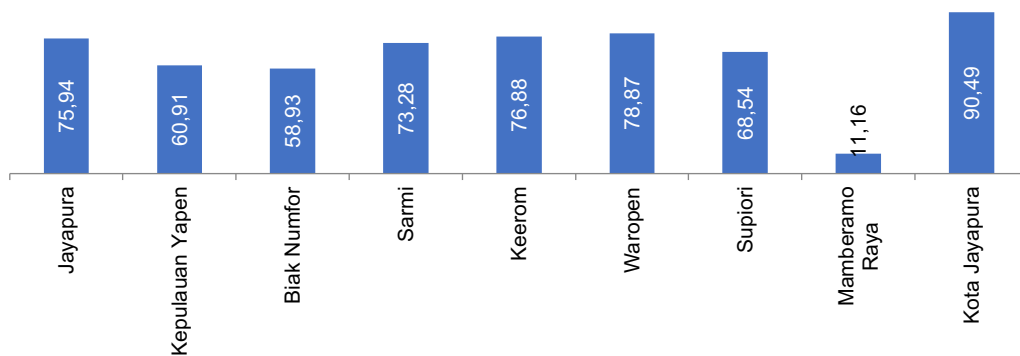
2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Provinsi Papua dilihat dari kepemilikan akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

a. Kependudukan

Penduduk pada usia 0-17 tahun di Provinsi Papua yang telah memiliki akta kelahiran di tahun 2020 sudah berada di atas rata-rata yaitu di atas 50% pada masing-masing kabupaten/kota. Meskipun kepemilikan akta kelahiran sudah berada di atas rata-rata, masih terdapat satu kabupaten dengan kepemilikan akta kelahiran di bawah rata-rata yaitu Kabupaten Mamberamo Raya sebesar 11,16%. Hal tersebut cukup menunjukkan ketimpangan besar dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Papua. Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-17 tahun menurut kabupaten/kota pada tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 0.55.

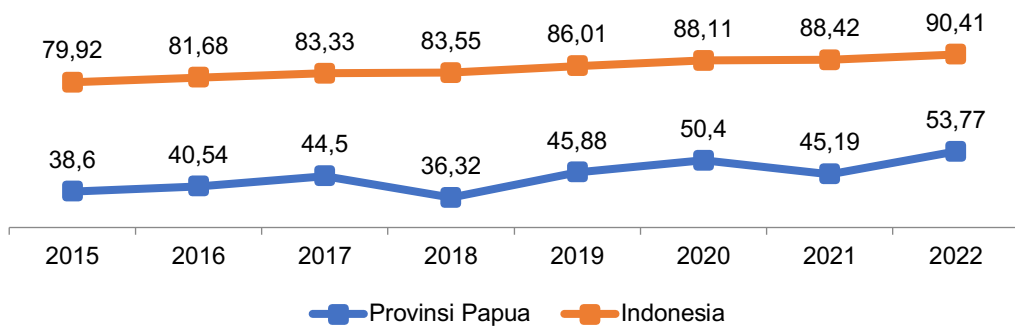
Gambar 0.55 Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-17 Tahun Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2020



Sumber: Analisis Profil Penduduk Provinsi Papua, BPS

Jika dilihat secara nasional melalui Gambar 0.56, cakupan kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-17 tahun di Provinsi Papua masih berada di bawah garis nasional. Meskipun persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran secara provinsi cenderung meningkat namun masih belum dapat mendekati persentase nasional.

Gambar 0.56 Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-17 Tahun di Provinsi Papua Tahun 2015-2022



Sumber: Susenas dalam BPS RI

b. Catatan Sipil

Pencatatan sipil merupakan pelayanan pencatatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sifatnya unik, tunggal, dan melekat pada penduduk yang terdaftar sebagai warga Indonesia. Kepemilikan NIK di Provinsi Papua sudah berada di atas rata-rata yaitu sebesar 80%. Meskipun begitu, masih terdapat satu kabupaten dengan persentase kepemilikan NIK sekaligus kepemilikan KTP terendah yaitu Kabupaten Mamberamo Raya. Persentase kepemilikan NIK berdasarkan jenis kelamin menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua pada tahun 2020 ditunjukkan pada Tabel 0.55.

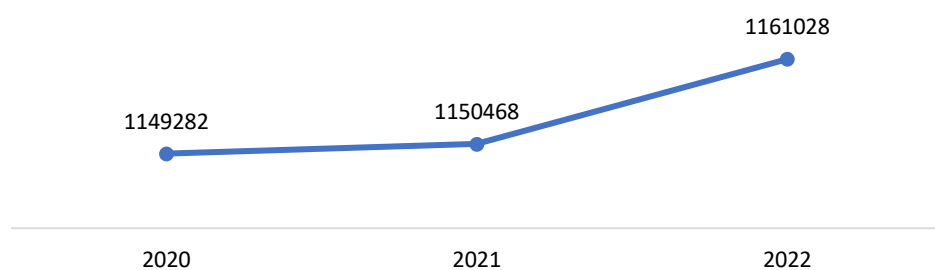
Tabel 0.55 Persentase Kepemilikan NIK Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2020

No	Kabupaten	Persentase Kepemilikan NIK		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Jayapura	86.98	86.68	86.84
2	Kepulauan Yapen	84.86	83.41	84.16
3	Biak Numfor	89.47	88.69	89.09
4	Sarmi	88.47	88.75	88.59
5	Keerom	82.25	84.46	83.24
6	Waropen	87.94	87.69	87.82
7	Supiori	99.42	98.84	99.15
8	Mamberamo Raya	39.72	41.12	40.36
9	Kota Jayapura	94.95	95.6	95.24

Sumber: BPS Provinsi Papua (data diolah, 2021)

Berdasarkan data Capaian Target Stranas AKPSH oleh Bappenas pada indikator cakupan kepemilikan NIK pada semua penduduk Warga Negara Indonesia, Provinsi Papua mengalami kenaikan jumlah penduduk yang tercakup dalam kepemilikan NIK. Cakupan kepemilikan NIK dari tahun 2020-2022 di Provinsi Papua ditunjukkan pada Gambar 0.57.

Gambar 0.57 Cakupan Kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Provinsi Papua 2020-2022

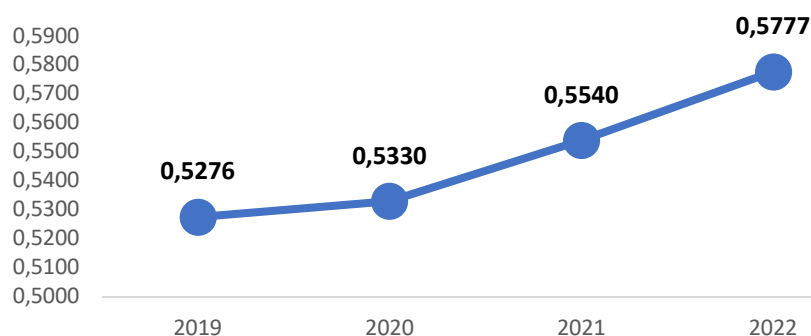


Sumber: Capaian Target Stranas AKPSH Bappenas, 2023

2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Menurut laporan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Papua menjadi Provinsi yang memiliki status desa sangat tertinggal terbanyak pada 2022. Meskipun Demikian, terdapat peningkatan nilai Indeks Desa Membangun dari 0,5276 pada tahun 2019 menjadi 0,5777 pada tahun 2022.

Gambar 0.58 Indeks Desa Membangun Provinsi Papua



Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, (data diolah)
Catatan : Data Provinsi Papua (9 Kabupaten/Kota)

Tabel 0.56 Alokasi Dana Desa di Provinsi Papua (Milyar)

Tahun	Uraian	Dana Desa	Total TKDD	% DD Terhadap TKDD
2020	Anggaran	964.17	7817.78	12.33
	Realisasi	964.14	7765.70	12.42
	Realisasi Capaian	100.00	99.33	100.67
2021	Anggaran	985.10	7807.25	12.62
	Realisasi	983.54	7735.30	12.71
	Realisasi Capaian	99.84	99.08	100.77
2022	Anggaran	802.71	9218.91	8.71
	Realisasi	802.12	9576.53	8.38
	Realisasi Capaian	99.93	103.88	96.19

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan RI, 2021, (data diolah)
Catatan: Data Provinsi Papua (9 Kab/Kota)

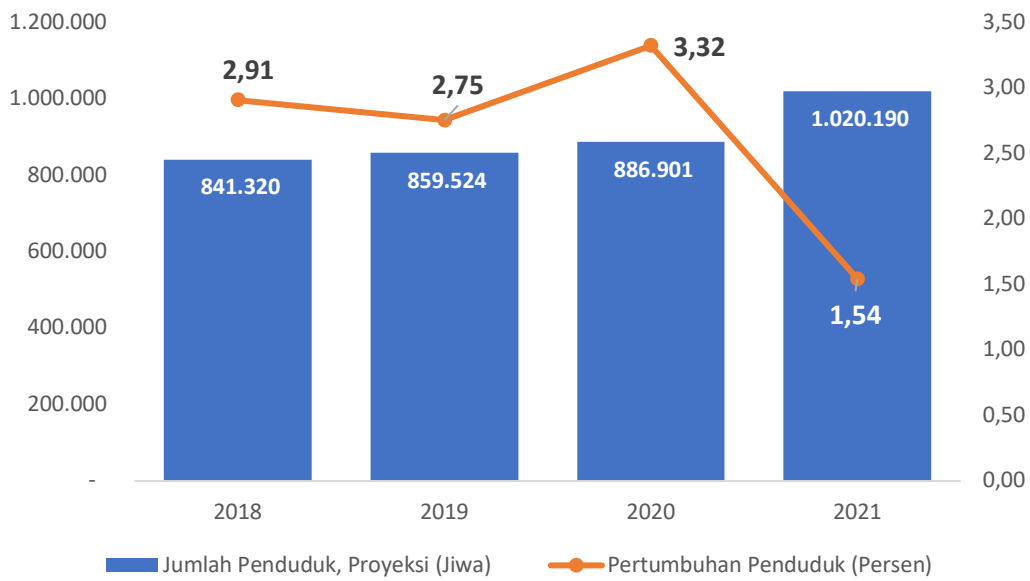
Pemberdayaan masyarakat dan kampung di Provinsi Papua tidak luput dari peran Dana Desa sebagai wujud komitmen Pemerintah Pusat. UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memandatkan pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran APBN ke Desa sebesar 10% (on top) dari dana transfer daerah secara bertahap. Alokasi anggaran tersebut kemudian diberi nama Dana Desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN - yang telah diubah dua kali, terakhir PP Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN-, Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk disalurkan kembali ke Rekening Kas Desa (RKD). Untuk mendapatkan penyaluran tersebut Desa harus telah menetapkan dokumen APBD dan laporan realisasi keuangan sebelumnya, sedangkan daerah telah melaporkan konsolidasi laporan realisasi keuangan desa tahun sebelumnya.

2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jumlah penduduk Provinsi Papua mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 841.320 jiwa pada tahun 2018 menjadi 1.020.190 jiwa pada tahun 2021. Meskipun demikian, terjadi penurunan laju pertumbuhan penduduk dari 2,91% pada 2018 menjadi 1,54% pada tahun 2021 (lihat Gambar 0.59). Berdasarkan Gambar 0.60 dapat diketahui bahwa rata-rata jumlah anggota keluarga di Provinsi Papua sebanyak 4-5 orang per keluarga yang mengindikasikan terdapat upaya

pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Provinsi Papua. Hal ini pun terlihat dari Tabel 0.57 yang menunjukkan jumlah peserta KB aktif di Provinsi Papua yang cukup tinggi pada tahun 2017-2021, meskipun dalam kondisi fluktuatif setiap tahunnya.

Gambar 0.59 Jumlah Penduduk (Juta Jiwa) dan Laju Pertumbuhan Penduduk (%)



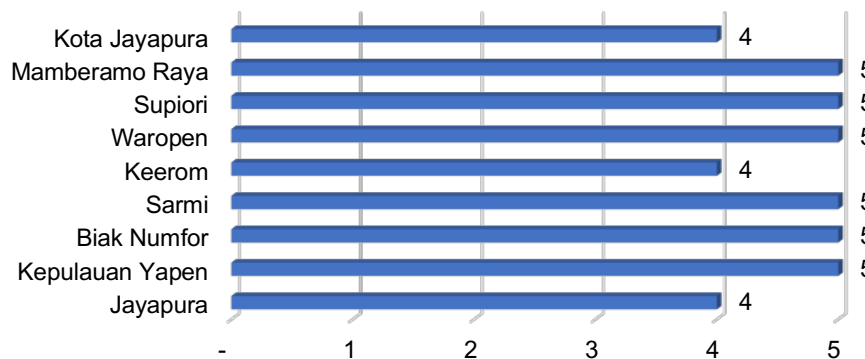
Sumber: BPS Provinsi Papua (Data Provinsi Papua 9 Kab/Kota)

Tabel 0.57 Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua (Jiwa)

No	Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jayapura	22,729	24,189	13,814	1,143	1,865
2	Kepulauan Yapen	5,113	7,474	478	5,209	6,426
3	Biak Numfor	13,378	15,189	18,031	1,653	7,568
4	Sarmi	514	1,354	19,093	19,093	7,901
5	Keerom	2,863	4,588	6,824	8,225	8,984
6	Waropen	865	2,340	5,602	5,977	7,179
7	Supiori	463	651	876	889	76
8	Mamberamo Raya	961	171	299	907	907
9	Kota Jayapura	60,326	33,394	48,066	46,727	50,876
Papua		107,212	89,350	113,083	89,823	91,782

Sumber: BPS Provinsi Papua

Gambar 0.60 Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga (Orang)



Sumber: BPS Provinsi Papua

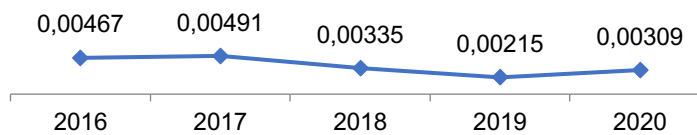
2.3.2.9 Perhubungan

Perhubungan di Provinsi Papua dilihat dari transportasi darat, laut, udara, dan konektivitas. Transportasi darat mencakup jalan, transportasi laut mencakup jumlah penumpangan domestik menggunakan moda transportasi kapal, dan transportasi udara mencakup jumlah penumpang berdasarkan moda transportasi pesawat. Konektivitas menjelaskan terkait aksesibilitas jalan baik provinsi maupun kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Papua berdasarkan tingkat kemantapannya.

1) Transportasi Darat

Provinsi Papua memiliki terminal tipe C sebanyak dua buah. Terminal tipe C merupakan terminal dengan cakupan wilayah yang lebih kecil. Terminal tipe C di Provinsi Papua berada di beberapa lokasi, yaitu Entrop di Kota Jayapura dan Biak di Kabupaten Biak Numfor.

Gambar 0.61 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Provinsi Papua Tahun 2016-2020 (km/unit)



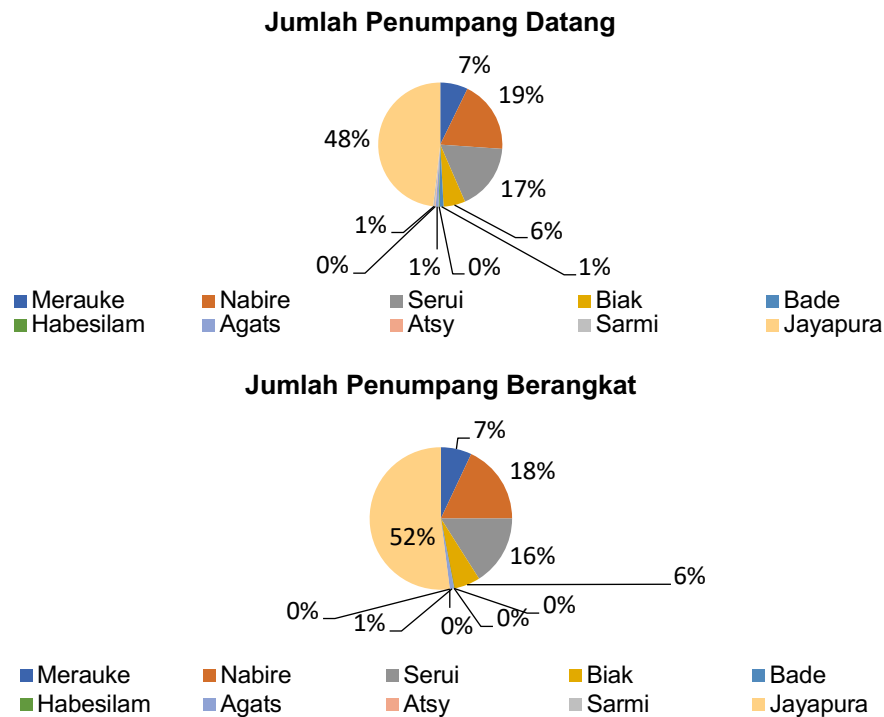
Sumber: BPS Provinsi Papua

Penggunaan transportasi darat di Provinsi darat dilihat dari ketersediaan aksesibilitas berupa jalan terhadap jumlah kendaraan. Tahun 2016-2020 ketersediaan jalan terhadap jumlah kendaraan mengalami penurunan. Rata-rata perbandingan panjang jalan dengan kendaraan bermotor pada tahun 2016 adalah 1 km/467 unit kendaraan dan menurun hingga tahun 2020 sebesar 1 km/309 unit kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Provinsi Papua pada tahun 2016-2017 ditunjukkan pada Gambar 0.61.

2) Transportasi Laut

Angkutan laut menjadi salah satu moda transportasi untuk mendukung mobilitas penduduk yang semakin tinggi terutama untuk wilayah-wilayah yang tidak bisa dijangkau melalui jalur darat maupun udara. Angkutan laut masih dipilih menjadi salah satu moda transportasi juga dikarenakan tarifnya yang relatif masih murah jika dibandingkan dengan transportasi udara untuk tujuan yang sama.

Gambar 0.62 Persentase Penumpang Datang dan Berangkat Dalam Negeri Menurut Pelabuhan Provinsi Papua Tahun 2022



Sumber: Statistik Transportasi Provinsi Papua Tahun 2022

Transportasi laut di Provinsi Papua dilihat dari jumlah penumpang domestik yang menggunakan mode transportasi laut kapal baik berangkat maupun datang. Diketahui bahwa jumlah penumpang domestik baik datang maupun berangkat di sepuluh pelabuhan di Papua (sebelum pemekaran) pada tahun 2022 masing-masingnya mencapai 384.492 orang dan 372.184 orang. Penumpang yang datang maupun berangkat seluruhnya merupakan penumpang domestik/dalam negeri. Pelabuhan Jayapura merupakan pelabuhan dengan jumlah penumpang datang dan berangkat paling banyak yang memberikan andil lebih dari 30% terhadap total jumlah penumpang. Jumlah penumpang domestik di Provinsi Papua (sebelum pemekaran) dengan moda transportasi laut pada tahun 2022 ditunjukkan pada Gambar 0.62.

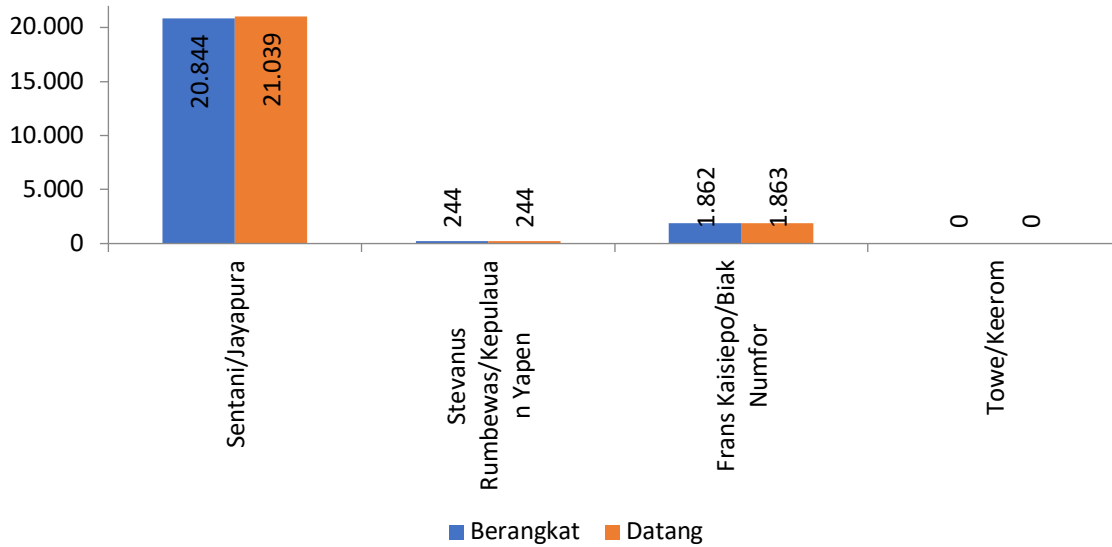
3) **Transportasi Udara**

Transportasi udara menjadi salah satu transportasi pilihan untuk perjalanan di dalam pulau maupun keluar Provinsi Papua. Salah satu mode yang digunakan pada transportasi udara di Provinsi Papua adalah pesawat. Uraian terkait transportasi udara di Provinsi Papua dapat dilihat dari jumlah keberangkatan dan kedatangan baik pesawat maupun penumpang. Terdapat empat bandara yang berlokasi di Provinsi Papua di antaranya yaitu Bandara Sentani, Bandara Stevanus Rumbewas, Bandara Frans Kaisepo, dan Bandara Towe.

Bandara Sentani (Jayapura) menjadi bandara dengan jumlah keberangkatan dan kedatangan pesawat tertinggi pada tahun 2022, masing-masingnya mencapai 20.844 unit dan 21.039 unit. Adapun Bandara Stevanus Rumbewas (Kepulauan Yapen) memiliki total keberangkatan dan kedatangan pesawat yang sama yaitu 244 unit. Bandara Frans Kaisepo (Biak Numfor) memiliki keberangkatan dan kedatangan yang hampir sama yaitu 1.862 unit dan 1.863 unit. Jumlah keberangkatan dan

kedatangan pesawat sebagai moda transportasi udara menurut bandara ditunjukkan pada Gambar 0.63.

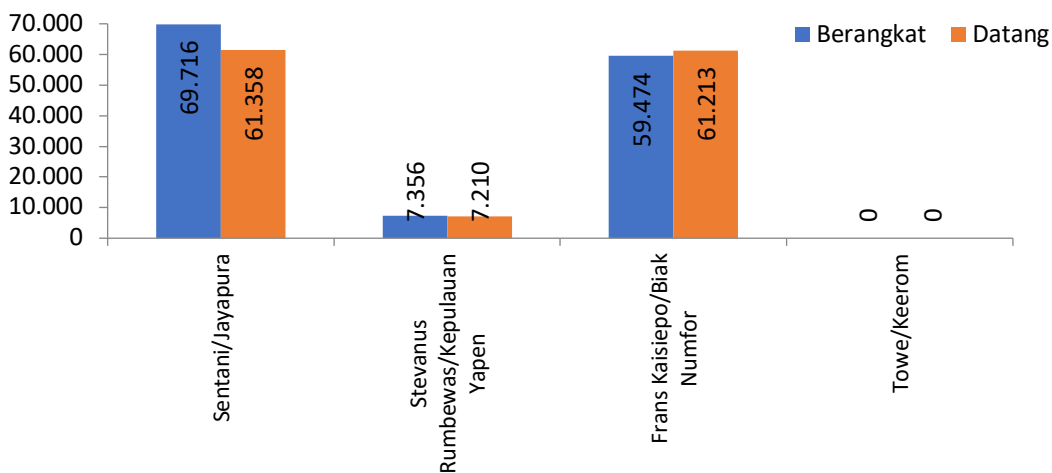
Gambar 0.63 Jumlah Keberangkatan dan Kedatangan Pesawat Menurut Bandara di Provinsi Papua Tahun 2022



Sumber: Statistik Transportasi Provinsi Papua Tahun 2022

Jumlah keberangkatan dan kedatangan penumpang tertinggi pada tahun 2022 berada pada Bandara Sentani yang masing-masingnya mencapai 69.716 orang dan 61.358 orang. Jumlah tersebut diikuti oleh Bandara Kaisiepo dengan keberangkatan mencapai 59.474 orang dan kedatangan mencapai 61.213 orang. Adapun Bandara Stevanus Rumbewas memiliki jumlah keberangkatan sebanyak 7.356 orang dan kedatangan sebanyak 7.210 orang. Jumlah keberangkatan dan kedatangan penumpang menurut bandara ditunjukkan pada Gambar 0.64.

Gambar 0.64 Jumlah Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang Menurut Bandara di Provinsi Papua Tahun 2022

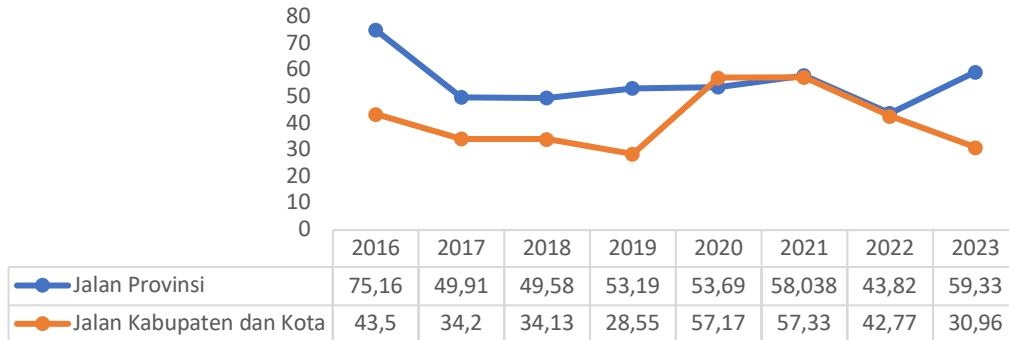


Sumber: Statistik Transportasi Provinsi Papua Tahun 2022

4) Konektivitas

Konektivitas di Provinsi Papua juga dapat dilihat dari keterhubungan aksesibilitas berupa jalan daerah. Jalan daerah merupakan jalan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang didalamnya berisikan kemantapan jalan baik secara provinsi maupun kabupaten dan kota. Jalan daerah dalam kondisi mantap artinya jalan daerah dalam kondisi baik dan sedang. Persentase kemantapan jalan provinsi maupun kabupaten dan kota di Provinsi Papua ditunjukkan pada Gambar 0.65.

Gambar 0.65 Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap di Provinsi Papua Tahun 2016-2023



Sumber : Jalan Provinsi (kecuali DKI Jakarta) : Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/ Kota (SiPDJD)

2.3.2.10 Penanaman Modal

Penanaman modal di Provinsi Papua dilihat dari realisasi investasi Penanaman Modal Luar Negeri dan Dalam Negeri. Adapun jumlah investor di Provinsi Papua pada tahun 2019-2023 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2019 jumlah proyek mencapai 127 unit dan di tahun 2023 menurun mencapai 73 unit. Realisasi investasi penanaman modal luar negeri di Provinsi Papua juga mengalami penurunan menjadi 8,3 juta US\$ pada tahun 2023. Jumlah proyek dan realisasi investasi pada tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 0.58.

Tabel 0.58 Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Provinsi Papua Tahun 2019-2023 (Unit) (Juta US\$)

Uraian	Proyek (Unit)					Investasi (Juta US\$)				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Papua	127	184	95	86	73	941	567,7	1.489,1	1.260,5	8,3
Indonesia	30.354	36.726	27.271	32.681	70.898	28.208,8	28.666,3	31.093,1	45.605	50.267,5

Sumber: BPS RI, 2024

Jumlah proyek pada penanaman modal dalam negeri cenderung mengalami peningkatan selama kurun waktu 2019 hingga 2023 dengan proyek pada tahun 2019 sebanyak 68 unit dan 2023 sebanyak 971 unit. Realisasi investasi juga mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2023 meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021. Jumlah proyek dan realisasi investasi penanaman modal dalam negeri pada tahun 2023 mencapai 971 unit dengan realisasi investasi sebesar 1.174,1 miliar rupiah.

Tabel 0.59 Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Provinsi Papua Tahun 2019-2023 (Unit) (Miliar Rupiah)

Uraian	Proyek (Unit)					Investasi (Miliar Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Papua	68	323	473	754	971	567,7	2.722,2	911	1.311,1	1.174,1
Indonesia	30.45	96.62	106.00	124.58	266.72	386.498,	413.535,	447.063,	552.76	674.923,
a	1	3	2	2	2	4	5	6	9	4

Sumber: BPS RI, 2024

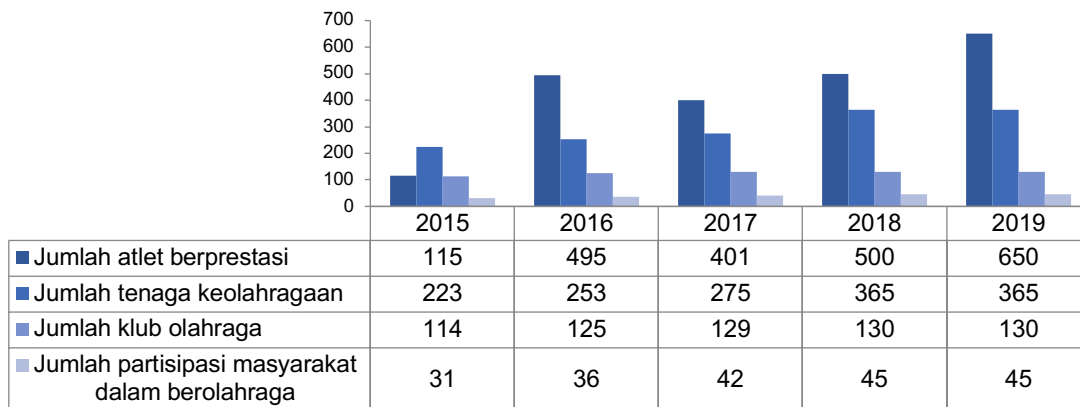
2.3.2.11 Kepemudaan dan Olahraga

Kepemudaan dan olahraga di Provinsi Papua dilihat dari keorganisasian yang ada dan sarana prasarana olahraga sebagai fasilitas olahraga. Organisasi terbagi menjadi dua yaitu organisasi keolahragaan dan kepemudaan. Sarana dan Prasarana olahraga menjadi penunjang untuk kegiatan olahraga yang ada di Provinsi Papua.

3) Organisasi Keolahragaan

Organisasi keolahragaan menjadi wadah bagi masyarakat yang ingin mengembangkan minatnya pada bidang olahraga. Provinsi Papua mengalami kenaikan klub olahraga dikarenakan semakin banyaknya kegiatan olahraga dari berbagai tingkatan, mulai dari kabupaten hingga nasional. Pemberdayaan organisasi keolahragaan dan partisipasi masyarakat dalam bidang olahraga di Provinsi Papua ditunjukkan pada Gambar 0.66.

Gambar 0.66 Pemberdayaan Organisasi Keolahragaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Olahraga di Provinsi Papua Tahun 2015-2019



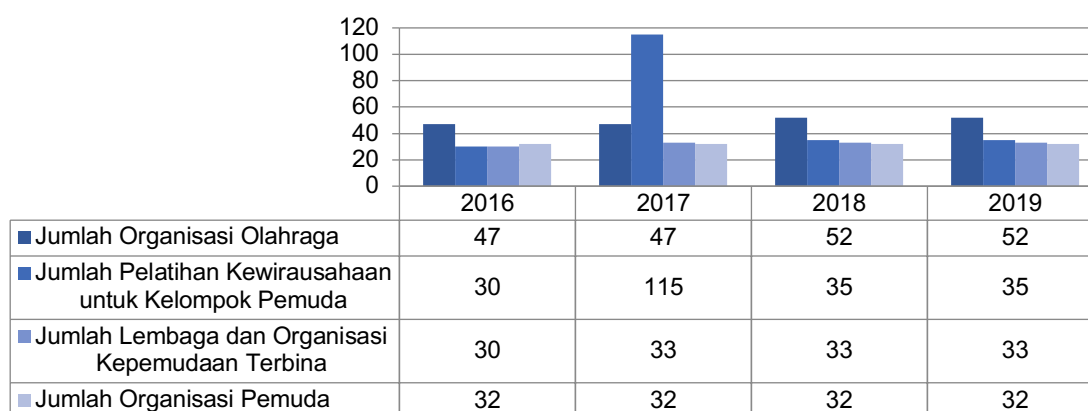
Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2021

Berdasarkan Gambar 0.66, diketahui bahwa, jumlah partisipasi masyarakat dalam berolahraga semakin meningkat dari tahun 2015-2019 begitu juga dengan jumlah atlet berprestasi, klub olahraga, dan jumlah tenaga keolahragaan. Banyaknya klub olahraga juga diikuti dengan meningkatnya jumlah atlet-atlet berprestasi di tingkat kabupaten hingga internasional dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan jumlah tersebut, organisasi keolahragaan di Provinsi Papua semakin mengalami peningkatan dalam mendukung bidang olahraga.

4) Organisasi Kepemudaan

Organisasi kepemudaan merupakan salah satu bentuk atau wadah bagi para pemuda untuk mengembangkan diri. Terdapat empat indikator bagi pemberdayaan pemuda di Provinsi Papua pada tahun 2016-2019, di antaranya adalah organisasi olahraga, lembaga dan organisasi kepemudaan terbina, organisasi pemuda, dan pelatihan kewirausahaan untuk Kelompok Pemuda.

Gambar 0.67 Jumlah Organisasi Pemberdayaan Pemuda di Provinsi Papua Tahun 2016-2019 (Unit)



Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2021 (data diolah)

Indikator-indikator tersebut dapat dilihat berdasarkan jumlah unit yang ada. Jumlah unit organisasi olahraga di Provinsi Papua mengalami kenaikan dari tahun 2016-2019, diikuti dengan jumlah unit lembaga dan organisasi kepemudaan terbina, dan jumlah organisasi pemuda. Satu indikator yang mengalami penurunan ditinjau dari unit adalah jumlah pelatihan kewirausahaan untuk kelompok pemuda. Keempat indikator tersebut beserta jumlah unit pada tahun 2016-2019 dapat dilihat pada Gambar 0.67.

Kepemudaan di Provinsi Papua juga ditinjau berdasarkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). IPP Papua semakin meningkat dari tahun 2019 hingga tahun 2021 dari 49,83 menjadi 52,00. Penyumbang kenaikan pada angka IPP bersumber dari domain kesehatan dari 67,50 menjadi 75,00 dan domain partisipasi kepemimpinan dari 46,67 menjadi 53,33.

Tabel 0.60 Perkembangan Nilai IPP dan Domain Penyusun IPP Provinsi Papua dan Indonesia Tahun 2019-2021

WILAYAH	INDIKATOR	2019	2020	2021
PAPUA	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	49.83	50.17	52.00
	a. Domain Pendidikan	56.67	56.67	56.67
	b. Domain Kesehatan dan Kesejahteraan	67.50	67.50	75.00
	c. Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja	45.00	50.00	45.00
	d. Domain Partisipasi dan Kepemimpinan	46.67	46.67	53.33
	e. Domain Gender dan Diskriminasi	33.33	30.00	30.00
INDONESIA	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	52.67	51.00	53.33
	a. Domain Pendidikan	70.02	70.01	70.00
	b. Domain Kesehatan dan Kesejahteraan	55.00	55.00	60.00
	c. Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja	45.00	40.00	40.00

WILAYAH	INDIKATOR		2019	2020	2021
	d.	Domain Partisipasi dan Kepemimpinan	46.66	46.67	43.33
	e.	Domain Gender dan Diskriminasi	46.67	43.33	53.33

Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam dokumen Indeks Pembangunan Pemuda 2022

5) Sarana dan Prasarana Olahraga

Sarana dan prasarana olahraga merupakan fasilitas fisik untuk menunjang kebutuhan dalam berolahraga. Provinsi Papua memiliki sarana dan prasarana olahraga untuk menunjang penduduk melakukan kegiatan olahraga. Berdasarkan Tabel 0.61, diketahui bahwa terdapat sejumlah fasilitas penunjang berbagai jenis olahraga yang ada di Provinsi Papua ditinjau dari desa/kelurahan. Pada tahun 2021, fasilitas olahraga terbanyak pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua adalah fasilitas sepak bola dan bola voli.

Tabel 0.61 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Fasilitas Lapangan Olahraga di Provinsi Papua Tahun 2021

No	Kabupaten	Sepak Bola	Bola Voli	Bulu Tangkis	Bola Basket	Tenis Lapangan	Tenis Meja	Futsal	Renang	Bela Diri	Bilyard	Lainnya
1	Jayapura	74	120	29	16	4	15	26	4	7	7	2
2	Kepulauan Yapen	36	61	3	1	1	2	4	1	2	3	1
3	Biak Numfor	116	192	7	3	4	4	9	1	2	3	0
4	Sarmi	36	53	4	1	1	1	8	0	3	1	0
5	Keerom	34	76	18	4	0	12	7	1	14	3	0
6	Waropen	10	28	2	1	0	3	3	0	1	0	0
7	Supiori	17	37	2	2	0	2	0	0	0	0	0
8	Mamberamo Raya	34	47	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kota Jayapura	23	30	15	14	11	5	14	5	11	5	1

Sumber: Statistik Potensi Desa Provinsi Papua 2021

2.3.2.12 Statistik

Statistik di Provinsi Papua dapat dilihat dari ketersediaan dokumen statistik daerah. Ketersediaan dokumen statistik diperlukan dalam rangka perencanaan serta pembangunan di Provinsi Papua yang berdasarkan pada hasil perhitungan. Instansi yang bergerak dalam penyediaan dokumen statistik adalah Badan Pusat Statistik (BPS) dan salah satu unit yang berada di bawah naungan Bappeda yaitu Pusat Data dan Analisis Pembangunan Provinsi Papua (PUSDALISBANG). PUSDALISBANG memiliki muatan utama berupa statistik hasil pembangunan dari penggunaan dana OTSUS Papua, penyediaan data SID, analisis statistik kinerja pembangunan, dan penyajian data tematik baik secara tematik, holistik, integratif, dan spasial. PUSDALISBANG Provinsi Papua juga mengembangkan e-Government sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas pembangunan.

2.3.2.13 Kebudayaan

Untuk menjaga dan melestarikan seni budaya Papua, saat ini telah tersedia sarana dan prasarana penunjang seni dan budaya berupa museum dan gedung-gedung kesenian. Dimana museum yang terbesar ada 2 (dua) gedung yang berlokasi di Kota Jayapura yaitu Museum Negeri Papua yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Papua, dan Museum Loka Budaya yang dikelola oleh Universitas Cenderawasih.

Koleksi seni budaya Papua pada Museum Negeri Papua kurang lebih sebanyak 3.447 koleksi yang meliputi benda geologi, biologi, etnografi, arkeologi, sejarah, numismatik, fisiologi, keramik, seni rupa, profil manusia, peta, dan diorama. Museum ini dilengkapi fasilitas sebagai berikut, ruang Pameran Tetap, ruang Pameran Temporer, ruang Auditorium, ruang Perpustakaan, ruang laboratorium, ruang Penyimpanan Koleksi, ruang Bengkel/ Preparasi, dan ruang Administrasi. Sedangkan koleksi utama dari Museum Loka Budaya adalah benda-benda etnografi yang berasal dari 270-an suku di Papua yang terdiri atas: peralatan dapur; peralatan yang berhubungan dengan mata pencaharian hidup seperti peralatan bercocok tanam, berburu dan menangkap ikan; busana dan perhiasan tubuh; peralatan perang; peralatan membayar harta (mas kawin, denda,dll); benda-benda sakral; alat transportasi dan alat-alat musik.

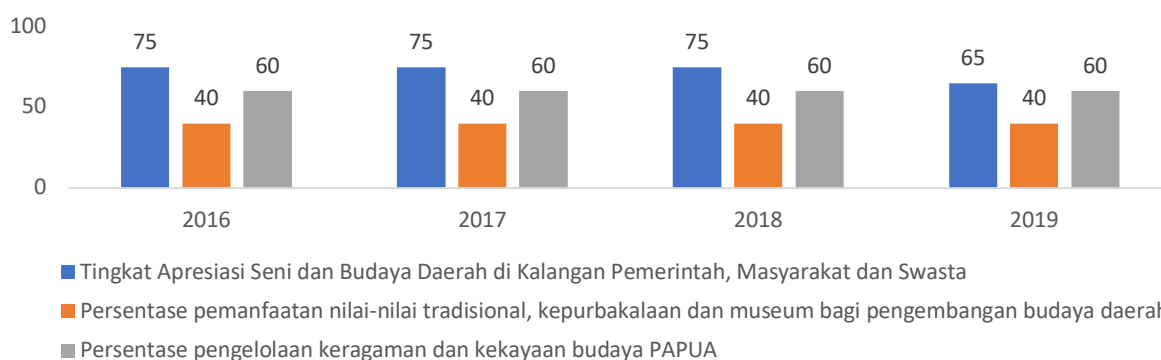
Dalam Dokumen Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia yang dipublikasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, tercatat sudah ada 17 Karya Budaya yang merupakan warisan suku-suku asli Papua. Mulai dari Yosim Pancar, Ukiran Asmat, hingga Pokem yang merupakan salah satu kemahiran dan kerajinan tradisional Papua.

Tabel 0.62 Perkembangan Warisan Tak Benda Papua

Tahun	No	Karya Budaya	Kategori
2013	67	Yosim Pancar	Seni Pertunjukan
	68	Ukiran Asmat	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
	69	Barappen	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan
	70	Tifa	Seni Pertunjukan
	77	Noken	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2015	119	Papeda	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
	120	Tomako Batu	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
	121	Koteka	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2016	141	Wor Biak	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan
	142	Elha	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
	143	Aker	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
	144	Honai	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
	145	Khombow	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
	146	Terfo	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2017	142	Ndambu	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan
	143	Yu	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan
	144	Pokem	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2018' (Catatan : Belum dipisah 29 Kab/Kota)

Gambar 0.68 Capaian Urusan Kebudayaan Provinsi Papua Tahun 2016-2019



Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Papua

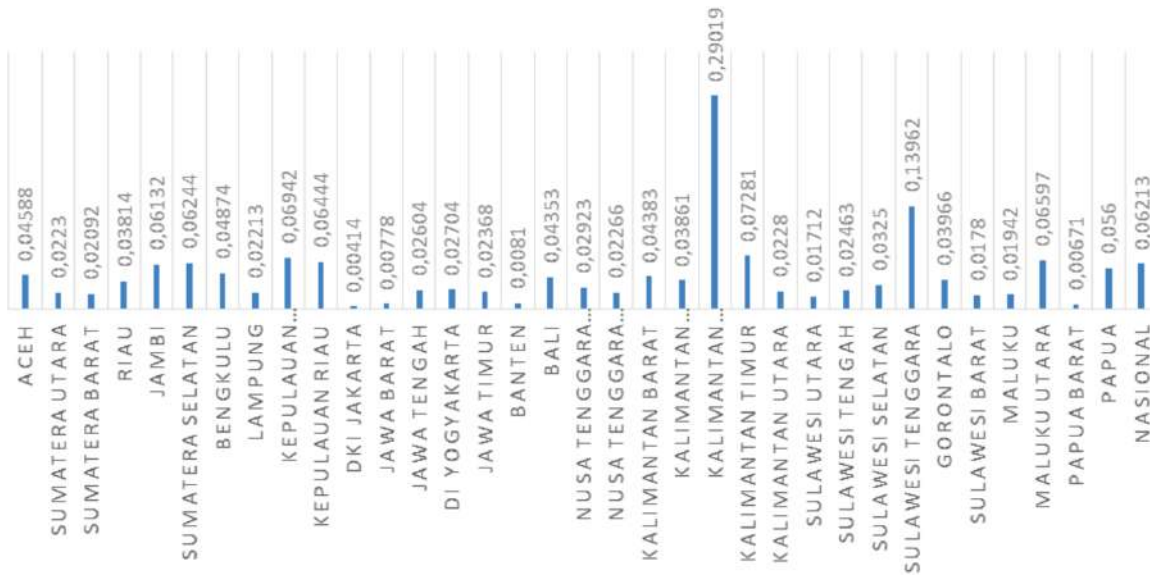
Salah satu keberhasilan pemerintah provinsi dalam mempromosikan dan menjaga kelestarian budaya Papua adalah mempatenkan Noken sebagai salah satu warisan dunia. Dimana pada tahun 2011 Noken Papua telah dinobatkan oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Takbenda dari Indonesia yang membutuhkan perlindungan mendesak. Noken Papua adalah hasil daya cipta, rasa dan karsa yang dimiliki manusia berbudaya dan beradab. Walaupun Noken berbentuk seperti halnya tas yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan berbagai macam benda dan peralatan, namun masyarakat Papua sendiri tidak menyebut noken sebagai tas. Bagi masyarakat Papua, Noken memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan tas yang diproduksi pabrik, baik secara bahan, jenis, model maupun bentuk Noken.

Tingkat apresiasi terhadap seni dan budaya daerah di Provinsi Papua dinilai cukup tinggi yaitu rata-rata sebesar 65 persen dalam rentang waktu lima tahun terakhir. Hal tersebut bisa terjadi disebabkan salah satunya oleh tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang seni dan budaya daerah Papua yang sudah mulai berkurang. Meskipun capaian tersebut hingga tahun 2019 terlihat menurun dari tahun sebelumnya. Tercatat pada tahun 2016 tingkat apresiasi terhadap seni dan budaya adalah sebesar 75 persen, namun mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 65 persen.

2.3.2.14 Perpustakaan

Perpustakaan di Provinsi Papua dapat dilihat dari ketercukupan jumlah koleksi. Jumlah koleksi dapat dikatakan mencukupi jika setiap satu orang penduduk membaca dua koleksi berdasarkan ketentuan IFLA/UNESCO. Secara nasional, rasio ketercukupan jumlah koleksi masih belum mencukupi ketentuan IFLA/UNESCO. Berdasarkan data rasio jumlah koleksi koleksi dari IFLA/UNESCO, Provinsi Papua memiliki rasio sebesar 0,056.

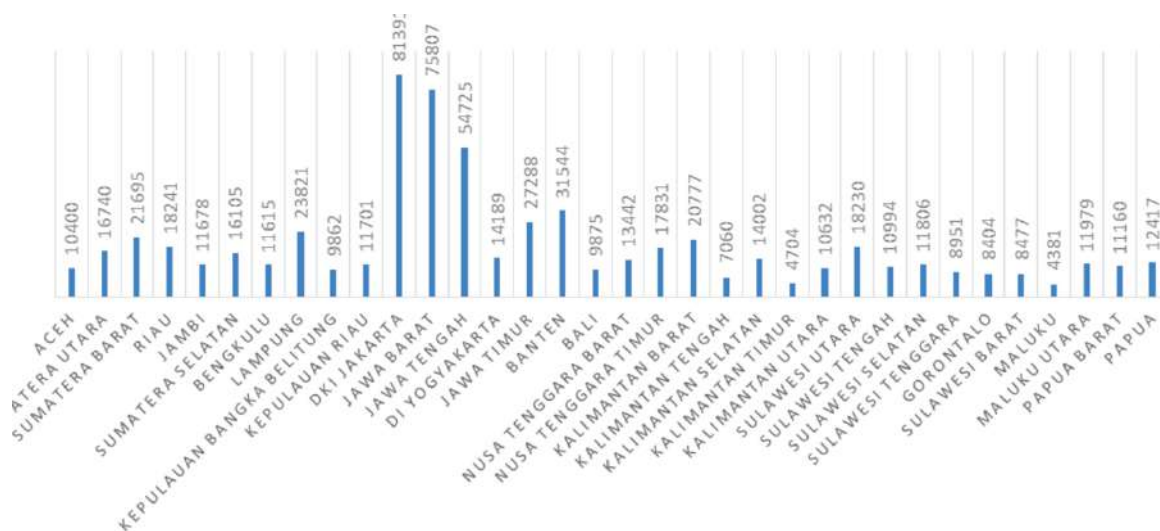
Gambar 0.69 Rasio Ketercukupan Jumlah Koleksi Perpustakaan Berdasarkan Kategori Dari IFLA/UNESCO pada 34 Provinsi Di Indonesia Dan Secara Nasional



Sumber: Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024

Berdasarkan data rasio ketercukupan dengan penilaian IFLA/UNESCO pada Gambar 0.69, diketahui bahwa seluruh provinsi di Indonesia masih belum memenuhi ketercukupan jumlah koleksi memenuhi ketercukupan jumlah koleksi. Meski begitu, secara persentase jumlah koleksi buku yang dipinjam terhadap keseluruhan koleksi buku, Provinsi Papua menjadi salah satu provinsi dengan persentase tertinggi setelah Provinsi Banten. Persentase tersebut ditunjukkan pada Gambar 0.70.

Gambar 0.70 Persentase Jumlah Koleksi Buku yang Dipinjam Terhadap Keseluruhan Koleksi Buku pada 34 Provinsi di Indonesia dan Secara Nasional



Sumber: Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024

Berdasarkan data perpustakaan dalam website pendataan perpustakaan berbasis wilayah, jumlah perpustakaan di Provinsi Papua mencapai 1077 unit yang meliputi perpustakaan sekolah sebanyak 918 unit, umum sebanyak 81 unit, perguruan tinggi

sebanyak 48 unit, dan khusus sebanyak 30 unit. Jumlah perpustakaan ditunjukkan pada Gambar 0.71.

Gambar 0.71 Sebaran Perpustakaan Dalam Peta Secara Nasional

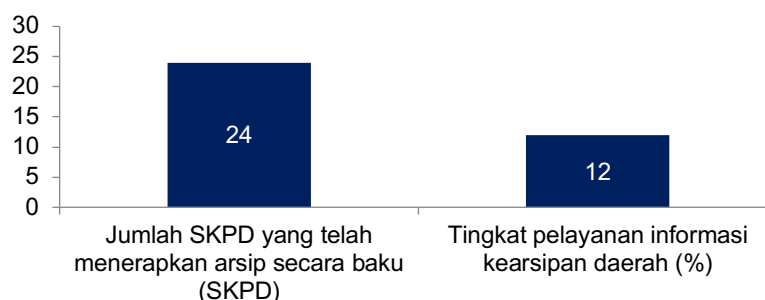


Sumber: data.perpusnas.go.id

2.3.2.15 Kearsipan

Urusan kearsipan di Provinsi Papua meliputi berbagai kegiatan di dalamnya meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam arsip nasional. Pengelolaan arsip didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, dan lainnya. Tenaga arsip dalam mengelola kearsipan merupakan tenaga arsip dari Perangkat Daerah (PD) yang menerapkan arsip secara baku dan telah mengikuti berbagai pembekalan terkait kearsipan. Perangkat Daerah di Provinsi Papua yang telah menerapkan arsip buku secara baku baru berjumlah 24 PD, sehingga menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa PD yang belum menerapkan arsip secara baku.

Gambar 0.72 Jumlah SKPD yang Telah Menerapkan Arsip secara Baku di Provinsi Papua Tahun 2016



Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2021

2.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

2.3.3.1 Pariwisata

Provinsi Papua memiliki jumlah akomodasi sebanyak 28 unit, 2148 kamar dan 3019 tempat tidur yang tersebar di Kabupaten Jayapura, kepulauan Yapen, Biak Numfor dan kota Jayapura pada tahun 2021 (lihat Tabel 0.63). Kota Jayapura merupakan wilayah yang paling banyak memiliki akomodasi, kamar dan tempat tidur untuk penunjang pariwisata. Pengembangan/ pembangunan layanan akomodasi perlu lebih ditingkatkan di Kabupaten Sarmi, Keerom, Waropen, Supiori dan

Mamberamo Raya karena sampai dengan tahun 2021 belum memiliki layanan akomodasi dalam mendukung kegiatan pariwisata daerah.

Tabel 0.63 Jumlah Akomodasi, Kamar dan Tempat Tidur di Hotel pada Provinsi Papua

No	Kabupaten/Kota	2019			2020			2021		
		Akomodasi	Kamar	Tidur Tempat	Akomodasi	Kamar	Tidur Tempat	Akomodasi	Kamar	Tidur Tempat
1	Jayapura	4	293	463	5	231	611	5	428	695
2	Kepulauan Yapen	1	31	50	1	26	51	1	30	51
3	Biak Numfor	2	78	106	2	57	106	2	78	111
4	Sarmi									
5	Keerom									
6	Waropen									
7	Supiori									
8	Mamberamo raya									
9	Kota Jayapura	15	1170	1886	15	1093	1756	20	1612	2162
PROVINSI PAPUA		22	1572	2505	23	1407	2524	28	2148	3019

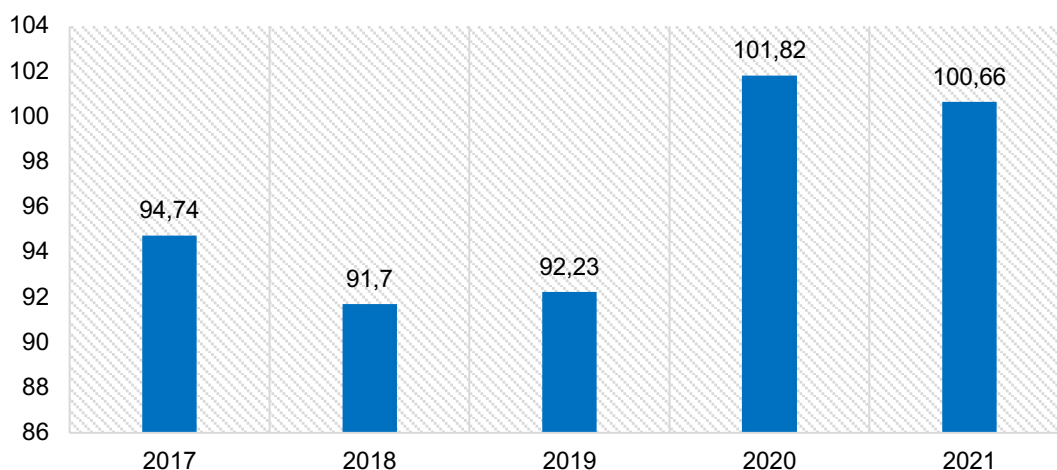
Sumber: BPS Provinsi Papua, 2022

2.3.3.2 Pertanian

NTP (Nilai Tukar Pertani) di Provinsi Papua sangat berfluktuasi dan cenderung meningkat, tergantung dari perkembangan harga barang yang dijual petani dan barang serta jasa yang dikonsumsi petani. Perkembangan NTP Provinsi Papua selama tahun 2017-2021 dalam kurun waktu 5 tahun NTP Papua menunjukkan kecenderungan meningkat, hingga sampai tahun 2021 sebesar 100,66 persen. Kecenderungan ini mengindikasikan bahwa kondisi petani di Papua mengalami surplus. Mulai tahun 2018-2020 terindikasi harga produksinya lebih rendah dibandingkan kenaikan harga konsumsinya sehingga pendapatan petani mengalami penurunan lebih jauh dari pengeluarannya. Dengan kata lain, tingkat kesejahteraan para petani semakin berkurang dibandingkan tingkat kesejahteraan sebelumnya.

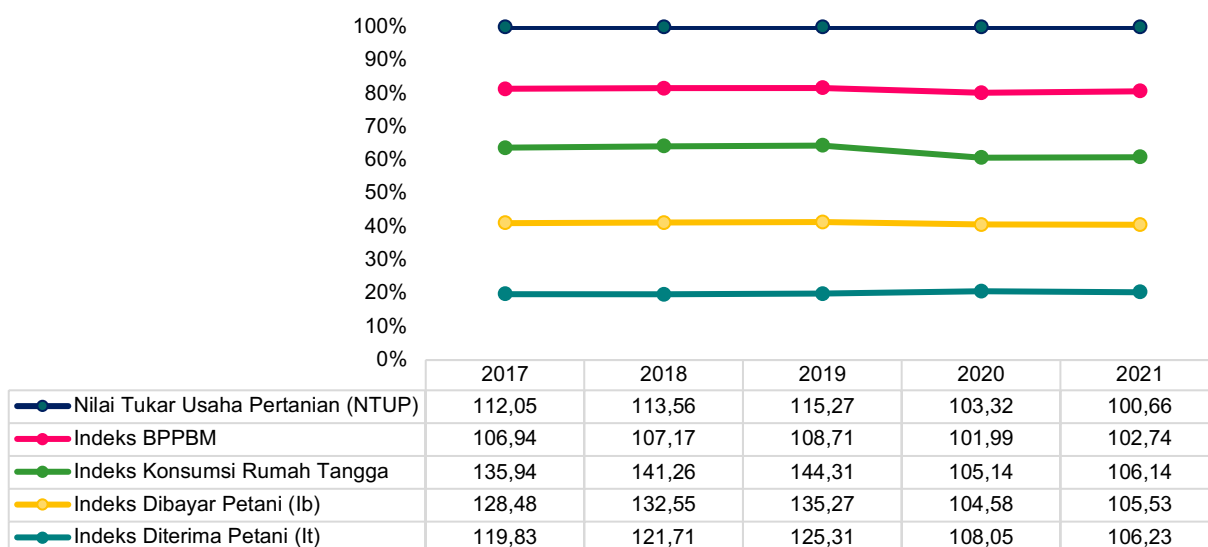
Selanjutnya, apabila dilihat berdasarkan masing-masing komponen pembentuk NTP Papua, terlihat seluruh komponen mengalami trend negatif. Meskipun demikian capaian komponen nilai tukar petani berada pada angka rata-rata diatas 100 persen. Sehingga hal tersebut memiliki dampak yang baik dalam peningkatan kesejahteraan petani di Papua.

Gambar 0.73 Nilai Tukar Petani Provinsi Papua Tahun 2016-2021



Sumber: Papua Dalam Angka Tahun 2022 (data diolah)

Gambar 0.74 Komponen Tukar Petani Provinsi Papua Tahun 2017-2021



Sumber: Papua Dalam Angka Tahun 2022 (data diolah)

Produksi komoditas di Provinsi Papua paling tinggi berupa Produksi Padi. Produksi padi gabah kering giling di Provinsi Papua mencapai 6.340,06 Ton dan produksi padi setara beras mencapai 2.601,42 Ton Tahun 2021. Produksi komoditas tertinggi berada di Kabupaten Jayapura, sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 0.64.

Tabel 0.64 Produksi Komoditas Tanaman Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua

Kabupaten/Kota	Produksi Padi (Ton GKG)	Produksi Padi Setara Beras (Ton)	Produksi Jagung (Ton)	Produksi Kedelai (Ton)
1 Jayapura	3193.21	813.87	591	1044
2 Yapen			167	162
3 Biak Numfor			764	
4 Sarmi	78.94	44.84	209	37
5 Keerom	135.92	77.21	517	290
6 Waropen	56.49	32.08	64	38
7 Supriori			12	
8 Mamberamo Raya				

Kabupaten/Kota	Produksi Padi (Ton GKG)	Produksi Padi Setara Beras (Ton)	Produksi Jagung (Ton)	Produksi Kedelai (Ton)
9 Kota Jayapura	2875.5	1633.42	321	5
Provinsi Papua	6340.06	2601.42	2645	1576

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

2.3.3.3 Kelautan dan Perikanan

Sektor kelautan dan perikanan yang memiliki nilai produksi tercatat sesuai data BPS diantaranya adalah hasil perikanan tangkap di laut dan juga perikanan umum di daratan. Dari wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Papua, hanya Kabupaten Keerom dan Kabupaten Mamberamo Raya yang tidak memiliki hasil produksi perikanan tangkap di laut, sedangkan wilayah dengan hasil yang lengkap adalah di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Waropen. Produksi hasil perikanan tangkap di laut Provinsi Papua tahun 2021 ada sebanyak 126.675 ton.

Tabel 0.65 Produksi Komoditas Perikanan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua

Kabupaten/Kota	Perikanan tangkap di laut		Perikanan perairan umum daratan	
	Volume (Ton)	Nilai/value (000 Rp)	Volume (Ton)	Nilai/value (000 Rp)
1 Jayapura	19.015	690.399.360	741	6.704.392
2 Yapen	6.165	193.500.017	-	-
3 Biak Numfor	41.124	1.474.923.137	-	-
4 Sarmi	16.396	489.494.238	-	-
5 Keerom	-	-	-	-
6 Waropen	831	21.100.857	511	4.602.888
7 Supriori	1.889	54.290.770	-	-
8 Mamberamo Raya	-	-	-	-
9 Kota Jayapura	41.255	1.496.675.020	-	-
Provinsi Papua	126.675	4.420.383.399	1.252	11.307.280

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

2.3.3.4 Energi dan Sumber Daya Mineral

Ketersediaan energi terutama fasilitas kelistrikan merupakan aspek penting dalam pembangunan daerah karena kebutuhan listrik tidak hanya bersumber dari rumah tangga, tetapi juga kebutuhan instansi pemerintah, perkantoran dan industri. Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akan energi, maka pembangunan sarana dan prasarana energi juga menjadi kebutuhan vital dan mendesak di Papua. Tabel 0.66 menunjukkan persentase rumah tangga berdasarkan sumber penerangan di Papua. Berdasarkan Tabel 0.66 diketahui bahwa rata-rata rumah tangga yang telah memiliki sumber penerangan listrik di Kabupaten/Kota di Provinsi Papua sebanyak 74,04%. Dalam hal ini, daerah yang perlu diprioritaskan dalam percepatan akses listrik di Provinsi Papua adalah Kabupaten Mamberamo Raya dan Supiori.

Tabel 0.66 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan di Provinsi Papua Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Listrik PLN	Listrik Non-PLN	Bukan Listrik	Jumlah
1	Jayapura	91,47	3,25	5,28	100,00
2	Kepulauan Yapen	70,95	12,20	16,85	100,00
3	Biak Numfor	99,79	0,20	0,01	100,00
4	Sarmi	87,91	7,83	4,27	100,00
5	Keerom	82,82	6,27	10,91	100,00
6	Waropen	63,35	26,12	10,54	100,00
7	Supriori	66,14	7,18	26,68	100,00
8	Mamberamo Raya	4,46	86,46	9,08	100,00
9	Kota Jayapura	99,45	0,18	0,37	100,00
Provinsi Papua (*rata-rata kab/kota)		74,04	16,63	9,33	100,00

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

Tabel 0.67 menunjukkan produksi listrik menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua tahun 2022. Berdasarkan Tabel 0.67 diketahui bahwa daya listrik terpasang di Provinsi Papua adalah 271.635 KW dengan produksi listrik sebesar 693.684.781 KWh, listrik terjual sebesar 614.472.107 KWh, dipakai sendiri sebesar 8.903.206 KWh, susut/hilang sebesar 70.309.468 KWh.

Tabel 0.67 Produksi Listrik Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua

Kabupaten/Kota	Daya terpasang	Produksi listrik	Listrik terjual	Dipakai sendiri	Susut hilang
	KW	KWh	KWh	KWh	KWh
1 Jayapura	32.876	114.740.369	104.309.426	-	10.430.943
2 Yapen	1.400	34.819.284	28.826.054	2.015	5.991.215
3 Biak Numfor	49.892	79.862.556	71.349.975	995.682	7.516.899
4 Sarmi	4.890	12.730.661	11.366.662	-	1.363.999
5 Keerom	306	24.068.325	22.121.622	-	1.946.703
6 Waropen	1.172	8.206.725	7.147.972	-	1.058.753
7 Supriori	-	10.068.731	8.832.220	-	1.236.511
8 Mamberamo Raya	-	-	-	-	-
9 Kota Jayapura	181.099	409.188.130	360.518.176	7.905.509	40.764.445
Provinsi Papua	271.635	693.684.781	614.472.107	8.903.206	70.309.468

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

2.3.3.5 Perdagangan

Provinsi Papua melakukan ekspor bijih tembaga dan konsentrat (HS26) dengan volume ekspor mencapai 1.728.475.100 ton atau sekitar 90,99 persen dari total volume ekspor provinsi Papua pada tahun 2021. Total volume ekspor Provinsi Papua sendiri adalah sekitar 1.899.612.101 ton di tahun tersebut. Negara penerima ekspor terbesar dari Papua adalah Negara Jepang, dengan nilai ekspor ke negara tersebut sekitar US\$ 1.366.460.621. Selain Jepang, dua negara lain yang menjadi penerima ekspor terbesar Papua adalah negara Asia lainnya dan Korea Selatan dengan nilai ekspor masing-masing mencapai US\$ 648.696.536 dan US\$ 637.536.734. Perkembangan impor di Provinsi Papua cukup fluktuatif, dengan mengalami peningkatan nilai yang cukup signifikan dalam satu tahun terakhir. Nilai impor Papua mengalami peningkatan dari US\$ 191.719.492 di tahun 2020 menjadi US\$ 272.239.487 di tahun 2021.

2.3.3.6 Perindustrian

Perusahaan industri besar dan sedang di Papua tahun 2020 tersebar di 4 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Kabupaten Jayapura (7 industri), Kota Jayapura

(10 industri), Kepulauan Yapen (1 industri) dan Biak Numfor (3 industri). Perusahaan industri besar dan sedang mampu menyerap tenaga kerja di Provinsi Papua tahun 2020 sebanyak 1165 tenaga kerja. Adapun lokasi dengan penyerapan tenaga kerja industri besar dan sedang tertinggi terdapat di Kabupaten Biak Numfor (452 tenaga kerja) dan Kota Jayapura (386 tenaga kerja), sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 0.68.

Berdasarkan survei industri mikro dan kecil tahunan, dari total industri di Provinsi Papua didominasi usaha industri mikro dan kecil yang mencapai 9.748 industri pada tahun 2020 yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Industri mikro dan kecil di Provinsi Papua mampu menyerap tenaga kerja sebesar 16.836 tenaga kerja. Lokasi industri mikro dan kecil terbanyak terdapat di Kabupaten Biak Numfor (2.542 industri), Kabupaten Supiori (1.745 industri), dan Kepulauan Yapen (1.731 industri). Adapun penyerapan tenaga kerja industri mikro dan kecil terbanyak terdapat di Biak Numfor (4.230 tenaga kerja), Kepulauan Yapen (3.403 tenaga kerja), serta Kota Jayapura (3.389 tenaga kerja), sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel 0.68.

Tabel 0.68 Jumlah Industri Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2020

Kabupaten/Kota	Industri Mikro dan Kecil		Industri Besar dan Sedang	
	Perusahaan	Tenaga Kerja	Perusahaan	Tenaga Kerja
Jayapura	1.227	2.011	7	325
Kepulauan Yapen	1.731	3.403	1	2
Biak Numfor	2.542	4.230	3	452
Sarmi	96	98	0	0
Keerom	179	307	0	0
Waropen	455	776	0	0
Supiori	1.745	2.414	0	0
Mamberamo Raya	89	208	0	0
Kota Jayapura	1.684	3.389	10	386
Papua	9.748	16.836	21	1.165

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

2.4 ASPEK DAYA SAING

2.4.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

Salah satu aspek daya saing bagi suatu wilayah adalah melalui kemampuan ekonomi. Daya saing ekonomi daerah di Provinsi Papua ditinjau dari pengeluaran per kapita dan pengeluaran konsumsi makan.

2.4.1.1 PDRB per Kapita

PDRB per kapita merupakan suatu perhitungan untuk melihat tingkat kemakmuran pada suatu wilayah. PDRB per kapita didapatkan dengan menghitung pendapatan rata-rata penduduk dari hasil pembagian PDRB dengan populasi yang ada pada suatu wilayah. Semakin tinggi pendapatan per kapita artinya semakin tinggi tingkat kemakmuran suatu wilayah.

Berdasarkan Tabel 0.69, terlihat bahwa PDRB ADHB per kapita tertinggi baik dengan maupun tanpa tambang dicapai oleh Kabupaten Jayapura. Diketahui juga bahwa pertumbuhannya semakin meningkat dalam kurun tiga tahun terakhir yaitu tahun 2020 hingga tahun 2022. Adapun capaian PDRB AHB per kapita dengan tambang di Kabupaten Jayapura pada tahun 2022 adalah sebesar Rp106.313.271,76 dan tanpa

tambang adalah sebesar Rp104.964.183,97. Sebaliknya, kabupaten dengan capaian PDRB AHB terendah baik dengan maupun tanpa tambang adalah Kabupaten Kepulauan Yapen. Meskipun terus mengalami peningkatan dalam kurun tiga tahun terakhir yaitu 2020 hingga 2022, namun Kabupaten Kepulauan Yapen masih menjadi kabupaten dengan PDRB ADHB terendah. Adapun capaian PDRB AHB dengan tambang pada tahun 2022 di Kepulauan Yapen adalah sebesar Rp40.116.433,93 dan tanpa tambang adalah sebesar Rp39.868.948,14.

Tabel 0.69 PDRB Per Kapita Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2020-2022 (Rupiah)

Kabupaten	PDRB ADHB Per Kapita (Dengan Tambang)			PDRB ADHB Per Kapita (Tanpa Tambang)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Jayapura	96.474.479,70	101.050.658,79	106.313.271,04	95.181.722,02	99.719.028,96	104.964.183,97
Kep. Yapen	36.960.294,10	39.162.856,92	40.116.433,93	36.737.720,30	38.925.438,73	39.868.948,14
Biak Numfor	38.802.783,39	40.671.417,61	43.342.696,78	38.407.220,85	40.254.445,17	42.913.724,29
Sarmi	70.862.080,01	74.486.213,89	78.241.330,17	70.026.860,07	73.626.725,41	77.350.454,82
Keerom	47.547.769,86	49.237.050,54	51.072.907,23	46.997.874,73	48.662.579,60	50.471.465,62
Waropen	60.452.726,53	61.436.297,86	66.108.619,73	60.038.358,85	61.011.998,67	65.654.285,12
Supiori	46.379.140,67	47.565.472,69	49.004.238,36	46.180.698,58	47.355.343,06	48.785.034,55
Mamberamo Raya	47.377.017,46	49.624.541,45	52.541.672,67	46.455.221,80	48.654.360,54	51.536.145,77
Kota Jayapura	80.637.679,49	82.026.393,17	86.232.327,04	80.226.476,77	81.595.984,10	85.801.827,25

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

Apabila ditinjau berdasarkan harga konstan baik dengan maupun tanpa tambang, Kabupaten Jayapura menjadi kabupaten dengan PDRB ADHK per kapita tertinggi di Provinsi Papua. PDRB ADHK per kapita dengan tambang di Kabupaten Jayapura pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 61.795.088,11 dan tanpa tambang sebesar Rp 60.601.798,77. Berdasarkan Tabel 0.70, terlihat juga bahwa PDRB ADHK per kapita terendah baik dengan maupun tanpa tambang dicapai oleh Kabupaten Biak Numfor. Adapun pada tahun 2022, PDRB ADHK per kapita dengan tambang di Kabupaten Biak Numfor mencapai Rp 25.793.581,69 dan tanpa tambang mencapai Rp 25.557.692,76.

Tabel 0.70 PDRB Per Kapita Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2020-2022 (Rupiah)

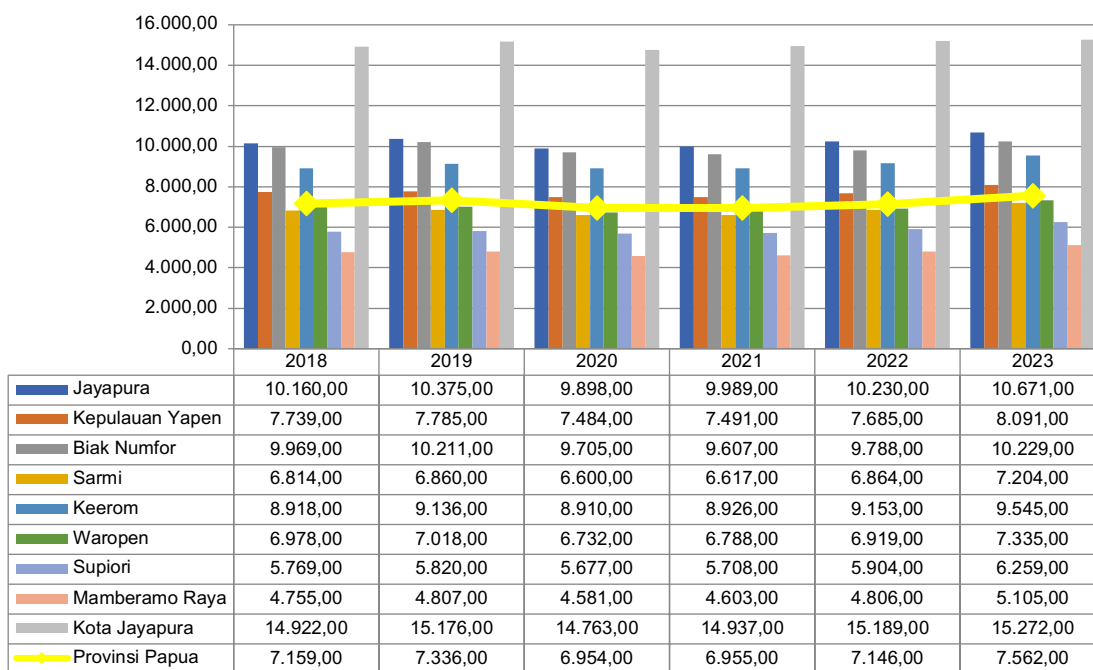
Kabupaten	PDRB ADHK Per Kapita (Dengan Tambang)			PDRB ADHK Per Kapita (Tanpa Tambang)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Jayapura	58.759.284,89	60.578.455,61	61.795.088,11	57.581.943,27	59.381.132,55	60.601.798,77
Kep. Yapen	24.646.163,46	25.391.966,29	25.965.277,53	24.497.540,22	25.235.976,06	25.808.014,87
Biak Numfor	24.185.719,85	24.673.103,81	25.793.581,69	23.956.185,34	24.439.052,27	25.557.692,76
Sarmi	44.245.545,07	44.563.984,48	45.109.012,73	43.601.910,03	43.919.054,92	44.458.230,08
Keerom	32.405.890,76	32.940.723,03	33.554.747,44	32.046.800,09	32.572.735,32	33.185.491,18
Waropen	43.335.939,16	43.168.889,26	44.453.491,80	42.980.627,40	42.811.438,34	44.092.026,08
Supiori	34.231.781,25	34.172.339,64	34.589.729,71	34.112.495,73	34.049.593,63	34.464.844,62
Mamberamo Raya	27.981.105,92	27.865.427,90	28.249.998,31	27.263.857,02	27.129.325,27	27.508.944,06
Kota Jayapura	55.701.902,69	56.482.331,11	57.692.330,94	55.474.188,04	56.255.886,84	57.468.591,63

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

2.4.1.2 Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran per kapita dapat dilihat melalui pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga menjadi ukuran dalam menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk. Pengeluaran per kapita merupakan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi seluruh anggota rumah tangga selama satu tahun yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli.

Gambar 0.75 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan di Provinsi Papua Tahun 2018-2023 (Rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

Semakin tinggi pengeluaran per kapita menunjukkan semakin banyak uang yang dikeluarkan tiap anggota rumah tangga setiap bulannya. Perhitungan pengeluaran per kapita sudah dihitung menggunakan metode baru. Adapun pengeluaran per kapita di Provinsi Papua menurut kabupaten/kota ditunjukkan pada Gambar 0.75.

Berdasarkan Gambar 0.75, pengeluaran per kapita tertinggi dari tahun 2018-2023 adalah Kota Jayapura dengan pengeluaran per kapita pada tahun 2023 mencapai 15.272 rupiah diikuti oleh Kabupaten Jayapura sebesar 10.671 rupiah dan Kabupaten Biak Numfor sebesar 10.229 rupiah. Sebaliknya, Kabupaten Mamberamo Raya menjadi kabupaten dengan pengeluaran per kapita terendah yaitu sebesar 5.105 rupiah pada tahun 2023.

2.4.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing sumber daya manusia di Provinsi Papua ditinjau berdasarkan kapasitas aparatur negara dengan melihat kuantitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin serta dengan melihat rasio ketergantungan dari tingkat produktivitas penduduk berdasarkan usia.

2.4.2.1 Kapasitas Aparatur Pemerintahan

Guna mencapai tujuan pembangunan, salah satu hal yang dimuat di dalamnya adalah mengenai aparatur pemerintah. Pemerintah perlu bebas dari intervensi politik, bersih praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, profesional, dapat memberikan pelayanan publik, dan berperan sebagai perekat kesatuan bangsa. Tugas aparatur sipil negara adalah melaksanakan pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembantuan tertentu. Penyiapan ketersediaan sumber daya aparatur pemerintah daerah yang memiliki kualitas secara proporsional di semua instansi menjadi arahan terkait kebijakan pembangunan kepegawaian di daerah.

Salah satu aparatur sipil negara daerah di Provinsi Papua adalah Pegawai Negeri Sipil. Pada tahun 2023, PNS di lingkungan instansi Provinsi Papua berjumlah 6.979 orang berdasarkan hasil pencatatan dari Badan Kepegawaian Negara. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, data untuk tahun 2023 cenderung mengalami penurunan jumlah. Hal ini dikarenakan sebelum tahun 2023, data masih merupakan data sebelum pemekaran. Jumlah PNS pada tahun 2023 didominasi oleh jenis kelamin laki-laki dengan jumlah 3.725 orang. Tingkat pendidikan tertinggi yang ditempuh PNS di Provinsi Papua adalah S1 yaitu sebanyak 3.108 orang.

Tabel 0.71 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2021-2023

Tingkat Pendidikan	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
SD	109	70	31	9	8	3	118	78	34
SMP	205	171	78	31	27	10	236	198	88
SMA	4402	4095	1074	1962	1680	547	6364	5775	1621
Diploma I/Akta I	208	216	3	75	86	10	283	302	13
Diploma II/Akta II	118	101	7	37	29	4	155	130	11
Diploma III/Akta III	1217	1339	315	1192	1231	596	2409	2570	911
Diploma IV/Akta IV	440	496	54	256	256	75	696	752	129
S1/Sarjana	6809	6591	1557	6178	6011	1551	12987	12602	3108
S2/Pasca Sarjana	2013	2109	583	1263	1422	453	3276	3531	1036
S3/Doktor/Ph.D	122	129	23	38	42	5	160	171	28
Jumlah	15643	15317	3725	11041	10792	3254	26684	26109	6979

Sumber: BPS dalam Provinsi Papua Dalam Angka 2024

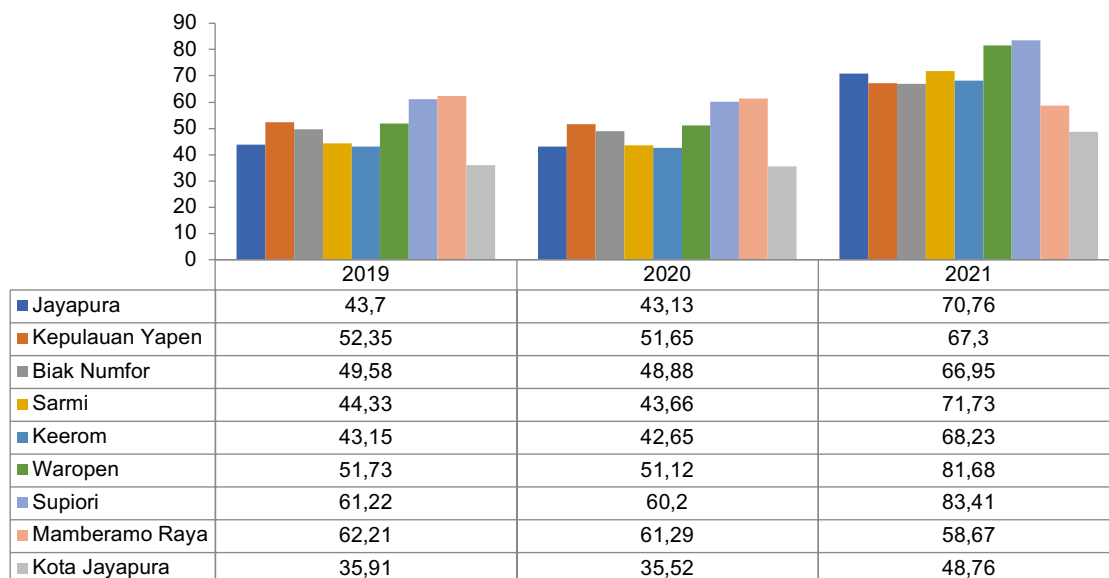
2.4.2.2 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan rasio untuk menunjukkan keadaan ekonomi yang digolongkan dalam negara maju atau negara berkembang. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan menunjukkan bahwa beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk belum produktif maupun tidak produktif lagi menjadi semakin tinggi. Persentase rasio ketergantungan di Provinsi Papua pada tahun 2019-2021 ditunjukkan pada Gambar 0.76.

Berdasarkan Gambar 0.76, diketahui bahwa rasio ketergantungan menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua meningkat pada tahun 2021. Kabupaten dengan rasio ketergantungan tertinggi adalah Kabupaten Supiori dan Kota Jayapura menjadi kota dengan rasio ketergantungan terendah pada tahun 2021. Rasio ketergantungan

yang cenderung meningkat pada tahun 2021 di Provinsi Papua menandakan bahwa semakin banyak penduduk produktif yang harus menanggung sejumlah penduduk yang belum produktif maupun tidak produktif lagi.

Gambar 0.76 Rasio Ketergantungan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2019-2021



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2022

2.4.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

2.4.3.1 Prasarana Transportasi

Prasarana transportasi merupakan sarana penunjang lalu lintas pemindahan orang dan atau barang, yang terdiri atas jalan, jembatan, dermaga, pelabuhan, dan lain-lain yang digunakan oleh masyarakat untuk mobilitas. Oleh karenanya, ketersediaan prasarana transportasi menjadi salah satu fasilitas digunakan untuk meningkatkan daya saing daerah.

Tabel 0.72 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Prasarana Transportasi dan Ketersediaan Angkutan Umum

Kabupaten	Jenis Prasarana Transportasi				Ketersediaan Angkutan Umum		
	Darat	Air	Darat dan Air	Udara	Ada, Dengan Trayek Tetap	Ada, Tanpa Trayek Tetap	Angkutan Umum
Jayapura	109	16	19	0	83	43	18
Kepulauan Yapen	64	50	49	2	53	41	71
Biak Numfor	195	4	69	0	172	73	23
Sarmi	84	14	13	0	64	16	31

Kabupaten	Jenis Prasarana Transportasi				Ketersediaan Angkutan Umum		
	Darat	Air	Darat dan Air	Udara	Ada, Dengan Trayek Tetap	Ada, Tanpa Trayek Tetap	Angkutan Umum
Keerom	82	4	5	0	13	14	64
Waropen	62	3	36	10	0	41	70
Supiori	14	8	16	0	22	13	3
Mamberamo Raya	1	43	15	0	3	6	50
Kota Jayapura	36	1	2	0	34	5	0

Sumber: BPS dalam Statistik Potensi Desa 2021 Provinsi Papua

Jenis prasarana transportasi darat menjadi jenis transportasi dengan jumlah terbanyak yang digunakan oleh Masyarakat. Adapun prasarana transportasi darat dan darat dan air terbanyak dimiliki oleh Kabupaten Biak Numfor dengan masing-masingnya sebanyak 195 unit dan 69 unit. Kabupaten Kepulauan Yapen menjadi kabupaten dengan prasarana transportasi air terbanyak. Lalu Kabupaten Waropen menjadi kabupaten dengan prasarana transportasi udara terbanyak yaitu berjumlah 10 unit. Adapun ketersediaan angkutan umum dengan dan tanpa trayek tetap terbanyak berada di Kabupaten Biak Numfor yaitu 172 unit dan 73 unit. Sedangkan angkutan umum terbanyak berada di Kabupaten Kepulauan Yapen yaitu sebanyak 71 unit disusul Kabupaten Waropen sebanyak 70 unit.

2.4.3.2 Infrastruktur Komunikasi

Infrastruktur komunikasi menjadi salah satu infrastruktur yang sangat diperlukan masyarakat untuk menjalin komunikasi dan berjejaring. Wilayah Provinsi Papua yang luas juga disertai kebutuhan akan komunikasi dan jejaring yang tinggi bagi masyarakat, infrastruktur komunikasi menjadi salah satu infrastruktur penting di wilayah Papua.

Apabila ditinjau berdasarkan masing-masing desa/kelurahan, angka ketersediaan BTS pada kategori “tidak ada”, jauh lebih banyak dibandingkan area yang telah terlayani oleh BTS, kecuali Kota Jayapura. Selain itu, masih terdapat beberapa daerah pada masing-masing kabupaten/kota yang masih belum terlayani oleh sinyal seluler. Sinyal internet telepon seluler juga telah menjangkau beberapa desa/kelurahan pada masing-masing kabupaten dengan paling banyak sudah terlayani oleh sinyal 4G/LTE. Namun juga masih ditemukan beberapa area pada masing-masing kabupaten yang belum terlayani sinyal internet. Kabupaten Biak Numfor menjadi kabupaten dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak yang tidak memiliki sinyal akses internet.

Tabel 0.73 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Base Transceiver Station (BTS), Sinyal Telepon Seluler, dan Sinyal Internet Telepon Seluler

Kabupaten	Keberadaan BTS		Kekuatan Sinyal Seluler				Sinyal Internet Telepon Seluler			
	Ada	Tidak Ada	Sangat Kuat	Kuat	Lemah	Tidak Ada Sinyal	4G/LTE	3G/H/H+/EVD O	2,5G/1/GPRS	Tidak Ada Sinyal Internet
Jayapura	36	108	33	51	37	23	63	31	8	19
Kepulauan Yapen	16	149	4	41	51	69	61	9	8	18
Biak Numfor	57	211	77	76	75	40	149	10	30	39
Sarmi	25	86	18	33	30	30	40	18	14	9
Keerom	28	63	16	22	22	31	36	9	1	14
Waropen	11	100	2	25	13	71	24	1	0	15
Supiori	16	22	1	14	16	7	9	4	4	14
Mamberamo Raya	14	45	4	10	5	40	10	2	2	5
Kota Jayapura	31	8	23	14	1	1	38	0	0	0

Sumber: BPS dalam Statistik Potensi Desa 2021 Provinsi Papua

Adapun warnet menjadi keberadaan sarana komunikasi terbanyak yang dimiliki masing-masing desa/kelurahan di Provinsi Papua. Selain itu, keberadaan sarana komunikasi lainnya yang dapat melayani masyarakat di antaranya adalah keberadaan kantor pos/pos pembantu, pos keliling, dan perusahaan jasa ekspedisi swasta.

Tabel 0.74 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Sarana Komunikasi

Kabupaten	Warnet	Kantor Pos/Pos Pembantu	Pos Keliling	Perusahaan Jasa Ekspedisi Swasta
Jayapura	26	5	7	7
Kepulauan Yapen	14	1	0	3
Biak Numfor	32	11	15	8
Sarmi	10	1	1	1
Keerom	9	1	4	4
Waropen	7	1	0	5
Supiori	3	2	1	2
Mamberamo Raya	4	1	0	0
Kota Jayapura	20	9	1	16

Sumber: BPS dalam Statistik Potensi Desa 2021 Provinsi Papua

2.4.4 Daya Saing Iklim Investasi

2.4.4.1 Laju Inflasi Daerah

Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Papua di 3 kota IHK, pada Januari 2023, terjadi inflasi y-o-y sebesar 5,23 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,76 pada Januari 2022 menjadi 112,35 pada Januari 2023. Tingkat inflasi month-to-month sebesar -0,40 persen dan tingkat inflasi year-to-date sebesar -0,40 persen. Jika dirinci menurut 3 kota HK dan inflasi mtm, maka pada Januari 2023 di Merauke terjadi inflasi sebesar 0,41 persen, Timika terjadi inflasi -0,60 persen dan Kota Jayapura dengan inflasi sebesar -0,55 persen. Sedangkan untuk inflasi yoy, terjadi inflasi sebesar 4,41 persen di Merauke, sebesar 5,75 persen di Timika dan Kota Jayapura mengalami inflasi 5,26 persen. Secara nasional, inflasi yoy tertinggi terjadi di Kotabaru sebesar 7,78 persen dan terendah di Sorong sebesar 3,23 persen. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran dan kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi yoy (secara rinci dapat dilihat pada tabel 5). Beberapa komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi year-on-year pada Januari 2023, antara lain: angkutan udara, bensin, beras, biaya akademi/perguruan

tinggi dan angkutan dalam kota. Sementara beberapa komoditas yang dominan memberikan andil deflasi year-on-year antara lain: biaya ponsel, ikan ekor kuning, bawang putih, ikan tongkol, dan kangkung.

Tabel 0.75 Tingkat Inflasi Provinsi Papua Tahun 2021-2023

No	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023
1	Month to Month (mtm) Januari	-0,27	0,03	-0,40
2	Year to Date (ytd) Januari	-0,27	0,03	-0,40
3	Year on Year (yoy) Januari	0,93	2,10	5,23

Sumber: BPS Provinsi Papua

2.4.4.2 Kondisi Politik dan Keamanan

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tercatat tahun 2016 IDI Papua adalah sebesar 61,02 persen meningkat 3,52 point pada tahun 2020 menjadi 64,54 persen. Hal tersebut juga tidak terlepas dari komponen pembentuk dari setiap aspek diantaranya Aspek Kebebasan Sipil (Persen); Aspek Hak-Hak Politik (Persen); dan Aspek Lembaga Demokrasi (Persen).

Tabel 0.76 Komponen Indeks Demokrasi Indonesia Menurut Aspek di Provinsi Papua, 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Demokrasi Indonesia (Persen)	61,02	61,34	62,20	65,25	64,54
Aspek Kebebasan Sipil (Persen)	92,15	89,09	84,36	93,08	89,32
Aspek Hak-Hak Politik (Persen)	41,13	42,16	47,90	51,16	53,54
Aspek Lembaga Demokrasi (Persen)	53,45	56,91	57,05	52,61	51,83

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2021 (data diolah)

Selanjutnya, jika dilihat berdasarkan aspek pembentuk IDI, persentase hak-hak politik cenderung meningkat meskipun nilainya tergolong cukup rendah. Sedangkan untuk kedua aspek lainnya yaitu kebebasan hak sipil dan Lembaga demokrasi cenderung mengalami penurunan. Meskipun cenderung aspek kebebasan sipil terlihat mengalami penurunan, tetapi capaian rata-rata pertahun tergolong cukup tinggi.

Tabel 0.77 Komponen Indeks Demokrasi Indonesia Menurut Aspek Berdasarkan Metode Baru di Provinsi Papua, 2021-2022

Uraian	2021	2022
Indeks Demokrasi Indonesia (Persen)	66,39	66,65
Aspek Kebebasan (Persen)	75,64	67,23
Aspek Kesetaraan (Persen)	62,3	67,85
Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi (Persen)	62,15	64,63

Sumber: BPS RI, 2023

Berdasarkan metode baru perhitungan IDI, terdapat perubahan indikator dalam aspek-aspek perhitungan IDI. Penggunaan indikator-indikator baru menghasilkan perbedaan nilai yang signifikan bagi Provinsi Papua. Adapun nilai IDI provinsi mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 66,65 dari sebelumnya 66,39.

Tingkat kriminalitas di Papua tercatat dalam tiga tahun terakhir mengalami perbaikan. Tercatat terjadi penurunan jumlah kasus kejahatan setiap tahunnya, sama halnya dengan resiko penduduk yang berpotensi ditindakpidanakan.

Penyelesaian tindak pidana sampai dengan tahun 2021 sebesar 42,82 persen, menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 45,79 persen. Penyelesaian kasus tindak pidana merupakan akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya, meskipun angkanya tercatat menurun setiap tahunnya, sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel 0.78.

Tabel 0.78 Tingkat Kriminalitas di Provinsi Papua Tahun 2019-2021

Uraian	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk (Juta Jiwa)	3.347	4.304	4.355
Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan (kasus)	8.551	8.005	6.864
Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana (per 100.000 Penduduk)	248,7	234,28	199,64
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana (Persen)	50,18	45,79	42,82
Tingkat Kriminalitas (Persen)	25,55	18,60	15,76

Sumber: Papua Dalam Angka Tahun 2022 (data diolah)

2.4.4.3 Produktivitas Total Daerah

Kontribusi tenaga kerja di Papua selama lima tahun terakhir terhadap produk domestik regional bruto (PDRB ADHB Tanpa Tambang) semakin baik. Jika dilihat berdasarkan tren perkembangan produktivitas total daerah selama 2017-2021 mengalami fluktuatif dan cenderung mengalami peningkatan. Ukuran produktifitas daerah dapat memvisualisasikan kapasitas dan daya saing tenaga kerja dalam menghasilkan nilai tambah atau PDRB.

Tabel 0.79 Produktivitas Total Daerah Provinsi Papua Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
PDRB ADHB Tanpa tambang (Rp. Juta)	122.457.689	133.409.669	144.899.565	142.683.470	148.652.165
Angkatan Kerja (jiwa/orang)	1.762.841	1.835.963	1.842.203	1.769.403	1.952.777
Produktivitas total daerah (P)	69,47	72,66	78,66	80,64	76,12

Sumber: Papua Dalam Angka Tahun 2022 dan BPS Papua 2022 (data diolah)

Komponen pembentuk produktivitas total pada indikator PDRB dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, sedangkan pada Angkatan kerja terjadi penurunan pada periode 2019-2020. Pandemi COVID-19 juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi yang berdampak kepada pengurangan tenaga kerja khususnya pada sektor swasta. Sehingga meningkatkan angka pengangguran secara keseluruhan di Provinsi Papua. Sampai dengan tahun 2021 produktivitas TK dalam perekonomian adalah sebesar Rp.76,12 Juta/TK/tahun yang tercatat menurun dari tahun sebelumnya yaitu Rp.80,64 Juta/TK/tahun.

2.5 EVALUASI HASIL RPJPD TAHUN 2005-2025

Subbab ini menjelaskan hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 untuk penyusunan RPJPD 2025-2045. Berdasarkan hasil evaluasi RPJPD 2005-2025, diketahui bahwa **capaian kinerja**

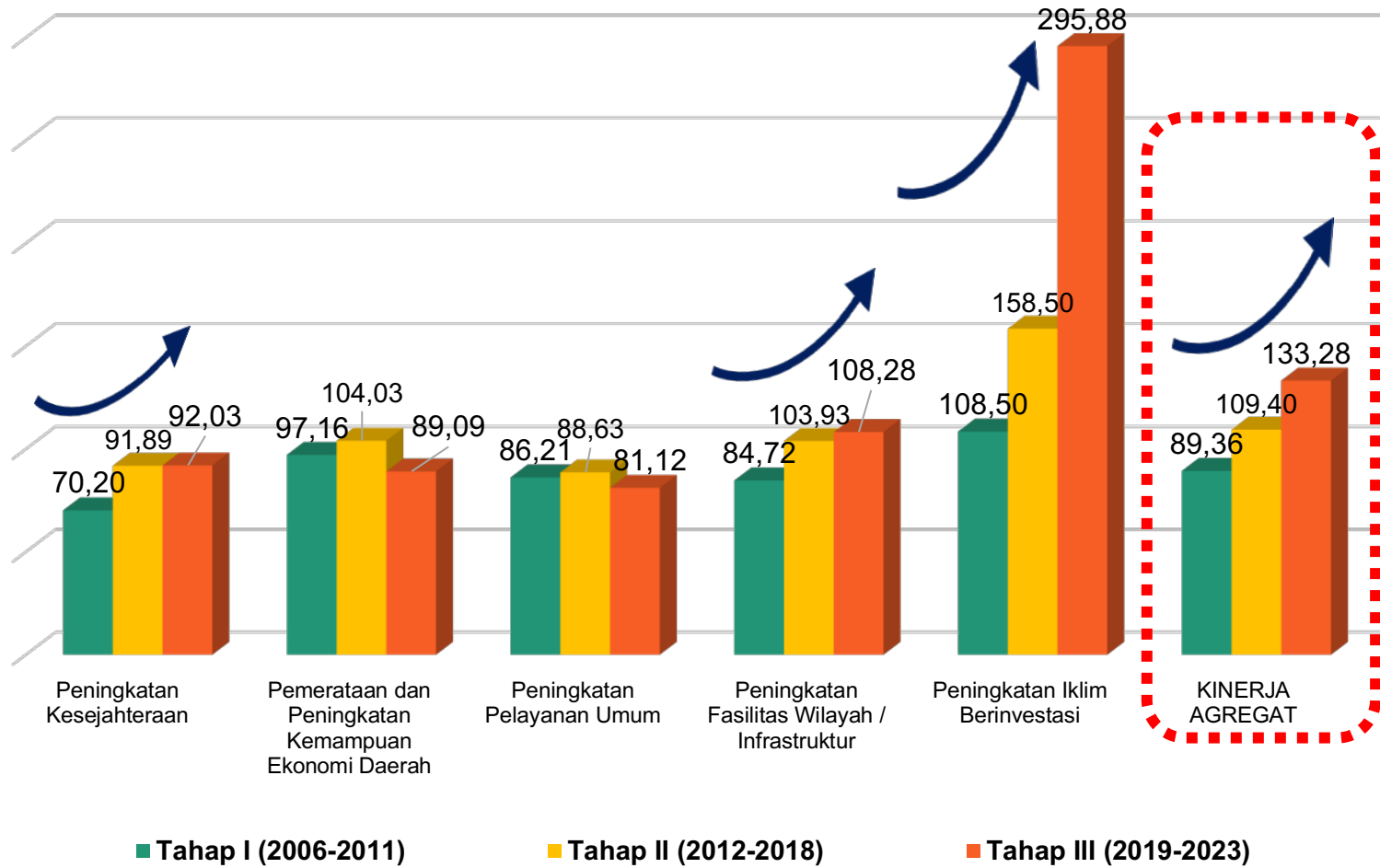
agregat jangka panjang Provinsi Papua termasuk kategori sangat tinggi. Terdapat peningkatan capaian kinerja agregat dari 89,36% pada 2006-2011 menjadi 109,40% pada 2012-2018, kemudian terjadi peningkatan kembali menjadi 133% pada 2019-2023 (sebagaimana yang ditampilkan dalam Gambar 0.77). Terdapat tren peningkatan signifikan pada capaian kinerja peningkatan iklim berinvestasi (sasaran 5), peningkatan Fasilitas wilayah (sasaran 4) serta peningkatan kesejahteraan (sasaran 1) di Provinsi Papua.

Capaian kinerja pemerataan dan peningkatan kemampuan ekonomi daerah (sasaran 2) dan Peningkatan pelayanan umum (sasaran 3) mengalami tren penurunan sehingga kedepannya perlu dikaji kembali dalam penentuan target pembangunan maupun perumusan strategi pembangunan.

Capaian peningkatan peningkatan iklim berinvestasi, peningkatan fasilitas wilayah, dan peningkatan kesejahteraan yang telah dilakukan dalam 20 tahun terakhir perlu dipertahankan untuk menjadi *enabling environment* dalam mencapai target percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua pada periode RPJPD 2025-2045.

Rekomendasi terhadap RPJPD 2025-2045 berdasarkan hasil evaluasi RPJPD 2005-2025 dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) aspek pembangunan, yaitu: (1) peningkatan kesejahteraan; (2) pemerataan dan peningkatan kemampuan ekonomi daerah; (3) peningkatan fasilitas wilayah/ infrastruktur; dan (4) peningkatan iklim berinvestasi.

Gambar 0.77 Refleksi Pembangunan Berdasarkan Hasil Evaluasi RPJPD Provinsi Papua 2005-2025



Sumber: Evaluasi RPJPD Provinsi Papua 2005-2025

2.5.1 Rekomendasi Tentang Peningkatan Kesejahteraan

**Tabel 0.80 Rekomendasi Tentang Peningkatan Kesejahteraan
Berdasarkan Hasil Evaluasi RPJPD Papua 2005-2025**

No	Sub-Aspek	Rekomendasi
a	Upaya Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemerintah perlu mengadopsi kebijakan pembangunan yang berfokus pada pemberdayaan manusia, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, dan perlindungan sosial; 2) Peningkatan investasi dalam sektor pendidikan dan kesehatan penting. Diperlukan peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang terjangkau untuk semua orang; 3) Kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, lembaga internasional, dan masyarakat sipil penting dalam mencapai IPM yang tinggi. Kolaborasi ini dapat meliputi pertukaran pengetahuan, teknologi, dan sumber daya finansial untuk mendukung upaya pembangunan manusia yang berkelanjutan.
b	Upaya Mengentaskan Buta Huruf	<ol style="list-style-type: none"> 1) Fokus pengentasan buta huruf pada daerah-daerah yang buta hurufnya tinggi; 2) Pengembangan dan peningkatan jaringan pemberantasan buta huruf dan inovasi pada pendidikan buta huruf; 3) Pembangunan dan pengembangan PKBM pada daerah-daerah yang terisolir secara luas dan merata; 4) Pembentukan tim satgas tingkat kabupaten, distrik dan kampung untuk mengoptimisasi PKBM dengan dukungan alokasi dana desa (ADD).
c	Upaya Mengentaskan Kemiskinan dan Ketimpangan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau sesuai karakteristik budaya; 2) Pemerintah melakukan pendataan masyarakat dengan pendapatan rendah agar dapat dibuat kebijakan program yang menyentuh langsung kepada masyarakat kurang mampu baik itu ekonomi, pendidikan dan kesehatan; 3) Penyediaan lapangan kerja padat karya, serta pemberian pelatihan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar; 4) Peningkatan kesejahteraan petani, melalui upaya peningkatan NTP (Nilai Tukar Petani) baik itu dengan subsidi produksi maupun harga pasar; 5) Menekan kenaikan harga dan kemahalan harga barang-barang konsumsi strategis pada daerah-daerah yang sulit akses; 6) Pengembangan sistem redistribusi pendapatan yang dilakukan dengan mendorong adanya <i>personal social responsibility</i> (PSC) pada kelompok pendapatan menengah ke atas

Sumber: Hasil Evaluasi RPJPD Provinsi Papua 2005-2025

2.5.2 Rekomendasi Tentang Pemerataan dan Peningkatan Kemampuan Ekonomi Daerah

Tabel 0.81 Rekomendasi Tentang Pemerataan dan Peningkatan Kemampuan Ekonomi Daerah Berdasarkan Hasil Evaluasi RPJPD Papua 2005-2025

No	Sub-Aspek	Rekomendasi
a	Upaya Meningkatkan Produktifitas Pertanian dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perlunya membangun korporasi dalam agrobisnis yang dapat menjadi jalan utama meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan dan peternak 2) Peningkatan muatan lokal berbasis SDA lokal pada sektor industri, konstruksi, dan jasa perdagangan 3) Peningkatan daya saing sektor pertanian, perikanan, kehutanan dan industri secara inklusif dan berkelanjutan 4) Pengembangan industri-industri berbasis pertanian, kreatif dan pariwisata yang berdaya saing 5) Penetapan regulasi daerah untuk pengembangan komoditi unggulan daerah; 6) Perlunya membangun korporasi dalam agrobisnis ubi jalar yang dapat menjadi jalan utama meningkatkan kesejahteraan petani padi; 7) Peningkatan sarana dan prasarana produksi padi secara meluas dan merata; 8) Pengembangan teknologi tanaman dan diversifikasi varietas padi; 9) Peningkatan kapasitas petani padi melalui pendidikan dan pelatihan 10) Kebijakan yang mendukung pertanian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; 11) Perlunya membangun korporasi dalam agrobisnis ubi jalar yang dapat menjadi jalan utama meningkatkan kesejahteraan petani ubi jalar; 12) Pengembangan agroindustri jalar yang berdaya saing dan berkelanjutan; 13) Perlunya peningkatan sarana dan prasarana produksi ubi jalar, dan pengembangan teknologi tepat guna ubi kayu; 14) Pengelolaan risiko iklim dan bencana alam, dan pengendalian penyakit dan hama; 15) Pemberian dukungan keuangan dan pendampingan kepada petani ubi jalar; 16) Perlunya membangun korporasi dalam agrobisnis ubi kayu yang dapat menjadi jalan utama meningkatkan kesejahteraan petani ubi kayu; 17) Pengembangan agroindustri ubi kayu yang berdaya saing dan berkelanjutan; 18) Perlunya peningkatan sarana dan prasarana produksi ubi kayu, dan pengembangan teknologi tepat guna ubi kayu; 19) Pemberian dukungan keuangan dan pendampingan kepada petani ubi kayu. 20) Memperkuat kelembagaan petani sektor pertanian jagung; 21) Kolaboratif (pemerintah, lembaga pertanian, petani) dalam membangun dan mengembangkan kawasan-kawasan sentra produksi jagung; 22) Meningkatkan infrastruktur pertanian tanaman jagung berbasis teknologi pertanian yang modern;

No	Sub-Aspek	Rekomendasi
		<ul style="list-style-type: none"> 23) Mengelola risiko iklim, dan meningkatkan pengendalian penyakit dan hama; 24) Menyediakan akses pembiayaan dan pasar yang stabil. 25) Pemanfaatan potensi perikanan yang besar dan perbaikan kinerja sektor perikanan secara berkelanjutan; 26) Penerapan sepenuhnya ekonomi biru dalam pembangunan perikanan yang inklusif dan berkelanjutan; 27) Diperlukan upaya yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, lembaga terkait, nelayan, dan masyarakat); 28) Penegakan hukum yang ketat pada kegiatan <i>illegal fishing</i>, penggunaan pukat, penangkapan ikan menggunakan bom ikan, dan pengrusakan terumbu karang; 29) Peningkatan kapasitas, dan investasi dalam infrastruktur perikanan. 30) Perlunya peningkatan pengolahan komoditas hasil perikanan, pekebunan, hasil hutan bukan kayu, dll untuk kebutuhan lintas pulau di Indonesia; 31) Perlunya membangun kerjasama antara Pulau, dengan mengandalkan komoditas unggulan Provinsi Papua yang tidak banyak dimiliki pulau lainnya di Indonesia
b	<p>Upaya Menurunkan Tingkat Pengangguran</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1) Membuka dan memperluas lapangan kerja padat karya secara merata; 2) Menciptakan partisipasi angkatan kerja yang lebih tinggi, meningkatkan kesempatan kerja, dan mendorong pengembangan ekonomi yang produktif; 3) Peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja lokal agar mampu bersaing dengan tenaga kerja luar, dan memperoleh pendapatan yang lebih berimbang; 4) Peningkatan pengawasan dan penegakan Perda UMR pada para pengusaha; 5) Meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar; 6) Diversifikasi lapangan usaha ekonomi dalam peningkatan partisipasi angkatan kerja; 7) Dilakukannya sinergitas dan kolaboratif dengan stakeholders di daerah dalam upaya mengurangi pengangguran; 8) Perluasan dan peningkatan program-program padat karya yang inovatif dan efektif guna menangani pengangguran; 9) Investasi dalam pendidikan, pelatihan keterampilan, pembangunan infrastruktur; 10) Penciptaan peluang usaha dan peluang kerja baru.

Sumber: Hasil Evaluasi RPJPD Provinsi Papua 2005-2025

2.5.3 Rekomendasi Tentang Peningkatan Pelayanan Umum

**Tabel 0.82 Rekomendasi Tentang Peningkatan Pelayanan Umum
Berdasarkan Hasil Evaluasi RPJPD Papua 2005-2025**

No	Sub-Aspek	Rekomendasi
a	Upaya Meningkatkan Akses dan Derajat Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penempatan tenaga strategis (dokter dan bidan) dan penyediaan fasilitas kesehatan di daerah-daerah dataran rendah sulit akses; 2) Pengembangan dan perluasan kunjungan tenaga kesehatan keseluruh wilayah pedalaman sulit akses; 3) Peningkatan kualitas tim kesehatan di puskesmas yang mampu memberikan pelayanan tatalaksana balita sakit dan gizi buruk; 4) Peningkatan investasi pendidikan dan pelatihan tenaga medis dalam bidang penolong kelahiran, yang meliputi peningkatan jumlah tenaga medis yang terlatih dan meningkatkan kualitas pendidikan yang disediakan; 5) Peningkatan Infrastruktur dan peralatan medis yang berkualitas untuk persalinan; 6) Penguatan sistem rujukan maternal dan pendampingan ibu hamil dan balita komplikasi; 7) Peningkatan cakupan dan kualitas persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan serta pelayanan antenatal, neonatal, dan pasca persalinan dengan tenaga kesehatan terlatih; 8) Kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga kesehatan, LSM, dan sektor swasta perlu dilakukan untuk mengimplementasikan program-program dan kebijakan yang efektif dalam mengurangi AKB; 9) Peningkatan jumlah dan kapasitas puskesmas mampu pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar (PONED) dan RS mampu pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif (PONEK); 10) Penyediaan tempat tunggu untuk kelahiran dan perawatan balita komplikasi; 11) Peningkatan cakupan dan kualitas persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan serta pelayanan antenatal, neonatal, dan pasca persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih; 12) Penguatan sistem rujukan maternal dan pendampingan ibu hamil dan balita komplikasi; 13) Penjaminan ketersediaan obat dan kebutuhan sediaan darah setiap saat; 14) Peningkatan jumlah dan kapasitas puskesmas yang mampu memberikan pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar (PONED) dan RS mampu pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif (PONEK); 15) Pendidikan kesehatan yang intensif perlu diberikan kepada masyarakat, terutama kepada ibu hamil, keluarga, dan masyarakat sekitar, mengenai pentingnya perawatan prenatal yang baik, persalinan yang aman, dan perawatan pasca kelahiran yang tepat; 16) Program pemantauan kehamilan yang intensif dan perawatan langsung yang diberikan oleh tenaga medis yang terlatih dapat membantu mengidentifikasi risiko dan memberikan perawatan yang tepat; 17) Program penempatan dokter di daerah terpencil dan pedesaan perlu diperluas dan ditingkatkan. Insentif seperti tunjangan dan fasilitas kerja yang lebih baik dapat diberikan untuk menarik dokter ke daerah-daerah yang sulit dijangkau;

No	Sub-Aspek	Rekomendasi
		<ul style="list-style-type: none"> 18) Pemerintah dapat memberikan dukungan dalam pengembangan karir dan pengembangan profesional dokter, termasuk program pelatihan lanjutan, kesempatan penelitian, dan keterlibatan dalam manajemen kesehatan; 19) Peningkatan jumlah tenaga kebidanan dan keperawatan yang memadai sesuai proporsi jumlah penduduk; 20) Perlu ditingkatkan akses ke fasilitas kesehatan, transportasi, dan infrastruktur pendukung lainnya untuk meningkatkan distribusi bidan di seluruh wilayah; 21) Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi Bidan; 22) Program penempatan di daerah terpencil atau pedesaan dapat mendorong perawat untuk bekerja di wilayah tersebut; 23) Peningkatan upah dan kesejahteraan perawat, termasuk tunjangan dan fasilitas kerja yang memadai, dapat meningkatkan daya tarik profesi perawat
b	<p>Upaya Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1) Memberikan bantuan beasiswa pendidikan bagi anak tidak mampu hingga tuntas belajar 12 tahun; 2) Optimalisasi peran lembaga pendidikan, organisasi profesi pendidik dan dunia usaha, serta melakukan gerakan orang tua asuh siswa; 3) Pengembangan dan peningkatan pendidikan menengah yang berkualitas dan merata; 4) Penguatan pembelajaran berbasis penguasaan keterampilan abad 21 pada jenjang pendidikan menengah; 5) Pemenuhan dan peningkatan pemanfaatan anggaran pendidikan; 6) Pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam sektor pendidikan, termasuk alokasi dana yang memadai untuk merekrut dan mempertahankan guru SD yang berkualitas; 7) Distribusi guru yang merata di berbagai daerah, termasuk daerah pedesaan dan terpencil. 8) Melakukan Perencanaan anggaran yang bersumber dari DAK, OTSUS maupun APBD untuk pembangunan maupun rehabilitasi ruang belajar bagi sekolah di daerah yang sulit akses atau terisolasi demi pemerataan pendidikan. 9) Pendidikan dasar yang berkualitas dan merata; 10) Penguatan pembelajaran berbasis penguasaan keterampilan abad 21; 11) Pemenuhan tenaga pendidik dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang diprioritaskan untuk Orang Asli Papua (OAP); 12) Peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik; 13) Pemenuhan dan peningkatan pemanfaatan anggaran pendidikan; 14) Pemerintah perlu meningkatkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur sekolah, termasuk penambahan ruang belajar yang memadai, fasilitas pendukung, dan perbaikan kondisi bangunan; 15) Pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam sektor pendidikan, termasuk alokasi dana yang memadai untuk merekrut dan mempertahankan guru SMP yang berkualitas; 16) Perlu dilakukan upaya untuk memastikan distribusi guru yang merata di berbagai daerah, termasuk daerah pedesaan dan terpencil, dengan memberikan insentif dan fasilitas yang memadai;

No	Sub-Aspek	Rekomendasi
		<p>17) Pemerintah perlu meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan, serta meningkatkan akses guru terhadap sumber daya pendidikan yang relevan dan mutakhir;</p> <p>18) Pengembangan program pengajaran yang menarik dan relevan dapat meningkatkan minat siswa untuk melanjutkan ke SMA/MA, sehingga meningkatkan permintaan akan guru di tingkat tersebut;</p> <p>19) Perencanaan Strategis yang baik guna mengidentifikasi daerah-daerah yang memerlukan peningkatan alokasi guru dan melakukan langkah-langkah yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut;</p> <p>20) Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membangun dan memperluas infrastruktur pendidikan, termasuk pembangunan ruang belajar tambahan di SMA/MA yang membutuhkan;</p> <p>21) Selain ruang kelas konvensional, dapat dilakukan penyediaan ruang belajar alternatif, seperti ruang belajar berbasis teknologi atau ruang belajar berbagi yang dapat digunakan oleh beberapa sekolah dalam satu lokasi;</p> <p>22) Perlu dilakukan penyesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal perencanaan dan alokasi ruang belajar, serta pengawasan penggunaannya agar sesuai dengan kebutuhan rasio murid SMA/MA terhadap ruang belajar;</p> <p>23) Perlu dilakukan perbaikan dalam sistem penempatan guru, termasuk analisis kebutuhan dan alokasi guru yang lebih tepat berdasarkan rasio murid SMA/MA terhadap guru di berbagai wilayah;</p> <p>24) Program Peningkatan Jumlah Guru dan Kualifikasi Guru;</p> <p>25) Diperlukan pengawasan dan monitoring yang lebih baik terkait penempatan guru, mobilitas guru, dan pemenuhan rasio murid SMA/MA terhadap guru di setiap sekolah</p>

Sumber: Hasil Evaluasi RPJPD Provinsi Papua 2005-2025

2.5.4 Rekomendasi Tentang Peningkatan Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Tabel 0.83 Rekomendasi Tentang Peningkatan Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Berdasarkan Hasil Evaluasi RPJPD Papua 2005-2025

No	Sub-Aspek	Rekomendasi
a	Upaya Meningkatkan Elektrifikasi Penduduk	<p>1) Pemerintah dan sektor swasta perlu meningkatkan investasi dalam pengembangan infrastruktur listrik, terutama di daerah yang belum terlayani atau sulit dijangkau;</p> <p>2) Intensifitas penggunaan teknologi terbarukan seperti panel surya atau turbin angin dapat membantu meningkatkan aksesibilitas listrik di daerah yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik seperti di perkotaan;</p> <p>3) Optimalisasi penyediaan jaringan listrik ke seluruh daerah pelosok dengan melanjutkan dan memperkuat program Papua Terang;</p>

No	Sub-Aspek	Rekomendasi
b	Upaya Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak huni	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengembangkan kemitraan, kolaborasi, dan sinergi yang lebih baik antara seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan permukiman dan perumahan yang layak huni dan berkelanjutan; 2) Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan program sepuluh ribu rumah layak huni; 3) Percepatan penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif; 4) Perlu dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat rumah sehat dan praktik yang dapat meningkatkan kualitas rumah; 5) Pemerintah memberikan program subsidi membangun atau memperbaiki rumah menuju rumah sehat.
c	Upaya Meningkatkan Sarana dan Prasarana Transportasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pembangunan, perawatan, dan pemeliharaan jalan nasional; 2) Pemerintah harus melakukan reformasi perizinan dan mempercepat proses perizinan untuk pembangunan jalan nasional; 3) Pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan jalan provinsi guna mempercepat pembangunan infrastruktur tersebut; 4) Pemerintah harus memperbaiki proses perizinan pembangunan jalan; 5) Pemerintah perlu mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan jalan provinsi secara efisien dan berkelanjutan; 6) Perencanaan Infrastruktur jalan yang memadai, pemeliharaan jalan dan perbaikan jalan yang terintegrasi (Jalan Trans-Papua); 7) Perencanaan infrastruktur jalan kota sampai kampung-kampung; 8) Pembangunan dan peningkatan bandara hub internasional dan penyediaan rute internasional; 9) pelatihan bagi tenaga kerja pelabuhan udara dalam hal penanganan barang yang efisien dan aman; 10) Peningkatan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja akan meningkatkan produktivitas dan kemampuan mereka dalam menangani jumlah barang yang lebih besar; 11) Pembangunan bandara perairan untuk mendukung daerah terluar sulit akses atau terisolir dan destinasi pariwisata; 12) Perlu dilakukan investasi dalam pembangunan dan perluasan infrastruktur pelabuhan udara, termasuk landasan pacu yang lebih panjang, terminal kargo yang lebih luas, dan fasilitas pengangkutan barang yang lebih efisien; 13) Perlu dilakukan perbaikan dalam pengaturan kapasitas dan proses operasional pelabuhan udara, termasuk penggunaan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi pengiriman barang dan peningkatan kerja sama antara pemangku kepentingan terkait; 14) Perlu percepatan pembangunan pelabuhan depapre sebagai pelabuhan khusus peti kemas untuk bongkar muat barang antar pulau dan luar negeri di Provinsi Papua;

No	Sub-Aspek	Rekomendasi
		<ol style="list-style-type: none"> 15) Perlunya peningkatan pengolahan komoditas hasil perikanan, pekebunan, hasil hutan bukan kayu, dll untuk kebutuhan ekspor; 16) perlunya peningkatan kerjasama perdagangan luar negeri dengan dengan negara-negara pasifik yang terdekat dan menjajaki peluang kerjasama dengan negara-negara di amerika latin dengan memanfaatkan jaringan logistik terdekat menuju amerika; 17) Menjadikan Pelabuhan Biak sebagai gerbang Indonesia di Kawasan Timur; 18) Perlu percepatan pembangunan pelabuhan depapre sebagai pelabuhan khusus peti kemas untuk bongkar muat barang antar pulau dan luar negeri di Provinsi Papua.
d	<p>Upaya Meningkatkan Pemenuhan Air Bersih</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam infrastruktur air bersih yang memadai, termasuk pembangunan sumur, pipa distribusi air, dan sistem penyediaan air bersih yang efisien; 2) Program edukasi dan kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya air bersih, kebersihan, dan pengelolaan air yang baik perlu ditingkatkan; 3) Mempercepat pemenuhan akses air minum dan sanitasi layak dan aman melalui strategi menyediakan dan mengelola akses air minum dan sanitasi layak dan aman serta berkelanjutan. 4) Pemerintah dan sektor swasta perlu meningkatkan investasi dalam pengembangan infrastruktur air bersih, termasuk pembangunan sumur, pipa distribusi, dan instalasi pengolahan air; 5) Peningkatan kualitas sumber daya air melalui regulasi yang ketat dan tindakan perlindungan lingkungan. Ini melibatkan pengendalian polusi, pengelolaan daerah tangkapan air, dan konservasi sumber daya air; 6) Pendidikan masyarakat tentang pentingnya air bersih, sanitasi yang baik, dan praktik penghematan air dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam program akses air bersih;
e	<p>Upaya Melestarikan Hutan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyuluhan dan pendampingan pengelola hutan pada masyarakat adat; 2) Penguatan sistem perizinan, pengawasan dan pengamanan pengelolaan sumber daya lahan; 3) Penataan ruang berbasis konservasi; 4) Perlindungan kawasan ekowisata berbasis kearifan lokal secara berkelanjutan; 5) Pemerintah perlu menguatkan kebijakan hukum dan penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap hutan lindung, termasuk <i>illegal logging</i> dan kegiatan ilegal lainnya; 6) Untuk mengurangi tekanan terhadap hutan lindung, diperlukan pengembangan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat sekitar hutan, seperti pengembangan pariwisata berbasis hutan, agroforestri, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan; 7) Program edukasi dan kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian hutan lindung, manfaatnya, dan peran masyarakat dalam menjaga keberlanjutan hutan lindung perlu ditingkatkan;

No	Sub-Aspek	Rekomendasi
		<p>8) Harus selalu dilakukan monev terkait penebangan liar, membuka lahan lain yang merusak hutan lindung tersebut;</p> <p>9) Pemerintah perlu menguatkan kebijakan dan hukum dalam perlindungan dan pengelolaan hutan produksi yang berkelanjutan, termasuk penegakan hukum yang lebih efektif terhadap aktivitas ilegal;</p> <p>10) Meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap aktivitas penebangan dan eksploitasi di hutan produksi untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pengelolaan yang berkelanjutan;</p> <p>11) Memberdayakan dan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan produksi melalui pelatihan, pendidikan, dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam pelestarian hutan produksi.</p>

Sumber: Hasil Evaluasi RPJPD Provinsi Papua 2005-2025

2.5.5 Rekomendasi Tentang Peningkatan Iklim Berinvestasi

Tabel 0.84 Rekomendasi Tentang Peningkatan Iklim Berinvestasi Berdasarkan Hasil Evaluasi RPJPD Papua 2005-2025

No	Sub-Aspek	Rekomendasi
a	Upaya Meningkatkan Realisasi Investasi	<p>1) Pemerintah perlu melakukan kampanye promosi investasi yang lebih aktif, baik di dalam maupun luar negeri, untuk menarik minat investor, dengan melibatkan unsur adat;</p> <p>2) Pemerintah harus berkomitmen untuk meningkatkan infrastruktur, terutama dalam hal transportasi dan konektivitas, guna memfasilitasi aksesibilitas dan mobilitas investor asing dalam menjalankan proyek PMA;</p> <p>3) Pemerintah dapat meningkatkan upaya promosi dan kerjasama dengan negara-negara asing untuk memperluas jaringan investasi PMA. Melalui kampanye promosi yang efektif dan kerjasama bilateral yang kuat, jumlah proyek PMA dapat meningkat;</p> <p>4) Penyediaan informasi investasi;</p> <p>5) Regulasi yang lebih jelas, transparan, dan efisien akan mendorong investor untuk melaksanakan proyek dengan lebih cepat;</p> <p>6) Program pelatihan tenaga kerja yang terarah dan berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian tenaga kerja lokal;</p> <p>7) Pemerintah perlu menjaga stabilitas ekonomi dan kebijakan yang konsisten dalam jangka panjang;</p> <p>8) Pelibatan dan penyadaran masyarakat terhadap pentingnya investasi dalam pembangunan daerah.</p>
b	Upaya Meningkatkan Fasilitas Keuangan Dalam Berinvestasi	<p>1) Pemerintah perlu fokus pada pengembangan infrastruktur keuangan di Papua, termasuk pembangunan jaringan perbankan yang lebih luas, peningkatan aksesibilitas ATM, dan peningkatan layanan keuangan di daerah terpencil;</p> <p>2) Bank perlu menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah.</p>

No	Sub-Aspek	Rekomendasi
		3) Peningkatan inklusi dan literasi keuangan yang tinggi. Terutama untuk pengusaha muda berbagai sektor, yang saat ini harus siap menghadapi perubahan zaman yang sangat cepat; 4) Peningkatan digitalisasi di sektor keuangan yang mempermudah akses terhadap berbagai produk investasi.

Sumber: Hasil Evaluasi RPJPD Provinsi Papua 2005-2025

2.6 TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK

Proyeksi kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik adalah komponen kunci dalam perencanaan strategis yang memastikan pengembangan wilayah yang terorganisir, inklusif, dan berkelanjutan. Proyeksi kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik Provinsi Papua menjadi penting agar pemerintah daerah dapat merencanakan dan mengembangkan infrastruktur serta fasilitas umum yang sesuai dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Hal ini menjadi penting karena dengan memahami kebutuhan fasilitas umum yang akan datang, pemerintah daerah dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien dan memastikan pembangunan sarana prasarana pelayanan publik memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.

2.6.1 Proyeksi Penduduk

Pemahaman terhadap komposisi penduduk Provinsi Papua pada masa yang akan datang menjadi penting untuk dapat menghitung proyeksi kebutuhan masyarakat di Provinsi Papua terhadap sarana prasarana pelayanan publik. Hasil proyeksi penduduk Provinsi Papua dalam subbab ini mempertimbangkan karakteristik demografi yang berbeda antar penduduk laki-laki dan perempuan, sehingga perlu dihitung terlebih dahulu proyeksi penduduk 2025-2045 berdasarkan jenis kelamin. Dalam hal ini, penggunaan metode geometrik dalam proyeksi penduduk Provinsi Papua tahun 2035-2045 mempertimbangkan deviasi yang paling kecil terhadap data jumlah penduduk tahun 2020-2023 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Papua.

Tabel 0.85 Proyeksi Penduduk di Provinsi Papua Tahun 2025-2045

No	Kabupaten	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
			2025	2030	2035	2040	2045
PAPUA		1.047.100	1.073.640	1.135.900	1.197.500	1.270.153	1.347.457
1	Jayapura	171.670	174.850	182.340	190.540	199.370	208.625
2	Kep. Yapen	117.030	120.120	127.770	135.620	144.483	153.924
3	Biak Numfor	139.390	142.790	151.080	159.470	168.940	178.985
4	Sarmi	42.680	43.480	45.220	47.050	49.116	51.272
5	Keerom	63.500	64.830	67.890	71.030	74.572	78.295
6	Waropen	35.320	36.300	38.750	41.350	44.244	47.344
7	Supiori	24.010	25.030	27.500	30.130	33.256	36.722
8	Mamberamo Raya	38.640	40.140	43.780	47.320	51.706	56.508
9	Kota Jayapura	414.860	426.110	451.580	475.020	504.467	535.780

(1) Jumlah penduduk tahun 2023 bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Papua.

(2) Proyeksi penduduk tahun 2025-2045 merupakan Hasil Analisis (2024).

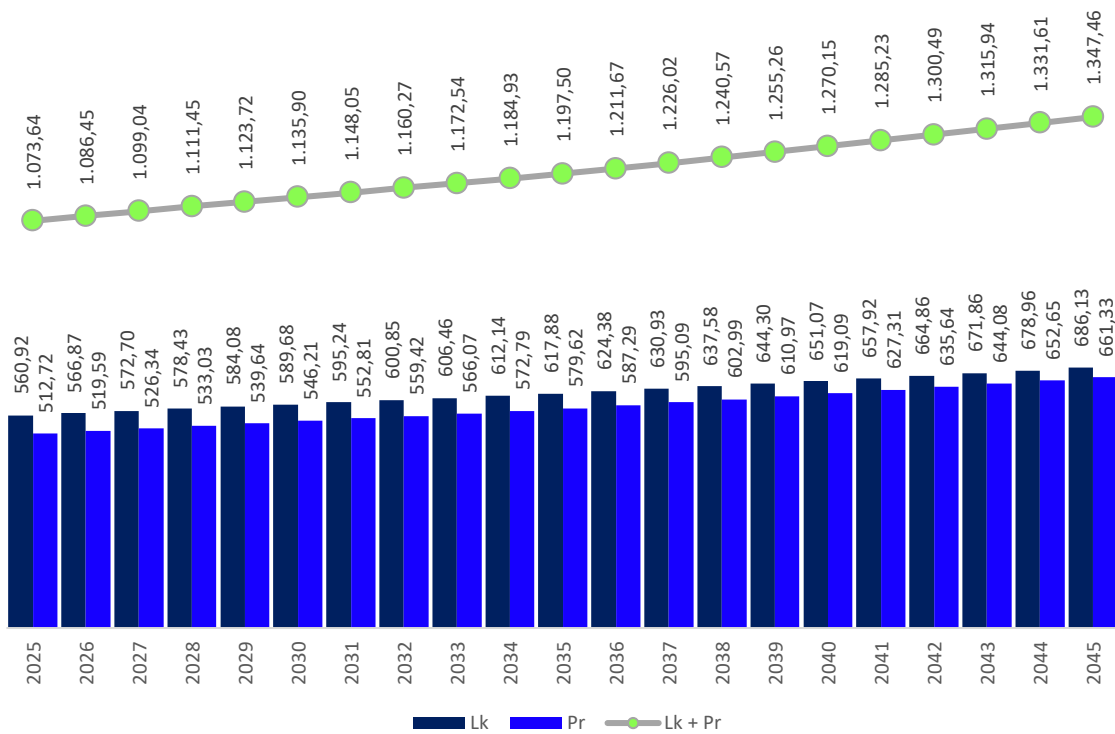
Tabel 0.86 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2025-2045

No	Variabel	Kabupaten	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
				2025	2030	2035	2040	2045
1	Laki-laki (orang)	PAPUA	548.510	560.920	589.680	617.880	651.067	686.130
		Jayapura	89.190	90.560	93.770	97.330	101.097	105.010
		Kep. Yapen	60.540	62.000	65.590	69.290	73.417	77.789
		Biak Numfor	71.390	73.060	77.120	81.250	85.882	90.778
		Sarmi	22.690	23.090	23.900	24.690	25.642	26.631
		Keerom	33.400	34.020	35.450	36.940	38.587	40.307
		Waropen	18.670	19.150	20.330	21.580	22.963	24.436
		Supiori	12.430	12.930	14.120	15.400	16.906	18.559
		Mamberamo Raya	20.170	20.890	22.610	24.280	26.325	28.542
		Kota Jayapura	220.020	225.230	236.790	247.120	260.243	274.063
2	Perempuan (orang)	PAPUA	498.590	512.720	546.210	579.620	619.086	661.327
		Jayapura	82.480	84.290	88.570	93.210	98.278	103.622
		Kep. Yapen	56.490	58.120	62.180	66.330	71.063	76.134
		Biak Numfor	68.000	69.730	73.960	78.210	83.057	88.205
		Sarmi	19.990	20.390	21.320	22.360	23.472	24.639
		Keerom	30.100	30.810	32.440	34.090	35.986	37.988
		Waropen	16.650	17.150	18.420	19.770	21.281	22.908
		Supiori	11.580	12.100	13.380	14.720	16.351	18.163
		Mamberamo Raya	18.470	19.250	21.170	23.040	25.383	27.965
		Kota Jayapura	194.840	200.880	214.790	227.900	244.214	261.696
3	Rasio	PAPUA	110,01	109,40	107,96	106,60	105,17	103,75
		Jayapura	108,14	107,44	105,87	104,42	102,87	101,34
		Kep. Yapen	107,17	106,68	105,48	104,46	103,31	102,17
		Biak Numfor	104,99	104,78	104,27	103,89	103,40	102,92
		Sarmi	113,51	113,24	112,10	110,42	109,25	108,08
		Keerom	110,96	110,42	109,28	108,36	107,23	106,10
		Waropen	112,13	111,66	110,37	109,16	107,90	106,67
		Supiori	107,34	106,86	105,53	104,62	103,40	102,19
		Mamberamo Raya	109,20	108,52	106,80	105,38	103,71	102,06
		Kota Jayapura	112,92	112,12	110,24	108,43	106,56	104,73

(1) Jumlah penduduk tahun 2023 bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Papua.

(2) Proyeksi penduduk tahun 2025-2045 merupakan Hasil Analisis (2024).

Gambar 0.78 Proyeksi Penduduk Provinsi Papua Tahun 2025-2045 (jiwa)



Sumber: Hasil Analisis, 2024

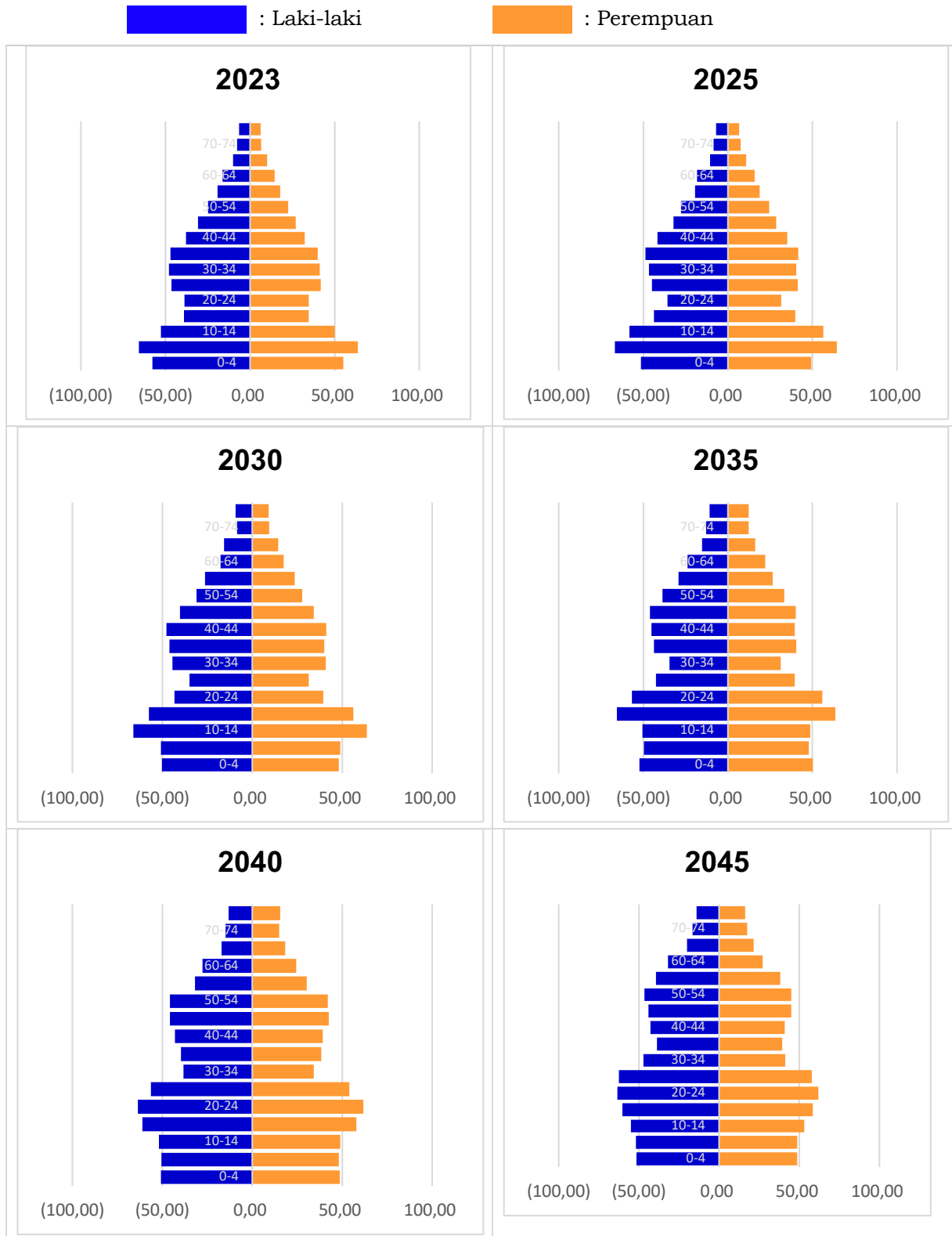
Apabila meninjau kondisi piramida penduduk, diproyeksikan terdapat perubahan struktur piramida penduduk masing-masing daerah pada tahun 2025-2045. Meskipun demikian terdapat kecenderungan bentuk stasioner. Hal ini didukung dengan adanya peningkatan jumlah penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas). Pergeseran struktur piramida penduduk ini perlu disikapi dengan strategi pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua, diantaranya melalui: penguatan sistem kesehatan dan sosial; peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan; peningkatan produktifitas tenaga kerja; pengembangan infrastruktur dan perubahan; maupun penguatan kebijakan keluarga dan komunitas. Perubahan kondisi demografis yang tidak diimbangi dengan strategi pembangunan berkelanjutan dapat berdampak pada munculnya permasalahan pembangunan di Provinsi Papua, antara lain: (1) penurunan produktivitas ekonomi akibat peningkatan beban ketergantungan ekonomi pada usia produktif; (2) krisis sistem kesehatan dan jaminan sosial akibat meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan dan pembiayaan jaminan sosial; (3) peningkatan ketimpangan sosial, termasuk ketimpangan antara generasi muda dan lansia; (4) stagnasi inovasi dan teknologi akibat penurunan tenaga kerja terampil; (5) ketidakstabilan sosial dan politik; dan (6) penurunan kesejahteraan kualitas hidup dan kesehatan mental masyarakat.

Tabel 0.87 Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Papua Berdasarkan Kelompok Umur 2025-2045

No	Klmpk Umur	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)			Proyeksi Penduduk (Jiwa)														
					2025			2030			2035			2040			2045		
		Lk	Pr	Jumlah	Lk	Pr	Jumlah	Lk	Pr	Jumlah	Lk	Pr	Jumlah	Lk	Pr	Jumlah	Lk	Pr	Jumlah
1	0-4	57.700	55.080	112.780	51.380	49.350	100.730	50.220	48.190	98.410	52.290	50.130	102.420	50.843	48.559	99.402	51.513	48.757	100.270
2	5-9	65.590	63.830	129.420	66.830	64.280	131.110	50.900	49.010	99.910	49.770	47.870	97.640	50.360	48.075	98.435	52.002	48.905	100.906
3	10-14	52.550	50.010	102.560	58.130	56.530	114.660	66.170	63.820	129.990	50.410	48.710	99.120	51.915	48.890	100.805	55.043	53.174	108.217
4	15-19	38.960	34.560	73.520	43.740	39.740	83.480	57.560	56.140	113.700	65.540	63.420	128.960	61.202	57.813	119.016	60.445	58.415	118.860
5	20-24	38.640	34.750	73.390	35.570	31.570	67.140	43.180	39.600	82.780	56.850	55.950	112.800	63.584	61.640	125.224	63.451	61.752	125.203
6	25-29	46.520	41.890	88.410	44.900	41.160	86.060	35.010	31.440	66.450	42.510	39.440	81.950	56.263	53.857	110.120	62.629	57.914	120.543
7	30-34	47.980	41.330	89.310	46.530	40.520	87.050	44.380	40.850	85.230	34.590	31.190	65.780	38.370	34.305	72.675	47.218	41.319	88.538
8	35-39	47.060	39.960	87.020	48.660	41.710	90.370	46.030	40.150	86.180	43.830	40.470	84.300	39.691	38.267	77.957	38.732	39.351	78.083
9	40-44	37.940	32.460	70.400	41.530	35.090	76.620	47.620	41.070	88.690	45.060	39.560	84.620	43.012	39.244	82.256	42.720	40.883	83.603
10	45-49	30.770	27.070	57.840	32.140	28.470	60.610	40.260	34.290	74.550	46.210	40.180	86.390	45.815	42.604	88.419	44.035	44.989	89.024
11	50-54	24.890	22.500	47.390	27.850	24.480	52.330	30.860	27.690	58.550	38.710	33.400	72.110	45.761	42.075	87.836	46.419	45.031	91.450
12	55-59	19.350	17.900	37.250	19.360	18.740	38.100	26.200	23.500	49.700	29.100	26.640	55.740	31.725	30.417	62.142	39.501	38.272	77.773
13	60-64	16.260	14.600	30.860	18.250	15.960	34.210	17.650	17.600	35.250	23.960	22.160	46.120	27.610	24.452	52.062	31.898	27.332	59.231
14	65-69	10.160	9.980	20.140	10.600	10.930	21.530	15.810	14.440	30.250	15.390	16.010	31.400	17.083	18.433	35.516	19.874	21.552	41.426
15	70-74	7.560	6.580	14.140	8.360	7.420	15.780	8.530	9.260	17.790	12.820	12.340	25.160	14.710	14.949	29.659	16.636	17.419	34.055
16	75+	6.580	6.120	12.700	7.080	6.750	13.830	9.330	9.160	18.490	10.850	12.150	23.000	13.120	15.507	28.627	14.013	16.261	30.274
Total		548.510	498.620	1.047.130	560.910	512.700	1.073.610	589.710	546.210	1.135.920	617.890	579.620	1.197.510	651.067	619.086	1.270.153	686.130	661.327	1.347.457

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Gambar 0.79 Proyeksi Piramida Penduduk Provinsi Papua Tahun 2023-2045 (Jiwa)



Sumber: Hasil Analisis, 2024

2.6.2 Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Pembahasan proyeksi kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik dalam subbab ini terdiri atas 6 (enam) pembahasan, yaitu: (1) proyeksi kebutuhan tempat tinggal; (2) proyeksi kebutuhan air minum; (3) proyeksi kebutuhan kelistrikan; (4) proyeksi kebutuhan persampahan; (5) proyeksi kebutuhan fasilitas dan SDM kesehatan; serta (6) proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik.

2.6.2.1 Proyeksi Kebutuhan Tempat Tinggal

Perkembangan suatu wilayah meningkatkan aktivitas di dalamnya, sehingga untuk mengakomodasi aktivitas masyarakat, diperlukan hunian sebagai tempat tinggal. Tempat tinggal tersebut, biasanya diwujudkan dalam bentuk perumahan dan permukiman oleh pemerintah. Meningkatnya pertumbuhan penduduk berbanding lurus dengan permintaan akan kebutuhan tempat tinggal menunjukkan proyeksi kebutuhan tempat tinggal di Provinsi Papua pada tahun 2025-2045, yang dihitung dengan menggunakan konsep unit rumah tangga. Dalam hal ini, definisi rumah tangga yang digunakan adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Asumsi yang digunakan untuk menghitung kebutuhan tempat tinggal adalah: *kebutuhan tempat tinggal = rumah yang sudah tersedia + rumah tangga baru yang membutuhkan rumah layak huni di tahun ke-n*.

Tabel 0.88 Proyeksi Kebutuhan Tempat Tinggal di Provinsi Papua Tahun 2025-2045

No	Variabel	Standar	Provinsi/ Kabupaten	Kondisi 2023	Proyeksi				
					2025	2030	2035	2040	2045
1	Jumlah Penduduk (orang)		PAPUA	1.047.100	1.073.640	1.135.900	1.197.500	1.270.153	1.347.457
			Jayapura	171.670	174.850	182.340	190.540	199.370	208.625
			Kep. Yapen	117.030	120.120	127.770	135.620	144.483	153.924
			Biak Numfor	139.390	142.790	151.080	159.470	168.940	178.985
			Sarmi	42.680	43.480	45.220	47.050	49.116	51.272
			Keerom	63.500	64.830	67.890	71.030	74.572	78.295
			Waropen	35.320	36.300	38.750	41.350	44.244	47.344
			Supiori	24.010	25.030	27.500	30.130	33.256	36.722
			Mamberamo Raya	38.640	40.140	43.780	47.320	51.706	56.508
			Kota Jayapura	414.860	426.110	451.580	475.020	504.467	535.780
2	Jumlah Rumah Tangga ⁽¹⁾		PAPUA	261.775	268.410	283.975	299.375	317.538	336.864
			Jayapura	42.918	43.713	45.585	47.635	49.842	52.156
			Kep. Yapen	29.258	30.030	31.943	33.905	36.121	38.481
			Biak Numfor	34.848	35.698	37.770	39.868	42.235	44.746
			Sarmi	10.670	10.870	11.305	11.763	12.279	12.818
			Keerom	15.875	16.208	16.973	17.758	18.643	19.574
			Waropen	8.830	9.075	9.688	10.338	11.061	11.836
			Supiori	6.003	6.258	6.875	7.533	8.314	9.181
			Mamberamo Raya	9.660	10.035	10.945	11.830	12.927	14.127
			Kota Jayapura	103.715	106.528	112.895	118.755	126.117	133.945
3	Kebutuha n Tempat Tinggal (unit) ⁽²⁾	rumah yang sudah tersedia + rumah tangga baru yang mebut uhkan rumah layak hun di tahun ke-n	PAPUA	261.775	268.410	283.975	299.375	317.538	336.864
			Jayapura	42.918	43.713	45.585	47.635	49.842	52.156
			Kep. Yapen	29.258	30.030	31.943	33.905	36.121	38.481
			Biak Numfor	34.848	35.698	37.770	39.868	42.235	44.746
			Sarmi	10.670	10.870	11.305	11.763	12.279	12.818
			Keerom	15.875	16.208	16.973	17.758	18.643	19.574
			Waropen	8.830	9.075	9.688	10.338	11.061	11.836
			Supiori	6.003	6.258	6.875	7.533	8.314	9.181
			Mamberamo Raya	9.660	10.035	10.945	11.830	12.927	14.127
			Kota Jayapura	103.715	106.528	112.895	118.755	126.117	133.945

(1) Definisi rumah tangga yang digunakan adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur (2) Perhitungan kebutuhan tempat tinggal menggunakan konsep unit rumah tangga

Diketahui terdapat peningkatan kebutuhan tempat tinggal di Provinsi Papua dari 268.410 unit rumah pada tahun 2025 menjadi 336.864 unit rumah pada tahun 2045. Kabupaten/Kota dengan kebutuhan rumah tertinggi terdapat di Kota Jayapura. Dalam menyikapi hasil proyeksi ini, penting bagi Pemerintah Daerah dalam merancang kebijakan efektif dan berkelanjutan di bidang perumahan. Kebutuhan tempat tinggal yang tidak terpenuhi dalam jangka panjang dapat berdampak pada menurunnya kualitas hidup layak, *overcrowding* maupun berkembangnya permukiman kumuh.

2.6.2.2 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih dan Air Minum

Proyeksi kebutuhan air minum di Provinsi Papua sangat penting untuk memastikan bahwa semua masyarakat memiliki akses ke air bersih dan layak. Proyeksi kebutuhan air minum di Provinsi Papua Tahun 2025-2045. Standar perhitungan kebutuhan air bersih yang digunakan adalah 100 liter/hari /orang (1 m³= 1000 liter) mengacu pada SNI 19-6728.1-2002 tentang Standar Penyusunan Neraca Sumber Daya Air. Adapun standar perhitungan kebutuhan air minum yang digunakan adalah 8 gelas/orang/hari atau setara dengan 2 liter/orang /hari mengacu pada rekomendasi *World Health Organization* (WHO).

Meningkatnya kebutuhan air minum dan air bersih yang layak di Provinsi Papua pada tahun 2025-2045, berimplikasi pada diperlukannya upaya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan, serta peningkatkan kualitas air baik dari sumber air permukaan maupun air tanah. Pengembangan infrastruktur penyediaan air, seperti pipa, pompa, dan sistem distribusi, sangat penting untuk memenuhi kebutuhan air minum di Kabupaten Biak Numfor melalui program kolaboratif antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, sektor swasta dan masyarakat.

Berbagai dampak negatif yang dapat muncul apabila di Provinsi Papua tidak terdapat upaya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan, serta kebutuhan air bersih layak tidak terpenuhi, diantaranya: (1) penurunan kesehatan masyarakat dan peningkatan risiko penyebaran penyakit seperti diare, disentri, dan kolera; (2) meningkatnya prevalensi stunting yang berdampak pada perkembangan kognitif dan fisik anak, serta kesejahteraan anak di masa depan; (3) menghambat pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah; maupun (4) penggunaan sumber air yang tidak berkelanjutan dan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.

Tabel 0.89 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih dan Air Minum di Provinsi Papua Tahun 2025-2045

No	Variabel	Standar	Provinsi/ Kabupaten	Kondisi 2023	Proyeksi				
					2025	2030	2035	2040	2045
1	Jumlah Penduduk (orang)		PAPUA	1.047.100	1.073.640	1.135.900	1.197.500	1.270.153	1.347.457
			Jayapura	171.670	174.850	182.340	190.540	199.370	208.625
			Kep. Yapen	117.030	120.120	127.770	135.620	144.483	153.924
			Biak Numfor	139.390	142.790	151.080	159.470	168.940	178.985
			Sarmi	42.680	43.480	45.220	47.050	49.116	51.272
			Keerom	63.500	64.830	67.890	71.030	74.572	78.295
			Waropen	35.320	36.300	38.750	41.350	44.244	47.344
			Supiori	24.010	25.030	27.500	30.130	33.256	36.722
			Mamberamo Raya	38.640	40.140	43.780	47.320	51.706	56.508
			Kota Jayapura	414.860	426.110	451.580	475.020	504.467	535.780
2	Kebutu- han Air Bersih (m ³ per hari) ⁽¹⁾	100 liter/hari /orang, dalam hal ini, 1 m ³ = 1000 liter	PAPUA	104.710	107.364	113.590	119.750	127.015	134.746
			Jayapura	17.167	17.485	18.234	19.054	19.937	20.862
			Kep. Yapen	11.703	12.012	12.777	13.562	14.448	15.392
			Biak Numfor	13.939	14.279	15.108	15.947	16.894	17.899
			Sarmi	4.268	4.348	4.522	4.705	4.912	5.127
			Keerom	6.350	6.483	6.789	7.103	7.457	7.830
			Waropen	3.532	3.630	3.875	4.135	4.424	4.734
			Supiori	2.401	2.503	2.750	3.013	3.326	3.672
			Mamberamo Raya	3.864	4.014	4.378	4.732	5.171	5.651
			Kota Jayapura	41.486	42.611	45.158	47.502	50.447	53.578
3	Kebutu- han Air Minum (liter per hari)	8 gelas/ora- ng/hari atau setara dengan 2 liter/oran- g/hari	PAPUA	2.094.200	2.147.280	2.271.800	2.395.000	2.540.307	2.694.914
			Jayapura	343.340	349.700	364.680	381.080	398.740	417.250
			Kep. Yapen	234.060	240.240	255.540	271.240	288.966	307.848
			Biak Numfor	278.780	285.580	302.160	318.940	337.879	357.970
			Sarmi	85.360	86.960	90.440	94.100	98.231	102.544
			Keerom	127.000	129.660	135.780	142.060	149.144	156.591
			Waropen	70.640	72.600	77.500	82.700	88.489	94.689
			Supiori	48.020	50.060	55.000	60.260	66.512	73.445
			Mamberamo Raya	77.280	80.280	87.560	94.640	103.412	113.017
			Kota Jayapura	829.720	852.220	903.160	950.040	1.008.934	1.071.561

(1) Perhitungan kebutuhan air bersih berdasarkan SNI 19-6728.1-2002 tentang Standar Penyusunan Neraca Sumber Daya (menggunakan standar perdesaan)

2.6.2.3 Proyeksi Kebutuhan Kelistrikan

Proyeksi kebutuhan kelistrikan sangat penting untuk memastikan pasokan listrik di Provinsi Papua dapat memenuhi kebutuhan di masa depan. Peningkatan populasi dan pertumbuhan ekonomi, akan berimplikasi pada peningkatan kebutuhan listrik, khususnya jumlah daya tambahan yang diperlukan. Berdasarkan proyeksi dapat diketahui terdapat peningkatan kebutuhan konsumsi listrik per hari di Provinsi Papua pada tahun 2025-2045, dengan asumsi rata-rata konsumsi listrik per kapita per hari di Provinsi Papua ditargetkan sama dengan rata-rata nasional.

Peningkatan kebutuhan listrik di Provinsi Papua perlu diiringi pengembangan infrastruktur kelistrikan seperti pembangkit listrik, jaringan transmisi, dan distribusi untuk memastikan pasokan listrik yang stabil dan berkelanjutan. Penggunaan sumber daya energi terbarukan seperti tenaga surya, air dan angin dapat dipromosikan dan diterapkan secara lebih intens untuk membantu memenuhi kebutuhan listrik secara berkelanjutan. Selain itu, promosi penggunaan energi yang lebih efisien dapat dilakukan untuk membantu mengurangi beban listrik dan meningkatkan efisiensi energi di berbagai sektor. Dalam hal ini, program kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, sektor swasta dan masyarakat dapat

dijalankan untuk mempercepat proses pengembangan infrastruktur kelistrikan secara berkelanjutan.

Tabel 0.90 Proyeksi Kebutuhan Kelistrikan di Provinsi Papua Tahun 2025-2045

No	Variabel	Standar	Provinsi/ Kabupaten	Kondisi 2023	Proyeksi				
					2025	2030	2035	2040	2045
1	Jumlah Penduduk (orang)		PAPUA	1.047.100	1.073.640	1.135.900	1.197.500	1.270.153	1.347.457
			Jayapura	171.670	174.850	182.340	190.540	199.370	208.625
			Kep. Yapen	117.030	120.120	127.770	135.620	144.483	153.924
			Biak Numfor	139.390	142.790	151.080	159.470	168.940	178.985
			Sarmi	42.680	43.480	45.220	47.050	49.116	51.272
			Keerom	63.500	64.830	67.890	71.030	74.572	78.295
			Waropen	35.320	36.300	38.750	41.350	44.244	47.344
			Supiori	24.010	25.030	27.500	30.130	33.256	36.722
			Mamb. Raya	38.640	40.140	43.780	47.320	51.706	56.508
			Kota Jayapura	414.860	426.110	451.580	475.020	504.467	535.780
2	Rata-rata konsumsi listrik per Kapita (MWh/kapita)	<i>Rata-rata Nasional</i>		1,285	1,482	1,918	2,482	3,211	4,155
3	Kebutuhan Konsumsi Listrik per hari (MWh)	<i>rata-rata konsumsi listrik per kapita diasumsikan sama dengan rata- rata nasional</i>	PAPUA	1.345.523,50	1.591.624,53	2.178.805,55	2.972.010,43	4.078.752,61	5.598.640,03
			Jayapura	220.595,95	259.207,51	349.752,09	472.890,91	640.221,88	866.829,28
			Kep. Yapen	150.383,55	178.072,67	245.079,66	336.587,94	463.967,56	639.549,57
			Biak Numfor	179.116,15	211.679,96	289.791,30	395.779,96	542.503,86	743.677,29
			Sarmi	54.843,80	64.457,21	86.737,91	116.770,85	157.721,62	213.034,19
			Keerom	81.597,50	96.107,65	130.221,95	176.285,51	239.467,33	325.315,12
			Waropen	45.386,20	53.813,17	74.327,60	102.624,33	142.079,03	196.714,37
			Supiori	30.852,85	37.105,88	52.748,62	74.778,02	106.793,22	152.579,98
			Mamb. Raya	49.652,40	59.505,80	83.975,80	117.440,95	166.039,86	234.790,24
			Kota Jayapura	533.095,10	631.689,51	866.189,82	1.178.926,42	1.619.958,25	2.226.149,98

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Berbagai dampak negatif yang dapat muncul apabila kebutuhan listrik tidak terpenuhi jangka pendek maupun jangka panjang di Provinsi Papua, diantaranya: (1) terhambatnya akses terhadap berbagai layanan dasar seperti penerangan, komunikasi, dan informasi; (2) terganggunya pelayanan/operasional fasilitas kesehatan dan pendidikan; (3) terhambatnya kegiatan ekonomi, industri, bisnis, maupun pertanian yang berdampak pada ketidakstabilan ekonomi; (4) terhambatnya perkembangan teknologi dan inovasi; serta (5) ketidakstabilan pasokan air bersih karena banyak sistem penyediaan air bersih yang bergantung pada listrik untuk operasional pompa dan distribusi air.

2.6.2.4 Proyeksi Kebutuhan Persampahan

Proyeksi kebutuhan persampahan di Provinsi Papua sangat penting untuk mengantisipasi peningkatan timbulan sampah akibat pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Peningkatan jumlah penduduk masing-masing daerah akan berimplikasi pada peningkatan timbulan sampah dan kapasitas fasilitas persampahan yang diperlukan. Selain itu, peningkatan aktivitas ekonomi juga akan berkontribusi pada peningkatan timbulan sampah. Proyeksi kebutuhan sarana pengelolaan persampahan serta estimasi produksi sampah/timbulan sampah per hari di Provinsi Papua Tahun 2025-2045. Estimasi ini dihitung berdasarkan asumsi timbulan sampah 2,5 liter per orang per hari, dengan berat jenis sampah menggunakan asumsi 0,2 kg per liter.

Peningkatan produksi timbulan sampah di masing-masing kabupaten/kota Provinsi Papua Tahun 2025-2045 perlu diiringi pengembangan infrastruktur persampahan yang memadai, efektif, dan berkelanjutan diantaranya melalui TPA (Tempat Pembuangan Akhir), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, dan Recycle* (TPS3R) yang dikelola dengan berwawasan lingkungan. Selain itu, program pengurangan sampah seperti 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) harus diperkenalkan dan diterapkan secara luas di Provinsi Papua untuk mengurangi timbulan sampah secara kolaboratif melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sektor swasta, dan masyarakat.

Tabel 0.91 Proyeksi Kebutuhan Sarana Pengelolaan Persampahan di Provinsi Papua Tahun 2025-2045

No	Variabel	Standar	Provinsi/ Kabupaten	Kondisi 2023	Proyeksi				
					2025	2030	2035	2040	2045
1	Jumlah Penduduk (orang)		PAPUA	1.047.100	1.073.640	1.135.900	1.197.500	1.270.153	1.347.457
			Jayapura	171.670	174.850	182.340	190.540	199.370	208.625
			Kep. Yapen	117.030	120.120	127.770	135.620	144.483	153.924
			Biak Numfor	139.390	142.790	151.080	159.470	168.940	178.985
			Sarmi	42.680	43.480	45.220	47.050	49.116	51.272
			Keerom	63.500	64.830	67.890	71.030	74.572	78.295
			Waropen	35.320	36.300	38.750	41.350	44.244	47.344
			Supiori	24.010	25.030	27.500	30.130	33.256	36.722
			Mamberamo Raya	38.640	40.140	43.780	47.320	51.706	56.508
			Kota Jayapura	414.860	426.110	451.580	475.020	504.467	535.780
2	Produksi sampah / Timbulan sampah (ton per hari) ⁽¹⁾	2,5 liter/ora ng/hari, dengan berat jenis sampah menggu nakan asumsi 0,2 kg/liter	PAPUA	523,55	536,82	567,95	598,75	635,08	673,73
			Jayapura	85,84	87,43	91,17	95,27	99,68	104,31
			Kep. Yapen	58,52	60,06	63,89	67,81	72,24	76,96
			Biak Numfor	69,70	71,40	75,54	79,74	84,47	89,49
			Sarmi	21,34	21,74	22,61	23,53	24,56	25,64
			Keerom	31,75	32,42	33,95	35,52	37,29	39,15
			Waropen	17,66	18,15	19,38	20,68	22,12	23,67
			Supiori	12,01	12,52	13,75	15,07	16,63	18,36
			Mamberamo Raya	19,32	20,07	21,89	23,66	25,85	28,25
			Kota Jayapura	207,43	213,06	225,79	237,51	252,23	267,89
3	Kebutuhan TPA	setidakn ya 1 kabupat en/kota memiliki 1 TPA	PAPUA	9	9	9	9	9	9
			Jayapura	1	1	1	1	1	1
			Kep. Yapen	1	1	1	1	1	1
			Biak Numfor	1	1	1	1	1	1
			Sarmi	1	1	1	1	1	1
			Keerom	1	1	1	1	1	1
			Waropen	1	1	1	1	1	1
			Supiori	1	1	1	1	1	1
			Mamberamo Raya	1	1	1	1	1	1
			Kota Jayapura	1	1	1	1	1	1
4	Kebutuhan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	1 unit TPS (Tipe II) untuk 30.000 jiwa pendud uk	PAPUA	35	36	38	40	42	45
			Jayapura	6	6	6	6	7	7
			Kep. Yapen	4	4	4	5	5	5
			Biak Numfor	5	5	5	5	6	6
			Sarmi	1	1	2	2	2	2
			Keerom	2	2	2	2	2	3
			Waropen	1	1	1	1	1	2
			Supiori	1	1	1	1	1	1
			Mamberamo Raya	1	1	1	2	2	2
			Kota Jayapura	14	14	15	16	17	18

No	Variabel	Standar	Provinsi/ Kabupaten	Kondisi 2023	Proyeksi				
					2025	2030	2035	2040	2045
5	Kebutuhan TPS3R	1 unit TPS3R setidakn ya terdapat di setiap distrik	PAPUA	115	115	115	115	115	115
			Jayapura	19	19	19	19	19	
			Kep. Yapen	16	16	16	16	16	
			Biak Numfor	19	19	19	19	19	
			Sarmi	19	19	19	19	19	
			Keerom	11	11	11	11	11	
			Waropen	12	12	12	12	12	
			Supiori	5	5	5	5	5	
			Mamberamo Raya	9	9	9	9	9	
			Kota Jayapura	5	5	5	5	5	

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Berbagai dampak negatif yang dapat muncul apabila kebutuhan fasilitas dan pengelolaan persampahan tidak terpenuhi jangka pendek maupun jangka panjang di Provinsi Papua, diantaranya: (1) pencemaran lingkungan, tanah dan air yang dapat mengganggu ekosistem lokal dan merusak habitat satwa; (2) peningkatan risiko penyebaran penyakit; (3) penurunan kualitas hidup masyarakat dengan adanya bau yang tidak sedap dan pemandangan yang membuat tidak nyaman; (4) penurunan minat wisatawan dan investor; (5) konflik sosial; maupun (6) gangguan terhadap infrastruktur seperti penyumbatan saluran drainase.

2.6.2.5 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas dan SDM Kesehatan

2.6.2.5.1 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan berfungsi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Perhitungan kebutuhan fasilitas kesehatan didasarkan jumlah penduduk yang dilayani setiap fasilitas. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentukan grup bangunan/blok yang nantinya terbentuk sesuai konteks lingkungannya, sedangkan penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani area tertentu.

Tabel 0.92 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan di Provinsi Papua Tahun 2025-2045

No	Variabel	Standar	Provinsi/ Kabupaten	2023		Proyeksi				
				Kebutuhan	Kebutuhan Terpenuhi	2025	2030	2035	2040	2045
1	Jumlah Penduduk (orang)		PAPUA	1.047.100		1.073.640	1.135.900	1.197.500	1.270.153	1.347.457
			Jayapura	171.670		174.850	182.340	190.540	199.370	208.625
			Kep. Yapen	117.030		120.120	127.770	135.620	144.483	153.924
			Biak Numfor	139.390		142.790	151.080	159.470	168.940	178.985
			Sarmi	42.680		43.480	45.220	47.050	49.116	51.272
			Keerom	63.500		64.830	67.890	71.030	74.572	78.295
			Waropen	35.320		36.300	38.750	41.350	44.244	47.344
			Supiori	24.010		25.030	27.500	30.130	33.256	36.722
			Mamberamo Raya	38.640		40.140	43.780	47.320	51.706	56.508
			Kota Jayapura	414.860		426.110	451.580	475.020	504.467	535.780

No	Variabel	Standar	Provinsi/ Kabupaten	2023		Proyeksi				
				Kebutuhan	Kebutuhan Terpenuhi	2025	2030	2035	2040	2045
2	Jumlah Distrik		PAPUA	115						
			Jayapura	19						
			Kep. Yapen	16						
			Biak	19						
			Numfor	19						
			Sarmi	19						
			Keerom	11						
			Waropen	12						
			Supiori	5						
			Mamberamo Raya	9						
Kota Jayapura	5									
3	Jumlah Kampung/ Kelurahan		PAPUA	1.032						
			Jayapura	144						
			Kep. Yapen	165						
			Biak	268						
			Numfor	111						
			Sarmi	91						
			Keerom	117						
			Waropen	38						
			Supiori	59						
			Mamberamo Raya	39						
4	Kebutuhan Rumah Sakit (unit) (Tipe D dan C)	setidaknya tersedia 1 RS Kelas D dan C per kabupaten/ kota	PAPUA	9	16	9	9	9	9	9
			Jayapura	1	1	1	1	1	1	1
			Kep. Yapen	1	1	1	1	1	1	1
			Biak							
			Numfor	1	2	1	1	1	1	1
			Sarmi	1	1	1	1	1	1	1
			Keerom	1	1	1	1	1	1	1
			Waropen	1	1	1	1	1	1	1
			Supiori	1	1	1	1	1	1	1
			Mamberamo Raya	1	1	1	1	1	1	1
Kota Jayapura	1	7	1	1	1	1	1			
4	Kebutuhan Rumah Sakit (unit) (Tipe A/B)	setidaknya Provinsi memiliki 1 RS Tipe A atau Tipe B	PAPUA	1	2	1	1	1	1	1
			Jayapura	0	0	0	0	0	0	0
			Kep. Yapen	0	0	0	0	0	0	0
			Biak		0					
			Numfor	0		0	0	0	0	0
			Sarmi	0	0	0	0	0	0	0
			Keerom	0	0	0	0	0	0	0
			Waropen	0	0	0	0	0	0	0
			Supiori	0	0	0	0	0	0	0
			Mamberamo Raya	0	0	0	0	0	0	0
Kota Jayapura	1	2	1	1	1	1	1			
5	Kebutuhan Puskesmas (unit)	1 unit Puskesmas per distrik	PAPUA	115	118	115	115	115	115	115
			Jayapura	19	21	19	19	19	19	19
			Kep. Yapen	16	15	16	16	16	16	16
			Biak							
			Numfor	19	21	19	19	19	19	19
			Sarmi	19	11	19	19	19	19	19
			Keerom	11	9	11	11	11	11	11
			Waropen	12	11	12	12	12	12	12
			Supiori	5	5	5	5	5	5	5
			Mamberamo Raya	9	11	9	9	9	9	9

No	Variabel	Standar	Provinsi/ Kabupaten	2023		Proyeksi				
				Kebutuhan	Kebutuhan Terpenuhi	2025	2030	2035	2040	2045
6	Kebutuhan Laboratorium Klinik (unit)	1 unit laboratorium klinik per kabupaten/ kota	Kota Jayapura	5	14	5	5	5	5	5
			PAPUA	9	n.a	9	9	9	9	9
			Jayapura	1	n.a	1	1	1	1	1
			Kep. Yapen	1	n.a	1	1	1	1	1
			Biak							
			Numfor	1	n.a	1	1	1	1	1
			Sarmi	1	n.a	1	1	1	1	1
			Keerom	1	n.a	1	1	1	1	1
			Waropen	1	n.a	1	1	1	1	1
			Supiori	1	n.a	1	1	1	1	1
			Mamberamo Raya	1	n.a	1	1	1	1	1
7	Kebutuhan Posyandu (unit)	setidaknya 1 unit Posyandu per kampung	Kota Jayapura	1	n.a	1	1	1	1	1
			PAPUA	1032	n.a	1032	1032	1032	1032	1032
			Jayapura	144	n.a	144	144	144	144	144
			Kep. Yapen	165	n.a	165	165	165	165	165
			Biak							
			Numfor	268	n.a	268	268	268	268	268
			Sarmi	111	n.a	111	111	111	111	111
			Keerom	91	n.a	91	91	91	91	91
			Waropen	117	n.a	117	117	117	117	117
			Supiori	38	n.a	38	38	38	38	38
			Mamberamo Raya	59	n.a	59	59	59	59	59
Kota Jayapura	39	n.a	39	39	39	39	39			

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Kebutuhan yang belum sepenuhnya terpenuhi berdasarkan ketersediaan fasilitas kesehatan tahun 2023 adalah kebutuhan penyediaan rumah sakit, posyandu, dan laboratorium klinik. Dalam menyikapi hasil analisis kebutuhan fasilitas kesehatan di Provinsi Papua tahun 2025-2045, tentu perlu dipertimbangkan juga kebutuhan SDM kesehatan, kualitas/kelengkapan ketersediaan fasilitas kesehatan, serta kualitas pelayanan kesehatan sebagai kesatuan sistem layanan kesehatan di masing-masing daerah di Papua. Sehingga fasilitas kesehatan yang telah tersedia pun perlu ditingkatkan dalam hal pelayanan dan penyediaan alat-alat medis maupun kualitas SDM kesehatannya.

2.6.2.5.2 Proyeksi Kebutuhan SDM Kesehatan

Sebagai kesatuan sistem layanan kesehatan di Provinsi Papua, dalam subbab ini dihitung juga proyeksi kebutuhan SDM kesehatan yang meliputi dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, tenaga kebidanan, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga kesehatan masyarakat, serta ahli teknologi laboratorium medik. Terdapat beberapa standar yang digunakan dalam perhitungan proyeksi kebutuhan SDM, yaitu: (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 22 Tahun 2021 Tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, serta (2) Keputusan MENKOKESRA Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2026.

Kebutuhan SDM kesehatan yang **belum sepenuhnya terpenuhi** berdasarkan ketersediaan SDM kesehatan tahun 2023, adalah ketersediaan dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. Dalam menyikapi hasil analisis SDM kesehatan di Provinsi Papua tahun 2025-2045, tentu perlu dipertimbangkan kualitas/kelengkapan ketersediaan fasilitas kesehatan, aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan, serta kualitas pelayanan kesehatan sebagai kesatuan sistem layanan kesehatan di masing-masing daerah di Provinsi Papua.

Tabel 0.93 Proyeksi Kebutuhan SDM Kesehatan di Provinsi Papua Tahun 2025-2045

No	Variabel	Standar	Provinsi/ Kabupaten	2023		Proyeksi				
				Kebutu han	Kebutu han Terpenuhi	2025	2030	2035	2040	2045
1	Jumlah Penduduk (orang)		PAPUA	1.047.100		1.073.640	1.135.900	1.197.500	1.270.153	1.347.457
			Jayapura	171.670		174.850	182.340	190.540	199.370	208.625
			Kep. Yapen	117.030		120.120	127.770	135.620	144.483	153.924
			Biak Numfor	139.390		142.790	151.080	159.470	168.940	178.985
			Sarmi	42.680		43.480	45.220	47.050	49.116	51.272
			Keerom	63.500		64.830	67.890	71.030	74.572	78.295
			Waropen	35.320		36.300	38.750	41.350	44.244	47.344
			Supiori	24.010		25.030	27.500	30.130	33.256	36.722
			Mamberamo Raya	38.640		40.140	43.780	47.320	51.706	56.508
			Kota Jayapura	414.860		426.110	451.580	475.020	504.467	535.780
2	Dokter Umum (orang) ⁽¹⁾	1 : 2200 penduduk atau 45 per 100.000 penduduk	PAPUA	471	446	483	511	539	572	606
			Jayapura	77	57	79	82	86	90	94
			Kep. Yapen	53	32	54	57	61	65	69
			Biak Numfor	63	42	64	68	72	76	81
			Sarmi	19	22	20	20	21	22	23
			Keerom	29	22	29	31	32	34	35
			Waropen	16	7	16	17	19	20	21
			Supiori	11	19	11	12	14	15	17
			Mamberamo Raya	17	26	18	20	21	23	25
			Kota Jayapura	187	219	192	203	214	227	241
3	Dokter Gigi (orang) ⁽¹⁾	1 : 7500 penduduk atau 13 per 100.000 penduduk	PAPUA	136	61	140	148	156	165	175
			Jayapura	22	9	23	24	25	26	27
			Kep. Yapen	15	3	16	17	18	19	20
			Biak Numfor	18	9	19	20	21	22	23
			Sarmi	6	2	6	6	6	6	7
			Keerom	8	3	8	9	9	10	10
			Waropen	5	3	5	5	5	6	6
			Supiori	3	4	3	4	4	4	5
			Mamberamo Raya	5	1	5	6	6	7	7
			Kota Jayapura	54	27	55	59	62	66	70
4	Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis ⁽¹⁾	1 : 16000 penduduk atau 6 per 100.000 penduduk	PAPUA	63	0	64	68	72	76	81
			Jayapura	10	n.a	10	11	11	12	13
			Kep. Yapen	7	n.a	7	8	8	9	9
			Biak Numfor	8	n.a	9	9	10	10	11
			Sarmi	3	n.a	3	3	3	3	3
			Keerom	4	n.a	4	4	4	4	5
			Waropen	2	n.a	2	2	2	3	3
			Supiori	1	n.a	2	2	2	2	2
			Mamberamo Raya	2	n.a	2	3	3	3	3
			Kota Jayapura	25	n.a	26	27	29	30	32
5	Tenaga Kebidanan (orang) ⁽¹⁾	1 : 850 penduduk atau 118 per 100.000 penduduk	PAPUA	1.236	1.556	1.267	1.340	1.413	1.499	1.590
			Jayapura	203	245	206	215	225	235	246
			Kep. Yapen	138	155	142	151	160	170	182
			Biak Numfor	164	351	168	178	188	199	211
			Sarmi	50	126	51	53	56	58	61
			Keerom	75	152	76	80	84	88	92
			Waropen	42	56	43	46	49	52	56
			Supiori	28	90	30	32	36	39	43
			Mamberamo Raya	46	79	47	52	56	61	67
			Kota Jayapura	490	302	503	533	561	595	632
6	Tenaga Keperawatan (orang) ⁽¹⁾	1 : 560 penduduk atau 179 per 100.000 penduduk	PAPUA	1.874	4.501	1.922	2.033	2.144	2.274	2.412
			Jayapura	307	569	313	326	341	357	373
			Kep. Yapen	209	490	215	229	243	259	276
			Biak Numfor	250	730	256	270	285	302	320
			Sarmi	76	208	78	81	84	88	92
			Keerom	114	302	116	122	127	133	140
			Waropen	63	217	65	69	74	79	85
			Supiori	43	216	45	49	54	60	66
			Mamberamo Raya	69	199	72	78	85	93	101

No	Variabel	Standar	Provinsi/ Kabupaten	2023		Proyeksi				
				Kebutu- han	Kebutu- han Terpenuhi	2025	2030	2035	2040	2045
7	Tenaga Kefarmasian (orang) ⁽²⁾	30 per 100.000 penduduk	Kota Jayapura	743	1.570	763	808	850	903	959
			PAPUA	314	461	322	341	359	381	404
			Jayapura	52	53	52	55	57	60	63
			Kep. Yapen	35	52	36	38	41	43	46
			Biak Numfor	42	60	43	45	48	51	54
			Sarmi	13	18	13	14	14	15	15
			Keerom	19	42	19	20	21	22	23
			Waropen	11	19	11	12	12	13	14
			Supiori	7	12	8	8	9	10	11
			Mamberamo Raya	12	15	12	13	14	16	17
8	Tenaga Gizi (orang) ⁽²⁾	18 per 100.000 penduduk	Kota Jayapura	124	190	128	135	143	151	161
			PAPUA	188	295	193	204	216	229	243
			Jayapura	31	55	31	33	34	36	38
			Kep. Yapen	21	25	22	23	24	26	28
			Biak Numfor	25	30	26	27	29	30	32
			Sarmi	8	14	8	8	8	9	9
			Keerom	11	32	12	12	13	13	14
			Waropen	6	15	7	7	7	8	9
			Supiori	4	18	5	5	5	6	7
			Mamberamo Raya	7	12	7	8	9	9	10
9	Tenaga Kesehatan Lingkungan (orang) ⁽²⁾	20 per 100.000 penduduk	Kota Jayapura	75	94	77	81	86	91	96
			PAPUA	209	189	215	227	240	254	269
			Jayapura	34	39	35	36	38	40	42
			Kep. Yapen	23	22	24	26	27	29	31
			Biak Numfor	28	26	29	30	32	34	36
			Sarmi	9	11	9	9	9	10	10
			Keerom	13	25	13	14	14	15	16
			Waropen	7	9	7	8	8	9	9
			Supiori	5	5	5	6	6	7	7
			Mamberamo Raya	8	13	8	9	9	10	11
10	Tenaga Kesehatan Masyarakat (orang) ⁽²⁾	18 per 100.000 penduduk	Kota Jayapura	83	39	85	90	95	101	107
			PAPUA	188	92	193	204	216	229	243
			Jayapura	31	34	31	33	34	36	38
			Kep. Yapen	21	21	22	23	24	26	28
			Biak Numfor	25	12	26	27	29	30	32
			Sarmi	8	6	8	8	8	9	9
			Keerom	11	3	12	12	13	13	14
			Waropen	6	5	7	7	7	8	9
			Supiori	4	3	5	5	5	6	7
			Mamberamo Raya	7	1	7	8	9	9	10
11	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (orang) ⁽²⁾	18 per 100.000 penduduk	Kota Jayapura	75	7	77	81	86	91	96
			PAPUA	188	406	193	204	216	229	243
			Jayapura	31	58	31	33	34	36	38
			Kep. Yapen	21	39	22	23	24	26	28
			Biak Numfor	25	54	26	27	29	30	32
			Sarmi	8	21	8	8	8	9	9
			Keerom	11	45	12	12	13	13	14
			Waropen	6	19	7	7	7	8	9
			Supiori	4	12	5	5	5	6	7
			Mamberamo Raya	7	31	7	8	9	9	10

⁽¹⁾ Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 22 Tahun 2021 Tentang Kriteria Daerah Kab/Kota Peduli HAM

⁽²⁾ Berdasarkan KEPMENKOKESRA No. 54 Tahun 2013 Tentang Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan 2011-2026

2.6.2.6.1 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Salah satu pendekatan perencanaan pendidikan adalah pendekatan social demand yang dimaksudkan untuk mengatasi pemerataan akses pendidikan berdasarkan tren demografis, penduduk usia sekolah (PUS), dan juga didasarkan pada kemungkinan transisi pendaftaran dan tingkat penerimaan pada tingkat pendidikan yang berbeda.

Tabel 0.94 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan di Provinsi Papua Tahun 2025-2045

No	Variabel	Standar	Provinsi/ Kabupaten	2023		Proyeksi				
				Kebutuhan Fasilitas	Kebutuhan Terpenuhi	2025	2030	2035	2040	2045
1	Jumlah Penduduk (orang) ⁽¹⁾		PAPUA	1.047.100		1.073.640	1.135.900	1.197.500	1.270.153	1.347.457
			Jayapura	171.670		174.850	182.340	190.540	199.370	208.625
			Kep. Yapen	117.030		120.120	127.770	135.620	144.483	153.924
			Biak Numfor	139.390		142.790	151.080	159.470	168.940	178.985
			Sarmi	42.680		43.480	45.220	47.050	49.116	51.272
			Keerom	63.500		64.830	67.890	71.030	74.572	78.295
			Waropen	35.320		36.300	38.750	41.350	44.244	47.344
			Supiori	24.010		25.030	27.500	30.130	33.256	36.722
			Mamberamo Raya	38.640		40.140	43.780	47.320	51.706	56.508
			Kota Jayapura	414.860		426.110	451.580	475.020	504.467	535.780
2	Jumlah Distrik		PAPUA	115						
			Jayapura	19						
			Kep. Yapen	16						
			Biak Numfor	19						
			Sarmi	19						
			Keerom	11						
			Waropen	12						
			Supiori	5						
			Mamberamo Raya	9						
			Kota Jayapura	5						
2	Taman Kanak-kanak (TK) (unit) ⁽¹⁾	1 unit TK per 1250 penduduk	PAPUA	838	284	859	909	958	1.016	1.078
			Jayapura	137	57	140	146	152	159	167
			Kep. Yapen	94	15	96	102	108	116	123
			Biak Numfor	112	21	114	121	128	135	143
			Sarmi	34	14	35	36	38	39	41
			Keerom	51	57	52	54	57	60	63
			Waropen	28	2	29	31	33	35	38
			Supiori	19	32	20	22	24	27	29
			Mamberamo Raya	31	18	32	35	38	41	45
			Kota Jayapura	332	68	341	361	380	404	429
3	Sekolah Dasar (SD/MI) (unit) ⁽¹⁾	1 unit SD per 1600 penduduk	PAPUA	654	854	671	710	748	794	842
			Jayapura	107	141	109	114	119	125	130
			Kep. Yapen	73	123	75	80	85	90	96
			Biak Numfor	87	167	89	94	100	106	112
			Sarmi	27	73	27	28	29	31	32
			Keerom	40	78	41	42	44	47	49
			Waropen	22	52	23	24	26	28	30
			Supiori	15	40	16	17	19	21	23
			Mamberamo Raya	24	82	25	27	30	32	35
			Kota Jayapura	259	98	266	282	297	315	335
4	Sekolah Menengah Pertama (SMP) (unit) ⁽¹⁾	1 unit SMP per 4800 penduduk	PAPUA	218	279	224	237	249	265	281
			Jayapura	36	49	36	38	40	42	43
			Kep. Yapen	24	39	25	27	28	30	32
			Biak Numfor	29	56	30	31	33	35	37
			Sarmi	9	22	9	9	10	10	11
			Keerom	13	17	14	14	15	16	16
			Waropen	7	20	8	8	9	9	10
			Supiori	5	14	5	6	6	7	8
			Mamberamo Raya	8	22	8	9	10	11	12
			Kota Jayapura	86	40	89	94	99	105	112
5	Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah	1 unit SMA per 4800 penduduk	PAPUA	218	167	224	237	249	265	281
			Jayapura	36	32	36	38	40	42	43
			Kep. Yapen	24	22	25	27	28	30	32
			Biak Numfor	29	28	30	31	33	35	37
			Sarmi	9	10	9	9	10	10	11

No	Variabel	Standar	Provinsi/ Kabupaten	2023		Proyeksi				
				Kebutuhan Fasilitas	Kebutuhan Terpenuhi	2025	2030	2035	2040	2045
6	Kejuruan (SMA/SMK) (unit) ⁽¹⁾		Keerom	13	11	14	14	15	16	16
			Waropen	7	9	8	8	9	9	10
			Supiori	5	9	5	6	6	7	8
			Mamberamo Raya	8	6	8	9	10	11	12
			Kota Jayapura	86	40	89	94	99	105	112
	Taman Bacaan (unit) ⁽¹⁾	1 unit taman bacaan per 2500 penduduk	PAPUA	419	n.a	429	454	479	508	539
			Jayapura	69	n.a	70	73	76	80	83
			Kep. Yapen	47	n.a	48	51	54	58	62
			Biak Numfor	56	n.a	57	60	64	68	72
			Sarmi	17	n.a	17	18	19	20	21
			Keerom	25	n.a	26	27	28	30	31
		Waropen	14	n.a	15	16	17	18	19	
		Supiori	10	n.a	10	11	12	13	15	
		Mamberamo Raya	15	n.a	16	18	19	21	23	
		Kota Jayapura	166	n.a	170	181	190	202	214	
Sarana Pendidikan Inklusif										
6	Sekolah Inklusif Tingkat SD/MI (unit) ⁽²⁾	paling sedikit 1 SD di setiap distrik	PAPUA	115	0	115	115	115	115	115
		menyele nggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus	Jayapura	19	0	19	19	19	19	19
			Kep. Yapen	16	0	16	16	16	16	16
			Biak Numfor	19	0	19	19	19	19	19
			Sarmi	19	0	19	19	19	19	19
			Keerom	11	0	11	11	11	11	11
			Waropen	12	0	12	12	12	12	12
			Supiori	5	0	5	5	5	5	5
			Mamberamo Raya	9	0	9	9	9	9	9
			Kota Jayapura							
				5	0	5	5	5	5	5
7	Sekolah Inklusif Tingkat SMP (unit) ⁽²⁾	paling sedikit 1 SMP pada setiap distrik	PAPUA	115	0	115	115	115	115	115
		menyele nggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus	Jayapura	19	0	19	19	19	19	19
			Kep. Yapen	16	0	16	16	16	16	16
			Biak Numfor	19	0	19	19	19	19	19
			Sarmi	19	0	19	19	19	19	19
			Keerom	11	0	11	11	11	11	11
			Waropen	12	0	12	12	12	12	12
			Supiori	5	0	5	5	5	5	5
			Mamberamo Raya	9	0	9	9	9	9	9
			Kota Jayapura							
				5	0	5	5	5	5	5
8	Sekolah Inklusif Tingkat SMA (unit) ⁽²⁾	paling sedikit 1 SMA di setiap kabupaten, menyele nggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima	PAPUA	9	0	9	9	9	9	9
			Jayapura	1	0	1	1	1	1	1
			Kep. Yapen	1	0	1	1	1	1	1
			Biak Numfor	1	0	1	1	1	1	1
			Sarmi	1	0	1	1	1	1	1
			Keerom	1	0	1	1	1	1	1
			Waropen	1	0	1	1	1	1	1
			Supiori	1	0	1	1	1	1	1
			Mamberamo Raya	1	0	1	1	1	1	1
			Kota Jayapura							
				1	0	1	1	1	1	1

No	Variabel	Standar	Provinsi/ Kabupaten	2023		Proyeksi				
				Kebutuhan Fasilitas	Kebutuhan Terpenuhi	2025	2030	2035	2040	2045
9	SLB Terpadu (unit) ⁽²⁾	a peserta didik berkebutuhan khusus setidakn ya terdapat 1 unit di setiap kabupaten/kota	PAPUA	9	7	9	9	9	9	9
			Jayapura	1	0	1	1	1	1	1
			Kep. Yapen	1	1	1	1	1	1	1
			Biak Numfor	1	3	1	1	1	1	1
			Sarmi	1	0	1	1	1	1	1
			Keerom	1	0	1	1	1	1	1
			Waropen	1	1	1	1	1	1	1
			Supiori	1	0	1	1	1	1	1
			Mamberamo Raya	1	0	1	1	1	1	1
			Kota Jayapura	1	2	1	1	1	1	1

⁽¹⁾ Berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

Kebutuhan fasilitas pendidikan yang **belum sepenuhnya terpenuhi** berdasarkan ketersediaan fasilitas pendidikan dimasing-masing daerah di Provinsi Papua tahun 2023. Dalam menyikapi hasil analisis kebutuhan fasilitas pendidikan dimasing-masing daerah di Provinsi Papua tahun 2025-2045, tentu perlu dipertimbangkan juga kebutuhan tenaga pendidik, kurikulum, dan kualitas proses belajar mengajar sebagai kesatuan sistem layanan pendidikan di Provinsi Papua.

2.6.2.6.3 Proyeksi Kebutuhan Tenaga Pendidik

Sebagai kesatuan sistem layanan pendidikan, dalam subbab ini dihitung juga proyeksi kebutuhan tenaga pendidik di setiap tingkat pendidikan, baik TK, SD, SMP, dan SMA/SMK. Perhitungan proyeksi kebutuhan tenaga pendidik menggunakan standar Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Pasal 17). Untuk dapat menghitung kebutuhan tenaga pendidik di Provinsi Papua, terlebih dahulu dilakukan proyeksi jumlah peserta didik. Dalam hal ini, proyeksi peserta didik yang digunakan adalah proyeksi penduduk usia sekolah dengan asumsi seluruh anak usia sekolah bersekolah dengan tepat waktu (rentang usia sekolah yang digunakan adalah SD : 7-12 tahun, SMP : 13-15 tahun, SMA : 16-18 tahun).

Tabel 0.95 Proyeksi Jumlah Peserta Didik di Provinsi Papua Tahun 2025-2045

No	Variabel	Standar	Provinsi/ Kabupaten	2023		Proyeksi Kebutuhan				
				Kebutuhan Guru	Kebutuhan Terpenuhi	2025	2030	2035	2040	2045
1	Jumlah Penduduk Usia 4-6 Tahun (orang) ⁽¹⁾		PAPUA	74.324		72.590	59.644	59.538	59.255	60.417
			Jayapura	14.138		13.536	9.612	9.726	9.292	9.881
			Kep. Yapen	8.456		8.044	7.668	7.926	7.612	8.066
			Biak Numfor	9.648		9.408	8.824	9.030	9.269	8.964
			Sarmi	3.454		3.236	2.106	2.126	1.997	2.115
			Keerom	5.122		5.038	3.198	3.222	3.033	3.073
			Waropen	3.080		2.952	2.130	2.192	2.236	2.357
			Supiori	2.048		1.960	2.082	1.910	1.950	1.894
			Mamberamo Raya	2.824		2.778	2.972	2.968	2.929	2.775
			Kota Jayapura	25.556		25.638	21.228	20.442	20.937	21.292

No	Variabel	Standar	Provinsi/ Kabupaten	2023		Proyeksi Kebutuhan				
				Kebutuhan Guru	Kebutuhan Terpenuhi	2025	2030	2035	2040	2045
2	Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun (orang) ⁽¹⁾		PAPUA	139.188		147.468	137.934	118.050	119.544	125.474
			Jayapura	26.136		27.948	24.636	18.768	18.460	21.574
			Kep. Yapen	16.818		16.812	15.642	15.162	15.125	16.232
			Biak Numfor	18.840		19.056	18.294	17.484	18.275	18.548
			Sarmi	6.624		7.014	5.748	4.110	3.904	4.828
			Keerom	9.234		10.374	9.126	6.336	5.575	6.473
			Waropen	5.850		6.294	5.448	4.230	4.514	5.166
			Supiori	3.930		4.056	3.798	4.068	3.874	3.738
			Mamberamo Raya	5.226		5.268	5.616	5.886	5.906	5.595
	Kota Jayapura	46.530		50.646	49.536	42.288	43.910	43.321		
3	Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun (orang) ⁽¹⁾		PAPUA	55.728		62.564	74.736	65.438	64.125	67.059
			Jayapura	9.702		11.182	14.128	11.172	10.538	11.864
			Kep. Yapen	7.272		7.936	8.196	7.606	7.633	7.799
			Biak Numfor	8.266		8.866	9.454	8.898	8.903	9.282
			Sarmi	2.478		2.848	3.448	2.508	2.377	2.925
			Keerom	3.364		3.934	5.416	4.102	3.425	3.834
			Waropen	2.226		2.600	3.196	2.506	2.515	2.889
			Supiori	1.574		1.830	1.430	1.986	1.978	1.901
			Mamberamo Raya	2.210		2.402	2.626	2.840	2.960	2.877
	Kota Jayapura	18.636		20.970	26.264	23.866	23.797	23.689		
4	Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun (orang) ⁽¹⁾		PAPUA	44.112		50.088	68.220	77.382	71.409	71.316
			Jayapura	7.326		8.406	12.336	14.748	13.208	12.992
			Kep. Yapen	5.832		6.588	8.448	7.914	7.635	7.906
			Biak Numfor	6.990		7.818	9.258	9.414	8.797	9.348
			Sarmi	1.818		2.100	3.072	3.480	3.112	3.165
			Keerom	2.532		2.910	4.428	5.886	4.793	4.390
			Waropen	1.566		1.920	2.928	3.318	3.021	3.043
			Supiori	1.086		1.314	1.014	1.638	2.048	1.996
			Mamberamo Raya	1.914		1.998	2.586	2.628	3.003	2.961
	Kota Jayapura	15.048		17.034	23.076	28.026	25.792	25.515		
2	Guru TK (orang) ⁽²⁾	satu guru TK bertanggung jawab terhadap 15 murid (1:15)	PAPUA	4.955	886	4.839	3.976	3.969	3.950	4.028
			Jayapura	943	206	902	641	648	619	659
			Kep. Yapen	564	67	536	511	528	507	538
			Biak Numfor	643	58	627	588	602	618	598
			Sarmi	230	29	216	140	142	133	141
			Keerom	341	151	336	213	215	202	205
			Waropen	205	4	197	142	146	149	157
			Supiori	137	72	131	139	127	130	126
			Mamberamo Raya	188	18	185	198	198	195	185
	Kota Jayapura	1.704	281	1.709	1.415	1.363	1.396	1.419		
3	Guru SD (orang) ⁽²⁾	satu guru SD bertanggung jawab terhadap 20 murid (1:20)	PAPUA	6.959	2.840	7.373	6.897	5.903	5.977	6.274
			Jayapura	1.307	1,316	1.397	1.232	938	923	1.079
			Kep. Yapen	841	868	841	782	758	756	812
			Biak Numfor	942	1,333	953	915	874	914	927
			Sarmi	331	428	351	287	206	195	241
			Keerom	462	671	519	456	317	279	324
			Waropen	293	338	315	272	212	226	258
			Supiori	197	307	203	190	203	194	187
			Mamberamo Raya	261	224	263	281	294	295	280
	Kota Jayapura	2.327	1,622	2.532	2.477	2.114	2.196	2.166		
4	Guru SMP (orang) ⁽²⁾	satu guru SMP bertanggung jawab terhadap 20 murid (1:20)	PAPUA	2.786	3.756	3.128	3.737	3.272	3.206	3.353
			Jayapura	485	755	559	706	559	527	593
			Kep. Yapen	364	486	397	410	380	382	390
			Biak Numfor	413	667	443	473	445	445	464
			Sarmi	124	211	142	172	125	119	146
			Keerom	168	316	197	271	205	171	192
			Waropen	111	208	130	160	125	126	144
			Supiori	79	152	92	72	99	99	95
			Mamberamo Raya	111	162	120	131	142	148	144
	Kota Jayapura	932	799	1.049	1.313	1.193	1.190	1.184		

No	Variabel	Standar	Provinsi/ Kabupaten	2023		Proyeksi Kebutuhan				
				Kebutuhan Guru	Kebutuhan Terpenuhi	2025	2030	2035	2040	2045
5	Guru SMA/SMK (orang) ⁽²⁾	satu guru SMA bertanggung jawab terhadap 20 murid (1:20)	PAPUA	2.206	3.540	2.504	3.411	3.869	3.570	3.566
			Jayapura	366	644	420	617	737	660	650
			Kep. Yapen	292	413	329	422	396	382	395
			Biak Numfor	350	611	391	463	471	440	467
			Sarmi	91	157	105	154	174	156	158
			Keerom	127	228	146	221	294	240	219
			Waropen	78	126	96	146	166	151	152
			Supiori	54	165	66	51	82	102	100
			Mamberamo Raya	96	85	100	129	131	150	148
			Kota Jayapura	752	1111	852	1.154	1.401	1.290	1.276
6	Guru SLB Terpadu (orang) ⁽³⁾	1 orang pendidik menangani 5 anak disabilitas (dengan asumsi 1 pendidik menguasai semua/ragam isu penyandang disabilitas), dengan estimasi 1 SLB melayani 10 rombel	PAPUA	70	67	70	70	70	70	70
			Jayapura	10	0	10	10	10	10	10
			Kep. Yapen	10	8	10	10	10	10	10
			Biak Numfor	10	14	10	10	10	10	10
			Sarmi	10	0	10	10	10	10	10
			Keerom	10	0	10	10	10	10	10
			Waropen	10	7	10	10	10	10	10
			Supiori	10	0	10	10	10	10	10
			Mamberamo Raya	10	0	10	10	10	10	10
			Kota Jayapura	10	38	10	10	10	10	10

(1) Proyeksi peserta didik yang digunakan adalah proyeksi penduduk usia anak sekolah dengan asumsi seluruh anak usia sekolah bersekolah (SD : 7-12 Tahun, SMP : 13-15 Tahun, SMA : 16-18 Tahun)

(2) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Pasal 17)

Peningkatan kebutuhan tenaga pendidik dimasing-masing daerah di Provinsi Papua pada tahun 2025-2045. Kebutuhan tenaga pendidik yang **belum sepenuhnya terpenuhi** berdasarkan ketersediaan guru di beberapa daerah tahun 2023, adalah ketersediaan guru TK. Dalam menyikapi hasil analisis kebutuhan tenaga pendidik di masing-masing daerah di Provinsi Papua ini, tentu perlu dipertimbangkan juga tantangan distribusi tenaga pendidik per distrik per sekolah, tingkat pendidikan guru, kurikulum, ketersediaan/kondisi fasilitas pendidikan, serta kualitas proses belajar mengajar sebagai kesatuan sistem layanan pendidikan di Provinsi Papua.

2.7 PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH

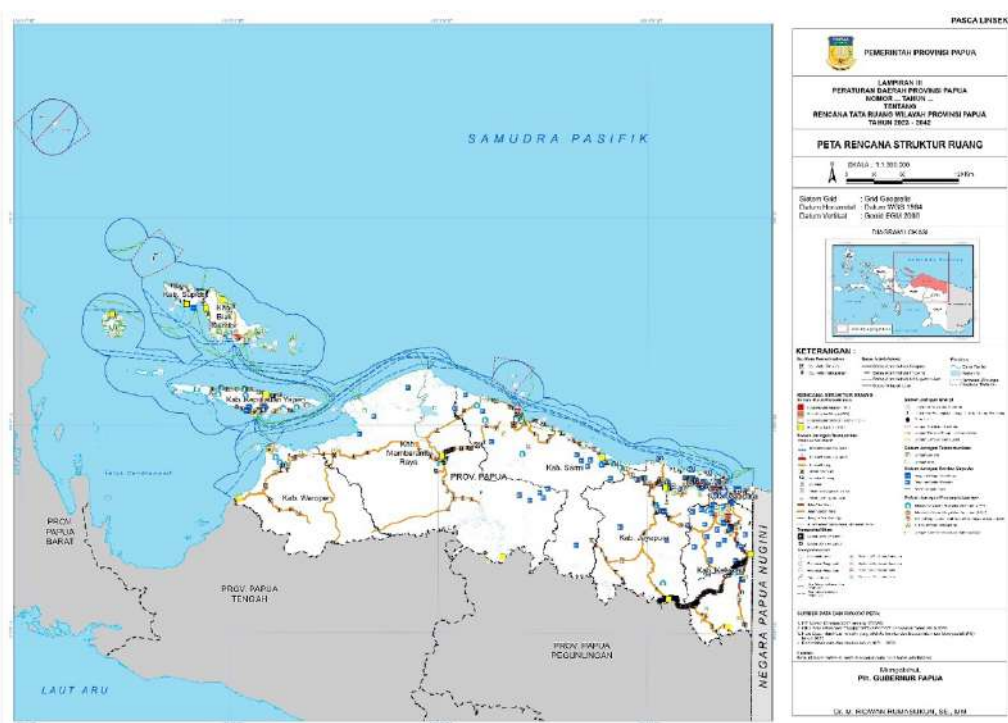
Penataan ruang Provinsi Papua bertujuan untuk mewujudkan pengembangan wilayah berbasis agroindustri, perikanan dan pariwisata bagi kesejahteraan masyarakat dengan tetap melindungi hak kelola masyarakat adat, yang maju dan berdaya saing, serta berkelanjutan, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042. Kebijakan penataan ruang Provinsi Papua terdiri atas:

- pengembangan komoditas unggulan pertanian, perkebunan dan kehutanan dalam menunjang agroindustri;
- pengembangan perikanan budidaya dan tangkap dengan tetap mengedepankan sumberdaya ikan lestari;
- pengembangan pariwisata unggulan berbasis wisata alam dan budaya yang terintegrasi dengan budaya setempat;
- peningkatan fungsi ruang yang mendukung kawasan lindung dan budidaya sesuai dengan karakter dan hak kelola masyarakat hukum adat sekaligus mewujudkan provinsi berkelanjutan;

- e. pengembangan secara terintegrasi wilayah darat, pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan karakter masyarakat adat dan kearifan lokal masing-masing wilayah sekaligus menciptakan peningkatan iklim investasi daerah;
- f. pengembangan struktur ruang secara berhierarki, dalam mendukung pengembangan pusat permukiman dan susunan pusat pertumbuhan di daratan dan lautan yang terintegrasi dengan prasarana wilayah sampai tingkat distrik;
- g. pemantapan ruang fungsi lindung dan budidaya dalam mendorong kelestarian lingkungan dan mendorong pengembangan wilayah dalam menciptakan daya saing daerah;
- h. pengembangan kawasan strategis dengan mengoptimalkan potensi ekonomi, mempertahankan karakter sosial budaya masyarakat adat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- i. pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan di wilayah darat, laut dan udara dengan penekanan pengamanan wilayah yang sangat luas sampai tingkat kampung dan wilayah perbatasan negara.

Pemanfaatan ruang Provinsi Papua berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang, dengan memperhatikan hak ulayat dan karakteristik masyarakat adat (lihat Gambar 0.80 dan Gambar 0.81). Pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Papua dilaksanakan melalui penyusunan indikasi program pemanfaatan ruang beserta sumber pendanaannya. Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), investasi swasta maupun kerja sama pendanaan. Adapun kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 0.80 Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Papua Tahun 2023-2042



Sumber: RTRW Provinsi Papua 2023-2042

Pusat-pusat kegiatan yang ada di Provinsi Papua terdiri atas (PKN), (PKW), (PKSN) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). PKN di Provinsi Papua meliputi Kota Jayapura dan Sebagian Kabupaten Jayapura. PKW di Provinsi Papua meliputi Biak di Kabupaten

Tabel 0.96 Pengembangan Sistem Pusat Permukiman dan Kawasan Strategis di Provinsi Papua

SWP	KABUPATEN/ KOTA	SISTEM PUSAT PERMUKIMAN				KAWASAN STRATEGIS					POTENSI	
		PKN (Pusat Kegiatan Nasional)	PKW (Pusat Kegiatan Wilayah)	PKSN (Pusat Kawasan Strategis Nasional)	PKL (Pusat Kegiatan Lokal)	KSN (Kawasan Strategis Nasional)	KSNT (Kawasan Strategis Nasional Tertentu)	KSP (Kawasan Strategis Provinsi)				
		Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi	Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kab/kota	Kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong Pengembangan kawasan perbatasan negara	Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa distrik			Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup		
SWP 1	1	Kota Jayapura	✔		✔				Kawasan Pertanian dan Industri Jayapura-Sarmi	Kawasan Festival Danau Sentani – Jayapura	Kawasan Cagar Alam Cycloops	a. Pertanian (tanaman pangan dan hortikultura) b. Perkebunan c. Peternakan d. Perikanan e. Pariwisata f. Jasa
	2	Jayapura	✔			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perkotaan Genyem, ▪ Perkotaan Airu 			Kawasan Pertanian dan Industri Jayapura-Sarmi	Kawasan Festival Danau Sentani – Jayapura	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan Suaka Margasatwa Mamberamo Foja ▪ Kawasan Cagar Alam Cycloops 	a. Pertanian (tanaman pangan dan hortikultura) b. Perkebunan (kelapa sawit, kakao, sagu) c. Peternakan d. Perikanan e. Pariwisata (Kerajinan kapak batu Ormu Wari, Danau Sentani, dsb) f. Pertambangan g. Industri h. Kehutanan
	3	Keerom		✔		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perkotaan Waris, ▪ Perkotaan Towe 			Kawasan Pertanian dan Industri Jayapura-Sarmi		Kawasan Suaka Margasatwa Mamberamo Foja	a. Pertanian (tanaman pangan dan hortikultura) b. Perkebunan (kelapa sawit, jaguung, kakao)

SWP	KABUPATEN/ KOTA	SISTEM PUSAT PERMUKIMAN				KAWASAN STRATEGIS					POTENSI
		PKN (Pusat Kegiatan Nasional)	PKW (Pusat Kegiatan Wilayah)	PKSN (Pusat Kawasan Strategis Nasional)	PKL (Pusat Kegiatan Lokal)	KSN (Kawasan Strategis Nasional)	KSNT (Kawasan Strategis Nasional Tertentu)	KSP (Kawasan Strategis Provinsi)			
		Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi	Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kab/kota	Kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong Pengembangan kawasan perbatasan negara	Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa distrik			Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	
											c. Pariwisata (Telaga Cinta Yowong) d. Pertambangan e. Peternakan
	4 Sarmi		✓		<ul style="list-style-type: none"> Perkotaan Bonggo 		KSNT Pulau Liki	Kawasan Pertanian dan Industri Jayapura-Sarmi		Kawasan Suaka Margasatwa Mamberamo Foja	<ul style="list-style-type: none"> a. Pertanian (tanaman pangan dan hortikultura) b. Perkebunan (kelapa sawit, kelapa dalam, kakao) c. Pertambangan (nikel) d. Perikanan e. Kehutanan f. Pariwisata
SWP II	5 Biak Numfor		✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Perkotaan Warsa, Perkotaan Swandiwe, Perkotaan Yenburwo 	KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi		Kawasan Perikanan dan Pariwisata Pulau Numfor	Kawasan Goa Jepang Biak	Kawasan Rawan Bencana Biak-Supiori	<ul style="list-style-type: none"> a. Perikanan b. Pariwisata c. Pertanian d. Pertambangan e. Peternakan
	6 Supiori				<ul style="list-style-type: none"> Perkotaan Awaki, Perkotaan Sorendiwari 		KSNT Pulau Fanildo, Pulau Bras, Pulau Befondi		Kawasan Maudori Supiori	Kawasan Rawan Bencana Biak-Supiori	<ul style="list-style-type: none"> a. Pariwisata b. Perikanan
	7 Kepulauan Yapen				<ul style="list-style-type: none"> Perkotaan Serui, Perkotaan Saubeba 			Kawasan perikanan dan		Kawasan Mangrove Waropen -	<ul style="list-style-type: none"> a. Pariwisata (Kampung wisata Alam)

SWP	KABUPATEN/ KOTA	SISTEM PUSAT PERMUKIMAN				KAWASAN STRATEGIS					POTENSI
		PKN (Pusat Kegiatan Nasional)	PKW (Pusat Kegiatan Wilayah)	PKSN (Pusat Kawasan Strategis Nasional)	PKL (Pusat Kegiatan Lokal)	KSN (Kawasan Strategis Nasional)	KSNT (Kawasan Strategis Nasional Tertentu)	KSP (Kawasan Strategis Provinsi)			
		Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi	Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kab/kota	Kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong Pengembangan kawasan perbatasan negara	Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa distrik			Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	
								pariwisata Kep. Yapen		Mamberamo Raya	b. Perikanan (ikan dan rumput laut) c. Perkebunan (sagu, kakao) d. Kehutanan e. Pertanian f. Peternakan
SWP III	8	Memberamo Raya			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perkotaan Kasonaweja, ▪ Perkotaan Dabra 			Kawasan pertanian Mamberamo Raya-Waropen		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan Suaka Margasatwa Mamberamo Foja ▪ Kawasan Mangrove Waropen - Mamberamo Raya 	a. Pertanian (tanaman pangan dan hortikultura) b. Perkebunan rakyat c. Pertambangan (batu bara) d. Perikanan e. Pariwisata (pariwisata alam) f. Kehutanan
	9	Waropen			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perkotaan Botawa, ▪ Perkotaan Wapoga 			Kawasan pertanian Mamberamo Raya-Waropen		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan Suaka Margasatwa Mamberamo Foja ▪ Kawasan Mangrove Waropen - Mamberamo Raya 	a. Pariwisata (Wisata Rohani Pulau Nau, Pantai Mangrove) b. Perikanan (ikan, udang, kepiting) c. Pertanian (tanaman pangan dan hortikultura) d. Perkebunan (sagu) e. Kehutanan f. Pertambangan

Sumber: RTRW Provinsi Papua 2023-2042

Provinsi Papua memiliki beragam kawasan potensial yang dapat dikembangkan dalam mendukung pembangunan, dengan mempertimbangkan kondisi geografis, potensi sektoral serta potensi alam yang sangat kaya. Pembangunan Provinsi Papua harus memanfaatkan berbagai sumber daya potensial yang tersedia, serta menekankan pada sektor-sektor unggulan di Provinsi Papua. Berdasarkan karakteristik wilayah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua 2023-2042, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan (kawasan budidaya). Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di Provinsi Papua yang dapat dikembangkan terdiri atas 10 kawasan, yaitu: (1) kawasan hutan produksi; (2) kawasan perkebunan rakyat; (3) kawasan pertanian; (4) kawasan perikanan; (5) kawasan pertimbangan dan energi; (6) Kawasan peruntukkan industri; (7) kawasan pariwisata; (8) kawasan permukiman; (9) Kawasan transportasi; serta (10) kawasan pertahanan dan keamanan.

Selain berdasarkan pemetaan kawasan budidaya, potensi pengembangan wilayah Provinsi Papua juga diimplementasikan berdasarkan penetapan kawasan strategis yang meliputi kawasan strategis nasional (KSN); kawasan strategis nasional tertentu (KSNT); dan kawasan strategis provinsi (KSP). KSN di Provinsi Papua meliputi: (1) kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa Kawasan Biak; serta (2) kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan berupa Kawasan Perbatasan Negara. KSNT di Provinsi Papua meliputi: (1) Pulau Fanildo, Pulau Bras, Pulau Befondi di Kabupaten Supiori, serta (2) Pulau Liki di Kabupaten Sarmi. Adapun KSP di Provinsi Papua meliputi:

- a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yang terdiri atas:
 - 1) Kawasan Pertanian Mamberamo Raya - Waropen di Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Waropen dan Wilayah Laut, yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan dan pengolahan hasil pertanian menunjang ekspor.
 - 2) Kawasan Perikanan dan Pariwisata Kepulauan Yapen dan sekitarnya di Kabupaten Kepulauan Yapen dan Wilayah Laut, yang bertujuan untuk membentuk pusat pengolahan perikanan berorientasi ekspor dan pusat pelayanan pariwisata bahari.
 - 3) Kawasan Perikanan dan Pariwisata Pulau Numfor di Kabupaten Biak Numfor dan Wilayah Laut, yang bertujuan untuk membentuk pusat pengolahan perikanan berorientasi ekspor dan pusat pelayanan pariwisata bahari.
 - 4) Kawasan Pertanian dan Industri Jayapura – Sarmi di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi dan Wilayah Laut, yang bertujuan untuk membentuk penyediaan lahan pertanian tanaman pangan dalam menunjang ketahanan pangan dan industri pengolah hasil tanaman pangan sebagai satu kesatuan kegiatan secara terpadu.

- b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, yang terdiri atas:
- 1) Kawasan Festival Danau Sentani – Jayapura di Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura, yang bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Danau Sentani sebagai pusat wisata budaya masyarakat Pesisir Pulau Papua.
 - 2) kawasan Goa Jepang Biak di Kabupaten Biak Numfor dan Wilayah Laut, yang bertujuan sebagai pusat festival budaya.
 - 3) kawasan Maudori Supiori di Kabupaten Supiori dan Wilayah Laut, yang bertujuan untuk mewujudkan wilayah Maudori sebagai kawasan pelestarian budaya yang berbasis religi.
- c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, yang terdiri atas:
- 1) Kawasan Suaka Margasatwa Mamberamo Foja di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Waropen dan Wilayah Laut, yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan Mamberamo-Foja sebagai kawasan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati.
 - 2) Kawasan Rawan Bencana Biak – Supiori di Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori dan Wilayah Laut, yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan Biak-Supiori sebagai kawasan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati.
 - 3) kawasan Cagar Alam Cycloops dan sekitarnya di Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura, yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan darat dan laut Cycloops sebagai kawasan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati.
 - 4) Kawasan Mangrove Waropen – Mamberamo Raya di Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Waropen dan Wilayah Laut, yang bertujuan untuk mewujudkan wilayah pesisir sebagai kawasan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati laut.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 PERMASALAHAN POKOK PEMBANGUNAN

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan pembangunan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu masalah pokok, masalah, dan akar masalah. Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah. Kemudian untuk masalah merupakan hal-hal yang harus dicari penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik, biasanya dipecahkan dalam bentuk strategi-strategi khusus. Dan akar masalah adalah hal-hal yang harus dicari penyebab dari masalah yang lebih rinci, dimana pemecahannya melalui kegiatan-kegiatan pembangunan yang tepat sasaran. Dalam pembahasan ini, disampaikan beberapa masalah pokok pembangunan di Papua yang harus diagendakan untuk dituntaskan di masa depan.

3.1.1 Kualitas Pembangunan Ekonomi yang Masih Rendah

Kualitas pembangunan ekonomi yang rendah ini ditandai dengan masih tingginya ketimpangan pembangunan ekonomi. Kontribusi kegiatan ekonomi lokal dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor industri pengolahan dalam perekonomian wilayah masih rendah, tenaga kerja yang belum berkualitas, daya saing investasi yang rendah, dan tingginya defisit perdagangan antar daerah. Adapun deskripsi dan data dukung perumusan masalah pokok “kualitas pembangunan ekonomi yang masih rendah”.

Tabel 0.97 Permasalahan Pokok 1: Kualitas Pembangunan Ekonomi yang Masih Rendah

No	Masalah	Deskripsi dan Data Dukung
1	Ketimpangan pembangunan ekonomi yang tinggi	<ul style="list-style-type: none"> a. Kondisi topografi yang sebagian besar berlereng, dengan curah hujan yang tinggi, merupakan kendala utama dalam penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Papua karena menyebabkan sulitnya membangun infrastruktur dasar dan tingginya biaya transportasi (<i>high cost</i>). Hal ini menjadi hambatan dalam meningkatkan pembangunan ekonomi secara merata baik itu antar sektor maupun antar wilayah b. Indeks Ketimpangan Ekonomi (IKE) berdasarkan ukuran koefisien variasi di Provinsi Papua selama tahun 2016-2022 dinilai sangat tinggi, baik itu secara sektoral maupun spasial. c. Secara sektoral rata-rata IKE Papua mencapai 1,6233 poin per tahun, yang bermakna bahwa derajat penyimpangan nilai PDRB dari masing-masing sektor ekonomi terhadap nilai rata-ratanya sebesar 1,6233 poin per tahun. d. IKE untuk ketimpangan spasial rata-rata mencapai 1,4377 per tahun yang artinya penyimpangan nilai PDRB per kapita pada masing-masing wilayah terhadap nilai rata-ratanya sebesar 1,4377 poin per tahun. Kedua angka IKE ini masih jauh sekali dari batas IKE terendah sebesar 0,2 poin.
2	Rendahnya kontribusi kegiatan ekonomi lokal dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Selama periode 2018-2022 peranan sektor industri pengolahan dalam menciptakan nilai tambah regional (PDRB) Provinsi Papua sangat rendah, rata-rata hanya mencapai 1,93% per tahun berdasarkan PDRB-DT (PDRB Dengan Tambang), dan 3,10% per tahun pada PDRB-TT (PDRB Tanpa Tambang). Keduanya dengan perkembangan yang cenderung menurun selama periode tersebut. b. Pondasi perekonomian Papua selama ini didominasi oleh sektor-sektor ekonomi yang ekstraktif (pertanian dan pertambangan), hal ini

No	Masalah	Deskripsi dan Data Dukung
	serta sektor industri pengolahan	<p>mengindikasikan bahwa upaya pemerintah melalui berbagai program dan proyek untuk mengaktifkan peran serta dan pemberdayaan ekonomi masyarakat masih belum menunjukkan hasil yang baik, dimana sebagian besar sumber daya alam Papua yang ada dikirim ke luar tanpa melalui proses pengolahan.</p> <p>c. Belum berperannya sektor industri pengolahan dalam menggerakkan perekonomian wilayah menandakan bahwa ada ketergantungan yang berlebih pada pengelolaan SDA sebagai komoditas ekspor, investasi dan pendapatan daerah. Kondisi ini dapat melemahkan pondasi perekonomian wilayah dimasa mendatang, oleh karena volatilitas harga dan jumlah produksi hasil ekstraktif (misal: komoditi pertanian) sangat tinggi, sehingga menimbulkan ketidakpastian ekonomi yang tinggi juga. Beda halnya dengan produk-produk hasil industri pengolahan yang bersifat durable goods (barang-barang tahan lama), harga dan produksinya cenderung terus mengalami peningkatan, memiliki umur ekonomi yang panjang, dapat disimpan lebih lama, harga yang lebih kompetitif, dan yang paling utama sektor industri pengolahan ini mampu menjadi leading sektor yang lebih mapan dalam perekonomian wilayah.</p>
3	Kualitas tenaga kerja yang rendah	<p>a. Struktur tenaga kerja di Provinsi Papua selama ini lebih dominan pada tenaga kerja dengan pendidikan SD dan kebawah, rata-rata sekitar 59,48% per tahun. Sedangkan untuk tenaga kerja yang berpendidikan SMA/SMK dan ke atas hingga pendidikan tinggi, yang dikategorikan tenaga kerja yang berkualitas, hanya 27,82% per tahun untuk waktu yang sama.</p> <p>b. Struktur tenaga kerja sektoral selama tahun 2021-2023 lebih terkonsentrasi pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan yang kurang memerlukan tenaga kerja berpendidikan, dengan pangsa tenaga kerja sekitar 69,23% per tahun.</p> <p>c. Tingkat upah di sektor pertanian paling rendah, dan sebagian juga merupakan tenaga kerja keluarga, akhirnya kemampuan sektor tersebut untuk mentransmisi pendapatan keluarga di atas garis kemiskinan sangat rendah, sehingga banyaknya jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor pertanian selama ini masih belum mampu mengakselerasi penurunan kemiskinan di Papua lebih baik.</p>
4	Daya saing investasi yang rendah	<p>a. Perkembangan ICOR Provinsi Papua selama periode 2011- 2022 sangat fluktuatif berkisar diantara 15,83 poin paling tinggi di tahun 2012, dan 2,28 poin paling rendah di tahun 2021, dengan asumsi ICOR negatif diabaikan dalam perhitungan.</p> <p>b. Rata-rata ICOR selama periode 2011-2022 mencapai 6,29 poin per tahun, dengan kata lain-lain untuk meningkatkan PDRB Papua sebesar 1 rupiah rata-rata dibutuhkan tambahan investasi sebesar 6,29 rupiah per tahun. Angka ini sangat tinggi jauh di atas batas maksimum ICOR efisien sebesar 4,00 poin. Sehingga terindikasi selama ini ada inefisiensi (pemborosan) dalam perekonomian Papua sebesar 36,40% per tahun, yang menandakan juga daya saing investasi sangat rendah.</p>
5	Defisit perdagangan antardaerah yang sangat tinggi	<p>a. Keterkaitan dan hubungan kerja sama ekonomi antarwilayah yang saling menguntungkan sangat diperlukan bagi pembangunan di suatu daerah. Karena pada hakikatnya, tidak ada satupun daerah yang mampu memenuhi segala kebutuhannya dengan mengandalkan sumber daya yang dimiliki sendiri karena adanya keterbatasan dan kelangkaan. Namun begitu, jika keterkaitan dan hubungan tersebut tidak berimbang, dimana ada salah satu yang mendominasi karena sangat kuat, maka hal tersebut tidaklah sehat bagi pembangunan ekonomi wilayah yang posisinya lemah. Kondisi seperti inilah yang terjadi di Papua</p> <p>b. Sepanjang tahun 2015-2022 rasio neraca perdagangan antar daerah terhadap PDRB Provinsi Papua lebih banyak mengalami defisit dengan kecenderungan yang meningkat, bahkan di tahun 2021 sempat menyentuh angka -9,98%. Meskipun di tahun 2022 ada koreksi penurunan, akan tetapi kondisi defisit masih tetap besar, yaitu -6,40%.</p> <p>c. Jika dihitung rata-ratanya selama periode 2015-2022, terlihat rasio defisit di Provinsi Papua bisa mencapai -4,24% per tahun. Dengan kata lain ada kebocoran ekonomi rata-rata -4,24% per tahun. Kondisi ini jelas sangat</p>

No	Masalah	Deskripsi dan Data Dukung
		tidak menguntungkan Papua, oleh karena rasio defisit yang besar tersebut menyebabkan : (1) banyak modal yang lari ke luar; (2) hilangnya potensi efek multiplier; (3) ketergantungan ekonomi terhadap daerah luar bertambah tinggi; (4) kesenjangan antardaerah semakin melebar; dan (5) daya saing perekonomian daerah semakin rendah.

Sumber: Hasil Analisis (2024)

3.1.2 Belum Optimalnya Kualitas Pembangunan Sosial Budaya

Kualitas pembangunan sosial budaya yang belum optimal ini ditandai dengan rendahnya akses dan mutu pendidikan; belum optimalnya akses dan derajat kesehatan, tingginya ketimpangan gender dan rendahnya perlindungan terhadap anak, rendahnya daya saing kepemudaan, dan pelayanan kesejahteraan sosial yang belum memadai. Adapun deskripsi dan data dukung perumusan masalah pokok “belum optimalnya kualitas pembangunan sosial budaya” ditampilkan dalam Tabel 0.98.

Tabel 0.98 Permasalahan Pokok 2: Belum Optimalnya Kualitas Pembangunan Sosial Budaya

No	Masalah	Deskripsi dan Data Dukung
1	Rendahnya akses dan mutu pendidikan	<p>a. Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Papua baru mencapai 7,2 tahun di tahun 2023, yang terlihat hanya meningkat rata-rata 0,1 tahun dari tahun 2010. Apabila akselerasi lama sekolah masih sama seperti periode sebelumnya, maka di tahun 2045 diperkirakan Pemerintah Provinsi Papua hanya sanggup mewujudkan Rata-rata Lama Sekolah bagi penduduknya sebesar 9,8 tahun, ini masih jauh di bawah target generasi emas Indonesia melalui program wajib belajar 12 tahun.</p> <p>b. Selain akses yang belum memadai, kualitas pendidikan di Papua juga terlihat sangat kurang. Hal ini ditandai salah satunya dengan jumlah sekolah yang masih banyak belum terakreditasi, contohnya di tahun 2021 mencapai 43,70% dari total 4.774 Satuan Pendidikan (SP), dengan rincian secara berurutan yang paling tinggi adalah pada satuan pendidikan SD sebanyak 1.176 unit (56,38%), kemudian PAUD sebanyak 540 unit (25,89%), SMP sebanyak 268 unit (12,85%), SMA sebanyak 67 unit (3,21%), dan SMK sebanyak 35 unit (1,68%).</p>
2	Belum optimalnya pelayanan kesehatan	<p>a. Berdasarkan hasil Long Form SP2020, AKB (Angka Kematian Bayi) di Indonesia adalah 16,85 kematian per 1.000 kelahiran hidup, dimana AKB tertinggi berada di Provinsi Papua yaitu sebesar 38,17 kematian per 1.000 kelahiran hidup, dan AKB terendah berada di Provinsi DKI Jakarta sebesar 10,38 kematian per 1.000 kelahiran hidup.</p> <p>b. Berdasarkan hasil Long Form SP2020 besaran AKI di Indonesia sebesar 189 per 100.000 kelahiran hidup, dengan AKI paling tinggi di Papua sebesar 565 per 100.000 kelahiran hidup, dan terendah sebesar 48 per 100.000 kelahiran hidup di DKI Jakarta.</p> <p>c. Provinsi Papua saat ini masih merupakan endemik malaria tertinggi di Indonesia. Berdasarkan catatan WHO pada tahun 2021 ditemukan 811.636 kasus malaria baru, dimana sekitar 89% dari banyaknya kasus tersebut ada di Provinsi Papua. Sejauh ini Malaria menjadi salah satu penyebab paling besar pada kematian ibu dan anak. Selain malaria, kematian ibu dan anak di Papua juga dipengaruhi infeksi, TB, dan masalah perilaku ibu hamil seperti tekanan darah tinggi, jarang melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin, serta kurang menjaga pola makan.</p> <p>d. Masih banyak puskesmas di Papua yang belum memenuhi standar puskesmas sesuai Permenkes RI No 43 tahun 2019 dan ada yang belum terakreditasi. Sesuai dengan standar yang ditetapkan, setidaknya-tidaknya dalam sebuah Puskesmas tersedia 9 jenis tenaga medis, yaitu Dokter Umum, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Farmasi, Kesmas, Keslink, Gizi, dan</p>

No	Masalah	Deskripsi dan Data Dukung
		<p>tenaga laboratorium medik. Berdasarkan buku Data Dasar Puskesmas Kondisi 31 Desember 2019 Provinsi Papua yang diterbitkan Kemenkes RI, jumlah Puskesmas yang telah memenuhi standar tersebut hanya sebanyak 27 puskesmas atau sekitar 14,59% dari total Puskesmas yang terdata. Sedangkan untuk proporsi Puskesmas yang belum terakreditasi di tahun 2019 sebanyak 25,43%, dalam proses akreditasi sebanyak 5,61%, dan sudah terakreditasi sebanyak 69.16%.</p>
3	<p>Masih tingginya ketimpangan gender</p>	<p>a. IKG (Indeks Ketimpangan Gender) Papua tahun 2023 mencapai 0,515 poin, yang masuk dalam 10 besar tertinggi di Indonesia. Nilai ini hanya terkoreksi 0,02 poin dari data IKG tahun 2021 sebesar 0,535 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa capaian pembangunan manusia di Papua belum inklusif karena terdistorsi oleh adanya ketimpangan gender yang tinggi.</p> <p>b. Keterlibatan perempuan dalam perlemen hanya 15,94% pada tahun 2022, masih jauh dibawah angka ideal 30%.</p> <p>c. Rata-rata Lama Sekolah perempuan 6 tahun, di bawah laki-laki 7,4 tahun.</p> <p>d. Angka Buta Huruf perempuan lebih tinggi sebesar 16,71%, sedangkan laki-laki sebesar 13,67%</p> <p>e. TPAK perempuan lebih rendah sebesar 69,09%, dan laki-laki sebesar 85,49%.</p>
4	<p>Daya saing kepemudaan yang masih rendah</p>	<p>a. Sepanjang periode 2015–2022, IPP Provinsi Papua bergerak diantara angka 48,00 poin di tahun 2015 dan 55,50 untuk tahun 2022, dengan rata-rata peningkatan 1,07 poin per tahun (Kemenpora RI, 2023). Selama 7 tahun tersebut cenderung IPP Provinsi Papua berada pada urutan terendah di Indonesia.</p> <p>b. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Provinsi Papua dalam pembangunan pemuda (IPP) terdapat pada domain pendidikan yang nilai indeksnya cenderung tidak mengalami perubahan dalam periode 2017–2021, dan terendah di Indonesia. Hal ini terjadi karena capaian indikator-indikator domain ini masih rendah, yang menggambarkan daya saing pemuda di Papua selama ini rendah, yang tercermin pada kondisi dimana sebagian besar pemuda Papua berpendidikan SMU ke bawah, bahkan ada yang tidak pernah bersekolah dan tidak sedikit pula yang putus sekolah yang disebabkan kondisi sosial ekonomi.</p> <p>c. Rendahnya tingkat pendidikan pemuda, memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, antara lain ketidakmampuan dalam bersaing, terbatasnya peluang kerja yang menjanjikan kesejahteraan yang lebih baik.</p>
5	<p>Pelayanan kesejahteraan sosial yang belum memadai</p>	<p>a. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang paling banyak ditangani oleh pemerintah Provinsi selama ini adalah keluarga fakir miskin.</p> <p>b. Meskipun pemerintah terlihat cukup berhasil mereduksi tingkat kemiskinan hingga mencapai 26,03% di tahun 2023 (BPS Papua, 2023), akan tetapi penanganan masalah penduduk fakir miskin ternyata belum berjalan optimal, dimana jumlah fakir miskin cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya.</p> <p>c. Selain fakir miskin, PMKS yang juga banyak ditangani pemerintah provinsi adalah penyandang HIV/AIDS. Data per Desember 2022 menunjukkan sekitar 50.502 orang penderita HIV/AIDS dengan pembagian Laki-laki 23.590 orang dan Perempuan 26.822 orang. Jalur penularan HIV/AIDS paling banyak ditemukan melalui hubungan seksual bebas yang ditularkan dari para pekerja seksual.</p>

Sumber: Hasil Analisis (2024)

3.1.3 Penanganan Terhadap Keamanan dan Ketertiban Umum Belum Optimal

Provinsi Papua termasuk 5 (lima) daerah dengan angka kriminalitas tertinggi di Indonesia di tahun 2021. Sebagaimana yang dipublikasikan oleh BPS RI (2022), Crime Rate Papua di tahun 2021 mencapai 186 per 100.000 penduduk, sedangkan pada tingkat nasional sebesar 90 per 100.000 penduduk. Dimana tingkat penyelesaian tindak pidana di Papua untuk tahun yang sama hanya mencapai 42,45%, paling rendah ketiga di Indonesia, dengan jumlah tindak pidana sebanyak 6.236 kasus. Kemudian dalam hal penanganan bencana daerah, Papua selama ini belum dapat menurunkan level resiko bencana dari kategori Sedang ke Rendah. Selama tahun 2016-2022 nilai IRB (Indeks Resiko Bencana) Papua berkisar diantara 122,15 - 125,31 poin, dimana hingga saat sekarang masih ada 5 daerah yang tergolong resiko tinggi, yaitu Kabupaten Jayapura, Sarmi, Mamberamo Raya, Merauke dan Nabire. Daerah lainnya termasuk dalam kategori resiko sedang. Seluruh fenomena ini mengindikasikan bahwa tingkat keamanan dan ketertiban umum di Papua belum begitu optimal mendukung pelaksanaan pembangunan daerah selama ini.

3.1.4 Tingkat Kerawanan Politik dan Demokrasi yang Patut Diwaspadai

Kebebasan berpendapat di Papua selama ini merupakan hak yang dilindungi oleh konstitusi dalam kehidupan berdemokrasi. Demokrasi yang ditandai oleh partisipasi, transparansi, dan politik yang akuntabel telah menjadi pusat tumbuhnya kebebasan berpendapat, baik di level individu maupun kelompok. Namun, kebebasan yang tidak terkendali saat ini telah mendistorsi demokrasi yang dimanfaatkan untuk menyerang kepentingan orang lain atau kelompok lain tanpa data dan informasi yang valid, ini tercermin dengan semakin maraknya hoaks, hate speech, dan propaganda hitam yang cenderung negatif mengganggu pelaksanaan pembangunan di Papua. Sebagai contoh pada tahun 2023 Aparat Kepolisian Daerah Papua menemukan penyebaran berita bohong atau hoaks yang masif di wilayah Papua. Berdasarkan hasil pantauan selama 3 bulan (Januari-Maret 2023), ditemukan 2-3 berita hoaks setiap harinya tersebar di Papua.

Narasi yang disampaikan penyebar hoaks terindikasi ingin memprovokasi masyarakat sehingga memunculkan aksi yang dapat berdampak pada gangguan keamanan dan kriminalitas. Perkembangan teknologi digital dan kemudahan untuk mengakses berbagai media sosial (Instagram, whatsapp, facebook, dan lain-lain) menjadi salah satu pemicu beredarnya informasi yang bertendensi negatif tersebut.

Selanjutnya untuk aspek politik, meskipun Papua dinilai tingkat partisipasi pemilihnya terbanyak di Indonesia pada Pilkada 2018, yaitu sebesar 84% (Bawaslu RI, 2018), namun pada tahun tersebut tingkat kerawanan politik di Papua dinilai Tinggi, sebagaimana yang dinyatakan Bawaslu RI bahwa : dari 17 provinsi yang melaksanakan Pilkada serentak 2018, terdapat tiga provinsi yang masuk kategori nilai Kerawanan Tinggi, yaitu: Papua (3,41), Maluku (3,25), dan Kalimantan Barat (3,04). Selanjutnya di tahun 2019, tingkat partisipasi pemilih di Papua juga dinilai paling tinggi di Indonesia yaitu sebesar 95,75%, akan tetapi tingkat kerawanan politik ternyata dinilai lebih tinggi dari rata-rata Indonesia dengan skor IKP (Indeks Kerawanan Pemilu) sebesar 49,63 poin. Begitu juga di tahun 2020, tingkat

kerawanannya malah meningkat menjadi 51,57 poin, dan terakhir di tahun 2024 diprediksi tingkat kerawanan politik di Papua semakin meningkat menjadi 57,27 poin yang dianggap merupakan tingkat kerawanan patut diwaspadai (Bawaslu RI, 2024).

3.1.5 Sarana Prasarana dan Konektivitas yang Belum Memadai

Dalam pembangunan daerah sangat diperlukan ketersediaan sarana prasarana yang memadai, guna mendukung berjalannya aktivitas suatu daerah. Adapun konektivitas merupakan kondisi yang menyebabkan atau memungkinkan dua atau lebih pusat pelayanan saling terhubung untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan wilayah. Sarana prasarana dan konektivitas seperti jalan, air bersih, sanitasi, pasar, terminal, dan lain-lain harus seimbang dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri, jika tidak maka akan menimbulkan masalah yang merugikan masyarakat. Tabel 0.99 menampilkan permasalahan pembangunan sarana prasarana dan konektivitas di Provinsi Papua.

Tabel 0.99 Permasalahan Pembangunan Sarana Prasarana dan Konektivitas di Provinsi Papua

No	Sarana Prasarana	Deskripsi dan Data Dukung
1	Panjang jalan	Total panjang jalan di Provinsi Papua sampai dengan tahun 2021 baru mencapai 21.563 km, dimana sekitar 44,31% dalam kondisi rusak dan rusak berat, dan hanya 20,77% yang dalam keadaan baik, serta 34,93% yang dalam kondisi sedang.
2	Air bersih	Selama periode 2011-2022 kondisi akses air bersih pada masyarakat di Provinsi Papua masih di bawah 50%, yang cenderung mengalami penurunan sekitar -0,33% per tahun yaitu dari 39,43% di tahun 2011 menjadi 35,77% tahun 2022.
3	Listrik	Tingkat elektrifikasi di Provinsi Papua masih belum memadai dan menyebar tidak merata. Merujuk pada data BPS Provinsi Papua, di tahun 2022 tercatat elektrifikasi penduduk baru mencapai 79,96% yang sebagian besar terdistribusi pada kota-kota besar seperti Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Biak Numfor, Merauke, Timika.
4	Rumah layak huni	Kepemilikan rumah layak huni di Provinsi Papua selama tahun 2018-2022 mengalami penurunan sekitar -10,32% per tahun. Dimana pada tahun 2018 proporsi kepemilikan rumah layak huni sebesar 58,23%, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 27,28%. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah rumah tangga yang tinggi tidak diimbangi dengan penambahan ketersediaan rumah layak huni secara proporsional.
5	Komunikasi dan informasi	Ketersediaan akses komunikasi dan informasi melalui internet saat ini menjadi salah satu kebutuhan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Di Papua cukup banyak tersedia menara BTS (Base Transceiver Station) yang dapat memfasilitasi akses terhadap internet tersebut melalui jaringan 3g/4g. Tercatat pada tahun 2020 sudah ada 213 unit menara BTS di Papua, yang dikelola oleh Telkomsel sebanyak 175 unit, XL sebanyak 36 unit, dan Indosat sebanyak 2 unit (Kementerian Koinfo RI, 2022). Akan tetapi, dengan jumlah BTS sebanyak itu masih belum mampu untuk melayani kebutuhan akses internet yang memadai, karena hingga tahun 2022 berdasarkan publikasi dari Kemendesa-DT RI melalui rekomendasi IDM 2022 menunjukkan masih sekitar 93,34% kampung yang masyarakatnya belum dapat mengakses internet.
6	Transportasi darat	Jumlah kendaraan bermotor di Papua, berdasarkan data BPS RI tahun 2021 sebanyak 449.709 unit kendaraan yang didominasi oleh sepeda motor sekitar 87,16%, dan 12,84% merupakan mobil yang umumnya untuk angkutan barang. Khusus untuk terminal mobil penumpang umum dan barang, sampai saat ini jumlahnya sangat minim, kurang lebih hanya

No	Sarana Prasarana	Deskripsi dan Data Dukung
		7 unit yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Darat yaitu Terminal Tipe A sebanyak 1 unit, Tipe B sebanyak 2 unit, dan lainnya merupakan Tipe C.
7	Transportasi udara	Di Papua peran transportasi udara sangat dominan dalam menghubungkan daerah-daerah terdalam atau terpencil, akibat sangat minimnya sarana prasarana transportasi darat yang tersedia. Kondisi ini akhirnya membuat biaya transportasi sangat mahal dan berpengaruh pada harga- harga barang. Contohnya untuk harga barang-barang konstruksi yang tercermin pada IKK (Indeks Kemahalan Konstruksi) yang dipublikasikan oleh BPS Papua (2023). Sepanjang tahun 2018-2022 misalkan, IKK Provinsi Papua selalu paling tinggi di Indonesia, dengan rata-rata nilai IKK sekitar 211,01 poin. Selanjutnya, berdasarkan data Kementerian Perhubungan RI, di tahun 2022 terdapat 151 bandara di Papua (di luar lapangan terbang yang tidak terdaftar di IATA), dimana hanya 2 Bandara dalam kategori internasional (Jayapura dan Biak Numfor), lainnya merupakan penerbangan domestik dan perintis.
8	Transportasi laut	Jumlah pelabuhan di Provinsi Papua yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah masih sangat terbatas, dimana sampai dengan tahun 2023 hanya ada 24 pelabuhan yang dikelola KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) dan KUPP (Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan), yang lebih banyak pengelolaannya pada KSOP Kelas III (70,83%). Berhubung jumlah pelabuhan sangat kurang, menyebabkan pelayanan rute pelayaran perintis di Papua masih sangat terbatas. Sebagai misal di tahun 2023, dalam menyukseskan program Tol Laut di Papua terdapat 3 (tiga) kapal penumpang yang melayani rute pelayaran Papua, yaitu : (1) KM Sabuk Nusantara 58 dengan rute pelayaran : Jayapura – Teba – Puiwai – Waren – Serui – Biak – Napan Wainami – Nabire (Pulang Pergi); (2) KM Sabuk Nusantara 81 dengan rute pelayaran : Jayapura – Kaipuri – Waren – Serui – Nabire – Wasior – Manokwari (Pulang Pergi); dan (3) KM Sabuk Nusantara 100 dengan rute pelayaran : Jayapura – Sarmi – Teba – Kurudu – Waren – Serui – Ansum – Wooi – Miosnum – Poom – Biak (Pulang Pergi).

Sumber: Hasil Analisis (2024)

3.1.6 Kualitas Lingkungan Hidup yang Belum Maksimal

Dalam hal lingkungan hidup, masih banyak masalah yang belum dapat dituntaskan hingga saat ini, sebagaimana yang disinyalir oleh Kementerian LH Indonesia (2022) bahwa berdasarkan hasil analisis, isu lingkungan hidup yang terjadi di wilayah Papua adalah: (1) kualitas air permukaan dan air laut, (2) perubahan ekstrem iklim global, serta (3) alih fungsi lahan dan hutan yang juga menyangkut aspek keanekaragaman hayati, pencemaran air dan pengelolaan persampahan/limbah. Mengacu pada dokumen IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) tahun 2021, nilai IKLH Provinsi Papua adalah sebesar 80,23 poin. Adapun faktor pembentuk IKLH yang skornya paling rendah adalah IKA (Indeks Kualitas Air) sebesar 57,83 poin. Secara umum rendahnya nilai IKA di Papua disebabkan oleh parameter fecal coliform. Hal ini berkaitan dengan sistem sanitasi dan pengelolaan limbah domestik yang belum berjalan dengan baik. Masalah pencemaran air di Ekoregion Papua juga dipengaruhi oleh limbah kegiatan pertambangan/industri. Perubahan ekstrem pada iklim global turut berperan dalam menyebabkan berbagai permasalahan seperti kebakaran hutan, kekeringan, banjir, longsor, coral bleaching, dan lain-lain.

3.1.7 Belum Optimalnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

United Nations Development Programme atau UNDP mengemukakan bahwa governance atau tata kelola pemerintahan adalah bentuk pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam pengelolaan masalah yang dihadapi suatu bangsa dengan melibatkan semua sektor. Governance bisa dikatakan baik (good governance) apabila sumber daya dan problem yang dihadapi publik dikelola secara efektif dan efisien, yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan publik. Sehingga good governance adalah kemampuan pemerintah dalam menjalankan pelayanan dan fungsi negara yang baik, atau menurut World Bank sebagai manajemen pemerintah yang solid, akuntabel, berdasarkan pada prinsip pasar yang efisien, mampu mencegah korupsi baik secara politis maupun administratif. Untuk mengamati perkembangan kinerja tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Provinsi Papua selama ini, Tabel 0.100 menampilkan beberapa indikator kinerja yang dapat menggambarkan hal tersebut.

Tabel 0.100 Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Provinsi Papua Tahun 2018-2022

Indikator Kinerja Tata Kelola Pemerintahan	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Pelayanan Publik				B-	B-
SAKIP		B	B	B	B
Indeks SPBE	2,240				1,876
Indeks RB		B	CC	CC	CC
Indeks SPI (Survei Penilaian Integritas)				Sangat Rentan	Sangat Rentan
Opini BPK Terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP

Sumber: Menpan RB-RI dan KPK-RI (2023)

Berdasarkan Tabel 0.100 terlihat nilai IPP Provinsi Papua untuk tahun 2021 dan 2022 masing-masing berpredikat B- atau dinilai berkinerja “Baik Dengan Catatan”, yang berarti masih ada 3 (tiga) tahapan predikat lagi yang harus dilalui Pemerintah Provinsi Papua untuk memperoleh predikat tertinggi yaitu A atau berkinerja “Pelayanan Prima”.

Kemudian untuk penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, selama tahun 2019 sampai dengan 2022, nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Pemerintah Provinsi Papua hanya bertahan pada predikat B (Baik). Dimana untuk mencapai predikat SAKIP yang tertinggi AA (Sangat Memuaskan), pemerintah provinsi harus melalui tiga tahapan predikat lagi.

Selanjutnya untuk penilaian transparansi, dapat diamati pada nilai indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada publik secara transparan. Terlihat angka indeks SPBE diantara tahun 2018 dan 2022 cenderung nilainya menurun, yaitu dari 2,240 menjadi 1,876 poin yang masuk dalam predikat Cukup. Pemerintah provinsi tampaknya harus bekerja keras dimasa mendatang untuk mencapai predikat Memuaskan dengan nilai SPBE antara 4,2 – 5,0.

Terkait dengan upaya mereformasi birokrasi yang dilakukan selama ini, terindikasi Pemerintah Provinsi Papua mengalami banyak kendala, sehingga terlihat nilai indeks RB mengalami penurunan dari predikat B (Baik) di tahun 2019 menjadi CC (Cukup) pada tahun 2020, dan sampai tahun 2022 predikatnya tidak pernah naik kembali ke B, selalu bertahan di CC. Padahal untuk memperoleh predikat RB tertinggi, yaitu Istimewa atau AA dengan skor lebih dari 90 poin, pemerintah provinsi harus melalui 4 (empat) tingkatan predikat RB, yang masih sangat jauh jika dibandingkan predikat CC.

Dalam kaitannya menilai kinerja pemerintahan yang bersih, terdapat salah satu indikator kinerja yang sangat representatif untuk menunjukkan hal tersebut, yaitu Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dikeluarkan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Untuk rilis tahun 2021 dan 2022 menunjukkan bahwa Indeks SPI Provinsi Papua masing-masing sebesar 58,04 dan 66,76 poin, keduanya masuk dalam kategori Sangat Rentan. Dimana untuk tahun 2022 KPK-RI menyebutkan tingkat kerawanan korupsi di Papua terbentuk dari 7 (tujuh) komponen penilaian risiko, yang dapat dilaporkan nilainya dari urutan terbesar hingga terendah, yaitu : (1) Risiko Penyalahgunaan Fasilitas Kantor sebesar 61%; (2) Risiko Pengelolaan PBJ sebesar 44%; (3) Risiko Trading In Influence sebesar 39%; (4) Risiko Nepotisme Dalam Pengelolaan SDM sebesar 35%; (5) Risiko Penyalahgunaan Perjalanan Dinas sebesar 31%; (6) Risiko Suap/ Gratifikasi sebesar 29; dan (7) Risiko Jual/Beli Jabatan sebesar 18%.

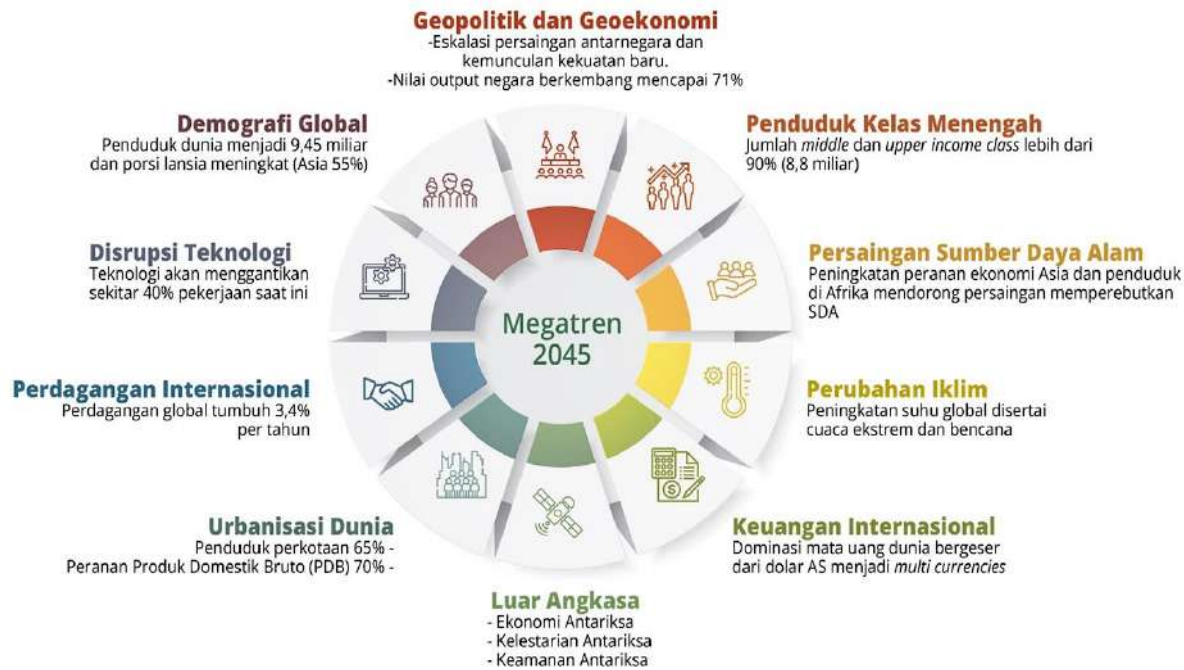
Setelah berturut-turut 8 kali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Provinsi Papua dalam pelaporan keuangan tahun 2022 hanya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hasil kurang memuaskan ini diakui pemerintah provinsi sebagai akibat transisi pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan pemekaran tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) yang berdampak pada kapasitas fiskal.

3.2 ISU STRATEGIS

3.2.1 Isu Internasional

Integrasi perencanaan daerah dengan isu-isu global merupakan fokus utama dalam penyusunan perencanaan jangka panjang, seperti isu perubahan iklim hingga bonus demografi. Dengan memperhatikan isu global, RPJPD dapat memuat arah pembangunan yang berkelanjutan, adaptif, dan responsif terhadap dinamika global, sehingga memastikan bahwa pembangunan daerah terjalin dalam konteks yang lebih luas. Penyusunan RPJPD harus secara cermat menimbang strategi yang tepat untuk mengatasi berbagai kompleksitas yang ditawarkan oleh isu-isu global. Pada bagian ini akan diulas mengenai bagaimana sinkronisasi antara RPJPD Provinsi Papua Tahun 2025–2045 dan perubahan dinamika global, dengan mengintegrasikan 10 (sepuluh) isu strategis yang dijelaskan dalam RPJPN 2025–2045. Isu-isu strategis global yang tercantum dalam RPJPN Tahun 2025–2045 dijabarkan pada Gambar 0.82 dan Tabel 0.101.

Gambar 0.82 Megatren Global 2045



Sumber: Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045

Tabel 0.101 Isu Strategis Internasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045

No	Isu	Deskripsi
1	Demografi Global	<ol style="list-style-type: none"> Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang memengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia. Meskipun jumlah penduduk terus bertambah, namun laju pertumbuhannya terus melambat. Bertambahnya kelompok penduduk usia tua (<i>aging population</i>) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan. Dalam demografi skala mikro, kualitas keluarga dipengaruhi oleh perubahan struktur dan bentuk keluarga, perkembangan teknologi digital, serta penetrasi global. Kecenderungan penduduk dunia akan terkonsentrasi di kawasan Asia dan Afrika yang disertai dengan munculnya kelompok negara yang memainkan perekonomian global
2	Geopolitik dan Geoekonomi	<p>Geopolitik:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia. Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan Persaingan geopolitik terutama di kawasan Indo-Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas. Indonesia menyikapi kontestasi geopolitik Kawasan Indo-Pasifik tersebut dengan mengedepankan ASEAN <i>Outlook on the Indo-Pacific</i> untuk memperkuat kerja sama dan meredam friksi di Kawasan. Risiko lingkungan, risiko sosial, dan ancaman siber berpotensi mendisrupsi stabilitas geopolitik. <p>Geoekonomi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nilai output dunia negara berkembang semakin dominan. Sektor komoditas tidak lagi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Kesiapan menghadapi perubahan atas

No	Isu	Deskripsi
		<p>komoditas akan menentukan pertumbuhan ekonomi negara berkembang di masa mendatang</p> <p>c. Institusi ekonomi sebagai sumber pertumbuhan negara berkembang.</p> <p>d. Dengan kebijakan yang tepat, negara berkembang mempunyai peluang mengejar ketertinggalan teknologi dan ekonomi dari negara maju.</p> <p>e. Perekonomian global pada tahun 2050 akan meningkat sebanyak 3 kali lipat dibanding tahun 2015.</p>
3	Disrupsi Teknologi	<p>a. Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat.</p> <p>b. Disrupsi teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat.</p> <p>c. Pandemi COVID-19 telah mendorong akselerasi disrupsi teknologi di berbagai sektor.</p> <p>d. Disrupsi teknologi yang berkembang di masa depan akan memengaruhi sektor manufaktur.</p> <p>e. Disrupsi teknologi di masa depan juga akan memengaruhi sektor pendidikan. Inovasi pengajaran dan pembelajaran yang berbasis <i>artificial intelligence</i> (AI) menjadi sebuah keniscayaan sehingga transfer ilmu pengetahuan dan pengembangan kompetensi dapat berlangsung kontinu, tanpa terbatas ruang dan waktu.</p> <p>f. Disrupsi teknologi menyebabkan jenis pekerjaan tergantikan oleh teknologi, dan juga berdampak pada sektor yang tidak mampu beradaptasi. yang selama ini bertumpu pada pola kerja konvensional.</p> <p>g. Disrupsi teknologi dapat berdampak besar terhadap cara kerja Pemerintah, termasuk dalam melakukan pembenahan proses perumusan kebijakan, dan penyusunan regulasi.</p>
4	Urbanisasi Dunia	<p>a. Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota.</p> <p>b. Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan di negara <i>emerging economies</i> yang umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh.</p> <p>c. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat memacu inovasi di kawasan perkotaan, khususnya dalam mengatasi masalah yang timbul sehari-hari.</p>
5	Perdagangan Internasional	<p>a. Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global mendorong perdagangan internasional berpusat di kawasan Asia-Afrika.</p> <p>b. Kolaborasi produksi bersama internasional (<i>global production networks/GPN</i>) dan rantai pasok global (<i>global value chain/GVC</i>) semakin menguat dan terdiversifikasi.</p> <p>c. Perdagangan internasional akan semakin dipengaruhi kecepatan perubahan teknologi dan digital, dan keberlanjutan yang terus berkembang.</p> <p>d. Kerja sama Kawasan menciptakan <i>hub</i> perdagangan strategis.</p>
6	Keuangan Internasional	<p>a. Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada tahun 2045 sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan demografi.</p> <p>b. Tren penggunaan <i>Central Bank Digital Currency</i> (CBDC) yang merupakan bentuk digital dari mata uang fiat suatu negara.</p> <p>c. Perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan disrupsi dalam industri jasa keuangan.</p>
7	Kelas Menengah	<p>a. Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 persen terhadap populasi dunia.</p> <p>b. Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam, termasuk kebutuhan gaya hidup baru (<i>new life style</i>).</p>
8	Persaingan Sumber Daya Alam	<p>Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber Daya Alam (SDA) (energi, air, dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang. Bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan SDA di antaranya air, pangan,</p>

No	Isu	Deskripsi
		dan energi, mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah.
9	Perubahan Iklim	<ul style="list-style-type: none"> a. Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati (tiga krisis global - The Triple Planetary Crisis) secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. b. Tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon menjadi kebijakan dan strategi global. c. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan akan menjadi sumber energi utama di dunia.
10	Pemanfaatan Luar Angkasa	<ul style="list-style-type: none"> a. Treneksplorasi antariksa semakin meningkat selama satu dekade terakhir. Antariksa dipandang sebagai warisan bersama umat manusia (<i>common heritage of humankind</i>), yaitu suatu ruang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. b. Perekonomian antariksa secara global akan tumbuh secara signifikan untuk jangka waktu yang panjang.

Sumber: Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045

Pemetaan isu global yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045 memuat beberapa hal terkait tantangan dan peluang yang akan dihadapi selama dua puluh tahun ke depan. Isu-isu tersebut perlu dilihat secara kontekstual dengan menyesuaikan potensi serta kemampuan yang dimiliki oleh setiap daerah. Namun, beberapa upaya mendasar perlu dilakukan mengingat dampaknya yang sudah terasa hingga hari ini. Upaya tersebut antara lain seperti mempersiapkan kualitas SDM yang mumpuni dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Dengan persiapan fondasi pembangunan yang matang, Provinsi Papua dapat memanfaatkan serta memitigasi peluang dan tantangan yang ditimbulkan dari isu-isu global tersebut.

3.2.2 Isu Nasional

Penyelarasan isu strategis nasional dalam penyusunan RPJPD Provinsi Papua Tahun 2025–2045 bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan daerah dengan yang telah disusun oleh pemerintah pusat dalam lokus nasional. Hal ini juga mendorong integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar fungsi koordinasi antar pelaku pembangunan. Adapun tujuh isu strategis nasional yang telah ditetapkan dalam RPJPN 2025–2045 dapat dilihat pada Tabel 0.102.

Tabel 0.102 Isu Strategis Nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045

No	Isu	Deskripsi
1	Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat	Kondisi produktivitas yang rendah tersebut di antaranya disebabkan oleh kualitas SDM yang jauh tertinggal terlebih lagi pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi yang tertinggal, dan kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah. Produktivitas yang rendah juga kemudian menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung terus melambat.
2	Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan,	Kapasitas IPTEKIN untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 sangat penting untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui peningkatan efisiensi dan penciptaan produk-produk berkualitas dan berteknologi tinggi. Namun, peningkatan kapasitas ilmu

No	Isu	Deskripsi
	teknologi, dan inovasi (IPTEKIN)	pengetahuan, teknologi, dan inovasi dihadapkan oleh masih lemahnya komitmen pemerintah, terutama dari segi anggaran, selain itu kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai.
3	Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah	Hal ini diakibatkan terjadinya pelemahan sektor manufaktur (<i>dutch diseases</i>), rendahnya produktivitas faktor-faktor produksi, terbatasnya kemampuan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi, keterbatasan dukungan ekosistem industri di luar Jawa, dan terjadinya ekonomi biaya tinggi. Di sisi lain, produktivitas sektor pertanian yang rendah disebabkan oleh lambatnya regenerasi petani dan nelayan, kurangnya tingkat keterampilan petani dan nelayan, terbatasnya adopsi teknologi dan akses keuangan, belum adanya standar proses, masih lemahnya kelembagaan ekonomi petani dan nelayan yang berbadan hukum, serta semakin berkurangnya daya dukung lahan pertanian.
4	Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata	Kinerja pariwisata masih berada di bawah potensinya disebabkan terutama oleh masih terbatasnya atraksi, aksesibilitas, dan amenitas, serta kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan cenderung masih rendah. Di samping itu, terjadi perubahan preferensi pasar dan disrupsi terkait dengan teknologi dan digitalisasi serta kebencanaan. Sementara, pemanfaatan potensi ekonomi kreatif belum optimal dikarenakan kurangnya dukungan dan kebijakan yang memadai serta transformasi digital yang belum merata. Inovasi dan pengembangan produk juga masih rendah, ekosistem untuk mendukung komersialisasinya belum terbentuk, dan akses ke pasar internasional juga masih terbatas.
5	Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Ekonomi Laut	Indonesia memiliki potensi ekonomi laut yang tinggi, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal untuk penciptaan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan juga peningkatan kesejahteraan secara inklusif dan berkelanjutan. Optimalisasi ekonomi biru masih dihadapkan pada rendahnya pemanfaatan sumber daya laut, serta belum berkembangnya pemanfaatan <i>Sea Lines of Communication</i> (SLoC) dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Rendahnya kontribusi ini juga disebabkan karena belum optimalnya pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan pengembangan budidaya perikanan, belum berkembangnya diversifikasi industri dan emerging sector lain yang memanfaatkan sumber daya dan kekayaan laut dalam menciptakan nilai tambah ekonomi, serta masih terbatasnya pengembangan riset dan teknologi kelautan. Di sisi lain, masih terdapat tantangan antara lain rendahnya penanganan sampah plastik, masih tingginya kegiatan <i>illegal, unreported and unregulated fishing</i> (IUU), serta belum optimalnya tata kelola dan regulasi pemanfaatan ruang laut.
6	Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi	Beberapa tantangan yang harus dihadapi UMKM dan koperasi di antaranya adalah sebagian besar UMKM memiliki pekerja berkeahlian rendah (<i>low-skilled workers</i>) dan juga banyak bergerak di sektor bernilai tambah rendah, rendahnya penggunaan teknologi, inovasi, dan investasi untuk pengembangan usaha, rendahnya kapasitas pengelolaan, rendahnya partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi, dan rendahnya jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil.
7	Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan	Kondisi ini dapat dilihat pada penggunaan energi fosil yang masih tinggi, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan, dan masih rendahnya efisiensi energi. Selain itu juga pencemaran air, udara, dan tanah terus terjadi sebagai dampak aktivitas pembangunan yang tidak berkelanjutan (<i>brown economy</i>).

No	Isu	Deskripsi
		Tantangan lainnya adalah pemanfaatan sumber daya alam yang cenderung merusak ekosistem seperti pertambangan eksploitatif serta meningkatnya penggunaan lahan untuk pertanian dan perkebunan yang menyebabkan degradasi hutan, deforestasi, dan berkurangnya keanekaragaman hayati, serta penegakan hukum dan regulasi termasuk pengaturan sistem insentif dan disinsentif untuk ekonomi hijau yang masih lemah.
8	Belum optimalnya pembangunan komunikasi dan informasi	Hal ini dapat diperhatikan pada ketersediaan infrastruktur dan literasi digital yang masih terbatas, adanya ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi dan produk luar negeri, masyarakat yang terjangkau jaringan 4g berkualitas dan juga kecepatan internet yang memadai masih terbatas dan tidak merata, dan terjadinya ketimpangan penetrasi pengguna internet antar wilayah yang berpotensi memperlebar perbedaaan kualitas layanan publik di setiap wilayah. Selain itu semua, penggunaan internet di Indonesia masih terbatas pada sektor tertentu dan kurang produktif seperti media dan hiburan, keuangan, dan perdagangan. Pola penggunaan internet yang tidak produktif, tidak memberikan dampak ekonomi yang signifikan pada perekonomian nasional.
9	Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antarwilayah masih relatif terbatas	Hal ini disebabkan antara lain karena pusat-pusat pertumbuhan lebih berkembang di Pulau Jawa, yang berkontribusi sebesar 57,8 persen terhadap PDB (2022), infrastruktur konektivitas yang belum memadai dan belum terintegrasi sepenuhnya menyebabkan tingginya biaya logistik, masih banyaknya regulasi yang menghambat, serta kuantitas dan kualitas SDM yang belum merata, terutama di luar Pulau Jawa.
10	Rendahnya peran perkotaan di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi	Hal ini disebabkan oleh terbatasnya keterhubungan antara perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dengan wilayah sekitarnya, ketimpangan pembangunan yang masih tinggi di kawasan maupun antar kawasan perkotaan dan perdesaan, kapasitas pengelolaan perkotaan yang masih terbatas, serta kualitas lingkungan perkotaan yang semakin menurun.
11	Akses dan kualitas yang belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial	Pembangunan kesehatan dihadapkan pada transisi demografi yang diiringi dengan meningkatnya mobilitas penduduk, urbanisasi, transisi epidemiologi, dan perilaku hidup tidak sehat. Hal ini meningkatkan beban penyakit menular dan tidak menular, termasuk permasalahan kesehatan penduduk lanjut usia dan kesehatan jiwa. Di sektor pendidikan, pembangunan dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang. Selain itu layanan pendidikan juga terlihat belum merata karena disparitas partisipasi pendidikan antarwilayah dan sosial-ekonomi masih tinggi. Selanjutnya kualitas pendidikan yang masih rendah, yang disebabkan oleh sarana-prasarana pendidikan dan fasilitas pembelajaran yang belum memadai, jumlah guru profesional dengan kompetensi tinggi masih terbatas. Dan belum terdistribusi ke seluruh daerah. Selain itu produktivitas dan daya saing perguruan tinggi di tingkat global saat ini juga masih rendah. Dalam hal perlindungan sosial, perubahan struktur dan peningkatan jumlah penduduk yang diiringi dengan peningkatan penduduk Lansia menuntut cakupan sistem perlindungan sosial yang lebih menyeluruh di sepanjang siklus kehidupan. Selanjutnya, pelaksanaan bantuan sosial belum adaptif dan mampu mendorong ketahanan terhadap bencana alam dan non

No	Isu	Deskripsi
		alam, serta perubahan iklim. Daya ungkit bantuan sosial juga masih rendah dan lingkungan yang belum inklusif terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia.
12	Kualitas dan kuantitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang belum optimal	Dalam tata kelola, pemerintah masih berhadapan dengan beberapa masalah, antara lain : (1) adanya regulasi yang berlebih (hyper regulation) dan kualitas regulasi yang rendah yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi, baik di pusat maupun daerah; (2) kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif; (3) proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif; (4) belum terimplementasinya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D; dan (5) ASN berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi politik di dalam birokrasi, khususnya di pemerintah daerah. kemudian dalam pelayanan publik permasalahan utamanya adalah : (1) belum meratanya kualitas pelayanan publik; (2) kualitas pelayanan dan proses pembangunan di bidang-bidang strategis belum memenuhi harapan masyarakat; dan (3) belum optimalnya transformasi digital di tingkat pemerintahan.
13	Kualitas kehidupan demokrasi dan politik yang belum memadai	Hal ini tercermin pada rendahnya Integritas pada partai politik, partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal, prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan, demokrasi masih terbatas pada hal-hal prosedural seperti teknis pemilihan dan hubungan formal kelembagaan
14	Sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan	Selain itu, pemulihan aset tindak pidana yang belum Optimal, potensi pelanggaran HAM masih tinggi, dan pengawasan institusi penegak hukum baik internal maupun eksternal masih lemah, budaya hukum masyarakat, penyelenggara negara, dan profesi hukum masih rendah juga merupakan isu di bidang hukum yang perlu dibenahi.
15	Keamanan nasional menghadapi kompleksitas ancaman dan gangguan, serta meningkatnya isu geopolitik kawasan, terutama di perbatasan	Sementara itu, kekuatan daya gentar pertahanan di kawasan belum terbangun dan ketergantungan terhadap Alpalhankam (alat peralatan pertahanan dan keamanan) luar negeri masih sangat tinggi. Tantangan lainnya adalah tata kelola dan kelembagaan keamanan nasional masih perlu diperkuat, meningkatnya jenis kejahatan baru dengan menggunakan teknologi tinggi, masih lemahnya keamanan Siber, serta masih tingginya gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut dan wilayah perbatasan.
16	Stabilitas ekonomi makro Indonesia saat ini cukup solid di tengah ketidakpastian global. Namun, tantangan ke depan adalah perlunya kebijakan fiskal dan moneter yang pro-growth	Tantangan kebijakan fiskal yang dihadapi di antaranya rendahnya penerimaan negara, terutama perpajakan yang tercermin dari rasio pajak yang hanya 10,4 persen dari PDB pada tahun 2022. Selain itu, kualitas dan rasio belanja negara terhadap PDB masih rendah, yaitu sebesar,15,8 persen (2022). Ruang fiskal yang rendah dan disertai kualitas belanja yang belum optimal menyebabkan terbatasnya peranan fiskal sebagai stimulus pembangunan. Selanjutnya, di sisi kebijakan moneter menghadapi tantangan menjaga stabilitas harga di tengah volatilitas harga komoditas di pasar global, terutama pangan dan energi serta risiko ketidakpastian ekonomi dan politik global. Kondisi ini berdampak pada naiknya risiko tekanan inflasi dan nilai tukar, sehingga

No	Isu	Deskripsi
		kebijakan moneter cenderung lebih ketat untuk menahan resiko ketidakstabilan harga domestik.
17	Belum optimalnya ketahanan sosial dan ekologi	Terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam hal ketahanan sosial budaya, di antaranya Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global, kearifan lokal dan nilai budaya belum dioptimalkan sebagai modal dasar pembangunan masyarakat. Kemudian budaya literasi, kreativitas, dan inovasi belum optimal untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, peran dan fungsi keluarga belum optimal, serta pemenuhan hak dan perlindungan anak, pemuda, perempuan, penyandang disabilitas, dan Lansia juga belum memadai. Berikutnya, terkait keagamaan, kebebasan beragama belum disertai dengan kemampuan literasi keagamaan yang inklusif, moderat, dan berorientasi kemaslahatan, serta penghormatan terhadap keragaman agama dan kebudayaan masih lemah Selanjutnya, ketahanan ekologi menghadapi tantangan berupa tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, tingginya tingkat bencana hidrometeorologi, kurang efektifnya mitigasi bencana, sistem peringatan dini, dan penanganan pasca bencana. Di sisi lain, pengendalian kerusakan lingkungan hidup belum optimal. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan pasokan pangan, energi, dan air juga terjadi di berbagai wilayah.
18	Masih tingginya ketimpangan pembangunan antar wilayah	Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya ketersediaan SDM yang berkualitas dan penyebarannya belum merata di seluruh wilayah Indonesia, belum memadainya ketersediaan infrastruktur di wilayah-wilayah yang tertinggal khususnya di bagian timur Indonesia, serta masih terbatasnya anggaran pemerintah daerah dan belum optimalnya pemanfaatan anggaran, masih tingginya permasalahan pertanahan dan sangat terbatasnya Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota yang tersedia, rendahnya produktivitas perkotaan akibat desain kota yang tidak optimal, serta tingginya risiko bencana dan lemahnya tata kelola kebencanaan. Selanjutnya, pembangunan pedesaan dan daerah afirmasi belum optimal akibat kebijakan yang belum asimetris dan afirmatif, Demikian pula desentralisasi dan otonomi daerah belum memberikan hasil yang diharapkan ditunjukkan oleh tata kelola yang lemah.
19	Konektivitas laut dan penyeberangan serta konektivitas udara yang menjadi tulang punggung angkutan barang dan penumpang antar pulau belum optimal	Konektivitas hinterland (intra-pulau) yang terdiri dari jaringan jalan, kereta api, serta angkutan perairan, danau dan sungai masih perlu ditingkatkan. Tantangan lainnya berupa masih terbatasnya sistem angkutan umum massal perkotaan terutama di wilayah metropolitan dan kota-kota, masih rendahnya jangkauan jaringan serat optik sebagai tulang punggung layanan digital yang berkualitas, dan masih belum meratanya jangkauan jaringan internet seluler, terutama di pedesaan dan Kawasan Timur Indonesia.
20	Belum optimalnya kesinambungan dalam pembangunan	Terutama dalam hal pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan. Untuk pelaksanaan, masih dihadapi tantangan seperti belum efektifnya upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional, Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah serta konsistensi pencapaian sasaran jangka panjang. Instrumen

No	Isu	Deskripsi
		pengaman (safe guarding) untuk pelaksanaan dan pengendalian pembangunan juga belum efektif, penerapan manajemen risiko pembangunan nasional belum optimal, serta komunikasi publik untuk membangun kepemilikan dan partisipasi pemangku kepentingan belum terjalin dengan baik. Sementara itu, kapasitas pembiayaan untuk memenuhi percepatan dan peningkatan kebutuhan pembangunan dari sektor publik pusat dan daerah, serta non publik masih terbatas.

Sumber: Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045

Secara umum, isu strategis nasional yang ditetapkan dalam RPJPN 2025-2045 berfokus pada transformasi tiga sektor utama, yakni sosial, ekonomi, dan tata kelola. Ketiga sektor transformasi ini menjadi panduan utama dalam mewujudkan tujuan bernegara dan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Dalam upaya mencapai transformasi tersebut, integrasi isu strategis ini memberikan ruang pembangunan yang luas dalam rincian kegiatan sesuai dengan karakteristik Provinsi Papua.

3.2.4 Isu Strategis Domestik Papua

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pokok yang teridentifikasi selama ini, terdapat 10 isu strategis domestik yang super prioritas untuk ditangani dengan cepat, bertahap dan efektif oleh Pemerintah Provinsi Papua dalam upaya mewujudkan transformasi pembangunan secara optimal dimasa depan. Ke-10 isu strategis yang dimaksud dapat divisualisasikan dalam Gambar 0.83.

Gambar 0.83 Isu-Isu Strategis Super Prioritas Domestik dalam Transformasi Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2045



Sumber: Kajian Retrospektif dan Prospektif Transformasi Pembangunan Provinsi Papua, 2024

3.2.4.1 Potensi Sumber Daya Pembangunan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dan Perpres Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan

Papua Tahun 2022-2041, telah memberikan otoritas yang lebih besar atas sumber daya dan pembangunan lokal Provinsi Papua dalam kerangka Otonomi Khusus yang akan dijalankan selama 20 tahun mendatang. Tersedianya sumber Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur, yang diprediksi dari tahun 2025 hingga 2045 secara kumulatif bisa mencapai \pm 71,14 triliun rupiah di seluruh wilayah Papua, merupakan potensi yang sangat besar untuk dioptimalkan oleh daerah-daerah yang ada di Papua selama 20 kedepan dalam upaya, antara lain: (1) meningkatkan kapasitas dan daya saing OAP; (2) mengembangkan ekonomi berbasis SDA lokal serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan OAP yang berkeadilan dan berkelanjutan; (3) mempercepat pembangunan infrastruktur dasar secara terpadu, khususnya di daerah-daerah pemukiman OAP; (4) meningkatkan dan melestarikan kualitas lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan pembangunan rendah karbon, serta (5) mempercepat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

3.2.4.2 Mempertahankan dan Menghormati Keragaman Budaya Masyarakat Papua

Apabila memperhatikan proporsi penduduk Non-OAP (bukan Orang Asli Papua) berdasarkan SP (Sensus Penduduk), tercatat pada SP2000 penduduk Non-OAP sebanyak 29,90%, dan pada SP2010 turun menjadi 23,70% (Suntono, 2012). Selanjutnya berdasarkan publikasi dari Dinas Kependudukan dan Capil Provinsi Papua di tahun 2017, terindikasi proporsi penduduk Non-OAP sebesar 50,24%. Sedangkan di tahun 2020, mengacu pada data Dinas Sosial, Kependudukan, P3A Propinsi Papua, proporsi penduduk Non-OAP sebesar 43,85%, yang sebagian besar terkonsentrasi di daerah-daerah dataran rendah dan kota-kota besar di Papua seperti Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika, dan Merauke. Dengan semakin terbukanya Papua dimasa depan, yang ditandai dengan bertambahnya kota-kota pusat pertumbuhan baru, dipastikan proporsi penduduk Non-OAP akan kembali naik dan semakin bertambah, yang diperkirakan pada tahun 2045 proporsinya bisa mencapai 60-65%. Sudah barang tentu, dengan semakin bertambahnya penduduk Non-OAP tersebut, khazanah budaya di Papua akan semakin beragam. Sehingga bukan hanya budaya Papua saja yang berkembang, tetapi juga budaya-budaya lainnya yang dibawa oleh penduduk migrasi Non-OAP, seperti budaya Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Maluku. Dampak keberagaman budaya sangat dirasakan masyarakat Papua. Dampak positif keberagaman budaya tentunya merupakan peluang yang perlu dikelola secara optimal. Sedangkan dampak negatifnya akan menjadi tantangan dimasa depan, antara lain : (1) adanya sikap etnosentrisme, yaitu sebuah sikap atau pandangan yang bertumpu pada kebudayaan sendiri, yang akan menimbulkan perasaan atau sikap meremehkan suatu suku atau kebudayaan lain; (2) adanya stereotip, yang menimbulkan pandangan yang negatif terhadap suatu kelompok budaya, dikarenakan adanya perbedaan budaya; (3) terjadinya konflik sosial dan budaya, yang disebabkan primordialisme, yaitu suatu sikap yang menganggap jika sukunya lebih baik dibanding suku lainnya; (4) cepatnya perubahan sosial dan budaya sebagai dampak dari kemajuan pembangunan dan teknologi, yang dapat mendegradasi nilai-nilai dan norma sosial budaya masyarakat Papua. Menurut Pamungkas (2021, dalam Paputungan, 2022), pada dasarnya penduduk OAP tidak menolak pembangunan, hanya saja butuh pemahaman yang baik terutama dari sisi tradisi, agar tidak terjadi kesalahan dalam pembangunan,

sehingga OAP memang benar-benar bisa merasakan manfaatnya. Oleh sebab itu penduduk Papua yang beraneka ragam budaya ini, nilai toleransi dan inklusif semakin penting untuk ditingkatkan guna menjaga kehidupan sosial yang damai sentosa.

3.2.4.3 Demografi, Urbanisasi dan Keterkaitan Kota-Kampung

Jumlah penduduk Papua akan semakin bertambah dengan suku atau etnik yang beragam dan arus migrasi ke Papua, penduduk semakin terkonsentrasi di kota, dan keterkaitan ekonomi kampung-kota di Papua semakin bertambah kuat dan meningkat. Berdasarkan data antar-SP (Sensus Penduduk) dari BPS Provinsi Papua (2023), cenderung penduduk Papua terus mengalami peningkatan yang cukup fluktuatif. Misalkan pada SP1990 penduduk Papua mengalami pertumbuhan rata-rata 1,63% per tahun jika dibandingkan SP1980. Selanjutnya di SP2000 agak melambat menjadi 1,52% per tahun bila dibandingkan SP1990. Kemudian kembali cepat pada SP2000 sebesar 2,70% pertahun dibandingkan SP1990. Dan terakhir di SP2020 melambat lagi menjadi 2,11% per tahun dibandingkan SP2000. Tercatat pada SP2020 ini (sebelum DOB) jumlah penduduk Papua sudah mencapai 4.303.707 jiwa. Selain faktor kelahiran (Fertility), penyebab bertambahnya jumlah penduduk di wilayah Papua selama ini adalah migrasi. Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan menetap. Merujuk pada data BPS Provinsi Papua, selama periode SP1980 sampai dengan SP2020, rata-rata penduduk migrasi seumur hidup mengalami peningkatan kurang lebih 2,40% per tahun, dan tercatat pada SP2020 jumlah penduduk migrasi seumur hidup di Papua sebesar 471.686 jiwa, atau 10,96% dari total penduduk Papua. Selain migrasi, mobilitas penduduk di Papua dapat juga dicermati pada arus urbanisasi dari kampung ke kota, yang diindikasikan dengan rasio derajat urbanisasi. Jika beranjak pada data antar-SP, derajat urbanisasi di Papua cenderung mengalami peningkatan, yaitu dari 25,96% pada SP2010 menjadi 30,20% pada SP2020. Dengan semakin berkembangnya daerah perkotaan, dan bertambahnya kota-kota pusat pertumbuhan baru, dipastikan arus mobilitas penduduk (migrasi dan urbanisasi) di Papua akan semakin meningkat dimasa depan yang dapat berpengaruh negatif terhadap pembangunan daerah jika tidak terkendali, seperti : (1) semakin minimnya lahan kosong, dan harga tanah yang terus naik; (2) menambah pencemaran lingkungan; (3) permukiman kumuh bertambah, dan bisa menjadi penyebab bencana alam; (4) tingkat kriminalitas meningkat; (5) bertambahnya golongan masyarakat miskin; (6) ketimpangan pendapatan meningkat, baik itu secara spasial, sektoral maupun personal. Namun disisi lain, apabila urbanisasi ditangani dengan baik bisa memberi dampak positif terhadap keterkaitan antara kampung-kota, antara lain : (1) meningkatnya kesejahteraan penduduk di kampung karena mendapatkan berbagai hal yang tak ada di desa seperti teknologi, informasi, dan lain-lain; (2) mempercepat pembangunan kampung karena adanya berbagai informasi yang diperoleh dari kota; (3) meningkatnya jumlah tenaga kerja di kota, terutama tenaga buruh yang berasal dari kampung; (4) kota dapat menjadi agen perubahan yang bisa ditiru pembangunan kampung agar semakin maju.

3.2.4.4 Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan

Upaya pengentasan kemiskinan dan ketimpangan berorientasi pada zero poverty dan zero inequality. RIPPV menargetkan pada tahun 2041 tingkat kemiskinan di Provinsi Papua berada pada interval 2,82-5,81%. Sedangkan dalam Visi Indonesia Emas 2045, ditargetkan kemiskinan Papua mengarah pada zero poverty diantara 1,01-2,50% pada tahun 2045. Baik itu target RIPPV 2041 maupun Indonesia Emas 2045, keduanya merupakan tantangan besar bagi Provinsi Papua dalam mentransformasi pembangunan sosial yang adaptif dimasa depan, khususnya dalam mereduksi kemiskinan. Hal ini disebabkan, kemampuan Provinsi Papua dalam menurunkan tingkat kemiskinan sepanjang tahun 2005-2023 masih sangat rendah, hanya mampu sebesar -0,82% per tahun, yang mana tingkat kemiskinan pada tahun 2023 sebesar 26,03%. Jika angka kemiskinan tahun 2023 tersebut dijadikan sebagai baseline, maka untuk mencapai tingkat kemiskinan di tahun 2045 sebesar 2,5% (angka maksimum target Indonesia Emas 2045) dibutuhkan akselerasi penurunan kemiskinan di Papua yang lebih cepat lagi berkisar 1,01-1,23% per tahun sepanjang periode 2030-2045, dengan asumsi akselerasi kemiskinan selama tahun 2024-2029 masih mengikuti kapasitas penurunan kemiskinan pada periode sebelumnya. Oleh karena itu, pemerintah provinsi dimasa depan ditantang untuk mengeluarkan dan melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan pro-poor yang lebih efektif, inovatif dan integratif baik itu secara sektoral, spasial maupun personal. Selain kemiskinan, tantangan yang tak kalah besarnya adalah upaya untuk mewujudkan kesetaraan ekonomi masyarakat. Pada pembahasan sebelumnya telah diutarakan kondisi ketimpangan pendapatan sektoral dan spasial di wilayah Papua sangat tinggi, masing-masing mencapai 1,6233 dan 1,4377 poin per tahun sepanjang periode 2016-2022. Sementara ketimpangan pendapatan antar personal di tahun 2023 yang direpresentasikan Gini Ratio masih di atas batas ketimpangan rendah, yaitu 0,386 poin. Berhadapan dengan angka-angka ketimpangan yang tinggi ini, Provinsi Papua akan menghadapi tantangan yang berat dimasa depan untuk mewujudkan distribusi pendapatan yang mengarah pada zero inequality, atau mendekati kesetaraan yang sempurna.

3.2.4.5 Ekonomi Daerah dan Ketenagakerjaan

Pemberdayaan ekonomi serta pertumbuhan industri berbasis pertanian dan kelautan, dan tenaga kerja yang didukung oleh infrastruktur modern dan penguatan konektivitas. Provinsi Papua memiliki potensi SDA (Sumber Daya Alam) yang sangat kaya dan beragam, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Berbagai potensi SDA pertanian dan perkebunan, mulai dari tanaman palawija, buah-buahan, sayur-sayuran hingga tanaman keras seperti kakao, cengkeh, kayu merbau, dan lain-lain, semuanya tersedia. Begitu juga dengan sumber daya perikanan, baik itu perikanan darat maupun perikanan laut, yang dibudidayakan atau pun ditangkap, potensinya sangat besar tersedia di Papua. Namun demikian, semua potensi SDA yang begitu besar tersebut sampai kini belum dapat memberikan nilai tambah yang lebih banyak kepada masyarakat. Oleh karena sebagian besar masih ditransaksikan tanpa melalui proses pengolahan. Dengan kata lain lebih banyak hasil SDA pertanian dan perikanan yang dipasarkan dalam bentuk bahan-bahan mentah yang sangat kecil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebagai salah satu indikasinya dapat diperhatikan pada kontribusi sektor industri terhadap

pembentukan nilai tambah regional Papua selama periode 2010-2022, rata-rata hanya 1,97% per tahun pada PDRB Dengan Tambang, dan sebesar 3,40% untuk PDRB Tanpa Tambang. Kontribusi yang sangat rendah seperti ini merupakan tantangan berat bagi pemerintah provinsi untuk mentransformasi ekonomi Papua dimasa depan. Oleh karena salah satu syarat terwujudnya transformasi ekonomi adalah terjadinya perubahan struktur ekonomi yang fundamental dari sektor-sektor ekonomi ekstratif (seperti pertanian dan tambang) ke sektor manufaktur atau industri. Paling tidak kontribusi sektor industri antara 15-20% terhadap PDRB mampu mengubah struktur ekonomi Papua secara normal, yaitu perubahan struktur PDRB dari sektor pertanian ke industri yang diiringi dengan kenaikan pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Itulah tantangan besarnya bagi Papua dimasa depan untuk mewujudkannya. Sesuai dengan potensi bahan baku yang banyak tersedia, industri berbasis pertanian dan perikanan harus dijadikan motor penggerak, yang didukung oleh tenaga kerja yang terampil dan memiliki keahlian sesuai kebutuhan pasar industri. Dimana untuk hal tersebut, Pemerintah Provinsi Papua harus bekerja lebih keras lagi dimasa depan mengubah struktur tenaga kerja yang selama ini lebih dominan pada tenaga kerja yang berpendidikan rendah (SD dan kebawah), ke tenaga kerja yang berpendidikan SMA/SMK dan ke atas hingga pendidikan tinggi. Sekurang- kurangnya angka proporsi tenaga kerja berpendidikan ini harus mencapai 40-50% dalam komposisi pasar tenaga kerja Papua dimasa depan.

3.2.4.6 Pendidikan dan Kesehatan

Pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan berdaya saing akan menciptakan produktifitas dan kompetensi OAP yang tinggi. Pembangunan dalam bidang pendidikan dan kesehatan merupakan dua pilar yang sangat penting dalam membentuk modal manusia (human capital) dalam artian pembangunan ekonomi investasi jangka panjang. Teori human capital menjelaskan proses dimana pendidikan memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Teori ini berargumentasi bahwa manusia yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibandingkan dengan yang pendidikannya lebih rendah. Apabila upah mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang memiliki pendidikan tinggi, semakin tinggi produktivitas, sehingga hasilnya ekonomi nasional akan bertumbuh lebih tinggi (Nugroho, 2014). Selanjutnya terkait dengan kesehatan, Todaro dan Smith (2003) mengatakan bahwa kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas. Oleh karena itu, kesehatan juga dapat dilihat sebagai komponen produktivitas tenaga kerja dan pembangunan ekonomi yang vital sebagai input produksi agregat, peran gandanya sebagai input maupun output menyebabkan kesehatan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Implikasi dari penerapan teori human capital dibidang pendidikan dan kesehatan ini adalah perlunya Provinsi Papua untuk mempercepat peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat dimasa depan, dalam upaya meningkatkan dan memperbesar produktifitas tenaga kerja regional. Hal ini harus dilakukan karena dari kualitas pendidikan penduduk Papua, jika dilihat dari Rata-Rata Lama Sekolah sangat rendah, yaitu 7,2 tahun di tahun 2023, yang terlihat hanya bertambah 0,1 poin per tahun dari tahun 2010. Kondisi tersebut akhirnya berdampak terhadap tingkat produktifitas tenaga kerja Papua juga rendah, rata-rata selama periode 2010-2023 hanya 77,36 juta rupiah per tenaga kerja per tahun,

dengan pertumbuhannya sangat lambat sebesar 0,46% per tahun. Sama halnya dengan kualitas kesehatan penduduk Papua, yang dapat dicermati pada perkembangan indikator Angka Harapan Hidup, cenderung meningkat sangat lambat, rata-rata hanya 0,1 poin per tahun selama periode 2010-2023. Dengan kondisi kualitas pendidikan dan kesehatan penduduk Papua tersebut, Pemerintah Provinsi Papua akan menghadapi tantangan yang berat dimasa depan dalam upaya meningkatkan produktifitas tenaga kerja melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.

3.2.4.7 Disrupsi Teknologi dan Inovasi

Telah disampaikan sebelumnya bahwa di era disrupsi teknologi saat ini membuat segala hal menjadi instan, mudah dan modern. Gaya hidup masyarakat Papua secara berangsur mulai mengalami perubahan yang cukup drastis, yang cenderung sangat bergantung pada berbagai gadget (gawai) yang setiap waktu terus mengalami perubahan, contohnya smartpone. Melalui smartpone semua informasi dan komunikasi dapat diakses dan disebar secara mudah, dengan jarak dan jangkauan yang tak terbatas. Dampaknya, saat ini telah muncul konsumen baru yaitu social-customer yang tahu segalanya dan terkoneksi secara intens tanpa ada batasan mengenai informasi produk atau layanan yang diinginkan. Hal ini dapat dilakukan karena tersedianya koneksi internet yang semakin mudah diakses dan cepat melalui jaringan 4g. Sebagai indikasinya dapat dilihat pada data Susenas BPS Provinsi Papua antara tahun 2015 dan 2023 yang menunjukkan adanya lonjakan yang tinggi dalam penggunaan internet pada penduduk Papua, yaitu dari 8,98% di tahun 2015 menjadi 29,87% pada tahun 2023, dimana sekitar 97,68% diakses melalui smartpone. Guna menghadapi era disrupsi teknologi yang semakin masif dimasa depan ini, Pemerintah Papua harus mampu beradaptasi, berkreasi dan inovatif untuk selalu merekayasa IPTEK menjadi lebih berkualitas dalam upaya memberikan pelayanan publik yang prima.

3.2.4.8 Pengelolaan SDA dan Pembangunan yang Berkelanjutan

Hutan dan perairan Papua memiliki dampak keberlanjutan oleh karena itu ekonomi hijau (green economy) dan ekonomi biru (blue economy) dapat menjadi development engine yang rendah karbon dan mampu menstabilkan perubahan iklim yang drastis, serta sekaligus meningkatkan kesejahteraan. Pembangunan berbasis ekonomi hijau merupakan keniscayaan di Papua, mengingat semakin tidak terkendalinya kerusakan hutan lingkungan akibat dari pembangunan. Data yang dipublikasikan BPS RI (2023) menunjukkan bahwa selama periode 2013/2014 sampai dengan 2021/2022 rata-rata deforestasi netto di Provinsi Papua mencapai 24.111,39 hektar per tahun, dengan kontribusi tertinggi berasal dari APL (Areal Penggunaan Lain) sebesar 56,83%, sedangkan dari kawasan hutan sebesar 43,17%. Meskipun ekonomi hijau dalam 10 tahun terakhir ini sudah menjadi arus utama pemikiran ekonomi wilayah di Papua, akan tetapi hal tersebut masih sebatas pada tataran normatif, dan belum sepenuhnya dilaksanakan dalam pembangunan daerah, cenderung implementasinya masih didasarkan pada asumsi bussiness as usual.

Selain ekonomi hijau, Provinsi Papua juga sangat berpotensi untuk menerapkan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep yang menggabungkan pemanfaatan sumber daya laut dengan pendekatan berkelanjutan, yang mencakup berbagai sektor dan bidang antara lain : perikanan, energi terbarukan, pariwisata, transportasi air, pengelolaan limbah, mitigasi perubahan iklim. Jika dikelola dengan visi berkelanjutan, sektor-sektor dan bidang pembangunan ekonomi biru tersebut dapat menjadi pilar penting dalam mewujudkan masyarakat Papua yang sejahtera, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pelestarian ekosistem laut, serta menciptakan lapangan kerja.

3.2.4.9 Transformasi Birokrasi dan Manajemen ASN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin transparan, akuntabel dan partisipatif dengan didukung modernisasi dan manajemen ASN yang profesional untuk pelayanan publik yang prima sangat diperlukan. Masyarakat Papua yang kini mulai beralih menjadi social-customer memiliki sosok yang lebih cerdas, kritis, dan menuntut kepuasan yang lebih tinggi. Kondisi ini akhirnya merubah karakteristik masyarakat yang menuntut lebih tinggi terhadap pelayanan publik dari pemerintah. Dimasa depan, Pemerintah Provinsi Papua harus dapat mengubah orientasi pelayanan publiknya secara bertahap, dari supplier-oriented (mengejar target) ke consumer-oriented (kepentingan masyarakat) dan terakhir ke customer-oriented (sesuai kebutuhan masyarakat) dimana tingkat partisipasi menjadi lebih besar. Untuk itu transformasi birokrasi dan manajemen ASN harus dilaksanakan seoptimal mungkin dimasa depan. Transformasi birokrasi adalah perubahan perilaku birokrat yang memberi kesadaran baru, pemerintah dibentuk tidak untuk melayani dirinya sendiri tetapi untuk melayani masyarakat sesuai kebutuhannya. Sedangkan transformasi manajemen ASN melingkupi penguatan budaya kerja, percepatan peningkatan kapasitas ASN, hingga peningkatan kinerja dan penghargaan. Tidak hanya transformasi pada tingkat instansi, setiap individu ASN juga dapat berinovasi untuk meningkatkan kinerja organisasi selama tidak melanggar aturan.

3.2.4.10 Perdagangan Antardaerah dan Global yang Kompetitif

Perdagangan antardaerah atau antarpulau adalah perdagangan dan/atau pendistribusian barang dari satu daerah ke daerah lain untuk memenuhi kebutuhan di daerah tersebut. Secara umum perdagangan antardaerah terjadi karena dua faktor, yakni perbedaan aktor produksi dan tingkat harga antardaerah. Adapun manfaat dari perdagangan antara daerah maupun global adalah: (1) menambah devisa negara untuk perdagangan global, dan menambah pendapatan daerah untuk perdagangan antarpulau; (2) meningkatkan pemenuhan kebutuhan konsumsi domestik; (3) menyediakan berbagai faktor-faktor produksi sebagai modal pembangunan; (4) meningkatkan produktifitas regional; (5) mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi; (6) menyerap lapangan kerja; (7) menstabilkan harga; (8) memperkuat kerjasama antardaerah dan antarnegara; (9) meningkatkan daya saing daerah; (10) mengurangi ketimpangan pembangunan antardaerah; (11) memperluas jangkauan pasar; (12) mempercepat alih teknologi. Melihat banyaknya manfaat yang diperoleh dari aktifitas perdagangan tersebut, maka sudah sepatutnya dimasa depan Papua harus mampu meningkatkan daya saing perdagangan antardaerah dan global.

Hal ini menjadi tantangan besar bagi Papua, karena selama ini perdagangan antardaerah selalu mengalami defisit sangat besar. Contohnya pada tahun 2018-2021 rata-rata defisit perdagangan Papua mencapai -3,16 triliun rupiah dengan kenaikannya sekitar 86,11% per tahun, yang mana defisit terbesar rata-rata terjadi pada perdagangan dengan Jawa Timur, Jawa Tengah dan DKI Jakarta (diolah dari data BPS RI, 2023).

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

4.1 VISI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025-2045

Visi menjadi suatu Inspirasi tentang bagaimana suatu wilayah atau daerah berkembang, bertransformasi, atau mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu 20 tahun ke depan. Visi juga mencerminkan aspirasi dan cita-cita masyarakat serta pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan wilayah tersebut. Definisi visi jangka panjang daerah mencakup visi tentang perkembangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan infrastruktur, serta nilai-nilai, identitas, dan karakteristik unik yang ingin dipertahankan atau ditingkatkan dalam masa depan. Visi jangka panjang daerah berfungsi sebagai landasan atau kerangka kerja bagi perencanaan dan pengembangan wilayah, membantu memandu kebijakan dan program, yang dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam visi tersebut. Selain itu, visi ini juga dapat memotivasi kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan kelompok-kelompok lainnya untuk mencapai tujuan bersama yang berorientasi pada masa depan yang lebih baik. Visi jangka panjang daerah juga dapat berfungsi sebagai alat komunikasi yang kuat, memungkinkan masyarakat untuk memahami dan berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah mereka.

Sesuai dengan analisis yang dikembangkan, pernyataan visi pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Papua Tahun 2025-2045 adalah:

”Provinsi Papua Maju dan Berkelanjutan Berkbasis Ekonomi Biru, Agroindustri dan Ekonomi Kreatif”

Selanjutnya visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- a. **Maju** merujuk pada kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti 1 v berjalan (bergerak) ke muka; tampil ke muka: 2 v menjadi lebih baik (laku, pandai, dan sebagainya); berkembang; 3 telah mencapai atau berada pada tingkat peradaban yang tinggi; dan 4 cerdas; berkembang pikirannya; berpikir dengan baik. Dalam konteks visi pembangunan Provinsi Papua maka maju dapat diartikan bahwa pada tahun 2045 masyarakat Provinsi Papua telah tampil sebagai masyarakat dengan peradaban yang lebih tinggi baik secara fisik (infrastruktur, perdagangan, ekonomi dan kesejahteraan) dan memiliki pikiran visioner tentang kemajuan daerah dan negara. Di dalam visi maju juga mengandung arti afirmasi, yaitu bahwa tidak boleh ada yang tertinggal dalam pembangunan, terutama kesejahteraan orang asli Papua (OAP) yang saat ini masih relatif tertinggal dalam pembangunan baik dari sisi partisipasi maupun hasil pembangunan.
- b. **Berkelanjutan** merujuk pada kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti v berlangsung terus-menerus; berkesinambungan. Dalam kontak visi pembangunan Provinsi Papua maka berkelanjutan dapat diartikan bahwa pembangunan di Provinsi Papua berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan baik secara sosial, ekonomi, kelembagaan maupun dari sisi daya dukung lingkungan.

- c. **Ekonomi Biru** adalah pengelolaan kegiatan sosial dan ekonomi yang mendorong eksploitasi, inovasi, dan pengelolaan laut dan sumber daya 'biru' yang memberi kehidupan secara berkelanjutan. Dalam konteks visi pembangunan di Provinsi Papua memiliki arti bahwa Provinsi Papua sebagai bagian dari negara kepulauan Indonesia yang memiliki sumber daya lautan yang luas akan memanfaatkan sumber daya lautan dan pesisir secara optimal untuk kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat untuk mencapai kemajuan secara berkelanjutan.
- d. **Agroindustri** merupakan bagian dari kompleks industri pertanian sejak produksi bahan pertanian primer, industri pengolahan atau transformasi sampai penggunaannya. Dalam konteks visi pembangunan di Provinsi Papua, agroindustri memiliki arti bahwa Provinsi Papua sebagai provinsi hijau akan mendayagunakan sumber daya alam untuk kegiatan produksi, pengolahan dan distribusi secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.
- e. **Ekonomi Kreatif** adalah kegiatan ekonomi yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan manusia sebagai faktor produksi yang utama. Ekonomi kreatif didukung dengan keberadaan industri kreatif yang menjadi pengejawantahannya, termasuk di dalamnya ekonomi berbasis digital. Dalam konteks visi pembangunan di Provinsi Papua, ekonomi kreatif memiliki arti bahwa pembangunan ekonomi di Provinsi Papua akan bersumber dari kreatifitas masyarakat di Provinsi Papua sekaligus mengadopsi perkembangan pengetahuan dan teknologi mutakhir untuk kemajuan dan kesinambungan pembangunan.

Visi Pembangunan Daerah Provinsi Papua tahun 2025-2045 selanjutnya diukur dengan pencapaian lima sasaran visi dan indikator pencapaiannya sebagaimana Tabel 0.1.

Tabel 0.1 Sasaran Visi dan Indikator Pencapaian Visi Pembangunan Provinsi Papua 2025-2045

Sasaran Visi	Indikator	Target	
		2025	2045
Peningkatan Pendapatan per Kapita	PDRB per kapita (Rp Juta)	83,54 - 84,15	568,47-894,19
	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	36,05	64,21
	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan & Perikanan (%)	14,3	15,67
	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	2,93-2,95	5,81 - 6,49
Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	16,00 - 16,50	5,25-6,25
	Rasio Gini (Indeks)	0,380-0,383	0,318-0,341
	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	0,39 – 0,41	0,48-1,09
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,40 - 4,90	5,44-7,93
Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, Daya Saing dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	44,55	60,51
	Indeks Daya Saing Daerah	3,06	3,78
Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Modal Manusia	0,44	0,56
	Indeks Pembangunan Manusia	65,36	74,70
Pelestarian ekologi dan Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan intensitas emisi GRK (%)	59,28	99,45
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	82,19	88,21

- a. Sasaran visi pertama yaitu **“Peningkatan Pendapatan Per kapita”** akan dicapai dengan upaya transformasi ekonomi yang terus berlangsung melalui peningkatan produktivitas dan penciptaan nilai tambah pada sektor pertanian dan agroindustri, perikanan dan kelautan, pariwisata serta ekonomi kreatif. Upaya transformasi ekonomi daerah tersebut secara ekstensif akan menciptakan lapangan pekerjaan dan penghasilan bagi masyarakat yang selanjutnya akan menjadi basis bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b. Sasaran visi kedua yaitu **‘Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan’** akan dicapai melalui dengan dua pendekatan utama yaitu: pertama, mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan melalui berbagai program perlindungan sosial dan subsidi. Kedua, melakukan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan produktivitas kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi atau pendapatan. Selain itu, intervensi tersebut juga akan dilakukan dengan upaya pemerataan hasil pembangunan baik antar golongan penghasilan maupun antar wilayah di Provinsi Papua.
- c. Sasaran visi ketiga yaitu **‘Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, Daya Saing dan Inovasi Daerah’** akan dicapai melalui akan tercapai dengan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang profesional dan menciptakan iklim yang kondusif untuk berlangsungnya pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, selain penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur daerah, pembangunan sumber daya manusia yang semakin mempunyai keahlian yang dibutuhkan, regulasi yang semakin mendorong terciptanya produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam perspektif tersebut, indikator indeks pelayanan publik, indeks kepemimpinan kepala daerah dan indeks daya saing daerah dapat meningkat secara signifikan dan akan menunjukkan Provinsi Papua sebagai satu wilayah yang terkemuka dan kondusif bagi penanaman modal sektor agroindustri, ekonomi biru dan ekonomi kreatif.
- d. Sasaran visi keempat yaitu **‘Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia** akan dicapai melalui akselerasi Papua Cerdas yang tidak hanya mencakup wajib belajar dan pendidikan formal di semua jenjang pendidikan tapi juga menyangkut program-program pendidikan yang terintegrasi dengan penciptaan daya saing daerah di berbagai bidang sesuai dengan zaman dan kemajuan teknologi informasi. Dalam perspektif tersebut, indeks modal manusia dan indeks pembangunan Manusia Provinsi Papua dalam periode tahun 2025-2045 minimal harus mengalami lompatan yang cukup jauh diatas capaian angka rata-rata nasional.
- e. Sasaran visi keenam yaitu **‘Pelestarian ekologi dan Penurunan emisi GRK menuju net zero emmission’** akan dicapai melalui fasilitasi pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, fasilitasi peningkatan efisiensi energi, pengelolaan limbah yang berkelanjutan, perlindungan hutan dan lahan basah, edukasi masyarakat, dukungan riset dan inovasi, serta kerjasama dengan multi-stakeholder dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Dalam perspektif tersebut, diharapkan terjadi Penurunan intensitas emisi GRK yang cukup drastis di Papua selama periode tahun 2025-2045.

4.2 MISI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025-2045

Visi daerah Provinsi Papua selanjutnya diturunkan ke dalam 8 (delapan) misi daerah Provinsi Papua tahun 2025-2045 yaitu:

- a. **Misi 1: Transformasi sosial untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas dan inklusif**, merupakan satu landasan gerak langkah bagi seluruh segenap pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan percepatan Papua Sehat, Cerdas dan Produktif. Dalam perspektif ini. Pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan sistem jaminan kesejahteraan sosial terutama bagi OAP harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah;
- b. **Misi 2: Transformasi ekonomi untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, maju dan produktif**, menjadi komitmen dan gerakan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif berkelanjutan terutama dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan pendapatan yang berkelanjutan bagi masyarakat Papua. Selain itu, upaya ini penting dalam menciptakan nilai tambah dan produktivitas yang berkelanjutan pada sektor-sektor ekonomi potensial daerah terutama pertanian, agroindustri, perikanan dan kelautan, pariwisata dan ekonomi kreatif.
- c. **Misi 3: Transformasi tata kelola untuk mewujudkan tata kelola yang efektif dan bebas dari korupsi**, merupakan upaya untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah secara profesional, modern dan akuntabel. Dalam perspektif tersebut, transformasi tata kelola juga akan menjamin terlaksananya transformasi kesejahteraan sosial dan transformasi ekonomi yang akan terkait langsung dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.
- d. **Misi 4: Keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah**, merupakan upaya melaksanakan penggalangan potensi keamanan dan ketertiban wilayah secara berkelanjutan yang berbasis pada supremasi hukum, iklim demokrasi yang kondusif dan ketahanan ekonomi daerah yang fundamental sehingga akan menciptakan kondisi wilayah yang stabil dan kondusif dalam melaksanakan transformasi kesejahteraan sosial, ekonomi dan tata kelola.
- e. **Misi 5: Pembangunan masyarakat yang berketahanan dari sisi sosial budaya dan ekologi**, merupakan upaya untuk menginternalisasikan sistem sosial, agama dan kearifan kebudayaan lokal dalam mewarnai dan memberikan nilai tambah bagi transformasi kesejahteraan sosial, ekonomi dan tata kelola. Masyarakat Papua yang tangguh akan merujuk pada kemampuan masyarakat Papua untuk menghadapi, menanggulangi, dan pulih dari berbagai tantangan sosial, ekonomi, politik, lingkungan, dan budaya yang potensial mengancam di masa depan;
- f. **Misi 6: Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan**, merupakan upaya untuk menciptakan pembangunan daerah yang lebih seimbang dalam hal distribusi kekayaan, kesempatan, dan manfaat pembangunan, dan pada akhirnya tercipta kualitas hidup yang lebih merata diantara variasi dan perbedaan yang ada diantara berbagai wilayah yang ada di Provinsi Papua

- g. **Misi 7: Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan mudah diakses, serta kemandirian pangan**, merupakan upaya percepatan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang meningkatkan akses konektivitas antar wilayah, penyediaan sumber daya energi, perumahan dan pemukiman, sanitasi, telekomunikasi dan sarana prasarana infrastruktur lainnya yang akan menjadi kondisi perlu bagi terjadinya transformasi kesejahteraan sosial, ekonomi dan tata kelola.
- h. **Misi 8: Peningkatan kapasitas pemerintahan dan masyarakat yang dapat menjalankan pembangunan secara berkesinambungan**, merupakan upaya untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang seimbang dan berkelanjutan. Misi ini mencerminkan kesadaran akan perlunya menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Misi RPJPD Provinsi Papua tahun 2025-2045 merupakan hasil penyelarasan kontekstual Papua dengan dokumen RIPP 2022-2041 dan RPJMN 2025-2045. Keselarasan antara visi dan misi Provinsi Papua dengan dokumen RIPP dan RPJPN dapat dilihat dalam Gambar 0.1.

Gambar 0.1 Penyelarasan RPJPN 2025-2045 dan RIPP 2022-2041 dalam RPJPD Papua 2025-2045



Dalam Gambar 0.1 dapat dilihat bahwa delapan misi pembangunan provinsi papua selaras dengan delapan misi pembangunan dalam RPJPN 2025-2045. Sedangkan misi RIPP 2022-2041 lebih sempit dan fokus pada tiga misi utama yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif telah tercakup ke dalam delapan visi RPJPD Propinsi Papua 2025-2045.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok pembangunan daerah merupakan titik antara yang akan dilalui oleh daerah dalam mencapai visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah sesuai dengan tahapan dan koridor pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Pemetaan terhadap arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan dilakukan dengan menganalisis rangkaian permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang dapat terdeteksi dari capaian kinerja maupun evaluasi pembangunan daerah pada masa yang lalu, selanjutnya rumusan arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah akan banyak berkaitan dengan penyelesaian masalah dan solusi yang paling layak. Selain itu, arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah juga mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta memperhitungkan dinamika wilayah dan tantangan yang diperkirakan akan muncul selama periode 2025-2045.

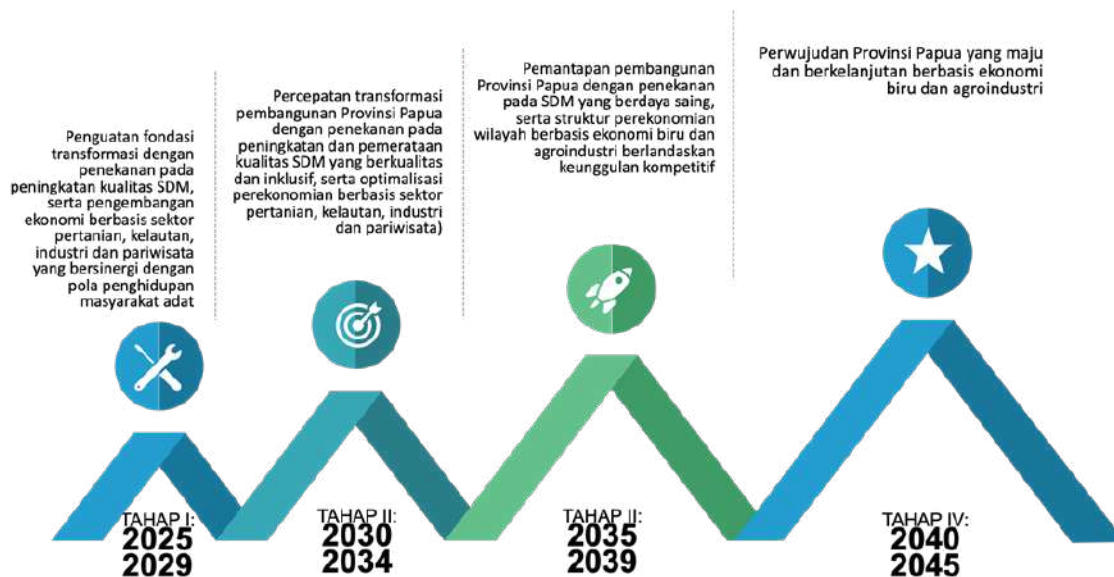
5.1 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan pembangunan daerah disusun dengan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah. Pentahapan per lima tahun mengacu pada tahap dan tematik pembangunan dalam RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Papua Tahun 2025-2045 yang disesuaikan dengan karakteristik dan dinamika isu strategis di Papua. Sesuai dengan siklus dan skema perencanaan pembangunan daerah, Pelaksanaan RPJPD Provinsi Papua tahun 2025-2045 akan terbagi kedalam 4 (empat) tahapan periode pelaksanaan sesuai dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua, yang terdiri dari:

- a. Pelaksanaan RPJPD Tahap Pertama yang akan berlangsung dalam masa pemberlakuan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2025-2029 dengan tema **penguatan fondasi transformasi dengan penekanan pada peningkatan kualitas SDM, serta pengembangan ekonomi berbasis sektor pertanian, kelautan, industri dan pariwisata yang bersinergi dengan pola penghidupan masyarakat adat;**
- b. Pelaksanaan RPJPD Tahap Kedua yang akan berlangsung dalam masa pemberlakuan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2030-2034, dengan tema **percepatan transformasi pembangunan Provinsi Papua dengan penekanan pada peningkatan dan pemerataan kualitas SDM yang berkualitas dan inklusif, serta optimalisasi perekonomian berbasis sektor pertanian, kelautan, industri dan pariwisata;**
- c. Pelaksanaan RPJPD Tahap Ketiga yang akan berlangsung dalam masa pemberlakuan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2035-2039, dengan tema **pemantapan pembangunan Provinsi Papua dengan penekanan pada SDM yang berdaya saing, serta struktur perekonomian wilayah berbasis ekonomi biru dan agroindustri berlandaskan keunggulan kompetitif; dan**

- d. Pelaksanaan RPJPD Tahap Keempat yang akan berlangsung dalam masa pemberlakuan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2040-2045, dengan tema **perwujudan Provinsi Papua yang maju dan berkelanjutan berbasis ekonomi biru, agroindustri dan ekonomi kreatif.**

Gambar 0.1 Tahapan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2025-2045



5.1.1 Tahap Pertama (2025-2029)

Tahap pertama pelaksanaan RPJPD Provinsi Papua yang terwujud dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode tahun 2025-2029 dengan tema Penguatan fondasi transformasi dengan penekanan pada peningkatan kualitas SDM, serta pengembangan ekonomi berbasis sektor pertanian, kelautan, industri dan pariwisata yang bersinergi dengan pola kehidupan masyarakat adat.

Transformasi Sosial akan berfokus pada upaya Pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Transformasi Ekonomi akan difokuskan pada upaya untuk Penguatan klaster-klaster ekonomi pertanian, kelautan, industri dan pariwisata dengan penekanan pada hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja, pada saat yang sama juga akan diperkuat adanya Transformasi Tata kelola dengan Kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.

5.1.2 Tahap Kedua (2030-2034)

Tahap Kedua pelaksanaan RPJPD Provinsi Papua yang terwujud dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode tahun 2030-2034 akan diarahkan pada upaya Percepatan transformasi pembangunan Provinsi Papua dengan penekanan pada peningkatan dan pemerataan kualitas SDM yang berkualitas dan inklusif, serta optimalisasi perekonomian berbasis sektor pertanian, kelautan, industri dan pariwisata.

Transformasi Sosial akan difokuskan pada upaya Percepatan pemerataan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif. Kemudian dalam lingkup upaya Transformasi Ekonomi akan difokuskan pada upaya Peningkatan produktivitas

secara masif melalui keterkaitan antar klaster ekonomi, perluasan hilirisasi SDA dan perluasan akses pasar sektor pertanian, kelautan, industri dan pariwisata. Pada saat yang sama juga akan diperkuat adanya Transformasi Tata kelola akan berfokus pada upaya Kelembagaan kolaboratif SDM ASN berkualitas, regulasi berbasis teknologi-informatif, partai politik berintegritas, dan masyarakat sipil partisipatif.

5.1.3 Tahap Ketiga (2034-2039)

Tahap Ketiga pelaksanaan RPJPD Provinsi Papua yang terwujud dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode tahun 2030-2034 akan diarahkan pada upaya Pemantapan pembangunan Provinsi Papua dengan penekanan pada SDM yang berdaya saing, serta struktur perekonomian wilayah berbasis ekonomi biru dan agroindustri berlandaskan keunggulan kompetitif.

Transformasi Sosial akan difokuskan pada upaya Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan. Kemudian dalam lingkup upaya Transformasi Ekonomi akan difokuskan pada upaya Struktur perekonomian wilayah Papua berbasis ekonomi biru dan agroindustri berlandaskan keunggulan kompetitif. Pada saat yang sama juga akan diperkuat adanya Transformasi Tata kelola akan berfokus pada upaya Kelembagaan adaptif, SDM ASN kompetitif, partai politik modern, regulasi adaptif, dan masyarakat sipil mandiri.

Tabel 0.2 Arah Kebijakan Transformasi Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2025-2045

VISI/ TRANFORMASI	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
Visi: PROVINSI PAPUA MAJU DAN BERKELANJUTAN BERBASIS EKONOMI BIRU, AGROINDUSTRI DAN EKONOMI KREATIF				
TEMA	Penguatan fondasi transformasi dengan penekanan pada peningkatan kualitas SDM, serta pengembangan ekonomi berbasis sektor pertanian, kelautan, industri dan pariwisata yang bersinergi dengan pola penghidupan masyarakat adat	Percepatan transformasi pembangunan Provinsi Papua dengan penekanan pada peningkatan dan pemerataan kualitas SDM yang berkualitas dan inklusif, serta optimalisasi perekonomian berbasis sektor pertanian, kelautan, industri dan pariwisata	Pemantapan pembangunan Provinsi Papua dengan penekanan pada SDM yang berdaya saing, serta struktur perekonomian wilayah berbasis ekonomi biru, agroindustri dan ekonomi kreatif berlandaskan keunggulan kompetitif	Perwujudan Provinsi Papua yang maju dan berkelanjutan berbasis ekonomi biru, agroindustri dan ekonomi kreatif
Transformasi Sosial	Pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial	Percepatan pemerataan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif	Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan	SDM Papua yang unggul
Transformasi Ekonomi	Penguatan klaster-klaster ekonomi pertanian, kelautan, industri dan pariwisata dengan penekanan pada hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan produktivitas secara masif melalui keterkaitan antar klaster ekonomi, perluasan hilirisasi SDA dan perluasan akses pasar sektor pertanian, kelautan, industri dan pariwisata	Struktur perekonomian wilayah Papua berbasis ekonomi biru, agroindustri dan ekonomi kreatif berlandaskan keunggulan kompetitif	Struktur perekonomian wilayah Papua berbasis ekonomi biru, agroindustri dan ekonomi kreatif bernilai tambah tinggi, berlandaskan keunggulan kompetitif, serta terhubung dengan jaringan pasar nasional dan global
Transformasi Tata Kelola	Kelembagaan tepat fungsi , peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil	Kelembagaan kolaboratif SDM ASN berkualitas, regulasi berbasis teknologi-informatif, partai politik berintegritas, dan masyarakat sipil partisipatif	Kelembagaan adaptif , SDM ASN kompetitif, partai politik modern, regulasi adaptif, dan masyarakat sipil mandiri	Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif

5.1.4 Tahap Keempat (2040-2045)

Tahap Keempat pelaksanaan RPJPD Provinsi Papua yang akan terwujud dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode tahun 2040-2045 akan diarahkan pada pencapaian Perwujudan Provinsi Papua yang maju dan berkelanjutan berbasis ekonomi biru dan agroindustri. Transformasi Sosial yang ditandai dengan terwujudnya SDM Papua yang unggul. Kemudian dalam lingkup upaya Transformasi Ekonomi sudah terlihat struktur perekonomian wilayah Papua berbasis ekonomi biru dan agroindustri bernilai tambah tinggi, berlandaskan keunggulan kompetitif, serta terhubung dengan jaringan pasar nasional dan global. Pada saat yang sama Transformasi Tata kelola akan terwujud dengan eksisnya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.

5.2 SASARAN POKOK

5.2.1 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan Daerah

Sasaran pokok, arah (tujuan) pembangunan daerah dan indikator utama pembangunan daerah merupakan rangkaian kerangka kerja logis strategi yang akan diterapkan dalam mencapai visi dan misi jangka panjang daerah yang sekaligus akan berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi RPJPN 2025-2045 sesuai dengan konteks, karakteristik dan potensi wilayah Provinsi Papua pada umumnya. Sasaran pokok pembangunan daerah Provinsi Papua tahun 2025-2045 dirumuskan dari 17 (tujuh belas) Arah Kebijakan Pembangunan Daerah yang juga dilengkapi dengan 45 indikator utama yang menjadi alat ukur atas kemajuan pelaksanaan masing-masing arah kebijakan pembangunan daerah tersebut. Penentuan sasaran pokok pembangunan daerah tersebut juga didasarkan pada hasil analisis konsolidasi sumber perencanaan pembangunan daerah Provinsi Papua, yaitu: arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2025-2045), Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2022-2041, Evaluasi RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005-2025 dan hasil identifikasi isu strategis jangka panjang daerah. Selanjutnya, uraian rangkaian sasaran pokok, arah pembangunan daerah, indikator utama pembangunan daerah, antara lain ditampilkan tabel berikut ini:

Tabel 0.3 Sasaran Pokok Pembangunan Daerah

Sasaran Pokok Pembangunan Daerah		Arah Pembangunan Daerah		No	Indikator Utama	Target Kinerja	
1	Terwujudnya Papua Sehat	IE1	Kesehatan untuk Semua	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	69,20	76,15
				2	Kesehatan Ibu dan Anak:		
				a.	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	239	28
				b.	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	26,40	12,10
				3	Penanganan Tuberkulosis dan Malaria:		
				a.	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	83,00	95,00
				b.	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	82,80	98,00
				c.	Cakupan kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	1,00	9,00
				4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	99,50	99,50
				2	Terwujudnya Papua Cerdas	IE2	Pendidikan Berkualitas yang Merata
a.	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:						
	i) Literasi Membaca	11,11	66,67				
	ii) Numerasi	0,00-11,11	55,56-66,67				
b.	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:						
	i) Literasi Membaca	21,22-23,22	59,85-61,85				
	ii) Numerasi	15,84-17,84	54,94-56,94				
c.	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	7,60 – 7,62	9,52 – 9,67				
d.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,41-12,19	12,54-16,70				

Sasaran Pokok Pembangunan Daerah		Arah Pembangunan Daerah		No	Indikator Utama	Target Kinerja	
				6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	9,34	9,34 – 11,29
				7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	71,21	85,00
3	Terwujudnya Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial afirmatif terutama Bagi OAP	IE3	Perlindungan Sosial yang Adaptif	8	Tingkat Kemiskinan (%)	16,00-16,50	5,25-6,25
				9	Cakupan Kepersertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	72,55	98,32
				10	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	15	45
				11	Kontribusi PDRB Sektor Unggulan Lokal :		
4	Terwujudnya Papua Produktif berbasis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan yang ditopang dengan penerapan IPTEK dan Inovasi	IE4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	a.	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	2,93-2,95	5,81-6,49
				b.	Kontribusi PDRB Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%)	14,3	30,67
				12	Pengembangan Pariwisata		
				a.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	1,23	1,72
				b.	Jumlah Tamu Wisatawan (Hotel Berbintang) (ribu orang)*	8,10	16,20
				13	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	5,63 - 6,57	6,69 - 7,43
				14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
				a.	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%)	13,12	16,13
				b.	Proporsi Jumlah Industri Mikro dan Kecil pada level provinsi (%)	1,29	2,65
				c.	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	0,58	1,23
				d.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,17	3,14
				e.	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	2,2	4,94
15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,30-6,80	1,40-2,42				
	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	15,00	50,00				
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	52,31	89,50				

Sasaran Pokok Pembangunan Daerah		Arah Pembangunan Daerah		No	Indikator Utama	Target Kinerja			
				17	Persentase usaha Industri kecil dan mikro yang melakukan inovasi produk, pemasaran, distribusi dan/atau teknologi (%)	49,5	75,72		
				IE5 Penerapan Ekonomi Hijau	18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			
					a.	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	77,87	89,61	
					b.	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	26,61	56,18	
				IE6 Transformasi Digital	19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,40	7,00	
					IE7 Integrasi Ekonomi Domestik	20	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Provinsi	9,5	5,48
				21		Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	40,17	46,54	
				22		Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	36,60	51,38	
				5 Terwujudnya pembangunan sektoral dan kewilayahan yang berimbang		IE8 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan	
					a.		Proporsi Kontribusi PDRB Papua terhadap Nasional	0,21	0,25
b.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	35,46	100						
c.	Persentase Desa Mandiri (%)	0	60,00						
d.	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	130,00	100,00						
e.	Indeks Desa Membangun	0,5747	0,7184						
6 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik, adaptif dan profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	IE9 Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	24	Indeks Reformasi Hukum	70,00	100,00				
		25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,00	5,00				
		26	Indeks Pelayanan Publik	1,13	5,00				
		27	Indeks Integritas Nasional	67,13	80,86				
		28	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan						
		a.	Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK)	78,00	100				
		b.	Persentase Kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0-17 tahun	93,00	100				

Sasaran Pokok Pembangunan Daerah	Arah Pembangunan Daerah	No	Indikator Utama	Target Kinerja			
7	Terwujudnya Stabilitas dan Kondusivitas wilayah Papua dalam Tataan Otonomi Khusus Papua	IE10	Kondusivitas wilayah yang berbasis pada harmonisasi keragaman masyarakat	29	Tingkat kondusivitas wilayah		
				a.	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	70,00	100,00
				b.	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	60,00	80,00
				30	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	69,31	86,69
				31	Indeks Demokrasi Indonesia	Sedang	Tinggi
		IE11	Stabilitas Ekonomi Makro	32	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,53	7,90
				33	Tingkat Inflasi (%)	3,1 - 4,4	1,0 - 3,6
				34	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan		
				a.	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *	16,64	45,3
				b.	Proporsi Asuransi dan Dana Pensiun terhadap PDRB (%)	0,28	4,84
				c.	Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan		2.421,63
		IE12	Otonomi Khusus Papua yang mensejahterakan Orang Asli Papua	d.	Total Kredit terhadap PDRB (%)	47,73	49,83
				35	Inklusi Keuangan (%)		97,40
				36	Indeks Pembangunan Manusia Orang Asli Papua (OAP)		
				a.	Usia Harapan Hidup (UHH) penduduk OAP (Tahun)	46,28	56,23
8	Terwujudnya Ketahanan Sosial dan Budaya Dalam keluarga, komunitas dan Masyarakat Papua	IE13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	b.	Rerata Lama Sekolah penduduk OAP (Tahun)	7,44	12,59
				c.	Daya Beli Penduduk OAP (Rp.)	0,8	1,2
		IE14	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	44,97 - 44,99	55,12 - 55,83
				38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,46 - 76,57	83,87 - 85,00
				39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	39,38 - 39,51	43,43 - 44,36
IE15	Lingkungan Hidup Berkualitas	40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,48	0,23 - 0,22		
		41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,389	0,624		

Sasaran Pokok Pembangunan Daerah	Arah Pembangunan Daerah	No	Indikator Utama	Target Kinerja			
		42	Kualitas Lingkungan Hidup				
		a.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	79,31	80,08		
		b.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	7	50		
		c.	Pengelolaan Sampah				
		i)	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	6,21	90		
		ii)	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	27,11	100		
9	Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur sosial, ekonomi dan pelayanan publik secara berkelanjutan yang sejalan dengan transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola	IE16	Berketahanan Energi, Air, Infrastruktur Konektivitas dan Kemandirian Pangan	43	Ketahanan Energi, Air, Infrastruktur Konektivitas dan Kemandirian Pangan		
				a.	Ketahanan Energi		
				i)	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	318	1190
				ii)	Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	90	60
				iii)	Cakupan rumah tangga yang memiliki akses listrik (PLN dan nonPLN)	85	100
				b.	Ketahanan Pangan		
				i)	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	34,04	5,43
				ii)	Indeks Ketahanan Pangan		5
				c.	Ketahanan Air		
				i)	Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	0	2,12
ii)	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	26,2	100				
10	Terwujudnya peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan masyarakat yang dapat menjalankan pembangunan secara berkesinambungan	IE17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44	Indeks Risiko Bencana (IRB)	206,13	175,54-149,30
				45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		
				a.	Kumulatif	23,19	57,86
				b.	Tahunan	39,01	97,35

5.2.2 Arah Kebijakan Transformasi

Arah kebijakan transformasi pembangunan daerah Provinsi Papua menggambarkan upaya transformasi pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh segenap stakeholder pembangunan daerah di Provinsi Papua dalam membawa Provinsi Papua pada satu titik perubahan yang drastis dan didasarkan pada konteks kekinian yang mempengaruhinya. Arah Kebijakan Transformasi juga mencakup langkah luar biasa dan mendasar yang membawa perubahan positif dan berkelanjutan, menciptakan keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya terutama bagi manusia dan peradapan Papua di masa mendatang.

Secara teknis, Arah kebijakan transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola dirumuskan dari berbagai analisis relevansi penyelesaian permasalahan pembangunan daerah Provinsi Papua terkini, baik dari hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005-2025, identifikasi dari Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (RIPPP), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua dan kajian-kajian tematik serta sektoral pembangunan daerah Provinsi Papua lainnya.

Gambar 0.4 Arah Kebijakan Transformasi Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2025-2045

Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi					
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua		
Transformasi sosial untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas dan inklusif	1	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat melalui peningkatan komitmen/ dukungan kebijakan daerah dan implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	✓	✓	✓	✓										✓	✓		
	2	Peningkatan kualitas tata kelola serta pemerataan akses dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan, baik pelayanan kesehatan primer maupun rujukan sesuai standar dan terakreditasi melalui peningkatan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan mengutamakan OAP serta <i>telemedicine</i> , dan <i>mobile health services</i> (pelayanan kesehatan bergerak) yang disinergikan dengan moda transportasi lainnya untuk daerah yang sulit dijangkau.	✓	✓	✓	✓											✓	✓	
	3	Pengembangan kemitraan dengan swasta dan kelompok agama dalam penyediaan layanan kesehatan di wilayah sulit akses.	✓	✓													✓		
	4	Percepatan perbaikan gizi masyarakat, terutama penurunan	✓	✓													✓	✓	

Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi			
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua
	prevalensi <i>stunting</i> dengan pendekatan integrasi lintas sektor terutama melalui peningkatan perilaku dan lingkungan sehat serta pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal.																
5	Percepatan pengendalian penyakit menular dan faktor risiko penyakit tidak menular, termasuk percepatan eliminasi malaria.	✓	✓	✓	✓									✓	✓		
6	Percepatan pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui afirmasi pendidikan, pendayagunaan, peningkatan tenaga medis dan tenaga kesehatan lokal dengan mengutamakan OAP, serta pengembangan insentif khusus bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah sulit akses dan perbatasan.	✓	✓	✓	✓									✓			
7	Pendampingan daerah dengan kapasitas sistem kesehatan yang rendah untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.	✓	✓											✓			
8	Pemenuhan sarana prasarana di fasilitas layanan kesehatan yang memadai dan merata di semua wilayah, termasuk jaringan	✓	✓											✓			

Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi			
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua
	internet, listrik dan sarana prasarana penanganan limbah medis.																
9	Percepatan peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja, kesehatan reproduksi, dan keluarga berencana (KB);	✓	✓	✓	✓											✓	
10	Peningkatan pembudayaan olahraga di masyarakat, tata kelola dalam rangka peningkatan budaya dan prestasi olahraga serta kualitas pembinaan olahraga pendidikan dan olahraga prestasi.	✓	✓	✓	✓											✓	
11	Peningkatan pemerataan akses dan kualitas fasilitas pelayanan pendidikan di semua jenjang melalui sekolah berpola asrama.	✓	✓	✓	✓									✓			
12	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	✓	✓											✓			
13	Percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai dengan komoditas unggulan dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata.		✓	✓	✓									✓			
14	Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk	✓	✓	✓										✓			

Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi			
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua
	daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil, penyediaan asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka.																
15	Peningkatan kompetensi, pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3 dengan mengutamakan OAP.	✓	✓	✓										✓	✓		
16	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi wilayah di bidang industri, pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata, serta keterkaitan dengan DUDI.	✓	✓	✓	✓									✓			
17	Penguatan pendidikan sepanjang hayat dan kecakapan hidup (<i>life skills</i>) yang berbasis kelembagaan komunitas (lembaga agama, lembaga adat, dan lembaga sosial lainnya).	✓	✓	✓	✓									✓			

Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi			
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua
	18	Peningkatan kualitas pengajaran, pembelajaran, penelitian dan inovasi	✓	✓	✓											✓	
	19	Peningkatan penjaminan mutu dan tata kelola penyelenggaraan layanan pendidikan	✓	✓	✓											✓	
	20	Pengentasan kemiskinan terutama pada daerah afirmasi melalui perlindungan sosial adaptif.	✓	✓	✓	✓									✓		
	21	Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.	✓	✓	✓	✓									✓		
	22	Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran.	✓	✓											✓		
	23	Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih	✓	✓	✓	✓									✓		

Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi			
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua
	berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.																
24	Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.	✓	✓	✓	✓									✓			
25	Penguatan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10% penduduk adalah	✓	✓	✓	✓									✓			

Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi			
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua
	26	lansia) dan penyandang disabilitas.															
	26	Peningkatan pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah 3T.	✓	✓											✓		
	27	Peningkatan jangkauan pendataan dan pemanfaatannya dalam penyusunan dan pelaksanaan program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berdasarkan pada data terpilah Orang Asli Papua (OAP) yang kontekstual Papua	✓	✓	✓	✓										✓	
Transformasi ekonomi untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, maju dan produktif	1	Percepatan hilirisasi komoditas unggulan bernilai tambah tinggi pada sektor pertanian (tanaman pangan dan hortikultura), perkebunan, dan perikanan melalui optimalisasi kawasan strategis eksisting seperti kawasan ekonomi berbasis pariwisata, sentra kelautan dan perikanan terpadu, penguatan sentra-sentra produksi di kawasan perdesaan serta sentra pengolahan dan pasar di kawasan perkotaan.	✓	✓	✓										✓		

Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi				
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua	
	2	Peningkatan pemberdayaan ekonomi di kawasan perbatasan negara melalui peningkatan jiwa kewirausahaan dan inovasi pengusaha muda.	✓	✓	✓	✓										✓		
	3	Peningkatan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.	✓	✓												✓		
	4	Peningkatan keterkaitan IKM, UMKM, dan BUMKam pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha		✓	✓	✓										✓		
	5	Peningkatan literasi keuangan dan digital bagi IKM, UMKM, BUMKam, dan koperasi	✓	✓												✓		
	6	Peningkatan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung kegiatan pemasaran komoditas unggulan.	✓	✓	✓	✓										✓		
	7	Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional dengan Asia Timur, Pasifik, dan Australia.			✓	✓										✓		

Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi			
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua
	8	Pelaksanaan afirmasi <i>reskilling</i> dan <i>upskilling</i> bagi angkatan kerja, terutama di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata melalui penguatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi dan pengembangan pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan.	✓	✓	✓										✓		
	9	Pengembangan pariwisata berkelanjutan melalui peningkatan aspek atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan kelembagaan, penguatan daya saing dan citra pariwisata, peningkatan kualitas SDM pariwisata, penguatan pemberdayaan UMKM di sektor pariwisata, serta peningkatan pemanfaatan teknologi digital.	✓	✓	✓										✓		
	10	Pengembangan kawasan pariwisata premium yang berkelanjutan berbasis bahari dengan target wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara.		✓	✓	✓									✓		
	11	Pengembangan pariwisata lokal berbasis alam yang memiliki daya ungkit perekonomian untuk mendukung pusat pertumbuhan dan perekonomian masyarakat.	✓	✓	✓	✓									✓		

Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi			
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua
	12		✓	✓	✓										✓		
	13			✓	✓										✓		
	14	✓	✓												✓		
	15	✓	✓												✓		

Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi			
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua
	(<i>isolated mini/micro-grid</i>) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.																
16	Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan <i>broadband</i> hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk		✓	✓	✓									✓			

Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi			
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua
	29	pusat pertumbuhan dan kawasan pengembangan ekonomi		✓	✓	✓											✓
Transformasi tata kelola untuk mewujudkan tata kelola yang efektif dan bebas dari korupsi	1	Optimasi dan harmonisasi regulasi dengan proses praregulasi yang memadai di daerah, termasuk untuk pengelolaan sumber daya kelautan, pertanian, dan perkebunan.	✓	✓											✓		
	2	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	✓	✓	✓	✓									✓		
	3	Penguatan Integritas Partai Politik.	✓	✓	✓	✓									✓		
	4	Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.	✓	✓	✓	✓									✓		
	5	Pengembangan <i>smart government</i> serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.	✓	✓											✓		
	6	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit	✓	✓	✓	✓									✓		

Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi			
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua
	SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.																
7	Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa, serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.	✓	✓	✓	✓									✓			
8	Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan publik terutama Orang Asli Papua (OAP) hingga ke tingkat kampung.	✓	✓	✓	✓									✓			
9	Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.	✓	✓											✓			
10	Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus berbasis kinerja yang lebih akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.	✓	✓	✓	✓									✓			
11	Peningkatan jangkauan terhadap masyarakat yang masih belum memiliki dokumen kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran.	✓	✓											✓			
12	Percepatan Desain Penataan Daerah	✓	✓												✓		
13	Pengembangan Kelembagaan birokrasi yang efektif dan inklusif	✓	✓	✓											✓		

Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi			
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua
	14	Pelayanan dan penegakkan hukum yang inklusif	✓	✓	✓	✓										✓	
	15	Peningkatan kesadaran dan meleak budaya hukum serta antikorupsi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat	✓	✓	✓	✓										✓	
	16	Peningkatan partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam pembangunan	✓	✓	✓	✓										✓	
	17	Peningkatan pemenuhan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	✓	✓	✓	✓										✓	
	18	Peningkatan kepastian hukum, kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat adat	✓	✓	✓	✓										✓	
Keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah	1	Peningkatan fungsi kawasan perbatasan negara dalam menopang perkembangan kawasan pusat pertumbuhan dan kawasan pengembangan ekonomi didukung oleh peningkatan konektivitas dan mobilitas pada kawasan perbatasan.	✓	✓	✓										✓		
	2	Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan kesejahteraan melalui strategi penguatan komunikasi sosial yang	✓	✓												✓	

Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)									Referensi		
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua
	inklusif dengan tokoh adat, agama, dan masyarakat.																
3	Pengembangan komunikasi sosial yang inklusif dalam mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat	✓	✓	✓	✓											✓	
4	Penguatan sistem pertahanan dan keamanan dalam mendukung pembangunan kesejahteraan yang berkelanjutan	✓	✓	✓	✓											✓	
5	Pengembangan proses pembangunan perdamaian peace building yang berkelanjutan	✓	✓	✓	✓											✓	
6	Peningkatan pertahanan dan keamanan perbatasan negara.	✓	✓	✓	✓									✓			
7	Peningkatan kerja sama antarpihak dan penguatan regulasi untuk mewujudkan kedaulatan, terutama di pulau-pulau belum bernama dan perbatasan laut yang mencakup keamanan dan eksplorasi sumber daya kelautan (mencegah IUU), terutama di WPP 717 (berbatasan dengan perairan Palau).	✓	✓	✓										✓			
8	Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial.	✓	✓	✓	✓									✓			
9	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan	✓	✓											✓			

Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi			
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua
	retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, obligasi biru dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD) termasuk dana otonomi khusus, sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.																
	10 Penguatan pengendalian inflasi daerah.	✓	✓	✓	✓										✓		
Pembangunan masyarakat yang berketahanan dari sisi sosial budaya dan ekologi	1 Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama.	✓	✓												✓		
	2 Peningkatan peran kebudayaan yang berlandaskan nilai-nilai luhur budaya Papua, serta penguatan kerukunan umat beragama dengan pelibatan tokoh adat dan agama.	✓	✓	✓	✓										✓		
	3 Penguatan regulasi terkait pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah adat/ulayat, peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat adat, dan	✓	✓												✓		

Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi			
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua
	pemberdayaan masyarakat adat dalam pembangunan.																
4	Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat.	✓	✓	✓	✓									✓			
5	Peningkatan peran kebudayaan yang berlandaskan nilai-nilai luhur budaya Papua dalam kesatuan budaya bangsa dan pengembangan etos kerja	✓	✓												✓		
6	Pengembangan pusat dan kerja sama kebudayaan Papua sebagai bagian dari khazanah kebudayaan nasional		✓	✓	✓										✓		
7	Penguatan moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial	✓	✓												✓		
8	Pengembangan sentra produksi pangan dalam rangka pengembangan kemandirian pangan lokal khususnya di kawasan transmigrasi yang didukung oleh sarana dan prasarana, SDM unggul dan kompeten, serta modernisasi teknologi pertanian serta penerapan pertanian regeneratif.	✓	✓											✓			
9	Pengurangan risiko kebencanaan khususnya bencana gempa bumi	✓	✓	✓	✓									✓			

Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi			
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua
	dan banjir melalui penguatan mitigasi, kesiapsiagaan, dan sistem peringatan dini bencana alam.																
	10 Penguatan kesiapsiagaan dalam menghadapi multibencana	✓	✓	✓	✓											✓	
	11 Percepatan penanganan saat kejadian bencana serta pemulihan pasca bencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik	✓	✓	✓	✓											✓	
	12 Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan, daratan, dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (<i>home range</i>) dan konektivitas spesies burung dan satwa lainnya yang dilindungi.	✓	✓	✓	✓									✓			
	13 Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan karakteristik kepulauan, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana.	✓	✓											✓			
	14 Optimalisasi pemanfaatan dan perlindungan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.	✓	✓	✓	✓									✓			

Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi			
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua
	15	Penguatan dan diversifikasi usaha subsektor perikanan untuk mendukung kemandirian pangan dan peningkatan nilai tambah dan daya saing industri perikanan.	✓	✓											✓		
	16	Peningkatan kapasitas pemerintah dan <i>stakeholders</i> dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut agar lebih adaptif terhadap risiko perubahan iklim.	✓	✓											✓		
	17	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung, khususnya pada masyarakat adat.	✓	✓	✓	✓									✓		
	18	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak, dengan pelibatan tokoh adat dan agama.	✓	✓	✓	✓									✓		
	19	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, terutama pada masyarakat adat melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta	✓	✓	✓	✓									✓		

Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi			
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua
	peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.																
20	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.	✓	✓	✓	✓											✓	
21	Pembangunan tampungan air serba guna untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat sehari-hari secara cepat.	✓	✓											✓			
22	Pengembangan irigasi baru yang disesuaikan dengan kategori lahan dan dilakukan secara selektif mempertimbangkan kesesuaian lahan dan prinsip keberlanjutan.	✓	✓											✓			
23	Pengembangan solusi berbasis alam untuk pengendalian banjir seperti perkuatan tanggul alami di sungai.	✓	✓	✓	✓									✓			
24	Pengembangan area yang didedikasikan sebagai kolam retensi.	✓	✓	✓										✓			
25	Penguatan karakter dan jati diri bangsa.	✓	✓	✓	✓									✓			
26	Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.	✓	✓	✓	✓									✓			
27	Pengembangan masyarakat Papua yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas air, air laut,	✓	✓												✓		

Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi						
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua			
Implementasi Transformasi	1	Penguatan kapasitas dan kelembagaan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di pemerintahan daerah untuk mendorong sinergi pusat-daerah serta mengoptimalkan pelayanan publik.	✓	✓	✓	✓											✓			
	2	Penguatan strategi tata kelola otonomi khusus Papua khususnya pengaturan kegiatan pembangunan yang difokuskan pada OAP dengan mempertimbangkan pembagian kewenangan.	✓	✓	✓													✓		
	3	Peningkatan peran Majelis Rakyat Papua dalam percepatan pembangunan.	✓	✓	✓	✓												✓		
	4	Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem.	✓	✓														✓		
	5	Penuntasan RDTR kab/kota serta kewenangan tata ruang laut.	✓	✓														✓		
	6	Peningkatan pelaksanaan reforma agraria.	✓	✓	✓	✓												✓		
	7	Pengembangan dan peningkatan pada pelabuhan simpul utama sebagai konektivitas dan hub ekspor ke kawasan Pasifik melalui		✓	✓	✓												✓		

Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi			
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua
	pengembangan Pelabuhan Depapre.																
8	Pemanfaatan ALKI III C secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global.			✓	✓										✓		
9	Pengembangan konektivitas <i>feeder</i> angkutan laut termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan sarana kapal RoRo (<i>Roll-On/Roll-Off</i>) angkutan barang sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah.		✓	✓	✓										✓		
10	Peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah Papua melalui pengembangan bandara utama (Sentani di Jayapura), pembangunan dan standardisasi <i>airstrip</i> , pengembangan bandara perairan (<i>waterbase</i>) dan <i>seaplane</i> sesuai dengan kondisi geografis, serta layanan penerbangan sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah.	✓	✓	✓											✓		
11	Percepatan penyelesaian jalan Trans Papua serta pembangunan dan peningkatan jalan termasuk jalan daerah sebagai bagian	✓	✓												✓		

Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi			
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua
	transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah.																
12	Pembangunan dan Peningkatan jalan dan jembatan yang terintegrasi;	✓	✓													✓	
13	Pembangunan dan Peningkatan konektivitas transportasi darat untuk mendukung distribusi barang dan mobilitas penumpang		✓	✓	✓											✓	
14	Pembangunan dan peningkatan konektivitas transportasi laut untuk mendukung distribusi barang dan mobilitas penumpang	✓	✓													✓	
15	Pembangunan dan Peningkatan konektivitas transportasi udara untuk mendukung distribusi barang dan mobilitas penumpang	✓	✓													✓	
16	Pembangunan waduk multiguna untuk memenuhi kebutuhan air baku, irigasi, dan energi listrik.		✓	✓										✓			
17	Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakteristik wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.		✓	✓	✓									✓			
18	Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal yang andal dan modern dalam melayani	✓	✓	✓										✓			

Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi			
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua
	mobilitas penumpang di kota sedang seperti Jayapura.																
19	Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.			✓	✓									✓			
20	Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.	✓	✓											✓			
21	Optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah kepulauan dan rawan air.		✓	✓	✓									✓			
22	Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan air minum dan sanitasi yang aman.	✓	✓	✓										✓			
23	Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.		✓	✓	✓									✓			

Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi			
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua
	24	Peningkatan lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal.	✓	✓											✓		
	25	Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang).	✓	✓	✓	✓									✓		
	26	Peningkatan konektivitas dan akses pelayanan dasar, terutama fasilitas kesehatan dan pendidikan.	✓	✓	✓	✓									✓		
	27	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.	✓	✓	✓	✓									✓		
	28	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi.	✓	✓											✓		
	29	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.	✓	✓	✓	✓									✓		
	30	Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.		✓	✓	✓									✓		

Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi				
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua	
	31	Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim.	✓	✓	✓	✓										✓		
	32	Penyediaan rumah layak huni yang berkelanjutan	✓	✓	✓	✓											✓	
	33	Penerapan bauran pendanaan dalam peningkatan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.	✓	✓	✓	✓										✓		
	34	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah, terutama untuk daerah afirmasi	✓	✓	✓	✓										✓		
	35	Peningkatan kolaborasi antarpemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan.	✓	✓	✓	✓										✓		
	36	Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan.		✓	✓	✓										✓		
	37	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan strategis, khususnya untuk pekerja.	✓	✓	✓	✓										✓		

Transformasi	Arah Kebijakan	Tahapan				Lokasi Prioritas (1/2/3)								Referensi						
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	Jayapura	Kep. Yapen	Biak Numfor	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	RPJPN 2024-2045	RIPPP 2022-2041	Analisis Kontekstual Papua			
	38	Peningkatan kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan.	✓	✓	✓	✓											✓			
	39	Pemenuhan akses air minum serta layanan sanitasi yang aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.	✓	✓														✓		

BAB VI PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun sebagai bentuk penjabaran dan/atau mengejawantahkan muatan-muatan yang terkandung dalam RPJPN Tahun 2025-2045. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sehingga pembangunan daerah harus mendukung pencapaian target kinerja pembangunan nasional. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen perencanaan perlu disusun untuk dapat menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara pusat dan daerah

RPJPD Provinsi Papua Tahun 2025-2045 memuat visi, sasaran visi, misi, arah (tujuan) pembangunan daerah, arah kebijakan transformasi dan sasaran pokok pembangunan daerah Provinsi Papua Tahun 2025-2045. Masing-masing komponen tersebut diinisiasi dengan pendekatan perencanaan terpadu yang mengkonsolidasikan analisis permasalahan dan isu strategis Provinsi Papua dan juga arahan yang diamanatkan oleh Pemerintah Pusat berupa Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (RIPPP) di samping juga dilakukan proses penyelarasan dengan dokumen RPJPN.

6.1 KAJIDAH PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI

6.1.1 Kaidah Pelaksanaan

RPJPD Provinsi Papua 2025-2045 akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan pembangunan di Provinsi Papua, terutama dalam hal:

- a. Penyusunan visi, misi, dan program calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah;
- b. Penyusunan tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program dalam RPJMD, Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan RKPD, Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah, serta dokumen perencanaan lainnya dan penyelenggaraan pemerintah daerah di Provinsi Papua;
- c. Merumuskan indikator dan pengukuran kinerja pimpinan daerah sesuai dengan arsitektur kinerja perencanaan daerah yang telah ditetapkan;
- d. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah maupun antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- e. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; serta
- f. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Adapun prinsip-prinsip kaidah pelaksanaan RPJPD Provinsi Papua 2025-2045 adalah sebagai berikut:

- a. Agar terjadi kesinambungan dalam penyusunan kebijakan daerah, maka masyarakat yang mencalonkan diri menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, di setiap tahapannya harus memperhatikan RPJPD Provinsi Papua Tahun 2025-2045 dan menjadikannya sebagai pedoman dalam menyusun Visi dan Misi kepala daerah, yang selanjutnya akan dituangkan ke dalam RPJMD Provinsi Papua;
- b. Lembaga eksekutif dan legislatif Provinsi Papua dengan didukung oleh instansi vertikal yang ada di wilayah Provinsi Papua dan masyarakat, termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan arah kebijakan dalam RPJPD Provinsi Papua Tahun 2025-2045;
- c. Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Papua, diwajibkan menyebarluaskan dokumen RPJPD ini kepada seluruh pemangku kepentingan daerah, terutama kepada calon Gubernur dan Wakil Gubernur melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua dan partai-partai politik di wilayah Provinsi Papua sehingga sasaran pembangunan 20 (dua puluh) tahun dapat dilaksanakan secara berkesinambungan;
- d. Gubernur dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJPD Provinsi Papua Tahun 2025-2045 dengan mengerahkan secara optimal semua potensi dan kekuatan sesuai sasaran pokok periode berkenaan;
- e. Dalam rangka implementasi RPJPD Provinsi Papua 2025-2045, Bappeda Provinsi Papua berkewajiban untuk melaksanakan penjabaran RPJPD ke dalam RPJMD.
- f. Bappeda wajib melakukan evaluasi pelaksanaan dan hasil RPJPD, yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perubahan RPJPD dengan pertimbangan bahwa: (a) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan menteri; (b) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan menteri; dan (c) terjadi perubahan yang mendasar.

Keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Papua dalam mewujudkan visi Provinsi Papua 2025-2045 yaitu **“Provinsi Papua Maju dan Berkelanjutan Berbasis Ekonomi Biru, Agroindustri dan Ekonomi Kreatif”** perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah dan daerah; (3) keberpihakan pembangunan kepada rakyat; dan (4) peran serta aktif segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan Provinsi Papua; serta (5) dalam rangka menjaga keseimbangan pembangunan dan menjaga kesinambungan rencana.

6.1.2 Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan RPJPD Provinsi

Tahapan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RPJPD Provinsi sebagaimana Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Dalam menyusun RPJPD provinsi, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi menggunakan Formulir E.1 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul menjadi Formulir E.20 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Lingkup Provinsi.
- b. Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi kepada Gubernur.
- c. Gubernur menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi, bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RPJPD provinsi untuk dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- d. Menteri Dalam Negeri menelaah hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi, antara lain mencakup pertimbangan dari landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti hasil musrenbang RPJPD provinsi, sinkronisasi dan sinergi dengan RPJPN, RTRW provinsi dan RPJPD dan RTRW provinsi lainnya.
- e. Hasil telaahan terhadap pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi disusun ke dalam Formulir E.2 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul menjadi Formulir E.22 Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi.
- f. Berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang provinsi yang dilakukan pada konsultasi rancangan akhir RPJPD provinsi, Menteri Dalam Negeri melakukan penilaian keselarasan antara provinsi satu dengan provinsi lainnya.
- g. Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing Gubernur.
- h. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk ditindaklanjuti, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah konsultasi dilakukan.

6.1.3 Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan RPJPD Provinsi

Tahapan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD Provinsi sebagaimana Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD provinsi.
- b. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BAPPEDA provinsi melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

- c. Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD provinsi kepada gubernur.

6.1.4 Evaluasi Terhadap Hasil RPJPD

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah provinsi bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang dimaksud adalah indikator kinerja yang ditetapkan dalam lingkup provinsi baik dalam pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan.

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup provinsi dilakukan oleh Gubernur sebagai Kepala Daerah provinsi. Hasil evaluasi ini selanjutnya menjadi umpan balik bagi perumusan kebijakan Gubernur dalam mewujudkan:

- a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah di wilayah provinsi.
- b. Konsistensi antara RPJPD provinsi di wilayah provinsi dengan RPJPN dan RTRW nasional.
- c. Konsistensi antara RPJPD provinsi dengan RTRW dan RPJMD provinsi.
- d. Kesesuaian antara capaian pembangunan di wilayah provinsi dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan secara nasional dan provinsi.

Adapun tahapan dalam evaluasi hasil RPJPD Provinsi sebagaimana Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD provinsi menggunakan Formulir E.15 dengan mengganti/ menyesuaikan nomor kode dan judul menjadi Formulir E.51 Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Provinsi.
- b. Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD provinsi kepada gubernur sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- c. Kepala BAPPEDA provinsi melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir E.51 dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel T-E.1.
- d. Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RPJPD provinsi kepada Gubernur.
- e. Gubernur menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJPD provinsi sebagaimana dimaksud pada angka (2) kepada Menteri Dalam Negeri.
- f. Menteri Dalam Negeri menilai laporan evaluasi hasil RPJPD setiap provinsi, dengan menyusun ke dalam Formulir E.16 Kesimpulan Evaluasi Hasil RPJPD Antar provinsi.
- g. Menteri Dalam Negeri selanjutnya menyusun kesimpulan dan memberikan rekomendasi kepada masing-masing Gubernur berdasarkan hasil penilaian kinerja RPJPD antar provinsi, sebagai bahan penyusunan RPJMD dan/atau RPJPD untuk periode berikutnya.
- h. Penyampaian rekomendasi kepada masing-masing Gubernur, paling lama 2 (dua) bulan setelah laporan evaluasi hasil RPJPD provinsi diterima.

6.2 PEDOMAN TRANSISI

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang disusun pada Tahun 2024, sebagai tahun terakhir periode RPD Papua. Oleh karena itu, penyusunan RKPD Tahun 2024 (pada saat belum ada RPJMD periode berikutnya) tetap berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPD Provinsi Papua 2024-2026 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selanjutnya RKPD tersebut dijadikan dasar penyusunan RAPBD Provinsi Papua Tahun 2025. Pemerintah Provinsi Papua akan menyusun RKPD Tahun 2025 dan 2026 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu agenda penyusunan RKPD yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani/terselesaikan sampai dengan Tahun 2025, selain untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional dan provinsi, dan lain-lain.

Pj. GUBERNUR PAPUA,

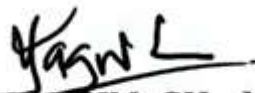
CAP/TTD

RAMSES LIMBONG, S.IP., M.Si

MAYJEN (Purn)

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM



NELWAN SAGRIM, SH., M. Hum

NIP. 19741205 200212 1 007